

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BUMN
Hadir untuk negeri

PENGUATAN BUMN
SINERGI MEMBANGUN NEGERI

STRENGTHENING BUMN IN BUILDING THE COUNTRY

LAPORAN TAHUNAN **2018** ANNUAL REPORT

THEME EXPLANATION

PENJELASAN TEMA

PENGUATAN BUMN SINERGI MEMBANGUN NEGERI

STRENGTHENING BUMN IN BUILDING COUNTRY

Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan upaya yang lebih optimal dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki, yang diantaranya ada pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN harus terus meningkatkan akselerasi dan kinerjanya serta menguatkan peran sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai. BUMN harus bisa tumbuh besar dan bertahan hingga 100-200 tahun yang akan datang sehingga bisa diwariskan kepada generasi mendatang dalam kondisi kokoh.

Indonesia is predicted to become one of the countries with the world's largest economic power in 2045. To realize this expectation, more optimal efforts are needed by utilizing all resources that are owned, among them are in State-Owned Enterprises (SOEs). SOEs must continue to increase acceleration and performance and to strengthen the roles as agent of development and value creation. SOEs needs to be able to grow higher and survive to the upcoming 100-200 years thus it can be passed on to the next generation in solid condition.

Peran Kementerian BUMN sangat menentukan bagi perkembangan BUMN secara umum, dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi agar siap dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan internasional, serta tercapainya BUMN sebagai *agent of development* yang besar, kuat, dan lincah.

The Ministry of SOEs' role is very decisive for the development of SOEs in general. It includes establishing policies that can create healthy and highly competitive SOEs which are ready and capable to compete at the regional, national, and international levels, as well as achieving SOEs as an agent of development that are great, strong and agile.

Hasil kerja nyata seluruh BUMN yang sudah dicapai dan dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia selama 4 (empat) tahun terakhir ini, tidak lepas dari penguatan sinergi dalam rangka membangun negeri. Semangat penguatan tersebut diwujudkan melalui pencanangan '*One Nation, One Vision, One Family, to Excellence*' yang senantiasa dikembangkan oleh seluruh insan BUMN.

The real work results of all SOEs that have been achieved and enjoyed by all Indonesian people over these past four years, are inseparable from the strengthening of synergy in order to develop the country. The spirit of reinforcement was realized through the launching of 'One Nation, One Vision, One Family, to Excellence' which was continuously developed by all SOEs employees.

Penguatan sinergi antar-BUMN telah memberikan kontribusi positif dalam rangka menciptakan efisiensi dan produktivitas BUMN demi menjawab situasi persaingan global saat ini. Nilai usaha yang telah dibangun merupakan modal utama BUMN demi membentuk bangsa yang kokoh dengan pertumbuhan perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. Kementerian BUMN senantiasa berkomitmen untuk membangun transformasi usaha guna mewujudkan BUMN yang kompetitif dengan dukungan regulasi kebijakan strategis dan tepat sasaran.

Strengthening the synergy between SOEs has contributed positively in order to create efficiency and productivity of SOEs in response to the current global competition. The established business value becomes the main capital of SOEs to form a strong nation with strong and sustainable economic growth. The Ministry of SOEs is always committed to build business transformation in order to manifest SOEs that are competitive with the support of strategic and on-target policy regulations.



2017 SINERGI WUJUDKAN PEMBANGUNAN NEGERI BERKELANJUTAN
SYNERGY FOR THE SUSTAINABILITY OF NATIONAL DEVELOPMENT

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai motor penggerak pembangunan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan beragam kemajuan di bidang peningkatan ekonomi bangsa. Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Kementerian BUMN terus mengarahkan BUMN untuk menjaga kesinambungan pembangunan dengan berpedoman pada tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. BUMN dituntut untuk saling menyatukan visi dan misi melalui sebuah sinergi dalam rangka memperbaiki ketimpangan serta memeratakan kesejahteraan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia.

State-Owned Enterprises (BUMN) as the agents of development which has a strategic role in realizing various advances in the field of improving the nation's economy. In realizing a sustainable development, the Ministry of SOEs continues to direct SOEs to maintain continuity of development based on three main pillars (economic, social and environmental) that are interdependent and strengthen. SOEs demanded to unite the vision and mission of each other through a synergy in order correcting inequality and equalizing economic prosperity throughout Indonesia.



2016 AKSELERASI PERAN STRATEGIS, BUMN HADIR UNTUK NEGERI
STRATEGIC ROLE ACCELERATION, SOEs PRESENT FOR THE COUNTRY

Merupakan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di Kementerian BUMN. Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan Kementerian BUMN dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan program dan kegiatan di masa datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

It is the various performance achievements, both macro and micro as well as the steps to implement development policies and programs at the Ministry of SOEs. Because of the support and hard work of all ranks, the Ministry of SOEs programs and activities able to achieve considerable progress. This becomes the basic capital to further develop programs and activities in the future, therefore the resources they have can be utilized optimally and sustainably.



2015 AKSELERASI PERAN STRATEGIS BUMN
ACCELERATION OF SOEs STRATEGIC ROLE

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi agen dalam pembangunan nasional, maka Kementerian BUMN memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN. Setiap kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN harus dapat mendukung pengelolaan BUMN, sehingga mampu menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi, sebagai agen pembangunan, BUMN harus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Bangsa Indonesia.

SOEs should serve as agents in the national development, thus the Ministry of SOEs has the duty to formulate policies and coordination for developing SOEs. Every policy set by the Ministry of SOEs must be able to support the management of SOEs, so as to create healthy and highly competitive SOEs as agents of development, where SOEs should become be one of the backbones of the Indonesian nation's economy.

TABLE OF CONTENTS
DAFTAR ISI

Theme Explanation **Penjelasan Tema**	2
Table Of Contents **Daftar Isi**	4
Highlight 2018 **Highlight 2018**	6
Message from the Minister of SOE's Sambutan Menteri BUMN	01
Message From Minister of State-Owned Enterprises **Sambutan Menteri BUMN**	10
Profile of the Ministry of SOE's Profil Kementerian BUMN	02
Constitutional Mandate **Amanat Konstitusi**	16
History of the Ministry of SOES **Riwayat Singkat Kementerian BUMN**	17
Vision, Mission, Duty and Function of The Ministry of SOES **Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN**	20
Organization Structure **Struktur Organisasi**	22
Profile of The Ministry of SOE's Officials **Profil Pejabat Kementerian BUMN**	24
Milestone the Ministry of SOEs **Milestone Kementerian BUMN**	34
Performance Highlight 2018 Kilas Kinerja 2018	03
SOEs Group **Keluarga BUMN**	38
Economic Perspective In 2018 **Perspektif Perekonomian di 2018**	40
State Owned Enterprises' Performance Highlights **Ikhtisar Kinerja BUMN**	42
Market Capitalization **Kapitalisasi Saham**	44
Financial Highlights of The Ministry of SOEs **Ikhtisar Keuangan Kementerian BUMN**	45
Awards and Certificate in 2018 **Penghargaan dan Sertifikasi di Tahun 2018**	48
Ministry of SOE's Policies and Programs Kebijakan dan Program Kementrian BUMN	04
Bureaucratic Reform **Reformasi Birokrasi**	52
Organization Performance Management **Manajemen Kinerja Organisasi**	62
Human Capital Management **Pengelolaan SDM**	69
Accountability Improvement **Peningkatan Akuntabilitas**	78
Business Restructuring and Development Policies & Programs Kebijakan dan Program Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha	05
SOES Resturcturization and Privatization Program **Program Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN**	84
SOEs Holding **Holding BUMN**	98
Privatization of SOEs **Privatisasi BUMN**	107
SOEs Synergy **Sinergi BUMN**	108
Business Infrastructure Policies & Programs Kebijakan dan Program Infrastruktur Bisnis	06
The Ministry of SOEs Business Infrastructure Policies and Programs **Kebijakan dan Program Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN**	114
SOEs Executive Management Program **Program Pengelolaan Manajemen Eksekutif BUMN**	115
Program Data and IT **Program Data dan TI**	123

The Support of SOEs to The National Strategic Projects
Dukungan BUMN dalam Proyek Strategis Nasional
07

The Support of SOEs to The National Strategic Projects **Dukungan BUMN dalam Proyek Strategis Nasional**	132
Land Connectivity **Konektivitas Darat**	134
Sea Connectivity **Konektivitas Laut**	156
Air Connectivity **Koneksi Udara**	168
Electrification **Elektrifikasi**	175
Telecommunication Networks **Jaringan Telekomunikasi**	178
Energy Security **Ketahanan Energi**	181
Food Security **Ketahanan Pangan**	192
National Defense **Pertahanan Nasional**	196
Modern Industrial Estate **Kawasan Industri Modern**	200

SOEs Present to the Country
BUMN Hadir untuk Negeri
08

Weaving Sustainable Development **Merajut Pembangunan yang Berkesinambungan**	205
Employees' Home Improvement **Bedah Rumah Karyawan**	206
Students Know The Archipelago **Siswa Mengenal Nusantara**	208
Free Homecoming Program **Mudik Gratis**	210
People's Business Loans (KUR) for MSMES **Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM**	212
MEKAAR and ULAMM **MEKAAR dan ULAMM**	214
BALKONDES **BALKONDES**	216
SOEs Creative Houses **Rumah Kreatif BUMN**	222
Our Food House **Rumah Pangan Kita**	224
Farmer Card **Kartu Tani**	228
Social Forestry **Perhutanan Sosial**	232
Agricultural Entrepreneurship Program **Program Kewirausahaan Pertanian**	235
Non-Cash Food Social Assistance Program **Program Bansos Bantuan Pangan Non Tunai**	241
SOEs Shop Program **Program BUMN Shop**	242
Cash for Work **Padat Karya Tunai**	243
One-Price BBM **BBM 1 Harga**	245
Implementation of PSO Function **Pelaksanaan Fungsi PSO**	248
Love Signs for Victims of Disaster **Tanda Cinta Untuk Korban Bencana**	250
Commemoration of Independence Day of Republic of Indonesia 2018 **Peringatan HUT Kemerdekaan RI 2018**	259

Good Governance
Tata Kelola Pemerintahan
09

Good Government Governance In The Ministry of SOEs **Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Kementerian BUMN**	270
Information Disclosure **Keterbukaan Informasi**	272
Code of Ethics of The Ministry of SOEs Apparatus **Kode Etik Aparatur Kementerian BUMN**	277
Internal Supervision **Pengawasan Internal**	281
Legal Information and Documentation Network **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**	295

Future Challenges
Tantangan ke Depan
10

Future Challenges **Tantangan ke Depan**	300

HIGHLIGHT 2018

HIGHLIGHT 2018

TOTAL ASET
TOTAL ASSETS

Rp 8.200 triliun
trillion

↑ 13,37%

PENDAPATAN BUMN
SOEs REVENUE

Rp 2.402 triliun
trillion

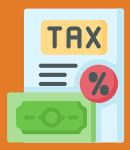
↑ 18,50%

TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
TOTAL PROFIT FOR THE YEAR

Rp 189 triliun
trillion

↑ 1,61%





SETORAN PAJAK BUMN
SOEs TAX DEPOSITS

Rp 245 triliun
trillion

↑ 16,11%



SETORAN DIVIDEN BUMN
SOEs DIVIDENDS DEPOSITS

Rp 44 triliun
trillion

↑ 2,33%



TOTAL LIABILITAS
TOTAL LIABILITIES

Rp 5.601 triliun
trillion

↑ 15,96%



BELANJA MODAL
CAPITAL EXPENDITURE

Rp 461 triliun
trillion

↑ 46,35%



01

SAMBUTAN MENTERI BUMN
MESSAGE FROM MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES

PERUSAHAAN BUMN HARUS TERUS MENINGKATKAN AKSELERASI DAN KINERJANYA SERTA MENGUATKAN PERAN SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN DAN PENCIPTAAN NILAI

SOEs should continue to improve acceleration and performance also strengthen the role as agents of development and value creation

Message From Minister of State-Owned Enterprises
Sambutan Menteri BUMN



Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini, kondisi BUMN terlihat semakin kuat dan kokoh seiring dengan kinerja yang terus bertumbuh sebagaimana laporan kinerja BUMN sepanjang tahun 2018.

In the past four years, the condition of SOEs has gained stronger ground in line with the continued growing performance as reported by SOEs performance reports throughout 2018.

RINI M. SOEMARNO
Menteri Badan Usaha Milik Negara
Minister of State-Owned Enterprises



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kementerian BUMN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengoptimalkan peran strategis BUMN sebagai agen pembangunan untuk menunjang program Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Peran Kementerian BUMN sangat menentukan bagi perkembangan BUMN secara umum, dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi agar siap dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan internasional. Selain itu, Kementerian BUMN juga selalu mengarahkan agar BUMN mengedepankan integritas dan profesionalisme serta memegang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga kegiatan usaha yang dijalankannya dapat menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan (*value of the firm*) yang pada ujungnya meningkatkan nilai investasi permanen Pemerintah.

Sejak tahun 2015, Kementerian BUMN bersama BUMN terus melakukan pembangunan berkesinambungan dan mensejahterakan masyarakat, hal tersebut terlihat dari hasil kerja nyata seluruh BUMN yang sudah dicapai dan dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia selama 4 (empat) tahun terakhir ini, yang tidak lepas dari sinergi semangat membangun negeri. Oleh karenanya sinergitas yang dibangun melalui pencanangan '*One Nation, One Vision, One Family, to Excellence*' perlu terus dikembangkan oleh seluruh insan BUMN.

Seiring perjalanannya, kondisi BUMN terlihat semakin kuat dan kokoh seiring dengan kinerja yang terus bertumbuh sebagaimana laporan kinerja BUMN sepanjang tahun 2018. Sampai dengan 31 Desember 2018, total aset BUMN telah menembus angka Rp8.200 triliun, naik signifikan dari capaian 2015 lalu sebesar Rp5.760 triliun dengan total laba tahun berjalan 189 triliun dari sebelumnya Rp149 triliun pada tahun 2015. Kontribusi BUMN terhadap APBN pun melonjak menjadi Rp466 triliun, naik Rp163 triliun jika dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp303 triliun.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Best wishes to all of us.

Firstly, let us praise to the Almighty Allah SWT for His abundance of grace and blessing, for which the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) has the capability to carry out its duties and functions in optimizing the strategic role of SOEs as agents of development to support Government programs in improving the economy and people's welfare.

The Ministry of SOEs has a highly decisive role for SOEs development in general, to establish policies that can create a sound and highly competitive for SOEs to be ready with high competence at the regional, national, and international levels. Besides, the Ministry of SOEs also continuously directs SOEs to prioritize integrity and professionalism as well as uphold the Good Corporate Governance (GCG) principles. Thus, their business activities can generate profits and increase the value of the firm which ultimately increases the Government's permanent investment value.

Since 2015, the Ministry of SOEs, along with SOEs, has proceeded to make sustainable development and prosperity for the community, marked by the work results and achievements of all SOES, perceived by all Indonesian people over the past four years. It is inseparable from the synergized spirit of building this nation. Therefore, the synergy built through the launching of 'One Nation, One Vision, One Family, to Excellence' is necessary to be continuously developed by all SOEs' employees.

Along the way, the condition of SOEs has gained stronger and more solid in line with the continued growing performance as reported by SOEs performance reports throughout 2018. As of December 31, 2018, total assets of SOEs exceeded IDR8,200 trillion, increased significantly from the 2015 achievement amounted to IDR5,760 trillion with the Total Profit for the Year to IDR189 trillion from IDR149 trillion in 2015. The contribution of SOEs to the State Budget also accelerated to IDR466 trillion, an increase of IDR163 trillion compared to 2015 which was recorded at IDR303 trillion.

Menyadari bahwa konektivitas merupakan faktor kritikal bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat, berbagai proyek yang menghubungkan Nusantara pun telah dilakukan oleh BUMN melalui peningkatan konektivitas darat, laut dan udara. Di darat, BUMN telah berperan dalam reaktivasi rel kereta Jawa Barat sepanjang 178,8 km, LRT Palembang, LRT Jabodebek serta merealisasikan pembangunan dan pengoperasian jalan tol baru sepanjang 782 km. Di laut, BUMN mendukung peningkatan konektivitas laut dengan pembangunan 27 pelabuhan baru dan 100 kapal pendukung tol laut. BUMN juga telah membangun 10 bandara baru guna mendukung konektivitas udara.

Realizing that connectivity is a critical factor for equitable distribution of people's welfare, various projects that connect Indonesia have also been carried out by SOEs through increasing land, sea and air connectivity. On land, SOEs has played a role in reactivating 178.8 km of West Java railroads, Palembang LRT; Greater Jakarta, Bogor, Depok and Bekasi (Jabodetabek) LRT and realizing the construction and operation of new toll roads with a length of 782 km. At sea, SOEs support the increase of sea connectivity with the construction of 27 new ports and 100 marine toll supporting vessels. SOEs have also built 10 new airports to support air connectivity.

Tidak hanya itu, BUMN turut berperan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di 458 kota/kab layanan yang memungkinkan 79 ribu desa terjangkau sinyal serta mendukung pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 97,2 persen dan perwujudan BBM Satu Harga di 124 lokasi di seluruh Indonesia. Dalam merealisasikan program pemerintah, BUMN bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian LHK, serta Kementerian Sosial tercatat telah melakukan sejumlah kegiatan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Besides, SOEs play a significant role in the development of telecommunication infrastructure in 458 cities/districts, enabling 79 thousand villages to get access to signal, supporting the government in increasing the electrification ratio to 97.2%, and realizing BBM One-Price in 124 locations throughout Indonesia. In realizing the government program, SOEs along with the Ministry of Agriculture; the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration; the Ministry of Environment and Forestry; and the Ministry of Social Affairs have carried out different activities to reach layers of society.

Di sisi kemandirian ekonomi, BUMN turut berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penyaluran KUR senilai total Rp113,9 triliun kepada 4,3 juta nasabah dan pembinaan ekonomi keluarga sejahtera 'Mekaar' yang menjangkau 276 kabupaten dengan total nilai penyaluran sebesar Rp16,4 triliun kepada 4,2 juta nasabah ultra mikro. Dalam mendukung pengembangan UKM, BUMN telah mendirikan sebanyak 209 Rumah Kreatif BUMN (RKB) guna menaikkan kelas ekonomi pelaku UMKM dengan jumlah binaan saat ini 12.552 pelaku, melalui pembinaan dan pembelajaran bersama serta mewadahi penjualan produknya melalui aplikasi Blanja.com.

On the economic independence side, SOEs play an active role in improving the welfare of the Indonesians through People's Business Loan (KUR) distribution totaling IDR113.9 trillion to 4.3 million customers. Furthermore, the family welfare economic development program 'Mekaar' reached 276 districts with a total value of IDR16.4 trillion to 4.2 million ultra-micro customers. In supporting the development of small-to-medium enterprises (SMEs), SOEs have set up 209 SOE Creative Houses (RKB) to raise the economy class of micro, small to medium enterprises (MSMEs) with the current total of 12,552 business people, through coaching and joint learning. SOEs also accommodate their products' sales through Blanja.com application.

Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia pada 2045. Untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan upaya yang lebih optimal dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki, yang diantaranya ada pada BUMN. Perusahaan BUMN harus terus meningkatkan akselerasi dan kinerjanya serta menguatkan peran sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai.

Indonesia is predicted to become one of the countries with the world's largest economic force` by 2045. To fill up this expectation, more optimal efforts are needed by making the most of all resources, including those in SOEs. Moreover, SOEs are required to continue improving their acceleration and performance as well as strengthen their roles as agents of development and value creation.

Oleh karenanya, Kementerian BUMN meyakini perlu menyatukan kekuatan seluruh BUMN agar dapat

Therefore, the Ministry of SOEs believes that it is necessary to unite the strength of all SOEs to have a greater impact

memberikan dampak lebih besar dari yang saat ini telah dihasilkan untuk terus berkontribusi bagi negeri. Kontribusi bagi negeri tidak hanya dihasilkan melalui capaian kinerja, namun BUMN juga terus melakukan pembangunan berkesinambungan dan mensejahterakan masyarakat melalui "BUMN Hadir untuk Negeri". Melalui program ini, BUMN terus bersinergi untuk menumbuhkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air ke seluruh pelosok negeri.

than the current results to continue contributing to the country. It is not only through performance achievements, but SOEs also continue to make sustainable development and prosperity of the community through "SOEs Present for the Country" program. With this program, SOEs proceeds to work jointly to cultivate pride in the nation to all regions of the country.

Program BUMN Hadir Untuk Negeri telah menunjukkan eksistensinya bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat secara langsung melalui kehadiran BUMN di provinsi-provinsi. Kehadiran BUMN di seluruh provinsi di Indonesia diharapkan dapat menjadi pendorong pengembangan ekonomi di daerah khususnya wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

The SOEs Present for the Country Program has demonstrated its existence that the state is present in the midst of society directly through the presence of SOEs in the provinces. The presence of SOEs in all Indonesian provinces is expected to be an encouragement of economic development in regions, especially in the 3T region (Foremost, Outermost and Disadvantaged).

Hal ini dilakukan, karena BUMN sadar bahwa Indonesia merupakan sebuah negeri yang kaya. Setiap sudut dihiasi dengan keragaman budaya, suku, ras, agama, serta bahasa, membuat bangsa ini semakin kuat. Aneka potensi alam pun terbentang dari dari Sabang sampai Merauke maupun dari Mianggas hingga Pulau Rote. Semangat inilah yang terus ada di program "BUMN Hadir untuk Negeri". Pembangunan demi pembangunan terus dilakukan secara sinergi dan bergandengan tangan bersama masyarakat. Mulai dari kota, kabupaten, hingga ke pelosok dusun di Tanah Air, semua diperhatikan secara seksama.

This is done as SOEs are fully aware of Indonesia's existence as a rich country. Each area is embellished by a diversity of cultures, ethnicities, races, religions, and languages that makes this nation even stronger. Various natural potentials range from Sabang to Merauke and from Mianggas to Rote Island. These become the spirit that continually exists in "SOEs Present for the Country" program. The development continues to be carried out in synergy and along with the community. Starting from the city, regency, to the remote areas in the country, all elements are carefully considered.

Melalui laporan ini, kami berharap masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai Kementerian BUMN sepanjang tahun 2018, maupun beberapa tahun sebelumnya. Baik capaian kinerja terkait kontribusi BUMN terhadap negara, maupun kontribusi BUMN terhadap masyarakat.

Through this report, we expect that the public and all concerned parties can get a depiction of the performance results achieved by the Ministry of SOEs throughout 2018, and several years ago, both the achievements of SOEs performance that relates to the contribution to the state, as well as to the SOEs contribution to the community.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah tulus dalam bekerjasama dan membantu Kementerian BUMN dalam melaksanakan perannya sebagai institusi yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN melalui visi 'One Nation, One Vision, One Family, to Excellence'.

At last, we would like to express our gratitude to all parties that have been sincere in working hand-in-hand and helping the Ministry of SOEs in carrying out the role as the institution that is tasked to formulate policies and coordination in the SOEs development through the vision of 'One Nation, One Vision, One Family, to Excellence' .

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

RINI M. SOEMARNO

Menteri Badan Usaha Milik Negara
The Minister of State-Owned Enterprises



02

PROFIL KEMENTERIAN BUMN
PROFILE OF THE MINISTRY OF SOE'S

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA MEMPUNYAI TUGAS MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA

The Ministry of State-Owned Enterprises is in charge with organizing government affairs in the field of state-owned enterprises to assist the President in performing state government

Constitutional Mandate
Amanat Konstitusi

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara". Dalam melaksanakan tugas konstitusional tersebut, Negara melakukan penguasaan atas seluruh kekuatan ekonomi melalui regulasi sektoral yang merupakan kewenangan Menteri Teknis dan kepemilikan Negara pada unit-unit usaha milik negara yang menjadi kewenangan Menteri BUMN.

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph (2) states that "Production branches which are important for the State and which affect the livelihood of the public shall be controlled by the State". In executing this constitutional duty, the State controls all economic forces through sectoral regulations which are the authority of the Minister of Technical Issues and State Ownership on the state-owned business units under the SOEs Minister's authority.

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk:

Based on Law No. 19 Year 2003 concerning SOEs, Article 2, the purpose and objective of SOEs establishment is to:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
2. Mengejar keuntungan
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

1. *Contribute to the development of the national economy in general and state revenues in particular;*
2. *Pursue profits;*
3. *Organize public benefits in the form of provision of high quality and adequate goods and/or services for the fulfillment of many people's lives;*
4. *Become a pioneer in business activities that cannot be implemented by the private sector and cooperatives;*
5. *Actively participate in coaching and giving assistance to small entrepreneurs, cooperatives and the community.*



History of the Ministry of SOES
Riwayat Singkat Kementerian BUMN



Kementerian BUMN sebagai organisasi Pemerintah memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, Kementerian BUMN telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Pembinaan BUMN sebelum tahun 1973 dilakukan secara terpisah oleh masing-masing Departemen Teknisnya.

The Ministry of State-Owned Enterprises ("Ministry of SOEs") as a Government organization with Main Duty and Function to oversee State Companies or State-Owned Enterprises (SOEs) in the Republic of Indonesia. During its journey, the Ministry of SOEs has undergone a number of changes and developments. The establishment of SOEs before 1973 was carried out separately by the respective Technical Departments.

➤ UNIT ESELON II

Dengan keluarnya Inpres Nomor 11 Tahun 1973, maka pembinaan terhadap Perusahaan Negara/BUMN dilimpahkan dari Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku pemegang saham dari penyertaan modal Negara dalam Perusahaan Negara/BUMN kepada Menteri bidang teknis yang terkait. Mengingat Departemen Keuangan hanya berperan dalam penatausahaan kepemilikan Negara atas saham Perusahaan Negara/BUMN tersebut, maka sejak 1973 tersebut, unit yang menangani Perusahaan Negara/BUMN berada pada unit setingkat Eselon II. Unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara) pada Departemen Keuangan. Selanjutnya, terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Kemudian organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sampai dengan tahun 1983.

➤ *SECOND ECHELON UNIT*

With the issuance of Presidential Instruction No. 11 YeaAr 1973, the development of State Enterprises/SOEs is delegated from the Minister of Finance in his position as shareholder of the State capital participation in the State Enterprise/SOEs to the Minister of the related Technical Area. Considering that the Ministry of Finance's role was only to administer the State's share ownership in the State Enterprises/SOEs, since 1973, the unit handling State Enterprises/SOEs was a Second Echelon unit. The organizational unit was called Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara) at the Ministry of Finance. Furthermore, there was a change of name to Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). This organization subsequently changed to become DirektoratPembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) until 1983.

➤ MENJADI UNIT ESELON I

Pada tahun 1983 terbitlah PP Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan, organisasi pembinaan Perusahaan Negara/BUMN yang awalnya hanya setingkat Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Negara. Periode Unit Eselon I ini terjadi dalam kurun waktu 1993- 1998, dan tercatat 2 (dua) orang Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, yakni Bapak Martiono Hadianto dan Bapak Bacelius Ruru.

➤ *BECAME FIRST ECHELON UNIT*

In 1983 upon the issue of Government Regulation No. 3 Year 1983 regarding Procedures for Guiding and Overseeing Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum and Perusahaan Perseroan, State Enterprise/SOEs development organization which previously was only at the Directorate/Second Echelon level, were upgraded to the Directorate General/ First Echelon level, under the name Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). This came alongside with the increasing need to optimize supervision and guidance of State Owned Enterprises. This First Echelon Period was in 1993-1998, and recorded 2 (two) General Directors of SOEs Development, namely Martiono Hadianto and Bacelius Ruru.

➤ JADI KEMENTERIAN

Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, maka sejak tahun 1998, pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi tersebut terjadi di masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VII, dengan nama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pembinaan BUMN. Menteri pertama yang bertanggung jawab atas pendayagunaan BUMN tersebut adalah Bapak Tanri Abeng (16 Maret 1998

➤ *BECAME A MINISTRY*

Considering the significant role, function and contribution of SOEs to state finances, in 1998 the Government of the Republic of Indonesia changed the form of SOEs developing and managing organization to be at the Ministry level. This change in organization form started during the Seventh Development Cabinet period with the name State Ministry of SOEs Utilization/Head of SOEs Development Agency (Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN). The first minister responsible for the SOEs utilization was Tanri Abeng (March 16, 1998

– 20 Oktober 1999). Pada masa ini sempat digagas tentang BUMN *incorporated*, sebuah bangun organisasi BUMN berbentuk *super holding*.

Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), struktur organisasi Kementerian ini sempat digabungkan dengan Badan Penanaman Modal sehingga menjadi Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN dengan Menteri Bapak Laksamana Sukardi (26 Oktober 1999 – 26 April 2000). Selanjutnya Presiden Gus Dur mengganti Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN dengan mengangkat Bapak Rozy Munir (26 April 2000 – 23 Agustus 2000).

Dari tanggal 23 Agustus 2000 hingga 9 Agustus 2001, keberadaan Kementerian yang membina BUMN dihapus dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Dirjen Pembinaan BUMN waktu itu dijabat oleh Bapak I Nyoman Tjager.

Namun, ketika terjadi suksesi pucuk kepemimpinan Republik Indonesia, dalam Kabinet Gotong Royong di bawah pimpinan Presiden Megawati, organisasi pembina BUMN tersebut dikembalikan, dan Bapak Laksamana Sukardi kembali menjadi Menteri Negara BUMN tanggal 9 Agustus 2001. Kala itu, kembali dipisahkan antara pembinaan BUMN dengan penanaman modal. Bapak Laksamana Sukardi menjadi Menteri hingga tanggal 20 Oktober 2004.

Ketika Bapak Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden di tahun 2004, terjadi pergantian Menteri yang menanggani BUMN ini. Dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, Bapak Sugiharto dipercaya menjadi Menteri Negara BUMN (21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007), yang kemudian digantikan Bapak Sofyan A. Djalil (9 Mei 2007 – 20 Oktober 2009), Bapak Mustafa Abubakar (22 Oktober 2009 – 19 Oktober 2011), Bapak Dahlan Iskan (19 Oktober 2011 - 20 Oktober 2014). Selanjutnya dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Ibu Rini Mariani Soemarno dipercaya sebagai Menteri BUMN sejak 27 Oktober 2014 hingga saat ini.

- October 20, 1999). At that time, there was an idea about SOEs incorporated, an organization building of SOEs in the form of a super holding.

During the period of Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Government, the Ministry's organizational structure was once combined with the Capital Investment Coordinating Board (Badan Penanaman Modal) to become the State Ministry of Capital Investment and SOEs Development chaired by Minister Laksamana Sukardi (October 26, 1999 - April 26, 2000). Later President Gus Dur replaced the State Minister of Investment and SOEs Development by appointing Rozy Munir (April 26, 2000 - August 23, 2000).

From August 23, 2000 to August 9, 2001, the existence of a Ministry overseeing SOEs was removed and returned to a First Echelon within the Ministry of Finance. The SOEs Development Director General was held by I Nyoman Tjager.

However, when the Republic of Indonesia's leadership succession took place, under the Kabinet Gotong Royong (Mutual Assistance Cabinet) under the leadership of President Megawati, the organization overseeing SOEs was restored and Laksamana Sukardi was again appointed the State Minister of State-Owned Enterprises on August 9, 2001. At that time, the organizations to oversee SOEs and capital investment were separated. Laksamana Sukardi served as Minister until October 20, 2004.

When Susilo Bambang Yudhoyono was elected President in 2004, there was a change of the Minister overseeing SOEs. Under the Kabinet Indonesia Bersatu I (First United Indonesia Cabinet), Sugiharto was entrusted to serve as the Minister of State-Owned Enterprises (October 21, 2004 - May 9, 2007), which was later replaced by Sofyan A. Djalil (May 9, 2007 - October 20, 2009), Mustafa Abubakar (October 22, 2009 - October 19, 2011), Dahlan Iskan (October 19, 2011 – October 20, 2014). Furthermore, during President Joko Widodo administration period, Rini Mariani Soemarno has been entrusted to serve as Minister of SOEs since October 27, 2014 to the present.

Vision, Mission, Duty and Function of The Ministry of SOES

Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN

Sebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara, Kementerian BUMN memiliki visi dan misi sebagai berikut:

As a government institution that has duties and responsibilities in order to manage the assets of the country, the Ministry of SOEs has the vision and mission as follows:

VISI
VISION

Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN

Become a Professional Overseer of SOEs to increase the value of SOEs

MISI
MISSION

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kementerian BUMN menetapkan misi sebagai berikut:

- Mewujudkan organisasi modern sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik
- Meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional, regional, dan internasional
- Meningkatkan Kontribusi BUMN kepada ekonomi nasional

To realize the vision above, the Ministry of SOEs set the mission as follows:

- Realizing a modern organization in accordance with good governance
- Increasing the competitiveness of SOEs at national, regional and international levels
- Increase the contribution of SOEs to the national economy



TUGAS DAN FUNGSI

JOB AND FUNCTION

Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

The Ministry of State-Owned Enterprises has the task of carrying out government affairs in the field of state-owned enterprises to assist the President in carrying out state governance.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis badan usaha milik negara;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis badan usaha milik negara;
c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
d. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

In carrying out this task, the Ministry of State-Owned Enterprises conducts functions:

a. formulating and stipulating policies in the field of strategic business initiatives, strengthening competitiveness and synergy, strengthening performance, creating sustainable growth, restructuring, business development, and increasing the capacity of business infrastructure of state-owned enterprises;
b. coordination and synchronization of implementation of policies in the field of strategic business initiatives, strengthening competitiveness and synergy, strengthening performance, creating sustainable growth, restructuring, business development, and increasing the capacity of business infrastructure of state-owned enterprises;
c. coordinating the implementation of duties, fostering and providing administrative support within the Ministry of State-Owned Enterprises;
d. management of state property which is the responsibility of the Ministry of State-Owned Enterprises; and
e. supervision of the implementation of duties within the Ministry of State-Owned Enterprises.

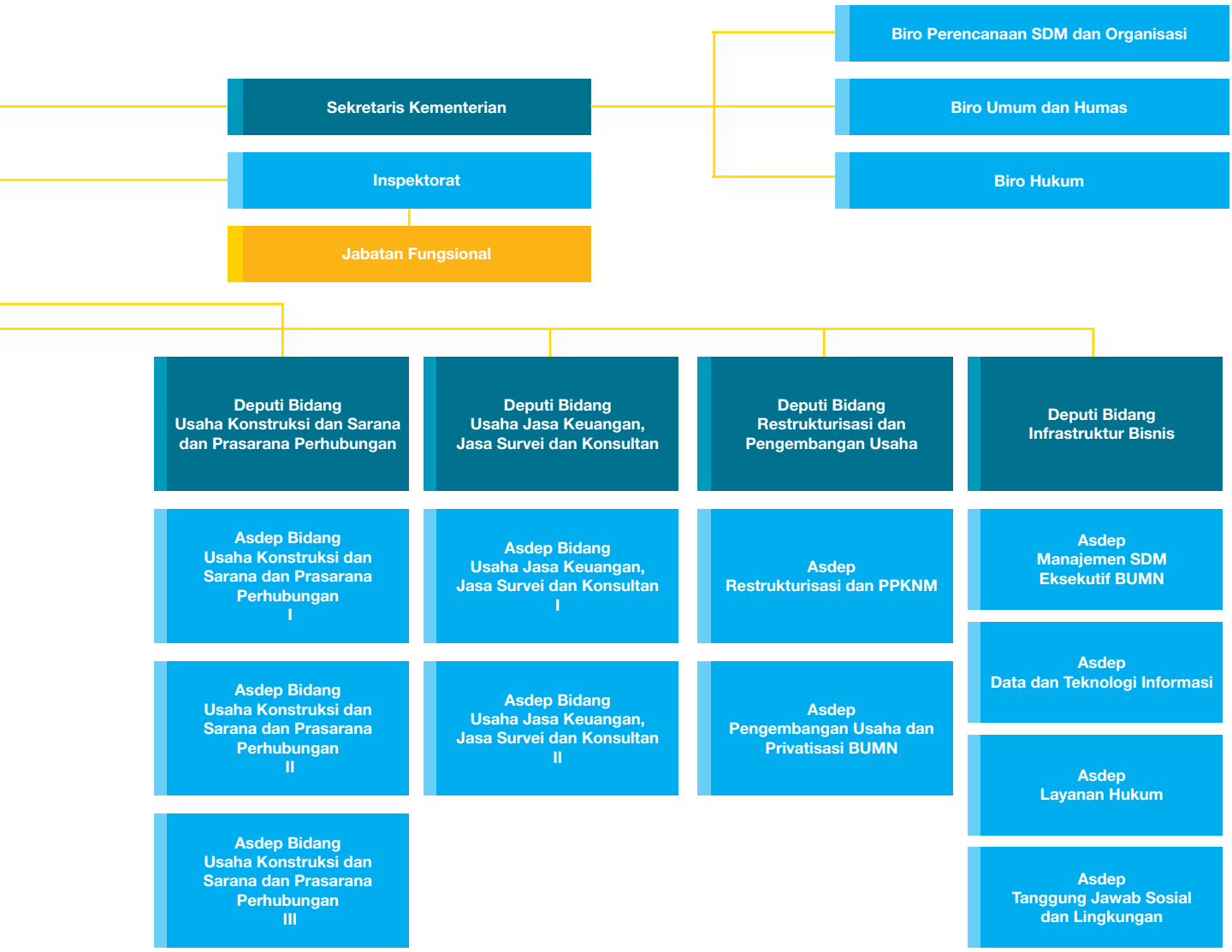


Organization Structure
Struktur Organisasi

Dengan telah ditetapkannya struktur organisasi Kementerian BUMN dalam Peraturan Presiden nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 41 tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan ditindaklanjuti dengan penetapan peraturan menteri BUMN nomor PER-06/MBU/12/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, struktur organisasi Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:



With the stipulation of the SOE Ministry organizational structure in Presidential Regulation number 41 of 2017 concerning changes to Presidential Regulation number 41 of 2015 concerning the Ministry of State Owned Enterprises, and followed up with the stipulation of SOE ministerial regulation Number PER-06/MBU/12/2017 Regarding Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-10/MBU/07/2015 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of State-Owned Enterprises, BUMN Ministry's organizational structure is as follows:



Profile of The Ministry of SOE's Officials
Profil Pejabat Kementerian BUMN



RINI MARIANI SOEMARNO

MENTERI BUMN

Minister of SOEs

Lahir di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958. Resmi menjabat sebagai Menteri Kementerian BUMN sejak 26 Oktober 2014. Latar belakang pendidikan beliau adalah lulusan Sarjana Ekonomi di Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat (1981). Beliau tercatat pernah menjabat posisi strategis lainnya yaitu sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong (2001-2004), Staf Ahli Departemen Keuangan Republik Indonesia (1998), dan 1998: Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1998). Beliau juga tercatat memilki pengalaman diluar jabatan struktur meliputi; Komisaris Aora (Sejak 2008), Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia (2001-2005), Presiden Direktur PT Semesta Citra Motorindo (2000-2001), Presiden Direktur PT Astra Internasional (1998-2000), Direktur Keuangan Astra Internasional (1990-1998), Presiden Komisaris PT Semesta Citra Motorindo (2000), Komisaris PT Agrakom (2000), Presiden Komisaris PT Astra Agro Lestari (1999), Komisaris PT Astra Agro Lestari (1995), Komisaris Bursa Efek Jakarta (1995), Wakil Presiden Komisaris PT United Tractors (1993), Komisaris Bank Universal (1990), General Manager Finance Division, PT Astra International (1989).

Born in Maryland, United States, June 9, 1958. Officially served as Minister of the Ministry of SOEs since October 26, 2014. Her educational background is a Bachelor of Economics degree at Wellesley College, Massachusetts, USA (1981). She was noted to have held other strategic positions, namely as Minister of Industry and Trade in the Mutual Cooperation Cabinet (2001-2004), Expert Staff in the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (1998), and Deputy Chair of the Indonesian Banking Restructuring Agency (1998). She also noted that she had experience outside the structural position including; Commissioner Aora (since 2008), President Director of PT Kanzen Motor Indonesia (2001-2005), President Director of PT Semesta Citra Motorindo (2000-2001), President Director of PT Astra International (1998-2000), Finance Director of Astra International (1990-1998), President Commissioner of PT Semesta Citra Motorindo (2000), Commissioner of PT Agrakom (2000), President Commissioner of PT Astra Agro Lestari (1999), Commissioner of PT Astra Agro Lestari (1995), Commissioner of the Jakarta Stock Exchange (1995), Deputy President Commissioner of PT United Tractors (1993), Commissioner of Bank Universal (1990), General Manager Finance Division, PT Astra International (1989).



IMAM APRIYANTO PUTRO

SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN

Secretary of the Ministry of SOEs

Lahir di Cilacap, 22 Maret 1964. Resmi menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN sejak 18 Maret 2013. Latar belakang pendidikan beliau adalah lulusan S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomo IBII, Manajemen (2000, Jakarta).). Beliau tercatat pernah menjabat posisi strategis lainnya yaitu sebagai Plh. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik (2013), Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi (2012-2013), dan Asdep Riset & Informasi (2010-2012). Beliau juga tercatat memilki pengalaman diluar jabatan struktur meliputi; Wakil Komisaris Utama PT Bank Mandiri (2015 – saat ini), Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) (2014-2015), Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2013-2014), dan jabatan strategis lainnya.

Born in Cilacap, March 22, 1964. Officially served as Secretary of the Ministry of SOEs since March 18, 2013. His educational background is a master's degree in IBII Economics, Management (2000, Jakarta). He was noted to have held another strategic position, namely as Acting Deputy of Infrastructure and Logistics Business (2013), Head of Planning, HR and Organization Bureau (2012-2013), and Assistant Deputy of Research & Information (2010-2012). He also noted that he had experience outside the structural position including; Deputy President Commissioner of PT Bank Mandiri (2015-current), Commissioner of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) (2014-2015), Commissioner of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2013-2014), and other strategic positions.



WAHYU KUNCORO

DEPUTI BIDANG USAHA INDUSTRI AGRO DAN FARMASI

Deputy of Agriculture and Pharmaceutical Industry

Lahir di Surakarta, 31 Oktober 1969. Resmi menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi sejak 9 Februari 2016. Latar belakang pendidikan beliau adalah lulusan S2 Universitas Gadjah Mada, Magister Manajemen (Yogyakarta, 2005). Beliau tercatat pernah menjabat posisi strategis lainnya yaitu sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis(2015-2016), Asdep Usaha Perbankan dan Asuransi(2014-2015), Asdep Bidang Usaha Jasa III (2013-2014),Kabid Usaha Infrastruktur dan Logistik Ia (2012-2013), Bidang Usaha Industri Primer IIIa (2010-2012), (Kepala Bidang Usaha Perkebunan II.B (2006-2010), Kepala Subbidang Perencanaan Usaha Produksi Pertanian (2002-2006). Beliau juga tercatat memilki pengalaman diluar jabatan struktur yaitu sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Born in Surakarta, October 31, 1969. Officially served as Deputy of the Agro and Pharmaceutical Industry Businesses since February 9, 2016. His educational background is a master's degree in Gadjah Mada University, Master of Management (Yogyakarta, 2005). He was noted to have held other strategic positions namely as Deputy of Infrastructure Business (2015-2016), Assistant Deputy of Banking and Insurance Business (2014-2015), Assistant Deputy of Services Business III (2013-2014), Head of Infrastructure and Logistics Business (2012-2013), Primary Industry Business IIIa (2010-2012), Head of Plantation Business Division II.B (2006-2010), Head of Agro Production Business Planning Sub-Division (2002-2006). He is also noted to have experience outside the structural position namely as Deputy President Commissioner of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



EDWIN HIDAYAT ABDULLAH

DEPUTI BIDANG USAHA ENERGI, LOGISTIK, KAWASAN DAN PARIWISATA

Deputy of Energy, Logistics, Zone and Tourism Industry

Lahir di Jakarta, 28 April 1971. Resmi menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata sejak Juli 2015. Latar belakang pendidikan beliau adalah lulusan S2 Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura dan S2 NUS (in Cooperation with Kennedy School of Government, Harvard University)/ Master of Public Management, Amerika Serikat. Beliau tercatat memilki pengalaman diluar jabatan struktur yaitu sebagai Komisaris PT Telkom (Persero) Tbk (2018 – sekarang), Komisaris PT Pertamina (Persero) (2016-2018), Komisaris PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) (2015-2016), Komisaris Independen PT Bumi Serpong Damai Tbk (2004-2015), Business Development dan Investment Director PT Global Perkasa Investindo (Perusahaan Investasi) (2010-2015), dan jabatan strategis lainnya

Born in Jakarta, April 28, 1971. Officially served as Deputy of Energy, Logistics, Estate and Tourism Businesses since July 2015. His educational background is a graduate of Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore and NUS Masters (in Cooperation with Kennedy School) of Government, Harvard University)/Master of Public Management, United States. He was noted to have experience outside the structural position, namely as Commissioner of PT Telkom (Persero) Tbk (2018-present), Commissioner of PT Pertamina (Persero) (2016-2018), Commissioner of PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) (2015-2016), Independent Commissioner of PT Bumi Serpong Damai Tbk (2004-2015), Business Development and Investment Director of PT Global Perkasa Investindo (Investment Company) (2010-2015), and other strategic positions.



FAJAR HARRY SAMPURNO

DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA

Deputy of Mining, Strategic and Media Industry

Lahir di Blitar, 18 April 1966. Resmi menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media sejak 27 Juli 2015. Latar belakang pendidikan beliau adalah lulusan S3 di American University (1999, Iowa City). Beliau tercatat memilki pengalaman diluar jabatan struktur yaitu sebagai Komisaris Utama PT PGN, Direktur Utama PT Dahana (2012 – 2015), Direktur Utama PT IKI (2012), Direktur Keuangan dan Bang Usaha PT Dahana (2002 – 2011), dan jabatan strategis lainnya.

Born in Blitar, April 18, 1966. Officially served as Deputy of Mining, Strategic Industry and Media Ministry Businesses since July 27, 2015. His educational background is a doctoral degree at American University (1999, Iowa City). He was recorded as having experience outside of structural positions, namely as President Commissioner of PT PGN, President Director of PT Dahana (2012-2015), President Director of PT IKI (2012), Director of Finance and Business Development of PT Dahana (2002-2011), and other strategic positions.



AHMAD BAMBANG

DEPUTI BIDANG USAHA KONSTRUKSI DAN SARANA & PRASARANA PERHUBUNGAN

Deputy of Construction, Facility and Infrastructure of Transportation Industry

Lahir di Kediri, 5 Juli 1962. Resmi menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana & Prasarana Perhubungan sejak November 2011. Latar belakang pendidikan beliau adalah lulusan Magister Teknik (MT) – Universitas Indonesia dan Magister Manajemen Industri (MMI) – Queensland University of Technology (QUT), Australia (Joint Program). Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Staff Khusus III Menteri BUMN (Bidang Marketing, Branding, Hilirisasi, Digitalisasi dan Restrukturisasi), April 2017 - November 2017. Beliau juga tercatat memilki pengalaman diluar jabatan struktur meliputi; Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) (2016-2017), Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) (2014-2016), President Director & CEO PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) (2012-2014), Senior Vice President (SVP) Human Resource Development – Direktorat Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) (2011-2012), dan jabatan strategis lainnya.

Born in Kediri, July 5, 1962. Officially served as Deputy of Construction and Transportation Facility & Infrastructure since November 2011. His educational background is a graduate of Master of Engineering (MT) - University of Indonesia and Master of Industrial Management (MMI) - Queensland University of Technology (QUT), Australia (Joint Program). Previously, he had served as Special Staff III of the Minister of BUMN (Marketing, Branding, Downstreaming, Digitalization and Restructuring), April 2017-November 2017. He recorded that he had experience outside the structural position including; Deputy President Director of PT Pertamina (Persero) (2016-2017), Marketing Director of PT Pertamina (Persero) (2014-2016), President Director & CEO of PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) (2012-2014), Senior Vice President (SVP) Human Resource Development - Directorate of Human Resources at PT Pertamina (Persero) (2011-2012), and other strategic positions.



GATOT TRIHARGO

DEPUTI BIDANG USAHA JASA KEUANGAN, JASA SURVEI DAN KONSULTAN

Deputy of Financial Services, Survey and Consulting Industry

Lahir di Yogyakarta, 29 Agustus 1960. Resmi menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan sejak 10 Juni 2015. Latar belakang pendidikan beliau adalah lulusan S3 Doktor Strategic Management dari Universitas Padjadjaran (Bandung, 1999). Beliau tercatat pernah menjabat posisi strategis lainnya yaitu sebagai Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain (2014-2015), Deputi Bidang Usaha Jasa (2013-2014), Asdep Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II (2010-2013), Kepala Bidang Data (2008-2010), dan Kepala Bidang Sistem Informasi (2006 -2008).

Born in Yogyakarta, August 29, 1960. Officially served as Deputy of Financial Services, Survey and Consulting Services since June 10, 2015. His educational background is a graduate of the Doctoral Degree in Strategic Management from Padjadjaran University (Bandung, 1999). He was recorded as having held other strategic positions, namely as Deputy of Financial Services, Construction and Other Services (2014-2015), Deputy of Services Business (2013-2014), Assistant Deputy of Strategic Industrial and Manufacture II (2010-2013), Head of Data Division (2008-2010), and Head of Information System Division (2006-2008).



ALOYSIUS K. RO

DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI DAN PENGEMBANGAN USAHA

Deputy of Business Restructuring and Business Development

Lahir di Kupang, 29 April 1961. Resmi menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Restrukturisasai dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN sejak 27 Juli 2015. Latar belakang pendidikan beliau adalah lulusan S3 University of Kentucky, Finance (1998, Amerika Serikat). Beliau tercatat pernah menjabat posisi strategis lainnya yaitu sebagai Direktur Keuangan PT Antam Tbk (2015), Direktur Bisnis PT Danareksa (Persero) (2005-2015), Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Kementerian BUMN (2003-2005). Beliau juga tercatat menjabat sebagai Komisaris PT PLN.

Born in Kupang, April 29, 1961. Officially served as Ministry of SOEs's Deputy of Business Restructuring and Business Development since July 27, 2015. His educational background is a graduate of the Ph.D. Finance of Kentucky University, (1998, United States). He was recorded as having held other strategic positions, namely as Finance Director of PT Antam Tbk (2015), Business Director of PT Danareksa (Persero) (2005-2015), Assistant Deputy of Restructuring and Privatization of the Ministry of SOEs (2003-2005). He also recorded as a Commissioner of PT PLN.



HAMBRA

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR BISNIS

Deputy of Business Infrastructure

Lahir di Ketapang (Maluku), 10 Oktober 1968 Resmi menjabat sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis sejak 9 Februari 2016. Latar belakang pendidikan beliau adalah lulusan S2 Universitas Gadjah Mada, Hukum Bisnis (Yogyakarta, 2010). Beliau tercatat pernah menjabat posisi strategis lainnya yaitu sebagai Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial (2015-2016), Plt.Kepala Biro Hukum (2012), Plt. Inspektur (2014), Kepala Biro Hukum (2012-2015), Kepala Bagian Perundang-undangan (2010 -2012), Kepala Bagian Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan (2006 -2010), dan Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat (2002-2006).

Born in Ketapang (Maluku), October 10, 1968. Officially served as Deputy of Business Infrastructure since February 9, 2016. His educational background is a graduate of Master's Degree from Gadjah Mada University, Business Law (Yogyakarta, 2010). He was recorded as having held other strategic positions, namely as Expert Staff in Strategic Communication and Industrial Relations (2015-2016), Acting Head of the Legal Bureau (2012), Acting. Inspector (2014), Head of Legal Bureau (2012-2015), Head of Legislation Department (2010-2012), Head of Division of Corporate Governance and Legislation Implementation (2006-2010), and Head of Public Relations Subdivision (2002-2006).



Milestone the Ministry of SOEs
Milestone Kementerian BUMN

1973

Awalnya Kementerian BUMN merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Initially the Ministry of SOEs was part of work unit within the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia

1973 - 1993

Berada pada unit setingkat Eselon II dengan beberapa pergantian nama diantaranya:
1. Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara)
2. Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara)
3. Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Located in Echelon II level units with several name changes including:
1. Directorate of Persero and PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara)
2. Directorate of Persero and BUN (Badan Usaha Negara)
3. Directorate of SOEs (Badan Usaha Milik Negara) Development

1993

Berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
Turned into the Directorate of SOEs (State-Owned Enterprises) Development

1993-1998

- Pada kurun 1993 - 1998, organisasi yang kini merupakan Kementerian BUMN berada pada unit setingkat Eselon I dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ - PBUN).
- Dalam kurun waktu 1993 – 1998 tercatat 2 (dua) orang Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, yakni Bapak Martiono Hadianto dan Bapak Bacelius Ruru.

- In the period of 1993-1998, the organization which is now the Ministry of SOEs was in the Echelon I unit with the name of the Directorate General for the Development of State Enterprises (DJ - PBUN).
- In the period of 1993-1998 there were 2 (two) General Directors of SOEs Development, namely Mr. Martiono Hadianto and Mr. Bacelius Ruru.

1998

- Berubah menjadi setingkat Kementerian, dengan nama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
- Menteri pertama yang bertanggung jawab atas pendayagunaan BUMN adalah Bapak Tanri Abeng (16 Maret 1998 – 20 Oktober 1999).

- Changed to Ministry level, with the name of the State Ministry of SOEs Utilization/Head of the SOEs Development Agency.
- The first minister responsible for the SOEs utilization was Mr. Tanri Abeng (March 16, 1998-October 20, 1999).



2014

Ibu Rini Mariani Soemarno dipercaya sebagai Menteri BUMN sejak 27 Oktober 2014 hingga saat ini

Ms. Rini Mariani Soemarno has been entrusted to serve as Minister of SOEs since October 27, 2014 until now

2011

Bapak Dahlan Iskan menjadi Menteri Negara BUMN (19 Oktober 2011 - 20 Oktober 2014)

Mr. Dahlan Iskan became Minister of SOEs (October 19, 2011-October 20, 2014)

2009

Bapak Mustafa Abubakar menjadi Menteri Negara BUMN (22 Oktober 2009 – 19 Oktober 2011)

Mr. Mustafa Abubakar became Minister of SOEs (October 22, 2009-October 19, 2011)

2007

Bapak Sofyan A. Djalil menjadi Menteri Negara BUMN (9 Mei 2007 – 20 Oktober 2009)

Mr. Sofyan A. Djalil became Minister of SOEs (May 9, 2007-October 20, 2009)

2004

Bapak Sugiharto menjadi Menteri Negara BUMN (21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007)

Mr. Sugiharto became Minister of SOEs (21 October 2004-9 May 2007)

2001

- Kembali menjadi setingkat Kementerian dengan nama Kementerian BUMN.
- Bapak Laksamana Sukardi kembali dipercaya sebagai Menteri (9 Agustus 2001 - 20 Oktober 2004)

- Back to the Ministry level with the name of the Ministry of SOEs.
- Mr. Laksamana Sukardi was again trusted as Minister (9 August 2001-20 October 2004)

2000-2001

- Kementerian yang membina BUMN dihapus dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan.
- Dirjen Pembinaan BUMN dijabat oleh Bapak I Nyoman Tjager

- The ministry that overseeing SOEs was removed and returned to a First Echelon within the Ministry of Finance.
- Director General of SOEs Development was held by Mr. I Nyoman Tjager

1999-2000

Digabung dengan Badan Penanaman Modal sehingga menjadi Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, dengan Menteri:

- Bapak Laksamana Sukardi (26 Oktober 1999 – 26 April 2000).
- Bapak Rozy Munir (26 April 2000 – 23 Agustus 2000).

Merged with the Capital Investment Coordinating Board to become the State Ministry of Capital Investment and SOEs Development, with the Minister:

- Mr. Laksamana Sukardi (26 October 1999-26 April 2000).
- Mr. Rozy Munir (April 26, 2000-August 23, 2000).





03

KILAS KINERJA 2018
PERFORMANCE HIGHLIGHTS IN 2018

BUMN TELAH BERKONTRIBUSI BESAR DI BIDANG PASAR MODAL DENGAN KONTRIBUSI KAPITALISASI PASAR MENCAPAI 24,95% DARI TOTAL KAPITALISASI PASAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). PRESTASI INI SANGAT MEMBANGGAKAN MENGINGAT JUMLAH BUMN YANG MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI HANYA SEKITAR 4,60%

SOEs have greatly contributed to the capital market sector with the contribution of market capitalization reaching 24.95% of the total market capitalization on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This achievement was very encouraging considering that the number of SOEs listed their shares on the IDX was only approximately 4.60%

SOEs Group
Keluarga BUMN



Kementerian BUMN sebagai institusi yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN, terus berupaya untuk memberikan arahan pada BUMN agar tidak hanya sekadar meningkatkan keuntungan, tetapi juga diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam menghasilkan *multiplier effect* bagi pembangun nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

The Ministry of SOEs, as an institution that arranges policy and coordination in fostering SOEs, continuously strives to provide SOEs directions to not only increase profit but also contribute and play an active role in creating a multiplier effect for national development and community welfare improvement.

Peran Kementerian BUMN sangat menentukan bagi perkembangan BUMN secara umum, dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi agar siap dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan internasional, serta tercapainya BUMN sebagai *agent of development* yang besar, kuat, dan lincah

The role of the Ministry of SOEs determines the development of SOEs, particularly in determining policies that produce sound and highly competitive SOE to compete in national, regional and international level, as well as actualizing SOEs as great, solid and agile agents of development.

Saat ini, Kementerian BUMN membina 142 Perusahaan Negara, dengan rincian sebagai berikut:

Recently, the Ministry of SOEs fosters 142 State Companies, with details as follow:

	2017	2018
Persero Tbk (*Listed/Public SOEs*)	17	16
Persero non Tbk / *Non Listed SOEs*	84	84
Perum (*Special Purpose Entity*)	14	14
Total BUMN	**115**	**114**
PPKNM (*Enterprises with Minority Goverment Ownership*)	27	28
Total Perusahaan Negara / *Total State Company*	**142**	**142**

Beberapa peristiwa penting selama tahun 2018, adalah:

Some events that took place in 2018, among others:

1. Terbentuknya Holding Migas pada 11 April 2018, dengan terlaksananya perjanjian pengalihan seluruh saham seri B yang dimiliki Pemerintah RI pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk kepada PT Pertamina (Persero) sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018. Hal ini berdampak pada berubahnya status PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang semula Persero Tbk menjadi Perusahaan dengan Portfolio Kepemilikan Negara Minoritas (PPKNM).

   1. Establishment of Holding of Oil and Gas on April 11, 2018, with realization of transfer agreement of all series B shares owned by Republic of Indonesia Government in PT Perusahaan Gas Negara Tbk to PT Pertamina (Persero) as follow-up to Government Regulation Number 6 of 2018. It impacts on the change in the status of PT Perusahaan Gas Negara Tbk from Persero to Company with Minority State Ownership Portfolio (PPKNM).

2. Kepemilikan saham negara pada PT Istaka Karya (Persero) mengalami perubahan sebagai dampak konversi utang Perseroan kepada Kreditur menjadi saham, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2018. Kepemilikan saham kreditur pada Perseroan bersifat sementara, tidak berhak atas dividen dan tanpa hak suara.

   2. State shares ownership in PT Istaka Karya (Persero) has changed as an impact of the Company's conversion debt into shares to Creditor, as stipulated in Government Regulation Number 44 of 2018. Creditor share ownership in the Company is temporary, and the Company is not entitled to dividend and votes.

3. PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya sesuai Putusan No 01/ Pdt.Sus.Pembatalan Pembayaran/18/PN.Niaga.Sby Jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Sby pada 25 September 2018 yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Agung No 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 pada tanggal 28 Maret 2019

   3. PT Kertas Leces (Persero) was declared bankrupt by Surabaya Commercial Court in accordance with Decision Number 01/ Pdt.Sus. Cancellation of Payment/18/ PN.Niaga.Sby Jo Number 5 / Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Sby on September 25 2018 which was confirmed by Decision of the Supreme Court Number 43 PK/ Pdt.Sus-Pailit/2019 on March 28, 2019.

Economic Perspective In 2018
Perspektif Perekonomian di 2018



➤ KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

Di tahun 2018, perekonomian global mengalami gejolak di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi global memiliki kecenderungan melambat sebesar 4,8% atau merosot dari 5,1% di tahun 2017. Sementara, menguatnya fundamental perekonomian Amerika Serikat di tengah perlambatan pertumbuhan diberbagai negara Eropa, Jepang dan Tiongkok, mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga FFR. Terhitung sepanjang 2018, The Fed telah menaikkan suku bunga sebanyak empat kali dengan masing-masing sebesar 25bps atau total sebesar 1% menjadi 2,25% - 2,50%. Kenaikan suku bunga The Fed mengakibatkan terjadinya capital outflow dari berbagai negara menuju Amerika Serikat dan menguatnya nilai tukar Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang negara lainnya.

➤ *GLOBAL ECONOMIC CONDITION*

In 2018, the global economy experienced turbulence amidst the uneven dynamism of economic growth. The global economic growth has slowed down by 4,8% or decreasing from 5,1% in 2017. Meanwhile, the strengthening US economic fundamental amidst slowing growth in European countries, Japan and China has encouraged the Fed to increase FRR interest rate. As of 2018, the Fed increased the interest rate four times with 25bps each or a total of 1% to 2.25%-2.50%. The increase in the Fed's interest rates resulted in capital outflows from various countries heading to the US and the strengthening of the US exchange against various other currencies.

Di sisi lain, perdagangan dunia juga mengalami ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan sejumlah negara. Gejolak perdagangan ini mengakibatkan ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada penurunan pertumbuhan volume perdagangan dan harga komoditas dunia, termasuk harga minyak mentah yang turun di triwulan IV tahun 2018.

On the other side, world trade, especially between the US and other countries, experienced world trade tension. The tension resulted in global economic uncertainty that impacted on declining growth in trade volume and world commodity prices, including crude oil prices which fell in the fourth quarter of 2018.

➤ PEREKONOMIAN NASIONAL DI TAHUN 2018

Di tengah kondisi perekonomian global yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru terus berlanjut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia masih diwarnai dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,2% di tahun 2018 dibandingkan 5,1% pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut, ditopang oleh program-program proyek infrastruktur Pemerintah yang terus berlanjut di 2018, aktivitas investasi, dan besarnya konsumsi domestik.

➤ *NATIONAL ECONOMY IN 2018*

Amidst uncertain global economic conditions, Indonesian economic growth kept continuing instead. Central Bureau of Statistics (BPS) recorded that Indonesia was still decorated with Gross Domestic Product (PDB) growth level by 5,2% in 2018 compared to 5,1% in the previous year. The Indonesian economic growth rate was sustained by the Government's infrastructure project programs that continued in 2018, investment activity and total domestic consumption.

Sementara ketahanan kondisi fiskal dan moneter Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari lembaga-lembaga pemeringkat utama di dunia, Fitch Ratings dan Standard & Poor's, sehingga kedua rating agency tersebut mempertahankan peringkat 'investment grade' surat hutang negara Indonesia. Adapun lembag pemeringkat Moody's menilai bahwa kerangka kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) cukup efektif dalam mendukung stabilitas ekonomi.

Meanwhile, the resilience of fiscal condition and Indonesian monetary obtained recognitions from global main rating agencies, Fitch Ratings and Standard & Poor's, so that those rating agencies maintained 'Investment grade' on Indonesian government bonds. Another rating agency, Moody's, assessed that the framework of Government's policy and Bank Indonesia (BI) is quite effective in supporting economic stability.

Tercatat sepanjang 2018, BI telah menaikkan suku bunga acuan BI 7-day Repo Rate sebanyak enam kali dengan total kenaikan 1,75% menjadi 6,00% pada akhir 2018 sebagai respon atas naiknya suku bunga FFR Amerika Serikat (AS). Akibat dari kenaikan suku bunga FFR, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pun melemah. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada 2018 meningkat dari awal tahun sebesar Rp 13.542/USD dan ditutup menjadi Rp 14.481/ USD (kurs tengah) pada akhir tahun 2018 dengan nilai tertinggi pada 11 Okbober 2018 adalah Rp 15.253/USD. Sebagai dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI, sumber pendana pun turut menaikkan suku bunga pinjaman yang berdampak pada kenaikan suku bunga sumber pendanaan.

Throughout 2018, BI increased the BI 7-day Repo Rate reference rate for six times with total increasing by 1.75% to 6.00% at the end of 2018 as a response to FFR interest rates of the US. Due to the increasing FFR interest rates, the rupiah exchange rate towards the US Dollar weakened. Based on the data of Bank Indonesia, it increased from the beginning of the year by IDR13,542/USD and was closed to IDR 14,481/USD (middle exchange rate) at the end of 2018 with total value on October 11, 2018 was IDR15,253/USD. As an impact of the increasing BI reference rate, the source of funding also increased loan interest rates that impacted on the increasing interest rates on funding sources.

State Owned Enterprises' Performance Highlights
Ikhtisar Kinerja BUMN

➤ KINERJA POKOK BUMN

➤ *SOES PRINCIPAL PERFORMANCE*

IKHTISAR KINERJA POKOK BUMN (2014-2018)
SOEs Principal Performance Overview (2014-2018)

Rp Triliun / *IDR Trillion*

Uraian *Description*	2018	2017	2016	2015	2014	YoY 2017-2018 (%)
Aset / *Assets*	8.200	7.210	6.473	5.760	4.577	13,73%
Liabilitas / *Liabilities*	5.601	4.830	4.216	3.769	5.602	15,96%
Ekuitas / *Equities*	2.599	2.380	2.257	1.991	2.605	9,20%
Pendapatan / *Revenues*	2.402	2.027	1.710	1.699	1.955	18,50%
Total Laba Bersih Tahun Berjalan *Income for the Year*	189	186	176	149	148	1,61%
Total Laba / *Total Profit*	212	191	183	160	158	10,99%
Total Rugi / *Total Loss*	(22)	(5)	(7)	(11)	(10)	340,00%
Belanja Modal/CAPEX *CAPEX Capital Expenditures*	461	315	298	221	223	46,35%
Setoran Pajak / *Tax Deposit*	245	211	190	176	178	16,11%
Setoran Dividen / *Dividend Payment*	44	43	37	37	40	2,33%

Total aset BUMN per 31 Desember 2018 mencapai Rp8.200 triliun, meningkat 13,73% dari posisi akhir tahun 2017 yang mencapai Rp7.210 triliun. Kontribusi peningkatan total aset BUMN terbesar di tahun 2018 berdasarkan sektor ekonomi disumbangkan oleh BUMN dari sektor Keuangan dan sektor Energi & Pertambangan. Sementara itu BUMN penyumbang kenaikan aset terbesar di tahun 2018 adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Pertamina (Persero).

Total assets of SOEs as of December 31, 2018 reached IDR8,200 trillion, increasing 13,73% of the last position in 2017 that had reached IDR7,210 trillion. Contribution of the increase in the largest SOEs' assets in 2018 based on the economic sector comes from SOEs in Financial and Energy & Mining sectors. Meanwhile, SOEs with the most increasing assets in 2018 is PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, and PT Pertamina (Persero).

Total liabilitas BUMN per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.601 triliun, meningkat 15,96% dari posisi akhir tahun 2017 yang sebesar Rp4.830 triliun. Peningkatan liabilitas BUMN di tahun 2018 tersebut didominasi oleh peningkatan dana pihak ketiga (dana masyarakat) di BUMN Perbankan dan adanya penerbitan surat berharga (obligasi) BUMN untuk pendanaan proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan usaha.

Total liabilities of SOEs as of December 31, 2018 were amounted to IDR5.601 trillion, increasing 15,96% from the last position in 2017 amounted to IDR4.830 trillion. The increase of SOEs liabilities in 2018 was dominated by the increase of third-party fund (public funds) in Banking SOEs and issuance of securities (bonds) for SOEs to fund infrastructure projects and business development.

Jumlah pendapatan BUMN selama tahun 2018 mencapai Rp2.402 triliun, meningkat 18,52% dari posisi akhir tahun 2017 yang sebesar Rp2.027 triliun. Kontribusi terbesar peningkatan pendapatan di tahun 2018 berdasarkan sektor ekonomi, disumbangkan oleh BUMN sektor Keuangan, sektor Energi &

Total SOEs income in 2018 reached IDR2.402 trillion, increasing 18,52% from the last position in 2017 amounted to IDR2.207 trillion. The biggest contribution of income in 2018 based on the economic sector came from Financial, Energy & Mining and Infrastructure SOE

Pertambangan, dan sektor Infrastruktur. Sementara itu BUMN penyumbang peningkatan terbesar adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Total Laba dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp212 triliun, meningkat 10,99% dari posisi akhir tahun 2017 sebesar Rp191,6 triliun. Kontribusi peningkatan laba terbesar di tahun 2018 berdasarkan sektor ekonomi berasal dari BUMN sektor Energi & Pertambangan, dan sektor perbankan. Sedangkan BUMN penyumbang kenaikan laba di tahun 2018, terbesar adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tahun 2018 jumlah belanja modal BUMN mencapai Rp461 triliun, meningkat 46,52% dari pencapaian belanja modal BUMN tahun 2017 yang mencapai Rp315 triliun. Peningkatan jumlah Capex di tahun 2018 berdasarkan sektor ekonomi paling besar disumbangkan oleh BUMN sektor Energi & Pertambangan, sektor infrastruktur, dan sektor Transportasi.

Total setoran pajak BUMN selama tahun 2018 mencapai Rp245 triliun, meningkat 16,11% dari pajak yang disetorkan BUMN pada tahun 2017 yang mencapai Rp211 triliun. Sumbangan pajak paling besar untuk tahun 2018 berasal dari BUMN sektor BUMN sektor Energi & Pertambangan, Sektor Keuangan dan sektor Komunikasi & Media.

Sementara itu, jumlah setoran Dividen BUMN pada tahun 2018 mencapai Rp44 triliun, meningkat 2,33% dari jumlah dividen yang disetorkan BUMN pada tahun 2017 yang mencapai Rp43 triliun. Kontributor dividen terbesar untuk tahun 2018 adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

➤ BUMN GOES TO GLOBAL

BUMN yang masuk ke dalam daftar Global Fortune 500 adalah PT Pertamina (Persero), yang berada di peringkat 253 berdasarkan peringkat Global Fortune 500. Peringkat tersebut meningkat dari tahun 2017 yang berada pada peringkat 289.

Selain itu, Forbes telah merilis daftar 2.000 perusahaan publik global terbesar di dunia pada 2018. Terdapat empat BUMN yang masuk dalam daftar Forbes 2000, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

sectors. Meanwhile, SOEs that contribute the biggest growth are PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), and PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Total Profit of all SOEs as of the end of 2018 was IDR212 trillion, increasing 10.99% from the last position in 2017 amounted to IDR191.6 trillion. The biggest contribution to the increase in profit in 2018 based on the economic sector came from SOEs in Energy & Mining and Banking sectors. While SOEs contributing to the increase in profits in 2018, the biggest were PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

In 2018 the number of SOEs capital expenditures reached IDR461 trillion, an increase of 46.52% from the achievement of SOEs capital expenditure in 2017 which reached IDR315 trillion. The increase in the number of Capex in 2018 based on the largest economic sector was contributed by the SOEs in the Energy & Mining sector, the infrastructure sector, and the Transportation sector.

Total tax deposits of SOEs in 2018 reached IDR245 trillion, increasing 16.11% from the total tax deposited by SOEs in 2017 amounted to Rp211 trillion. The biggest tax contribution in 2018 came from SOEs in Energy & Mining, Financial, and Communication & Media sectors.

Meanwhile, the total dividend deposits of SOEs in 2018 reached IDR44 trillion, increasing 2,33% from the total dividends deposited by SOEs in 2017 reaching IDR43 trillion. The biggest dividend contributors in 2018 were PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

➤ *BUMN GOES TO GLOBAL*

SOEs that are included in the Global Fortune 500 list is PT Pertamina (Persero), which is ranked 253 based on the Global Fortune 500 ranking. The rating increased from 2017 which was ranked 289.

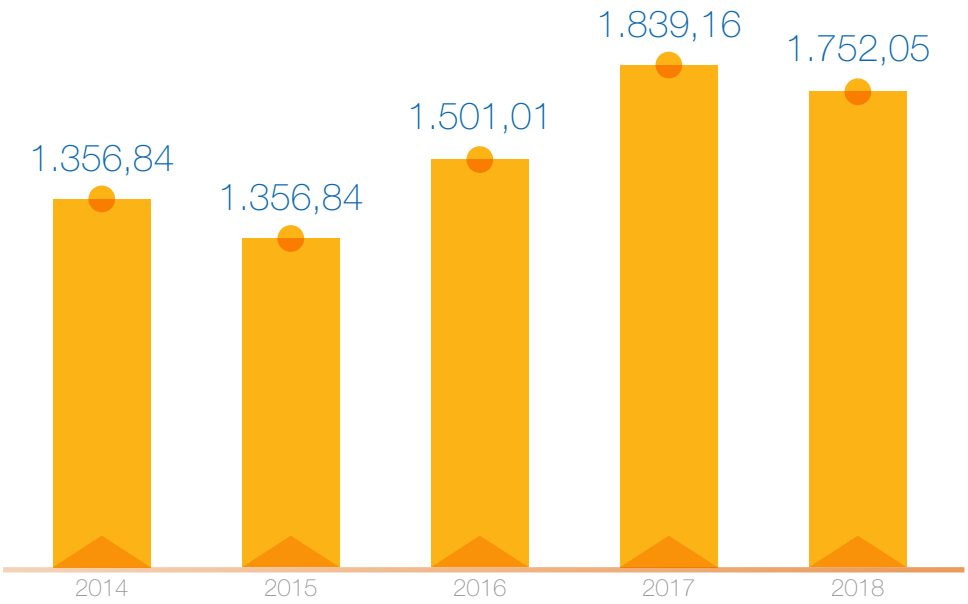
Besides, Forbes has released a list of the 2,000 largest global public companies in the world in 2018. There are four SOEs included in the Forbes 2000 list, namely PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Market Capitalization
Kapitalisasi Saham

BUMN juga telah berkontribusi yang besar di bidang pasar modal dengan kontribusi kapitalisasi pasar mencapai BUMN Group tahun 2018 adalah sebesar Rp1.752,05 miliar atau 24,95% dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Prestasi ini sangat membanggakan mengingat jumlah BUMN yang mencatatkan sahamnya di BEI hanya sekitar 5,14% yaitu 32 perusahaan yang terdiri dari 16 BUMN dan 16 anak perusahaan BUMN dari total Emiten di BEI yang mencapai 630 perusahaan.

SOEs have also greatly contributed to the capital market sector with the contribution of market capitalization to the SOE Group in 2018 amounted to IDR1,752.05 billion or 24.95% of the Composite Stock Price Index (CSPI). This achievement boasts pride, considering total SOEs that listed shares in BEI is only 5.14%, namely 32 companies consisting of 16 SOEs and 16 SOEs subsidiaries of total Issuers in BEI that consist of 630 companies.

KAPITALISASI PASAR BUMN GROUP TAHUN 2014-2018 (RP TRILIUN)
Capitalization of SOEs Group Market for 2014-2018 (IDR Trillion)



Financial Highlights of The Ministry of SOEs
Ikhtisar Keuangan Kementerian BUMN

Sebagai salah satu instansi Pemerintah, Kementerian BUMN berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan Kementerian BUMN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas

As one of the Government's institutions, the Ministry of SOEs is obliged to arrange Institution Financial Report. SOEs Financial Statement that Ended on December 31, 2018 has been arranged and provided according to Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP) and principles of sound financial management in the Government environment. This Financial Report includes:

1. *Budget Realization Report*
2. *Balance*
3. *Operational Report*
4. *Statement of Changes in Equity*

➤ REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN BUMN

➤ *BUDGET REALIZATION OF MINISTRY OF SOES*

REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN BUMN 2017-2018
The Ministry of SOEs Budget Realization

(dalam Rupiah penuh / *In Rupiah*)	2018			2017		
	Anggaran *Budget*	Realisasi *Realization*	Pencapaian (%) *Achievement*	Anggaran *Budget*	Realisasi *Realization*	Pencapaian (%) *Achievement*
Pendapatan Negara dan Hibah / *State Revenues and Grants*						
Penerimaan Negara *State Revenue*	1.469.850.000	6.512.815.502	443,09%	1.313.004.000	4.443.248.725	338,40%
Penerimaan Perpajakan *Tax Revenue*	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Penerimaan Negara Bukan Pajak *Non-Tax State Revenue*	1.469.850.000	6.512.815.502	443,09%	1.313.004.000	4.443.248.725	338,40%
Hibah *Grants*	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Jumlah Pendapatan dan Hibah *Total Revenue and Grants*	1.469.850.000	6.512.815.502	443,09%	1.313.004.000	4.443.248.725	338,40%
Belanja Negara / *State Expenditures*						
Belanja Pegawai *Employee Expenditure*	52.159.826.000	48.701.098.828	92,07%	44.600.612.000	43.581.581.959	97,72%
Belanja Barang *Goods Expenditure*	137.436.650.000	125.054.565.466	90,99%	134.984.780.000	126.674.779.294	93,84%
Belanja Modal *Capital Expenditure*	57.445.279.000	53.692.692.743	93,47%	19.279.680.000	18.769.764.661	97,36%
Jumlah Belanja *Total Expenditure*	247.041.755.000	227.448.357.037	92,07%	198.865.072.000	189.026.125.914	95,05%

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Budget Realization Report (LRA) depicts the comparison between budget and its realization that include elements of Revenue-LRA and Expenditure during January 1, until December 31, 2018.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.512.815.502 atau mencapai 443,09 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp1.469.850.000. Realisasi Belanja Negara untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp227.448.357.037 atau mencapai 92,07% dari alokasi anggaran sebesar Rp247.041.755.000.

Realization of State Revenue for December 31, 2018 is Non-Tax State Revenue amounted to IDR6,512,815,502 or reaching 443.09% of estimation of Revenue-LRA amounted to IDR1,469,850,000. State Spending Realization for December 31, 2018 was IDR227,448,357,037 or reaching 92.07% of budget allocation amounted to IDR247,041,755,000.

NERACA KEUANGAN KEMENTERIAN BUMN 2017-2018
Financial Balance Sheet of the Ministry of SOEs 2017-2018

(dalam Rupiah penuh)	2018 (Rp / *IDR*)	2017 (Rp / *IDR*)	YoY 2017-2018 (%)	*(in Rupiah)*
Aset	568.491.321.213	481.563.443.834	18,05%	*Assets*
Liabilitas	8.254.412.912	3.164.039.883	160,88%	*Liabilities*
Ekuitas	560.236.908.301	478.399.403.951	17,11%	*Equity*

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp568.491.321.213 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp5.552.801.047, Aset Tetap (neto) sebesar Rp556.668.719.268, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya (neto) masing-masing sebesar Rp33.794.588 dan Rp6.236.006.310. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.254.412.912 dan Rp560.236.908.301.

The balance sheet describes the financial position of the entity regarding assets, liabilities, and equity as of December 31, 2018. Asset value as of December 31, 2018 was recorded and presented at IDR568,491,321,213 consisting of Current Assets of IDR5,552,801,047, Fixed Assets (net) of IDR556,668,719,268, Long-term Receivables and Other Assets (net) amounting to IDR33,794,588 and IDR6,236,006,310, respectively. Value of Liabilities and Equities amounting to IDR8,254,412,912 and IDR560,236,908,301, respectively.

➤ LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.426.639.145, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp195.737.289.507 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(190.310.650.362).

➤ *OPERATIONAL REPORT*

Operational Report (LO) provides various elements of Revenue-LO, expense, the surplus/deficit of operation, the surplus/deficit of non-operational activities, surplus/deficit before extraordinary posts, extraordinary posts, and surplus/deficit-LO that is needed for the appropriate presentation. Revenue-LO for December 31, 2018 is IDR5.426.639.145, while total operational expense is IDR195,737,289,507 so that there is a Deficit of Operational Activities worth IDR(190,310,650,362).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp937.690.304 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(189.372.960.058).

Non-Operational Activities and Extraordinary Posts are respectively worth IDR937,690,304 and IDR0, so companies experienced Deficit-LO in the amount of IDR(189,372,960,058).

➤ LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp478.399.403.951 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(189.372.960.058). Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp(169.611.259) dan Transaksi Antar Entitas senilai total Rp271.380.075.667, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp560.236.908.301.

➤ *STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY*

Statement of Changes in Equity provides information of increasing or decreasing equity in the reporting year compared to the previous years. Equity on January 1, 2018 was worth IDR478.399.403.951 with additional Deficit-LO worth IDR(189,372,960,058). The correction that increases/decreases Equity is worth IDR(169.611.259) and Inter-Company Transaction is worth IDR271,380,075,667, so companies' Equity on December 31, 2018 stood at IDR560,236,908,301.

➤ CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN BUMN

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

➤ *NOTES OF FINANCIAL REPORT OF MINISTRY OF SOE*

Notes of Financial Report (CaLK) provides information concerning explanation or detailed lists or analysis on the value of a post that is provided in Budget Realization Report and Balance Sheet, Operational Report, and Statement of Changes in Equity. CaLK also provides information that is obliged and recommended by Government Accounting Standards and other disclosures that are needed for appropriate presentation on the financial report.

Presentation of Budget Realization Report for a period that ended on December 31, 2018 was arranged and presented based on a cash base. Meanwhile, Balance, Operational Report and Statement of Changes in Equity for a period that ended on December 31, 2018 was arranged and presented based on accrual base.

Awards and Certificate in 2018
Penghargaan dan Sertifikasi di Tahun 2018

Selain melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan BUMN, Kementerian BUMN juga tetap memperhatikan peningkatan kinerja dalam lingkungan Kementerian BUMN selaku instansi Pemerintah, hal tersebut tergambar dari beberapa penghargaan dan sertifikasi yang berhasil diraih oleh Kementerian BUMN sepanjang tahun 2018. Penghargaan dan sertifikasi yang berhasil diraih Kementerian BUMN di tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Penghargaan atas Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 2017 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Pemerintah Indonesia

Award for Preparation and Presentation of 2017 Financial Reports with Achievement of Unqualified Opinion by Indonesia Government



Nasional Procurement Award 2018 "Kategori Percepatan Pengadaan" oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

2018 National Procurement Award "Category for Acceleration of Procurement" by Government Goods and Services Procurement Policy Agency (LKPP)

In addition to carrying out its duties and functions in fostering and managing SOEs, the Ministry of SOEs also considers performance improvement in the Ministry of SOEs environment as a Government's institution. It is manifested with some achievements and certificates obtained by the Ministry of SOEs throughout 2018.
The achievements and certificates obtained by the Ministry of SOEs in 2018 are as follows:





Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 "Sebagai Badan Publik Cukup Infomatif dalam Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik" oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Public Agency Information Openness Award 2018 "As an Informative Public Agency in the Implementation of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure " by Central Information Commission of the Republic of Indonesia

Sertifikasi sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dengan Realisasi PNBP Terbesar atas Pemanfaatan BMN di Lingkup KPNL Jakarta V Tahun 2018 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Certification as User / Authorization of Goods Users with the Largest Realization of PNBP for BMN Utilization in the Scope of KPNL Jakarta V in 2018 by The State Wealth and Auction Service Office (KPKNL) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia cq. Directorate General of State Assets


Monumen Pers Nasional
Diresmikan Presiden Republik Indonesia
Pembangunan Gedung Perpustakaan
Kepada Tuhan Yang Maha Esa
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Pembangunan Gedung Perpustakaan
Kepada Tuhan Yang Maha Esa
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
RI M. SOEHARNO

04

KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEMENTRIAN BUMN

MINISTRY OF SOE'S POLICIES AND PROGRAMS

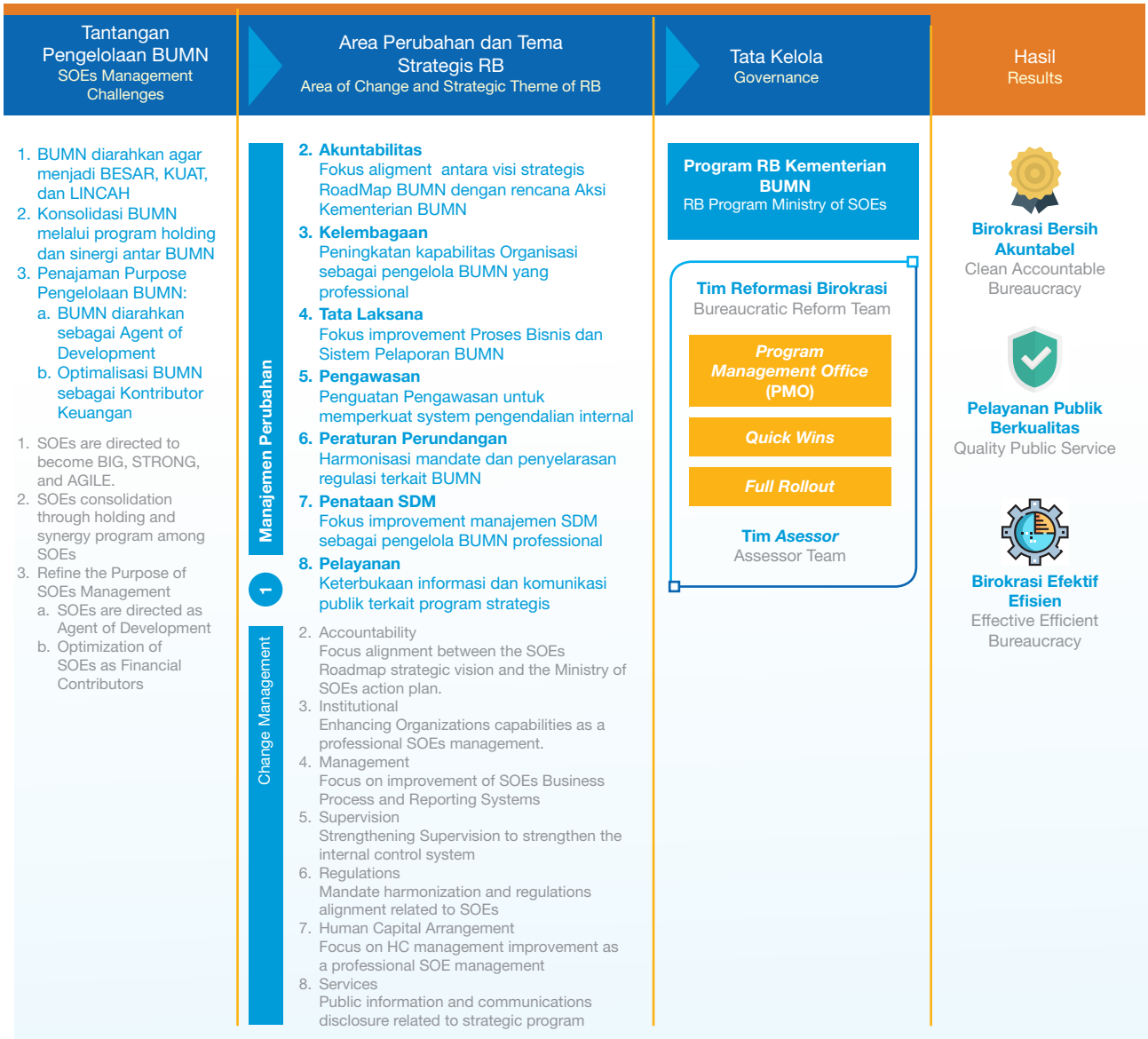
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, KEMENTERIAN BUMN MELAKUKAN PENGUKURAN TINGKAT KINERJA UNIT PELAYANAN SECARA BERKALA SEBAGAI BAHAN UNTUK MENETAPKAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SELANJUTNYA

As an effort to improve public services, the Ministry of SOEs periodically measures the level of service units performance as an indicator to establish policies in order to improve the quality of further public services

Bureaucratic Reform
Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN merupakan program peningkatan kapasitas Birokrasi Kementerian BUMN untuk mengakselerasi pelaksanaan pembinaan BUMN dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis *Roadmap* BUMN. Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian BUMN merupakan program berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien untuk pengelolaan BUMN yang lebih baik.

Bureaucratic reform within the Ministry of SOEs is a program to increase the bureaucracy capacity of the Ministry of SOEs to accelerate the implementation of SOEs development in order to achieve the SOEs Roadmap Strategic Goals. Bureaucratic Reform (RB) at the Ministry of SOEs is an ongoing program to create an effective and efficient bureaucracy for better management of SOEs.



Program Reformasi Birokrasi dilingkungan Kementerian BUMN melibatkan seluruh unit untuk menghasilkan pelayanan yang cukup memuaskan bagi BUMN dan *Stakeholders* serta masyarakat pada umumnya. Program ini, telah di susun melalui bentuk Tata Kelola Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN agar semua dapat terorganisir dengan baik dan dapat menghasilkan *output* yang maksimal.

Bureaucratic Reform Program within the Ministry of SOEs involves all units to produce services that are quite satisfying for SOEs, stakeholders and general public. This program has been compiled through a form of Bureaucratic Reform in the Ministry of SOEs in order to be well organized and able to produce maximum output.

TATA KELOLA REFORMASI BIROKRASI
Governance of Bureaucratic Reform

KEBIJAKAN
POLICY

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
NATIONAL BUREAUCRATIC REFORM POLICY

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
BUREAUCRATIC REFORM ROADMAP

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
BUREAUCRATIC REFORM PROGRAM

AKUNTABILITAS ACCOUNTABILITY		KELEMBAGAAN INSTITUTIONAL	TATA LAKSANA MANAGEMENT	
INSPEKTORAT INSPECTORATE	PSDMO [PMK]	PSDMO [ORB]	PSDMO [ORB]	DTI [IT]

PENGAWASAN PENGAWASAN	MANAJEMEN SDM HC MANAGEMENT	PENATAAN PUU PUU ARRANGEMENT	
INSPEKTORAT INSPECTORATE	PSDMO [SDM] PSDMO (HUMAN CAPITAL)	BIRO HUKUM LAW FIRM	LAYANAN HUKUM LEGAL SERVICES

MANAJEMEN PERUBAHAN CHANGE MANAGEMENT	PELAYANAN SERVICES		
BIRO PSDMO [ORB] PSDMO BUREAU (ORB)	BIRO PSDMO PSDMO BUREAU	BIRO UMUM GENERAL BUREAU	DTI

IMPLEMENTASI
IMPLEMENTATION

SELURUH UNIT
ALL UNITS

- Tim RB dari Perwakilan Unit berperan menyebarkan kebijakan dan menjadi penggerak pelaksanaan RB di lapangan
- Proses implementasi RB melibatkan seluruh unit dan pimpinan di kementerian BUMN
- RB team from Representative Unit has the role of spreading the policy and implement RB in the field
- RB implementation process involving all units and leaders in the Ministry of SOEs

IMPACT
IMPACT

BUMN
SOES

LEMBAGA MITRA
PARTNER INSTITUTION

MASYARAKAT
COMMUNITY

- Improvement tata kelola pelaksanaan Tugas dan Fungsi Core Business Kementerian BUMN dalam Pengelolaan BUMN
- Improvement tata kelola dan mekanisme hubungan antar lembaga dan stakeholder strategis
- Improvement layanan dan keterbukaan informasi kepada Masyarakat
- Improvement of governance implementation of the Duties and Functions of the Ministry of SOEs's Core Business in the SOEs Management
- Improvement of governance and mechanisms of relations between institutions and strategic stakeholders
- Improvement of services and information disclosure to the Community

➤ PENERAPAN DAN PENCAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

Setiap tahunnya, Tim Koordinasi Reformasi Birokrasi dibentuk oleh Sekretaris Kementerian BUMN atas nama Menteri BUMN sebagai wujud pelaksanaan salah satu area perubahan reformasi birokrasi yaitu manajemen perubahan. Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan program-program reformasi birokrasi yang dijalankan lintas unit atau dapat juga bertindak sebagai inisiator program reformasi birokrasi di Kementerian BUMN.

Tim ini juga berkoordinasi dengan unit organisasi dan reformasi birokrasi dan Inspektorat dalam membantu pelaksanaan *self assessment* penilaian reformasi birokrasi (PMPRB) dan evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN-RB setiap tahunnya. Berdasarkan hasil *self assessment* pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian BUMN, skor untuk tahun 2018 adalah 87,86.

Penilaian reformasi birokrasi dibagi ke dalam 2 (dua) komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit memiliki bobot dan total penilaian yaitu sebesar 60%, sedangkan komponen hasil memiliki bobot sebesar 40%.

Nilai skor 87,86 untuk tahun 2018 merupakan hasil self assessment yang dilakukan tim asesor reformasi birokrasi Kementerian BUMN. Sebagai tindak lanjut atas *self assessment* tersebut, Sekretaris Kementerian BUMN telah menyampaikan hasil *self assessment* kepada Kementerian PAN-RB untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi. Faktor pengungkit bagian pengawasan menekankan pada *improvement* program SPIP dan penguatan APIP secara berkelanjutan.

➤ KUALITAS PELAYANAN

Pelayanan terhadap BUMN dan Stakeholders

Kementerian BUMN merupakan instansi pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan BUMN, sehingga pelayanan yang diharapkan dari Kementerian BUMN adalah dalam kaitannya dengan pembinaan BUMN tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian BUMN berbeda dengan instansi lain yang langsung melayani kebutuhan masyarakat luas seperti kantor pelayanan pajak atau kantor bea dan cukai, namun fungsi utama pelayanan yang diberikan berupa kebijakan, perizinan, maupun regulasi kepada BUMN, walaupun terdapat juga kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti penyediaan data dan informasi tentang BUMN maupun Kementerian BUMN.

➤ *BUREAUCRATIC REFORM IMPLEMENTATION AND ACHIEVEMENT*

Every year, the Bureaucracy Reform Coordination Team is formed by the Ministry of SOEs Secretary on behalf of the SOEs Minister as a form of change management, an area of bureaucratic reform implementation. The team is tasked to coordinate bureaucratic reform program carried out across units or may also act as initiator of the bureaucratic reform program at the Ministry of SOEs .

The team also coordinates with the organizational and bureaucratic reform unit and Inspectorate to support the bureaucratic reform self assessment and bureaucratic reform evaluation annually carried out by the State Apparatus Empowerment & Bureaucratic Reform Ministry. Based on the result of self assessment of bureaucratic reform in the Ministry of SOEs, the score for 2018 is 87.86.

The bureaucratic reform assessment is divided into 2 (two) components: the enablers and the results. The enablers' assessment weight and total score is 60%, while the results's weight is 40%.

The score of 87.86 for 2018 is the self assessment result conducted by the Ministry of SOEs's bureaucratic reform assessor team. To follow-up the self assessment, Ministry of SOEs Secretary has submitted the self-assessment results to the State Apparatus Empowerment & Bureaucratic Reform Ministry for evaluation and verification. The enablers factor of supervision division emphasizes the SPIP Improvement Program and the Strengthening of APIP in a sustainable manner.

➤ *SERVICE QUALITY*

Service to SOEs and Stakeholders

The Ministry of SOEs is a government agency tasked to oversee SOEs, so that the services expected from the Ministry of SOEs is related to the oversight of SOEs. The services expected from the Ministry of SOEs is not the same with other agencies that directly serve the wider community's needs such as tax offices or customs and excise offices, however the main functions of services provided are in the form of policies, permits and regulations for SOEs, although there are also an obligation to make available data and information about SOEs and the Ministry of SOEs to public.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, Kementerian BUMN melakukan pengukuran tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran tingkat pelayanan tersebut dilaksanakan dengan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sehingga dapat diketahui kinerja pelayanan aparatur Pemerintah kepada masyarakat.

As an effort to improve public services, the Ministry of SOEs regularly measures the service performance index as a material to establish policies in order to improve public services quality. The service performance index is measured by assessing the people's opinion on the services provided through the People's Satisfaction Index (IKM) arrangement, the purpose is to find out the Government apparatus' public services performance.

Sebagai pedoman dalam penyusunan IKM, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 tahun 2014 tentang tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun pedoman tersebut merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Perubahan dimaksud adalah terkait penyempurnaan parameter penilaian.

The People's Satisfaction Index is arranged based on the guidelines stipulated in the State Apparatus Empowerment Ministerial Decree No. 16 Year 2014 regarding Guidelines for People's Satisfaction Survey on the public services implementation. These guidelines are enhancement of the previous guidelines provided in the State Apparatus Empowerment Ministerial Decree No. KEP/25/M.PAN/2/2004 regarding General Guidelines for Arranging the People's Satisfaction Index of Government Agency's Service Unit. The purpose of the change is related to the assessment parameters enhancement.

Pada tahun 2018, Kementerian BUMN telah melakukan survey sebagai landasan untuk menilai sejauh mana tingkat kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan oleh Kementerian BUMN baik pelayanan yang diberikan kepada BUMN maupun instansi Pemerintah terkait/*stakeholders* ataupun masyarakat pada umumnya. Skor yang didapat dari survey tersebut adalah 86% yang menunjukkan bahwa pelayanan yang telah dilakukan Kementerian BUMN masuk dalam kategori cukup memuaskan. Namun untuk ke depan, Kementerian BUMN akan terus meningkatkan mutu layanan sesuai dengan SOP yang berlaku agar indeks kepuasan pelayanan dari Kementerian BUMN dapat terus mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan.

In 2018, the Ministry of SOEs conducted a survey as a basis for assessing satisfaction index of the services provided by the Ministry of SOEs both services provided to the SOEs and related Government agencies/stakeholders or the public in general. The survey score is 86%, indicating SOEs' perception on the services provided by the Ministry of SOEs is in the category of quite satisfying. However for the future, the Ministry of SOEs will continue to improve its service quality in accordance with the applicable SOP so that the Ministry of SOEs satisfaction index can continue to increase as expected.

Pelayanan Publik

Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian BUMN telah melakukan percepatan alur proses naskah dinas di Lingkungan Kementerian BUMN dalam rangka mewujudkan pelayanan yang tanggap dan responsif, sebagai bagian dari penilaian kinerja Kementerian BUMN. Setiap pemrosesan naskah dinas dilakukan secara terstandar, terutama dari segi ketepatan waktu dan sesuai dengan pedoman tata naskah dinas guna menghasilkan pelayanan prima sebagai bentuk nyata pelayanan kepada pemangku kepentingan Kementerian BUMN.

Public service

To encourage public service quality improvement, the Ministry of SOEs has accelerated the office correspondence process flow within the Ministry of SOEs with a view to implement responsive services as part of the Ministry of SOEs's performance assessment. All office correspondence processes are carried out in a standardized manner, especially in terms of timeliness, and in accordance with the guidelines for office correspondence in order to produce excellent services as a tangible form of the Ministry of SOEs's services to stakeholders.

Percepatan alur proses naskah dinas diharapkan mampu menjadikan budaya kerja di lingkungan Kementerian BUMN menjadi lebih transparan, profesional, dan akuntabel serta menunjang pengambilan keputusan yang lebih cepat bagi pemangku kepentingan Kementerian BUMN.

The office correspondence process flow acceleration is expected to make the Ministry of SOEs's work culture more transparent, professional, and accountable and to support faster decision making for the Ministry of SOEs's stakeholders.

Selain itu, Kementerian BUMN juga menaruh perhatian yang serius terhadap kebutuhan informasi publik melalui *Desk* Informasi dan Hubungan Masyarakat, yang bertugas merencanakan optimalisasi publikasi Kementerian BUMN, serta Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertugas dalam penerimaan, pemrosesan, pengkajian, serta pemenuhan kebutuhan informasi publik. Keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Kementerian BUMN telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana setiap badan publik memiliki kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.

In addition, the Ministry of SOEs also pays serious attention to the need of public information through the Information and Public Relations Desk tasked to plan the Ministry of SOEs's publications optimization, as well as the Information and Documentation Management Team in charge of receiving, processing, assessing and fulfilling the need of public information. Public information disclosure carried out by the Ministry of SOEs is already in conformity with the mandate of Law No 14 of 2008 regarding Public Information Disclosure, providing that all public bodies have the obligation to make available access to public information related to the public bodies for general public.

Lingkup badan publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana APBN/APBD dan mencakup pula organisasi non Pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

The public bodies specified in this Law include executive, judicial, and legislative institutions, and other state administrators obtaining the funds from APBN (State Budget)/APBD (Local Government Budget), and also includes non-governmental organizations, both legal entities and non-legal entities, such as non-governmental organizations, associations, and other organizations that manage or use funds that are partly or wholly sourced from APBN/APBD, community contributions, and/or abroad.

Bagian Humas dan Protokol dalam pemenuhan permintaan informasi Publik berfungsi sebagai Pejabat Pengelola Informsasi dan Dokumentasi (PPID). Penjawaban atas permohonan informasi dan dokumentasi dari masyarakat yang merupakan fungsi dari PPID sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, layanan PPID tersebut diberikan kepada masyarakat secara *online* melalui *website*, *email* maupun secara tatap muka langsung melalui loket permintaan informasi dan dokumentasi.

In fulfilling requests for public information, the Public Relations and Protocol Department functions as the Information and Documentation Management Officer (PPID). Response to public request for information and documentation as a function of PPID pursuant to the mandate of Law No. 14 of 2008 regarding Public Information Transparency, the PPID service is provided to public online through website, email, or face to face directly through the information and documentation request counter.

Selama tahun 2018, PPID Kementerian BUMN tercatat menerima 24 permohonan informasi publik, 3 (tiga) diantaranya tidak dapat diproses/ditolak dengan alasan tidak melengkapi persyaratan permohonan sesuai dengan ketetapan.

During 2018, the Ministry of SOEs's PPID received 24 requests for public information, 3 (three) of which could not be processed/rejected because they failed to complete the information application requirements in accordance with the provisions.



Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan, pada tahun 2018, PPID Kementerian BUMN melakukan inovasi sistem pelayanan informasi melalui Portal PPID (ppid.bumn.go.id) yang telah diluncurkan pada Oktober 2018. Terobosan ini menjadi wujud nyata komitmen Kementerian BUMN untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas. Portal ini memangkas waktu pelayanan menjadi lebih efisien sehingga proses pemenuhan permohonan informasi lebih optimal. Secara umum, proses pelayanan informasi membutuhkan waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing pelayanan, terhitung sejak diterima/mendapat disposisi hingga pengesahan jawaban oleh PPID setelah berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

In an effort to improve service, in 2018, the Ministry of SOEs's PPID innovated the information service system through the PPID Portal (ppid.bumn.go.id) which was launched in October 2018. This breakthrough was a concrete manifestation of the commitment of the Ministry of SOEs to improve service to the community. This portal cuts service time to be more efficient so that the process of fulfilling information requests is more optimal. In general, the information service process takes 10 (ten) working days and an extension of 7 (seven) working days for each service, from the time of receipt/getting the disposition to the endorsement of answers by the PPID after coordinating with the relevant work units.

➤ EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KBMUN

Pada tahun 2018, telah dilakukan evaluasi berupa penilaian terhadap program reformasi birokrasi instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terhadap Kementerian BUMN. Reformasi birokrasi Kementerian BUMN sudah dimulai sejak tahun 2010, dimana secara tahunan dan konsisten terus dilakukan perbaikan proses yang dinilai secara internal oleh Tim Asessor Kementerian BUMN dan divalidasi oleh Kementerian PAN-RB.

➤ *EVALUATION OF BUREAUCRATIC REFORM OF MINISTRY OF SOES*

In 2018, an evaluation was carried out through an assessment of the government agency bureaucratic reform program carried out by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PAN-RB) on the Ministry of SOEs. Bureaucratic reform of the Ministry of SOEs has been started since 2010. Every year, process improvement is assessed internally, and consistently by the Ministry of SOEs' Assessors Team and validated by the Ministry of PAN-RB.

PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH
Assessment of Government Agency Bureaucratic Reform

DASAR HUKUM
LEGAL BASIS

1. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014
2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

1. Regulation of the Minister of PAN-RB No. 30 of 2018 concerning Amendments to Ministerial Regulation of Minister of PAN-RB No. 14 of 2014
2. Minister of PAN-RB Regulation No. 14 of 2014 concerning Guidelines for Evaluating Government Agency Bureaucratic Reform

WAKTU
TIME

Penilaian dilaksanakan setiap tahun pada bulan September-Desember Tahun berikutnya

Assessment is carried out every year in September - December of the following year

HASIL PENILAIAN
ASSESSMENT RESULT

Hasil Penilaian RB oleh Kementerian PAN-RB ditindaklanjuti oleh Instansi

The results of Bureaucratic Reform Assessment by the Ministry of PAN-RB are through Institutional Bureaucratic Reform scores

TINDAK LANJUT
FOLLOW-UP

Hasil Penilaian RB oleh Kementerian PAN-RB ditindaklanjuti oleh Instansi

The results of Bureaucratic Reform Assessment by the Ministry of PAN-RB are followed up by the Agency

MEKANISME PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH
Mechanism of Assessment of Government Agency Bureaucratic Reform

01



Tim Asesor KBUMN melakukan Penilaian Mandiri RB
The Ministry of SOEs' Assessor Team conducts an Independent Bureaucratic Reform Assessment

02

Hasil penilaian dari Tim Asesor disampaikan kepada Kementerian PAN-RB secara online
The assessment results from the Assessor Team are submitted to the Ministry of PAN-RB online

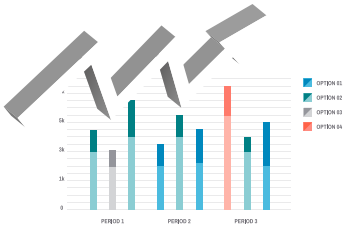


03



KemenPAN-RB menerima hasil self assessment, kemudian melakukan evaluasi dan verifikasi lapangan
The Ministry of PAN-RB receives the self-assessment result. Afterwards, the Ministry of PAN-RB does the evaluation and the field verification

04



SKOR RB Kementerian BUMN berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi KemenPAN-RB
Bureaucratic Reform Score of the Ministry of SOEs is based on the evaluation and verification results of the Ministry of PAN-RB

Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi, berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

The Component of Bureaucratic Reform Evaluation, based on the Ministerial Regulation of PAN-RB No. 14 of 2014 concerning Guidelines for Evaluation of Government Agency Bureaucratic Reform, is as follows:



Selain penilaian reformasi birokrasi secara keseluruhan, Kementerian PAN-RB juga dilakukan penilaian Zona Integritas untuk Unit Eselon I Kementerian BUMN. Penilaian ini merupakan hasil evaluasi dari *self assessment* penilaian reformasi birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Tim Asessor Kementerian BUMN. Berdasarkan hasil *self assessment* pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian BUMN, skor untuk tahun 2018 adalah 87,86. Adapun komponen penilaian Zona Integritas Unit Eselon I meliputi:

In addition to the overall assessment of bureaucratic reform, the Ministry of PAN-RB also carries out an Integrity Zone assessment for the Ministry of SOEs' First Echelon Unit. This assessment is the evaluation result of the bureaucratic reform self-assessment (PMPRB) conducted by the Ministry of SOEs' Assessor Team. Based on the self-assessment results on the implementation of bureaucratic reform at the Ministry of SOEs, the score for 2018 was 87.86. The assessment component of the First Echelon Unit Integrity Zone includes:



Komponen penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB terdiri atas komponen Proses dan Hasil dengan komposisi 60% Proses dan 40% Hasil. Dari hasil evaluasi tersebut, Kementerian BUMN mendapatkan nilai Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 sebesar 76,77%, terdiri atas 44,11% perbaikan proses internal dan 32,66% komponen hasil Reformasi Birokrasi.

The assessment component of bureaucratic reform carried out by the Ministry of PAN-RB consists of Process and Results components with a composition of 60% Process and 40% Results. Based on the evaluation results, in 2018 the Ministry of SOEs obtained the value of Bureaucratic Reform amounted to 76.77%, consisting of 44.11% internal process improvements and 32.66% results' weight of the Bureaucratic Reform.

NILAI REFORMASI BIROKRASI 2018 | 2018 BUREAUCRATIC REFORM VALUE

76,77 %

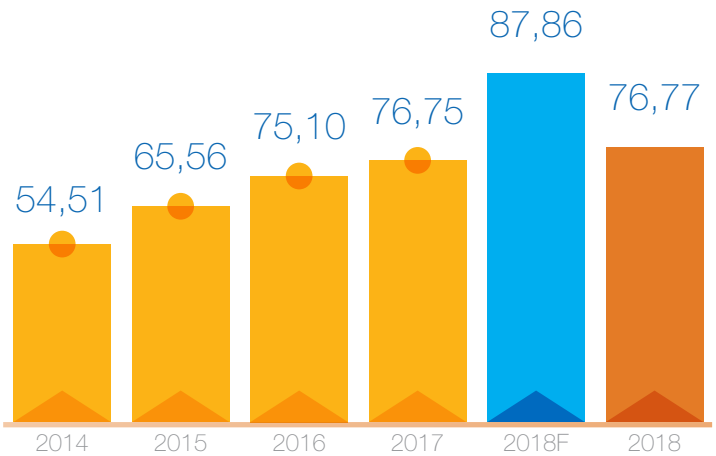
PROSES | PROCESS

44,11 %

HASIL | RESULTS

32,66 %

HASIL PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN BUMN (2014-2018)
Bureaucratic Reform Assessment Results of Ministry of SOEs (2014-2018)



Dari hasil penilain tersebut, Kementerian BUMN pada 2018 mendapatkan nilai proses 44,11% dari maksimal nilai 60%. Melalui hasilpenilaian ini, Kementerian BUMN berkomitmen untuk:

- Melaksanakan perbaikan proses birokrasi internal Kementerian BUMN, secara berkelanjutan mencakup 8 Area Perubahan:
  1. Manajemen Perubahan
  2. Pentaan Peraturan Perundang-Undangan
  3. Penetaan Kelembagaan
  4. Penataan Tata Laksana
  5. Penataan SDM Aparatur
  6. Penguatan Akuntabilitas
  7. Penguatan Pengawasan
  8. Peningkatan Pelayanan Publik

- Secara konsisten dalam 3 tahun terakhir, Kementerian BUMN telah melakukan perbaikan berkelanjutan terlihat dari peningkatan nilai pada setiap area perubahan

Sementara itu, Kementerian BUMN pada 2018 memperoleh nilai komponen hasil 32,66% dari nilai maksimal 40%. Dari hasil penilaian ini, terdapat beberapa poin, diantaranya:

- Komponen hasil sebagai keluaran proses RB meliputi:

  1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

  2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

  3. Kualitas Pelayanan Publik

- Sebagai hasil atas proses RB yang dilakukan, terdapat peningkatan Nilai SAKIP dan Indeks Persepsi Kualitas Layanan Kementerian BUMN

From the assessment results, the Ministry of SOEs in 2018 obtained a process value of 44.11% from the maximum value of 60%. Through these results, the Ministry of SOEs is committed to:

- *Improving the Ministry of SOEs' internal bureaucratic process, covering eight Areas of Change on an ongoing basis:*
  1. *Change Management*
  2. *Legislation Arrangement*
  3. *Institutional Arrangement*
  4. *Governance Arrangement*
  5. *HC Apparatus Arrangement*
  6. *Strengthening Accountability*
  7. *Strengthening Supervision*
  8. *Improving Public Services*

- *Consistently in the last three years, the Ministry of SOEs has made continuous improvements as seen from the increase in value in each area of change*

Meanwhile, the Ministry of SOEs in 2018 obtained a result results' weight of 32.66% from a maximum value of 40%. From the assessment results, there are several points, including:

- *Results' weight as output of the Bureaucratic Reform process include:*
  1. *Capacity and Accountability of Organizational Performance*
  2. *Government that is clean and free of corruption collusion nepotism*
  3. *Quality of Public Services*

- *As a result of the Bureaucratic Reform process, an increase occurred in SAKIP Value and Service Quality Perception Index of the Ministry of SOEs*

Organization Performance Management
Manajemen Kinerja Organisasi

Manajemen Kinerja Organisasi (MKO) di lingkungan Kementerian BUMN ialah rangkaian kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya (*resources*) yang dimiliki organisasi dalam rangka menciptakan keselarasan kinerja antar unit dan penyempurnaan maupun perbaikan organisasi.

Pada dasarnya Manajemen Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian BUMN telah dirumuskan dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri BUMN pada tahun 2016. Pada tahun 2018, telah dilakukan beberapa pengembangan peraturan Manajemen Kinerja Organisasi agar lebih efektif dan efisien. Lebih lanjut, sistem pengelolaan kinerja sudah berbasis IT. Hal ini dapat mempermudah proses perencanaan, pelaporan, dan pengawasan karena dapat mengurangi pengaruh *human error*.

Pada tahun 2018 Kementerian BUMN telah menyempurnakan mekanisme Pelaporan Kinerja dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi. Melalui dukungan teknologi informasi diharapkan *Performance Report* dapat dilaporkan lebih cepat, pengukuran kinerja dapat dilakukan lebih akurat, dan evaluasi oleh pimpinan dapat dilakukan lebih tepat.

➤ MANAJEMEN KINERJA BERBASIS ELEKTRONIK

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berpedoman kepada kedua hal tersebut, Kementerian dan Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Renstra selanjutnya dijabarkan setiap tahun secara lebih rinci dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Selain itu, Renstra juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga. Setiap tahunnya, RPJMN dijabarkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara itu, Kementerian dan Lembaga menyusun RKT dan Renja disusun setiap tahun sekali berdasarkan kinerja dan anggaran dalam Renstra dan mendetilkannya dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

RKA tersebut akan menjadi dasar penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada akhir tahun. Maksimal 1 bulan setelah DIPA telah ditetapkan, maka pejabat di lingkungan Kementerian dan Lembaga wajib menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang berisi target-target dalam satu tahun yang ditandatangani oleh pejabat dan pimpinannya. Pada akhir periode, Kementerian dan Lembaga menyusun

Organization Performance Management (MKO) in the Ministry of SOEs is a series of activities to utilize and manage the organization's resources that aims to create harmony between units and to make improvement to the organization.

Basically, the Ministry of SOEs's Organization Performance Management has been formulated and stipulated in the SOEs Ministerial Regulation in 2016. In 2018, several regulations for Organization Performance Management have been developed to be more effective and efficient. Furthermore, the performance management system has been IT based. This development can facilitate the planning, reporting and supervision process as minimizing the human error.

In 2018, the Ministry of SOEs improved the Performance Reporting mechanism using the Information Technology System. The information technology support is expected to make the Performance Report can be reported faster, the performance measurement can be done more accurate, and the assessment by leaders can be done more precise.

➤ *ELECTRONIC BASED PERFORMANCE MANAGEMENT*

In order to achieve the vision and mission of the Government of the Republic of Indonesia, the Government has drafted the Government's Long Term Development Plan (RPJPN) and the National Medium Term Development Plan (RPJMN). Guided by these two plans, The Ministries and Institutions develop Strategic Plans (Renstra) as the elaborations of RPJMN. The next Renstra is elaborated annually in the Annual Performance Plan (RKT). In addition, the Strategic Plan is also used as a guideline in the preparation of Ministries/Institutions Work Plans. Every year, RPJMN is outlined in the Government Work Plan (RKP). Meanwhile, Ministries and Institutions develop RKTs and Renja that are arranged every year based on performance and budget in the Strategic Plan. Afterwards, Ministries and Institutions elaborate them with Work and Budget Plans (RKA).

RKA will be the basis for the issuance of the Budget Implementation List (DIPA) at the end of the year. A maximum of one month after DIPA has been determined, the officials within the Ministry and Institutions are required to prepare a Performance Agreement (PK) that contains targets within one year signed by officials and their leaders. At the end of the period, Ministries and Institutions arrange a Performance

Laporan Kinerja (LKj) berdasarkan PK yang ditetapkan oleh unit kerja.

Report (LKJ) based on PK determined by the work unit.

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, disebut Akuntabilitas Kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

The manifestation of the government agency obligation to account for the success/failure of the Programs and Activities implementation mandated by stakeholders in order to achieve the organization's mission measurably with the performance targets/set targets through periodic government agency performance reports is called Performance Accountability. Government Agency Performance Accountability System, hereinafter abbreviated as SAKIP, is a systematic series of various activities, tools, and procedures designed for setting and measuring, data collection, classification, reporting and performance reporting on government agencies, for accountability and performance improvement in the government agency.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publikkepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Strengthening performance accountability is one of the programs implemented in bureaucratic reform to create clean and free government from any corruption collusion nepotism, increase the quality of public services to the community, and increase the capacity and accountability of bureaucratic performance. Strengthening accountability is carried out by implementing the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) as referred to in Presidential Regulation No. 29 of 2014 concerning SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana Kementerian BUMN mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi dan terobosan implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Kementerian BUMN untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN.

To find out the extent to which the Ministry of SOEs implements The Government Agency Performance Accountability System (SAKIP), as well as concurrently encourage the increase in the performance of government agency, it is necessary to conduct an evaluation and breakthrough in the implementation of SAKIP. This evaluation is expected to be able to encourage the Ministry of SOEs to consistently improve the implementation of SAKIP and manifest the performance achievements (results) of its institution as mandated in RPJMN.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Evaluation of SAKIP Implementation

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Kementerian BUMN. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat

Evaluation of the SAKIP implementation is a systematic analysis activity, value giving, attributes, appreciation, and identification of issues, as well as providing solutions to the issues for increasing the accountability and performance of the Ministry of SOEs. In various cases, evaluation is carried out through monitoring the existing system, but sometimes the evaluation cannot be carried out only by using information

dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada instansi. Data dari luar Kementerian BUMN juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan.

Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/ rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

SiManis Makin Baik

Di lingkungan Kementerian BUMN, seluruh aktivitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja dapat diakses melalui aplikasi SiManis dalam menu Makin Baik. Sistem Manajemen Informasi atau SiManis merupakan portal yang memudahkan Kementerian BUMN dalam pengelolaan administrasi dan data kepegawaian, manajemen kinerja organisasi dan individu, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pengelolaan organisasi dan proses bisnis internal lainnya.

Dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian BUMN, SiManis menjadi alat untuk penguatan

generated by the information system in the agency. Data outside the Ministry of SOEs is also substantial as an analysis material. Evaluation can be done by not having to depend on the completeness and accuracy of existing data. Sufficient information can be used to support the arguments regarding the need for improvement.

The use of data for evaluation prioritizes the speed of obtaining data and its usefulness. Thus, the evaluation results will be more quickly obtained and corrective actions can be carried out immediately. Evaluation focuses more on data collection and analysis to build arguments for formulating suggestions/recommendations for improvement. The evaluation becomes more persuasive and analytical by considering the possible application.

The evaluation purpose of SAKIP implementation can be determined annually in accordance with the determined evaluation policy. The goals and objectives of the evaluation are highly dependent on the users of evaluation results and the policies of the leadership of the agency/work unit that is authorized to conduct the evaluation, taking into account the various constraints that exist.

In general, the purpose of evaluating the implementation of SAKIP is to:

1. *Obtain information about SAKIP implementation.*
2. *Assess the level of SAKIP implementation;*
3. *Provide suggestions to improve SAKIP implementation.*
4. *Monitor follow-up of recommendations on the results of previous period evaluations.*

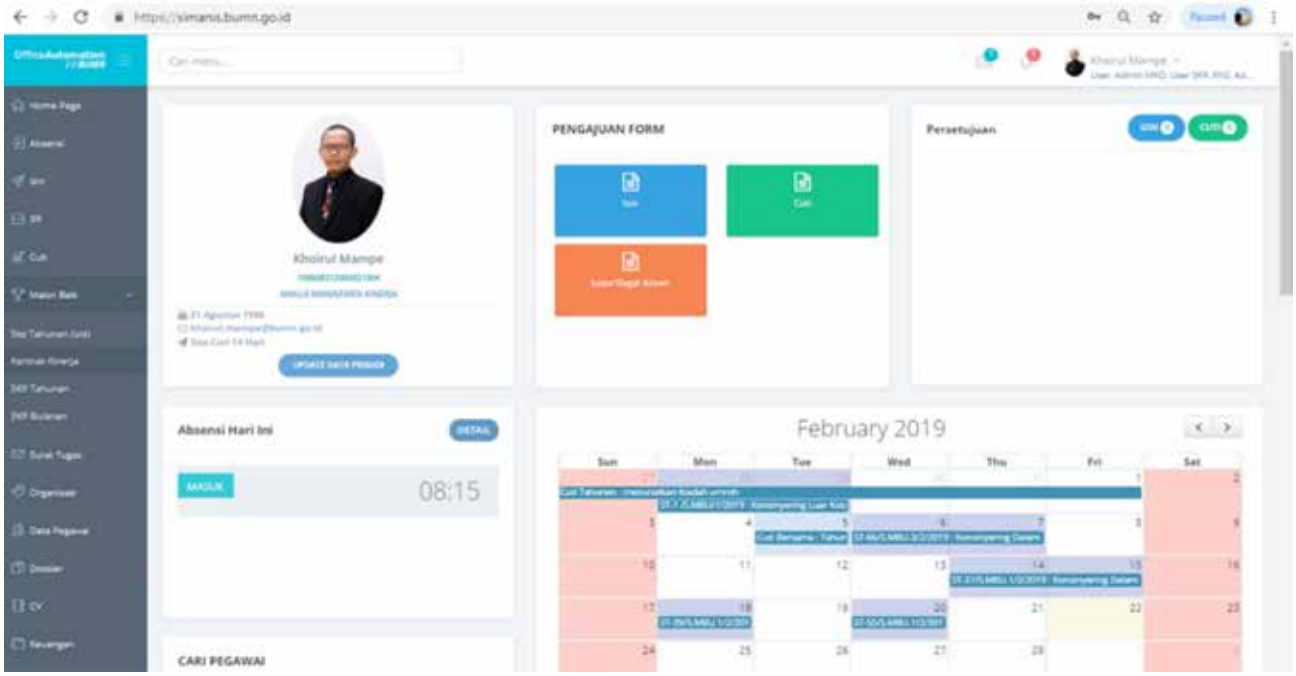
SiManis Makin Baik

In the Ministry of SOEs, all performance planning activities, performance measurement, performance evaluation, and performance achievements can be accessed through SiManis application in Makin Baik menu. The Information Management System (SiManis) is a portal that facilitates the Ministry of SOEs in managing administration and staffing data, management of organizational and individual performance, accountability for financial management, organization management and other internal business processes.

In managing performance accountability in the Ministry of SOEs, SiManis is a tool for strengthening the implementation

pelaksanaan manajemen kinerja individu dan organisasi, dimana di dalamnya terdapat aplikasi Makin Baik (Manajemen Kinerja Berbasis Elektronik).

of performance management for individuals and organizations, which inside there is Makin Baik application (Electronic Based Performance Management).



Makin Baik ini menjadi solusi dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian BUMN.

Makin Baik becomes a solution in implementing performance accountability in the Ministry of SOEs.

Dengan adanya menu Makin Baik ini IKU Kementerian BUMN dapat dipastikan turun dari IKU Renstra sampai dengan level individu di lingkungan Kementerian BUMN. Alignment antara IKU dari Renstra sampai dengan level individu selama ini menjadi kendala di hampir semua Kementerian dan Lembaga, namun dengan adanya Makin Baik, Kementerian BUMN dapat memastikan bahwa IKU di dalam Renstra Kementerian BUMN telah align dan dilaksanakan oleh unit kerja eselon I yang sesuai, Eselon II yang melaksanakan, Eselon III yang membawahi, Eselon IV yang bertanggung jawab, bahkan sampai dengan level pelaksana di lapangan.

Through the presence of Makin Baik Menu, Key Performance Indicators (KPI) of the Ministry of SOEs can be ascertained to decrease from Renstra KPI to the individual level within the Ministry of SOEs. Alignment between KPI from Renstra to individual level has been an obstacle in almost all Ministries and Institution. However, with the presence of Makin Baik, the Ministry of SOEs can ensure that KPI in the Ministry of SOEs' Strategic Plan aligns and is implemented by the appropriate First Echelon work unit in which Second Echelon unit implements the task, Third Echelon unit is in charge on the task, and Fourth Echelon unit is responsible for the task, even up to the level of executor in the field.

Target kinerja dan realisasinya disusun sedemikian rupa sehingga seluruh pegawai menjadi lebih mudah dan cepat dalam membuat target kinerja, realisasi kinerja sampai dengan pelaporan kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi. Penyusunan dilakukan untuk target kinerja tahunan maupun bulanan, realisasi bulanan maupun tahunan dan pelaporan bulanan maupun pelaporan tahunan.

The performance targets and their realization are arranged in the manner that all employees become easier and faster in reaching the performance targets, performance realization up to performance reporting, both individual performance and organizational performance. Compilation is carried out annually and monthly for performance targets, realization and reporting.

Makin Baik disusun berdasarkan hasil kolaborasi antara peraturan di Pemerintahan yang mengatur mengenai akuntabilitas kinerja, dan penilaian kinerja di korporasi. Untuk memperoleh menghasilkan Makin Baik, Kementerian BUMN melakukan benchmarking pelaksanaan manajemen kinerja ke instansi Pemerintah yang memiliki nilai SAKIP tertinggi, kepada BUMN yang memiliki nilai *Good Corporate Governance* (GCG) yang terbaik, mengundang narasumber profesional, dan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD). Hal ini dilakukan semata untuk memperoleh model manajemen kinerja terbaik, mudah dipakai namun tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Target kinerja jabatan/individu ditentukan oleh pengelola manajemen kinerja organisasi. Dalam hal ini pengelola manajemen kinerja organisasi mereviu dan memastikan bahwa target kinerja tahunan ataupun bulanan yang disusun pegawai telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat di dalam informasi jabatan dan telah align dengan IKU unit kerja sampai dengan IKU-IKU yang tercantum di dalam Rensrta Unit Kerja Eselon I dan terutama IKU-IKU di dalam Renstra Kementerian BUMN.

Bank IKU

Pengelola manajemen kinerja organisasi mengidentifikasi dan menyusun Bank IKU yang harus dicapai serta cara menghitung capaian IKU tersebut pada setiap nama jabatan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Tugas dan fungsi di dalam Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja;
2. Target IKU Renstra unit kerja Eselon II
3. Target IKU Renstra unit kerja Eselon I;
4. Target IKU Renstra Kementerian BUMN;
5. Ketentuan yang mengatur mengenai manajemen kinerja;
6. *Best practice* yang dijalankan oleh perusahaan besar dan instansi Pemerintah;
7. Wawancara terhadap perwakilan pegawai yang menjabat pada nama jabatan yang sama/serupa;
8. Informasi eksternal lainnya.

Setelah memiliki bank IKU dan cara perhitungannya, maka para pegawai tidak perlu lagi membuat target-target IKU tahunan dan bulanan. Dalam menyusun target kinerja tahunan dan bulanan, mereka hanya cukup memilih data dari Bank IKU tersebut yang telah disusun dan disetujui oleh pengelola manajemen kinerja organisasi.

Makin Baik is arranged based on the collaboration results between regulations in the Government that regulate performance accountability, and performance assessment in the corporation. To implement Makin Baik, the Ministry of SOEs conducts benchmarking of performance management to Government agency that have the highest SAKIP value, to SOEs that have the best value of Good Corporate Governance (GCG), invite professional speakers, and hold Focus Group Discussion (FGD). These are carried out only to obtain the best performance management model that is user-friendly but still in accordance with the applicable regulations.

Position/individual performance targets are determined by the organization's performance management manager. In this case, the organization's performance management manager reviews and ensures that the annual or monthly performance targets arranged by the employees are in accordance with the tasks and functions contained in the job information aligned with the work units KPI up to the KPIs listed in the Rensrta of First Echelon Work Unit and especially KPIs in the Ministry of SOEs' Renstra.

KPI Bank

Organizational performance management managers identify and compile the KPI Bank that must be achieved and how to calculate the achievement of KPI on each job position using several approaches, namely:

1. *Tasks and functions in the Ministerial Regulation concerning Organization and Work Procedure;*
2. *KPI Target of Strategic Plan of Second Echelon work unit*
3. *KPI Target of Strategic Plan of First Echelon work unit;*
4. *KPI Target of Strategic Plan Ministry of SOEs;*
5. *Provisions governing performance management;*
6. *Best practice run by large companies and Government agencies;*
7. *Interviews with representatives of employees who hold positions in the same/similar position;*
8. *Other external information.*

After having KPI Bank and how to calculate it, the employees no longer need to make annual and monthly KPI targets. In arranging annual and monthly performance targets, they only have to choose data from KPI Bank that has been compiled and approved by the organization's performance management manager.

Untuk target kinerja tahunan, masing-masing pegawai memiliki 5 target, dimana 2 IKU target tahunan adalah *target mandatory* dari informasi jabatan dan Renstra, 1 IKU dipilihkan oleh atasannya, 1 IKU dipilih sendiri oleh pegawai yang bersangkutan dan 1 IKU akuntabilitsa kinerja. IKU akuntabilitas kinerja merupakan rata-rata nilai capaian kinerja pegawai setiap bulan. Capaian kinerja bulanan pegawai akan mempengaruhi capaian kinerja tahunan. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa para pegawai menjalankan aktivitas sesuai dengan rencana dan *timeline* yang telah ditentukan.

Sementara itu, target kinerja bulanan setiap pegawai dengan jumlah minimal 1 *output* dalam satu bulan. Pegawai tidak diperkenankan mengosongkan target kinerja dalam bulan berjalan, karena hal ini akan berpengaruh terhadap perhitungan tunjangan kinerja pegawai setiap bulannya.

Target kinerja pegawai baik bulanan dan tahunan harus memperoleh *approval* dari atasan masing-masing. Setelah pegawai mengisi target kinerja, maka atasan mereka akan memperoleh notifikasi agar melakukan *approval* atas target kinerja yang telah dibuat oleh bawahannya. Bawahan tidak akan bisa mengisi realisasi capaian kinerja, ketika target kinerja mereka belum di *approve* oleh atasan mereka.

Dalam penyusunan target kinerja, seorang atasan dapat meng-claim target kinerja salah satu atau seluruh target bawahannya. Apabila atasan melakukan *claim target* bawahan, dan pada saat target bawahan tersebut telah tercapai, maka secara otomatis target kinerja atasan tersebut juga akan tercapai. Hal ini tentunya akan memotong rangkaian aktivitas serupa (*upload* dokumen yang sama). Target kinerja dan realisasi kinerja pegawai dapat diklaim oleh pegawai lain dengan hubungan vertikal dalam struktur organisasi.

Target Kinerja Pegawai Makin Baik

Dengan adanya Makin Baik, terbukti bahwa kepedulian pegawai Kementerian BUMN terhadap penyusunan target kinerja meningkat melebihi ekspektasi. Sebelum tahun 2018, jumlah pegawai yang menyusun target kinerja tidak lebih dari 50%, namun ketika Makin Baik ini diluncurkan, jumlah pegawai yang menyusun target kinerja adalah 100%. Salah satu faktor yang membuat para pegawai menggunakan Makin Baik adalah fiturnya yang sederhana dan mudah dipakai. Adanya keterkaitan antara pengisian Makin Baik dengan tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai juga mempengaruhi hal ini.

For annual performance targets, each employee has five targets, of which two KPI annual targets are mandatory targets from position information and Strategic Plan, one KPI is chosen by his superior, one KPI is chosen by the relevant employee and one KPI is accountable for performance. Performance Accountability KPI is the average value of employee performance achievements every month. Achievement of employee monthly performance will affect annual performance achievements. It is expected that the employees carry out activities in accordance with the predetermined plan and timeline.

Meanwhile, the monthly performance target of each employee is a minimum of one output in one month. Employees are not allowed to vacate performance targets in the current month as it will affect the calculation of employee performance benefits each month.

Employee and monthly performance targets must obtain approval from their respective superiors. After employees fill the performance target, their supervisors will get a notification to approve the performance targets made by their staffs. The staffs will not be able to fill the realization of performance achievements when their performance targets have not been approved by their supervisors.

In preparing performance targets, supervisors can claim the performance target of one or all of their staffs' targets. If the supervisors claim the staffs' targets and when the staffs' targets have been achieved, the supervisors' performance targets will also be achieved automatically. Certainly it will cut a series of similar activities (upload the same document). Performance targets and realization of employee performance can be claimed by other employees with a vertical relationship in the organizational structure.

Better Employee Performance Target

With the presence of Makin Baik, it is proven that the employees concern of the Ministry of SOEs towards the arrangement of performance targets has exceeded expectations. Prior to 2018, total employees who compiled a performance target did not exceed 50%. However, when Makin Baik was launched, total employees who compiled the performance target was 100%. One factor that makes employees use Makin Baik is its simple and easy to use features. The relations between filling in Makin Baik and the performance allowances received by employees also affects this result.

Tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian BUMN tidak hanya dihitung berdasarkan presensi dan hukuman disiplin pegawai, melainkan juga dipengaruhi oleh capaian kinerja bulanan pegawai dan ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja pegawai. Apabila pegawai tidak mencapai kinerja dalam bulan tertentu, maka tukin pegawai tersebut akan dipotong (*punishment*). Demikian juga, apabila terdapat pegawai yang tidak menyampaikan realisasi bulanan, maka pembayaran tunjangan kinerja mereka akan ditunda sampai dengan pegawai yang bersangkutan menyampaikan realisasi capaian kinerjanya.

The employees' performance allowance in the Ministry of SOEs are not only calculated based on the presence and punishment of employee discipline, but are also influenced by the achievement of monthly employee performance and the timeliness of reporting employee performance achievements. If the employee does not achieve performance in a particular month, the employee allowance will be cut (punishment). Likewise, if there are employees who do not submit monthly realization, the payment of their performance benefits will be postponed until the employees submit the realization of performance achievements.

Capaian realisasi target bulanan yang di upload ke dalam Makin Baik juga memiliki kriteria, yaitu merupakan dokumen akhir dari sebuah proses. Dokumen tersebut bukan hanya file mentah, melainkan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Achievement of the monthly targets realization uploaded to Makin Baik also has criteria, which is the final document of a process. The document is not only a raw file but also authorized by an authorized official.

Makin Baik ini berisi pula tentang daftar penilaian prestasi kerja (DP3) dan nilai prestasi individu (NPI). NPI ini dipengaruhi oleh nilai DP3, tingkat kerapian tempat kerja, nilai keaktifan dalam berbagi gagasan di SiBagas dan laporan penugasan lainnya. Makin Baik merupakan kolaborasi dan jawaban atas kebutuhan Kementerian BUMN dalam melakukan manajemen kinerja yang lebih baik.

Makin Baik includes the work performance assessment list (DP3) and individual achievement scores (NPI). This balance of payments is influenced by the value of DP3, the level of workplace neatness, the value of activeness in sharing ideas in SiBagas and other assignment reports. Makin Baik is a collaboration and becomes an answer to the Ministry of SOEs' needs in conducting better performance management.

Makin Baik adalah aplikasi IT untuk mempermudah proses bisnis manajemen kinerja baik dari perencanaan, pelaporan dan evaluasi. Penggunaan aplikasi IT adalah suatu keharusan mengingat di Kementerian BUMN memiliki tidak kurang dari 142 fungsi yang berbeda-beda untuk masingmasing individu pegawai dan tidak kurang dari 2.500 jenis indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur manajemen kinerja seluruh pegawai Kementerian BUMN. Jumlah tersebut dapat meningkat sesuai dengan sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai oleh Kementerian BUMN kedepannya.

Makin Baik is an IT application to simplify business process management performance from planning, reporting and evaluation. The use of IT application is a must considering that the Ministry of SOEs has no less than 142 different functions for each individual employee and no less than 2,500 types of performance indicators used to measure the performance management of all the Ministry of SOEs' employees. Those can increase according to the goals and policies that the Ministry of SOEs' aims to achieve in the future.

Human Capital Management
Pengelolaan SDM

Kementerian BUMN meyakini bahwa pengelolaan *Human Capital* (HC) yang terkoordinasi dengan baik dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Memiliki HC yang andal, loyal dan berkompeten merupakan modal utama bagi Kementerian BUMN guna meraih visi, misi dan kinerja yang berkelanjutan. Integrasi antara *HC Management* dengan strategi organisasi dapat dicapai dengan memiliki sistem pengelolaan HC yang memastikan bahwa Kementerian BUMN memiliki HC berkualitas, dengan mengembangkan pelatihan yang berfokus pada pembelajaran organisasi dan manajemen.

Ministry of SOEs believes that well-coordinated Human Capital (HC) management can support organization's objective achievements. Having superior, loyal and competent HC is stimulus for Ministry of SOEs to achieve sustainable vision, mission, and performance. Integration between HC Management with organization strategy can be achieved by having HC management system that ensures Ministry of SOEs have qualified HC, by developing training focusing on organization and management learning.

Pengelolaan SDM Kementerian BUMN dilaksanakan oleh Bagian Manajemen SDM – Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi yang mempunyai tugas pengembangan, penataan, dan pelaksanaan administrasi SDM aparatur, administrasi jabatan fungsional, mutasi, dan kesejahteraan pegawai Kementerian BUMN

HC Management of Ministry of SOEs is conducted by HC Management Section – Planning, HC, and Organization Bureau that are assigned to develop, govern, and implement administration of HC personnel, administration of functional positions, transfers and welfare of employees of the Ministry of SOEs.

Bagian Manajemen SDM menyelenggarakan fungsi:

HC Management Section implements functions as follow:

1. Penyiapan perencanaan dan pelaksanaan rekrutmen SDM Aparatur;
2. Penyiapan perencanaan dan manajemen jabatan fungsional di lingkungan Kementerian BUMN;
3. Penyiapan seleksi jabatan tinggi negara, serta penyelesaian usulan mutasi pejabat di lingkungan Kementerian BUMN;
4. Penyiapan mutasi jabatan pelaksana, kesejahteraan, disiplin, serta tata usaha dan administrasi umum SDM aparatur;
5. Penyiapan penataan sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN sebagai calon Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maupun perangkat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
6. Penyiapan koordinasi pemberian tanda jasa/kehormatan serta piagam penghargaan pensiun;
7. Penyiapan koordinasi pemantauan dan evaluasi manajemen kinerja individu sumber daya manusia aparatur;
8. Penyiapan koordinasi pelaksanaan *Assessment Center* sumber daya manusia aparatur; dan

1. *Preparation of planning and implementation of HC apparatus recruitment;*
2. *Preparation of planning and management of functional positions within the Ministry of SOEs;*
3. *Preparation of state high-level office selection, as well as settlement of proposals for transfer of officials in the Ministry of SOEs;*
4. *Preparation of mutations of executive positions, welfare, discipline, and administration and general administration of HC personnel;*
5. *Preparation of structuring the human capital of the Ministry of SOEs apparatus as candidates for Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board as well as the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs;*
6. *Preparation of coordination of the awarding of services/ honors and charter of pension;*
7. *Preparation of monitoring condition and evaluation of individual performance management of the human capital of the apparatus;*
8. *Preparing the coordination of the implementation of the appraisal human capital Assessment Center; and*

9. Penyiapan koordinasi perencanaan, analisis kebutuhan, serta pelaksanaan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur.

Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi memiliki peran strategis untuk meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Kementerian BUMN. Penigkatan Peningkatan kapasitas ini tentunya harus selaras dengan visi dan misi Kementerian BUMN. Peningkatan kapasitas ini salah satunya dilakukan melalui pengadaan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi dimaknai sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigm dan tata kelola pemerintahan, yang mengarah pada organisasi (kelembagaan), tatalaksana, SDM, pelayanan, akuntabilitas dan perundang-undangan serta pola pikir.

➤ PENGELOLAAN SDM SEPANJANG TAHUN 2018

Pengelolaan SDM sepanjang Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan survei tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan SDM

   Tingkat kepuasan pegawai Kementerian BUMN terhadap layanan SDM dinilai melalui survei kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian BUMN. Survei telah disampaikan kepada pegawai pada tanggal 7 Januari 2019 melalui email, sinadine dan *whatsapp group*. Hasil survey menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan SDM sebesar 79,8%.

   Dari hasil survei tersebut, dipandang perlu untuk meningkatkan layanan kepada para pegawai, utamanya pada ketepatan waktu dalam pembayaran hak-hak kepegawaian yang menjadi komponen dengan nilai terkecil pada hasil survei.

2. Program pengembangan SDM

   Kegiatan pengembangan SDM yang dilaksanakan di tahun 2018 terdiri dari:

   - Inhouse Training

     a. Pelatihan Hukum Bisnis dan Hukum Pasar Modal yang ditujukan untuk Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana.

9. Preparation of planning coordination, requirements analysis, and implementation of the development and training of apparatus human capital.

The Planning, HC and Organization Bureau has a strategic role to increase the capacity of human capital within the Ministry of SOEs. Increasing this capacity building must certainly be in line with the vision and mission of the Ministry of SOEs. One of means to increase capacity is through the procurement of bureaucratic reforms. Bureaucratic reform is interpreted as a major change in paradigm and governance, which leads to organizations (institutions), management, HC, services, accountability and legislation and mindset.

➤ *HUMAN CAPITAL MANAGEMENT THROUGHOUT 2018*

Human Capital (HC) management throughout 2018 includes the following:

1. Implementation of employee satisfaction level surveys on HC services

The level of satisfaction of employees of the Ministry of SOEs towards HC services was assessed through surveys to all employees in the Ministry of SOEs. The survey was submitted to employees on January 7, 2019 via email, sinadine and whatsapp group. The survey results show that the level of employee satisfaction with Human Capital services is 79.8%.

From the results of the survey, it was deemed necessary to improve services to employees, especially in the timeliness of payment of personnel rights which became the component with the smallest value in the survey results.

2. HC development program

Human Capital development activities carried out in 2018 consist of:

- *Inhouse Training*

  a. Business Law Training and Capital Market Law aimed at Administrator, Supervisor and Implementing Officials.

b. Pelatihan *Legal for Non Legal* yang ditujukan untuk Pejabat Pengawas.

c. Pelatihan *Developing Infographics* yang ditujukan untuk Pejabat Pengawas dan Pelaksana.

d. Pelatihan *Microsoft Excel* yang ditujukan untuk Pejabat Pengawas dan Pelaksana.

- Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, seperti:

a. *Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices: Executive Education Directorship* Program dengan peserta lintas jabatan.
b. *Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices Leaders Talk: Winning Strategy "Leading Strategic Growth & Change"* dengan peserta lintas jabatan.
c. *Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices: Corporate Culture & Leadership Journey* dengan peserta lintas jabatan.
d. *Training of Trainer* Substansi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
e. *Training International Trade* di BNI Corporate University.
f. *Leadership Program* yang ditujukan untuk seluruh pejabat Eselon III, IV dan Pelaksana sebanyak 5 batch.
g. *Coaching & Empowering Skill*.
h. *Problem Solving & Decision Making*
i. *Self Reflection to Boost Motivation*
j. *Business Strategy.*
k. *Business Modeling.*
l. *Risk Management Seminar*.
m. *Legal for Non Legal.*
n. Hukum Bisnis dan Pasar Modal.
o. *Legal Drafting.*
p. Persiapan Pensiun.
q. Manajemen Proyek.
r. *Infographic for PPT*.
s. Pelatihan *Ms Excel*.
t. Program Induksi 25 orang CPNS.
u. Pelaksanaan Diklat Prajabatan untuk 25 orang CPNS.
v. *Admin Support Excellence*.

- Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan VII dan VIII Tahun 2018 On Campus II kepada 25 CPNS yang diangkat pada Desember 2017.

b. Legal for Non-Legal Training aimed at Supervisory Officers.

c. Training on Developing Infographics aimed at Supervisors and Executives.

d. Microsoft Excel training aimed at Supervisor and Implementing Officials.

- *Trainings held by external parties, such as:*

a. Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices: Executive Education Directorship Program with cross-office participants.
b. Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices Leaders Talk: Winning Strategy "Leading Strategic Growth & Change" with cross-position participants.
c. Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices: Corporate Culture & Leadership Journey with cross-office participants.
d. Training of Trainer for Substance of Internal Control over Central Government Financial Reporting.
e. International Trade Training at BNI Corporate University.
f. The Leadership Program that is intended for all Echelon III, IV and Implementing officials in 5 batches.
g. Coaching & Empowering Skill.
h. Problem Solving & Decision Making
i. Self Reflection to Boost Motivation
j. Business Strategy.
k. Business Modeling.
l. Risk Management Seminar.
m. Legal for Non-Legal.
n. Business and Capital Market Law.
o. Legal Drafting.
p. Pension Preparation.
q. Project management.
r. Infographic for PPT.
s. Ms Excel Training.
t. Induction Program 25 people CPNS.
u. Prajabatan Training Implementation for 25 CPNS.
v. Admin Support Excellence.

- *CPNS Basic Training Group III Generation VII and VIII of 2018 On Campus II to 25 Candidates for civil servants appointed in December 2017.*

- Program sertifikasi

  a. Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terbagi atas 3 *batch* dan diikuti total 55 orang.

  b. *Certified Risk Management Professional* yang diikuti oleh 17 orang.

  c. *Certified Human Capital Management* dengan peserta 4 orang.

- *Workshop*

  a. *Directorship Program*
  b. *Optimizing the Future Role of Corporate Secretary*

3. *Assessment* Seluruh Pegawai Kementerian BUMN

   Pada bulan September 2018, Kementerian BUMN melakukan asesmen kompetensi terhadap pegawai mulai dari Pelaksana sampai dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Dari hasil asesmen tersebut, diketahui bahwa rata-rata kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian BUMN berada pada skala 4, yaitu tingkat kesenjangan kompetensi rendah.

   Skala tersebut menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Kementerian BUMN sudah baik relative setara. Program pengembangan lanjutan diperlukan untuk menutup kesenjangan kompetensi yang masih ada di beberapa area, salah satunya pada kompetensi *customer focus*.

   Skala pengukuran dimaksud mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara No 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dimana yang dimaksud dengan kesenjangan kompetensi rendah yaitu telah memenuhi ¾ dari seluruh indikator perilaku kompetensi jabatannya.

4. *Medical Check Up* Bagi Seluruh Pegawai Kementerian BUMN

   Medical Check Up dilaksanakan secara *in house* sebagai bentuk layanan kesejahteraan pegawai untuk kesehatan jasmani.

- *Certification program*

  a. *Government Procurement of Goods/Services Certification divided into 3 batches and participated in by a total of 55 people.*

  b. *Certified Risk Management Professional attended by 17 people.*

  c. *Certified Human Capital Management with 4 participants.*

- *Workshop*

  a. *Directorship Program*
  b. *Optimizing the Future Role of Corporate Secretary*

3. *Assessment of All Employees of the Ministry of SOEs*

   In September 2018, the Ministry of SOEs carried out competency assessments of employees starting from the Implementer to the Primary Executive Officer. From the assessment results, it is known that the average competency of employees in the Ministry of SOEs is on a scale of 4, which is the level of low competency gap.

   The scale shows that the competencies possessed by the Ministry of SOEs employees are relatively equal. Further development programs are needed to close competency gaps that still exist in several areas, one of which is customer focus competencies.

   The measurement scale refers to the Regulation of the State Administration Agency No. 10 of 2018 concerning Competence Development of Civil Servants, which is meant by a low competency gap that is fulfilling ¾ of all position competency behavior indicators.

4. *Medical Check Up for all employees of the Ministry of SOEs*

   Medical Check Up is carried out in house as a form of employee welfare service for physical health.

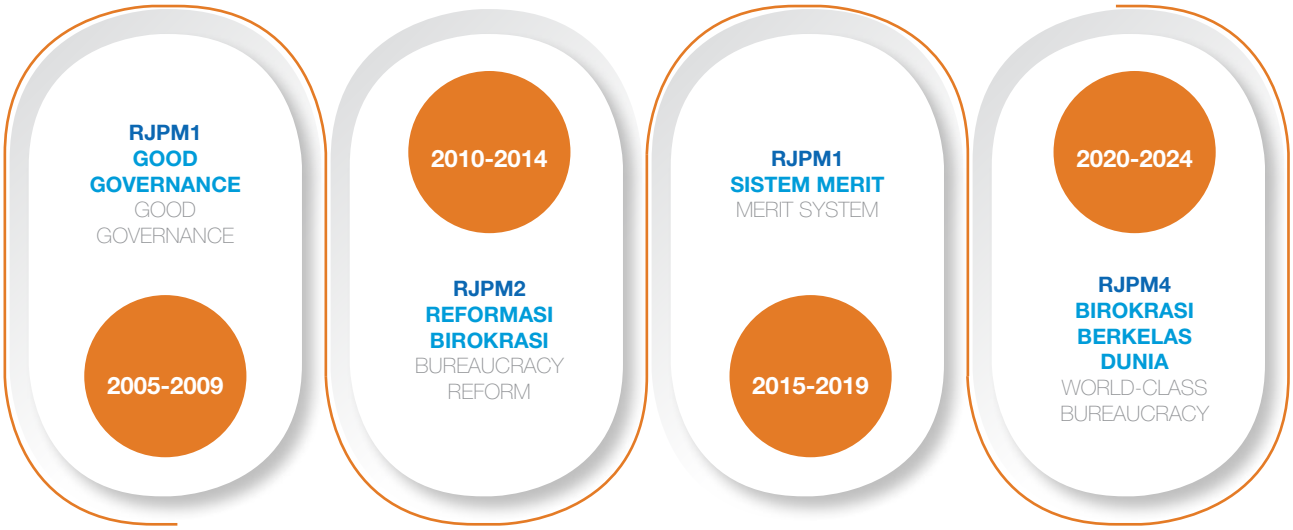
➤ PROGRAM UNGGULAN SDM 2018

Hingga pada tahun 2018 Bagian SDM pada Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi Kementerian BUMN telah merancang *Grand Design* ASN pada Kementerian BUMN untuk tahun 2019-2024. Berawal dari garis besar pembangunan ASN yang termaktub pada RPJM 1 (2005-2009) dengan berfokus pada penerapan *Good Governance*, RPJM 2 (2010-2014) reformasi birokrasi, RPJM 3 dengan penerapan sistem merit, dimana kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.

➤ *HC SUPERIOR PROGRAM 2018*

Until 2018, the HC Department at the Planning, HC, and Organization of the Ministry of SOEs has designed the Grand Design ASN at the Ministry of SOEs for 2019-2024. It starts from the outline of the ASN development as outlined in RPJM 1 (2005-2009) by focusing on the implementation of Good Governance, RPJM 2 (2010-2014) bureaucratic reform, RPJM 3 with the implementation of merit systems, where ASN policies and management are based on qualifications, competencies and performance fairly and fairly without discrimination.

Roadmap Pembangunan ASN
ASN Development Roadmap



Tujuannya dengan adanya sistem merit untuk tahun 2015-2019 adalah:

1. Merekrut ASN yang professional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya;
2. Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak;
3. Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat;
4. Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan prinsip merit (nepotisme dan primordialisme).

The objectives of merit system for 2015-2019:

1. *Recruiting ASN who are professional and have integrity and placing them in positions of government bureaucracy according to their competence;*
2. *Maintaining ASN through providing fair and decent compensation;*
3. *Developing the ability of ASN through guidance and training;*
4. *Protecting ASN careers from politicization and policies that contradict merit principles (nepotism and primordialism).*

Kemudian, dalam menyongsong RPJM 4 (2020-2024), pembangunan ASN kementerian BUMN akan menuju Birokrasi berkelas dunia. *Roadmap* Pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi bagian pada *Roadmap* reformasi birokrasi dimana salah satunya adanya penataan sistem manajemen SDM dengan suksesinya adalah adanya ASN yang profesional. Adapun indikator profesionalitas ASN diukur melalui indeks profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit.

Dalam pengukuran Profesionalitas ASN, seperti yang sudah diberitahukan menggunakan indeks profesionalitas dan Indeks Sistem Merit. Pada pengukuran Indeks Profesionalitas yang menjadi instansi pengawasnya adalah Badan Kepegawaian nasional. Terdapat 4 (empat) indikator penilaian yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

a. Kualifikasi
   Indikator ini menitikberatkan pada tingkat pendidikan dan latihan yang sudah dienyam oleh Individu apakah telah sesuai dengan pelaksanaan tugas jabatannya

b. Kompetensi
   Indikator ini bertitiktumpukan pada pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang ada pada individu yang bertugas di suatu unit

c. Kinerja
   Adapun menjadi titik tumpuannya adalah dengan adanya sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dibuat secara daring (*online*) baik dilakukan per bulan dengan SKP bulanan, atapun pertahun dengan SKP tahunan.

d. Disiplin
   Pada data organisasi yang sudah modern, seperti sistem absen dan administrasi pelanggaran disiplin yang dilakukan secara *proxy*, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggarannya semakin rendah.

Later on, in welcoming the RPJM 4 (2020-2024), the development of the ASN of the Ministry of SOEs will lead to world-class bureaucracy. The Roadmap for the Development of the State Civil Apparatus (ASN) is part of the Roadmap for bureaucratic reform where one of them is structuring the HC management system with its success is the existence of a professional ASN. The indicators of ASN professionalism are measured through the ASN professionalism index and the Merit System Index.

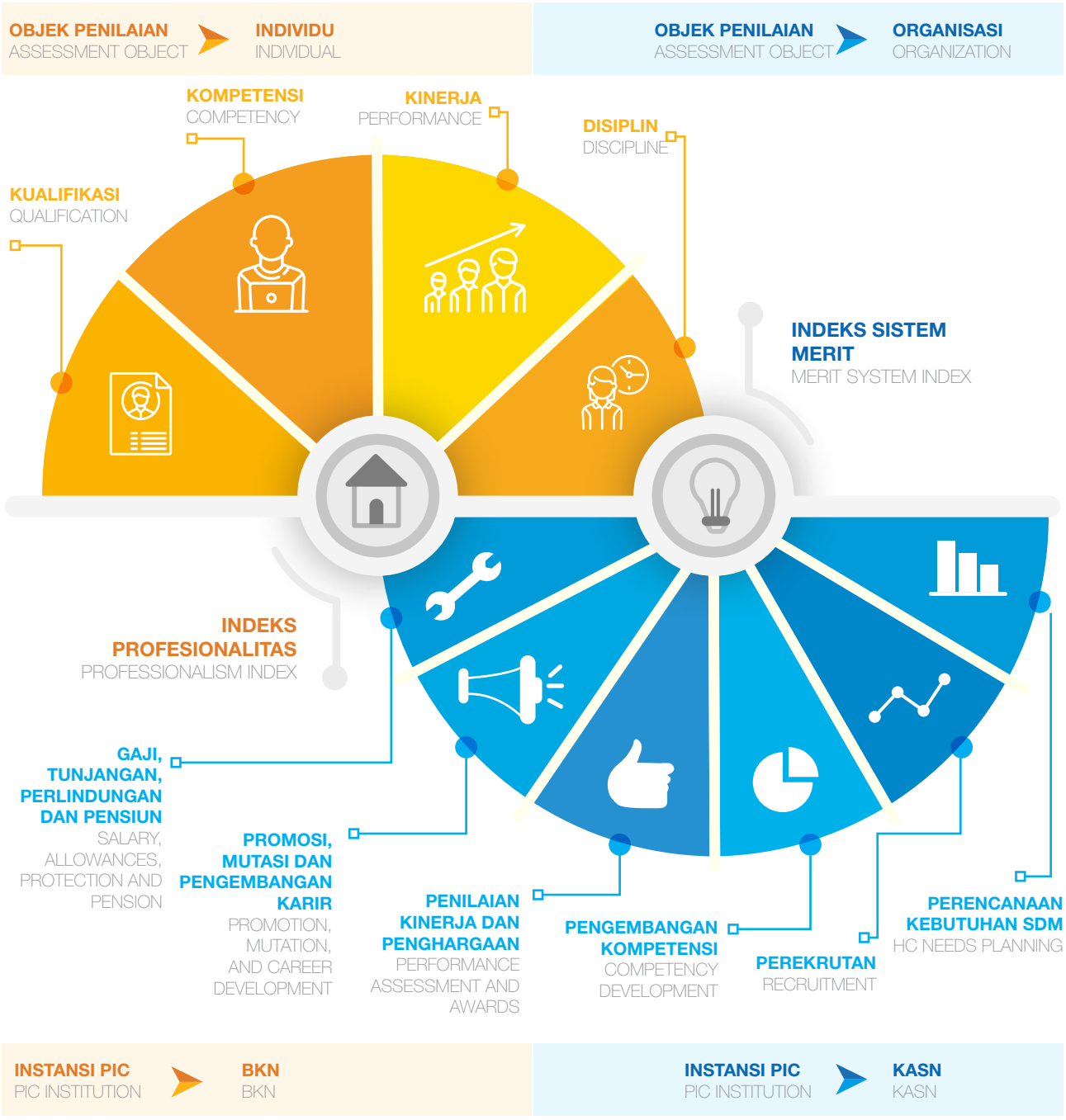
The measurement of ASN Professionalism, as already notified, uses the professional index and the Merit System Index. The supervisory institution in charge of Professionalism Index Measurement is National Civil Service Agency. There are 4 (four) assessment indicators, namely qualification, competence, performance, and discipline.

a. Qualification
   This indicator focuses on the level of education and training that has been received by the Individual whether it is in accordance with the implementation of his job duties

b. Competence
   This indicator is based on the knowledge, expertise and experience that exists in the individual in charge of a unit

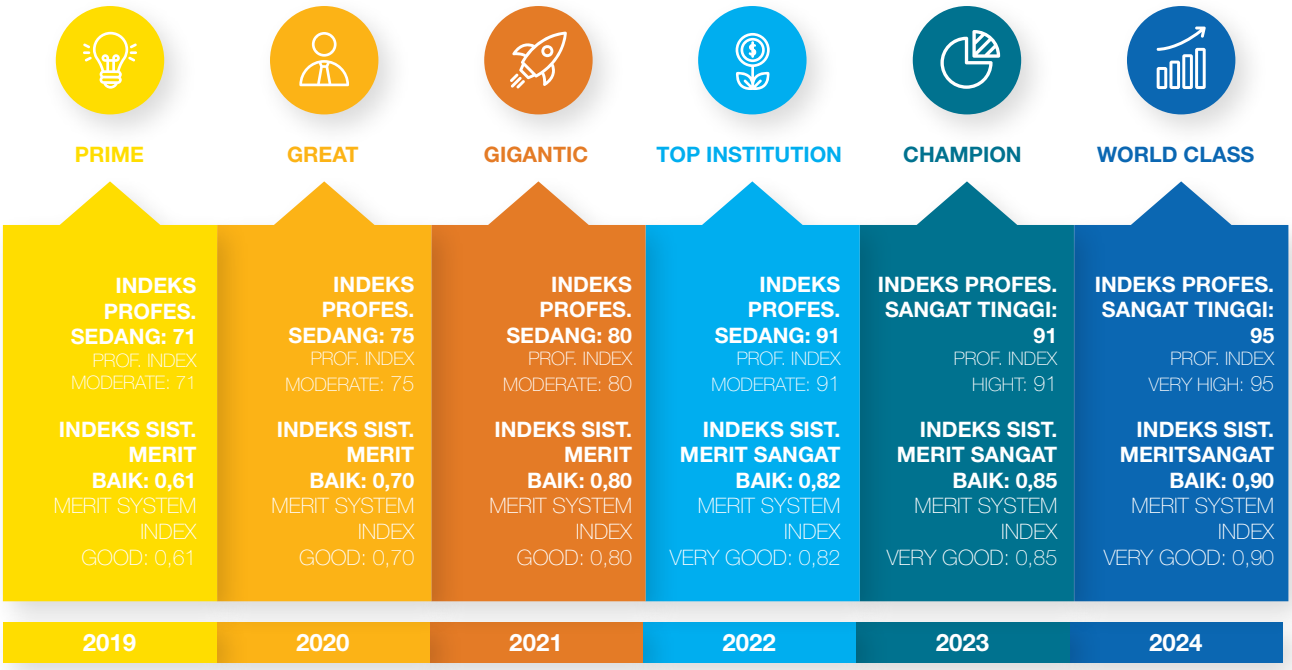
c. Performance
   As for being the fulcrum, there is an employee performance target (SKP) made online with monthly SKP or annual SKP.

d. Discipline
   On modern organizational data, such as the attendance and administration system of disciplinary violations are carried out in a proxy, where an employee is considered increasingly professional if the level of violation is lower.



Adapun dalam Indeks Sistem Merit, penggunaan objek, indikator, dan PIC berbeda dengan pengukuran indeks sistem profesionalitas ASN. Pada Indeks sistem merit objek penilaiannya adalah organisasi, dalam hal ini adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sedangkan untuk PIC atau yang menjalankan.

In Merit System Index, the use of objects, indicators, and PIC is different from ASN professionalism system index measurement. In Merit System Index, the assessment object is organization, such as the Ministry of State-Owned Enterprises,
while for PIC or running.



Dimana dalam indeks sistem merit memiliki objek penilaian:

1. Perencanaan kebutuhan SDM

Perencanaan Kebutuhan SDM dilakukan dengan menerapkan kebijakan reviu ABK, penyusunan kebutuhan ABK 5 tahun, penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional reviu kebutuhan dan pola karir Jabatan fungsional. Pada proses pelaksanaannya perencanaan kebutuhan SDM juga memperhatikan pengisian posisi jabatan struktural. Dalam praktiknya, pengisian jabatan posisi tersebut dapat dilakukan dengan adanya pengisian data e-formasi.

2. Perekrutan

Begitu halnya dengan perencanaan kebutuhan SDM, kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan berupa penyusunan formasi umum dan formasi STAN, penyusunan kebutuhan JPT Pratama dan Madya, serta pengadaan posisi jabatan fungsional. Adapun dalam perekrutan, Kementerian BUMN melakukan pemutakhiran data di portal SSCN BKN dan Portal Rekrutmen agar lebih memudahkan proses perekrutan.

The merit system has the following valuation objects:

1. HC Needs Planning

HC Need Planning is carried out by implementing the ABK review policy, the preparation of the needs of the 5-year ABK, the preparation of Functional Needs Reviewing the needs and functional positions of the career pattern. The process of implementing HC needs planning also pay attention to filling structural positions. Practically, filling in the positions can be done by filling in the e-formation data.

2. Recruitment

As in the case of HC needs planning, the policies that will be implemented are in the formulation of general formations and STAN formations, preparation of the needs of Primary and Secondary JPT, and the procurement of functional positions. As for recruitment, Ministry of SOEs updated data on the SSCN BKN portal and the Recruitment Portal to make the recruitment process easier.

3. Pengembangan kompetensi

Kebijakan yang diambil adalah adanya penyusunan updating standar kompetensi ASN. Kementerian BUMN, pedoman pemberian beasiswa, dan pedoman pemagangan (nasional dan internasional). Adapun pelaksanaannya, dilakukan pengembangan kompetensi rutin seperti pendidikan, pelatihan klasikal, pelatihan non klasikal dengan pendekatan 4 academy yaitu *leadership academy, culture academy, corporate academy,* dan *operational academy* hingga implementasi pembelajaran melalui *e-learning*. Ke depannya akan dilakukan pembangunan pembelajaran *e-learning, upgrading minor* aplikasi makin Kompeten, *upgrading e-learning*, dan integrasi komunikasi data pada aplikasi Makin Baik, Makin Kompeten dan data pribadi dalam portal SIMANIS.

3. *Development of competence*

The policies taken are the arrangement of ASN competence standard update, Ministry of SOEs, scholarship guidelines, and apprenticeship guidelines (national and international). On its implementation, regular competence developments, such as education, classical training, non-classical training with 4 academies (leadership academy, culture academy, corporate academy and operational academy) and learning implementation through e-learning are conducted. In the future, there are a number of things that will be developed, including e-learning, minor upgrade on Makin Kompeten application, e-learning upgrade, and better data communication integration on Makin Baik, Makin Kompeten applications, and personal data in the SIMANIS portal.

4. Penilaian kinerja dan penghargaan

Penilaian kinerja pada masa yang akan datang dilakukan dengan kebijakan penyusunan konsep penilaian 360 derajat dan penyusunan pedoman *coaching*. Dalam proses pelaksanaan, akan dilakukan *monitoring* realiasi SKP bulanan dan tahunan, implementasi penilaian 360 derajat, dan implementasi *coaching* dalam dialog kinerja pencapaian SKP. Untuk dukungan sistem informasi/ terotomasi, akan dilakukan pembangunan aplikasi penilaian 360 derajat (mengintegrasikan "Makin Baik"). Ke depan akan dilakukan penyusunan pedoman pemberian *reward* pada tahun 2020, dimana dimulai dari 2019 akan dilakukan penetapan *nominative* pegawai.

4. *Assessment of performance and awards*

In the future, the policy for drafting a 360-degree assessment concept and the preparation of coaching guidelines will be carried out. In its implementation, monthly and annual SKP realization, 360-degree assessment implementation, and coaching implementation in the SKP achievement performance dialog will also be carried out. The 360-degree assessment application (integrating "Makin Baik") will be developed with the aim of supporting automated information systems. In 2019, nominative employees will be determined. Meanwhile, in 2020, guidelines for awarding rewards will be designed.

5. Promosi, mutasi, dan pengembangan karir

Promosi dan mutasi akan dilakukan kebijakan penyusunan pola karir dan reviu pola karir dengan pelaksanaan implementasi menu pola karir, sedangkan pada aspek sistem informasi dilakukan pembangunan menu pola karir SIMANIS serta meng-*upgrading* menu pola karir pada SIMANIS.

Dalam pengembangan karir pada Kementerian BUMN pula, akan dilakukan dengan menyusun kebijakan *talent management*, dengan pelaksanaan pengembangan *talent people management* sebagai *talent pool*, hingga pada penanganan sistem informasi menggunakan integrasi Makin Kompetensi dengan kebijakan *talent management* serta *upgrading* hasil integrasi makin kompentensi dengan kebijakan *talent management*.

5. *Promotion, mutation, and career development*

The policy of preparing a career pattern and its review will be carried out on aspects of promotion and mutase with the implementation of a career pattern. Meanwhile, the SIMANIS career pattern menu will be developed on information system aspect.

In developing careers at the Ministry of SOEs, the preparation of talent management policies will be carried out by implementing talent people management as a talent pool, until the handling of information systems uses integration of Competence with the talent management policy and upgrading the results of integration of Competence with the talent management policy.

Accountability Improvement
Peningkatan Akuntabilitas

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Kementerian BUMN memperlihatkan kemajuan yang berarti dalam implementasi manajemen kinerja dan makin meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN. Dengan pencapaian yang terus meningkat ini menunjukan bahwa Kementerian BUMN telah memiliki akuntabilitas kinerja yang semakin baik, taat kebijakan, mengimplementasikan budaya kerja, hasil kinerja optimal, dan memiliki system informasi manajemen kinerja untuk pertanggungjawaban.

Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi di mana instansi pemerintah telah mengubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (*input*) atau kegiatan (*output*) semata, menjadi berorientasi kepada hasil (*outcome*).

Sebelum diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), instansi pemerintah bekerja berdasarkan perencanaan yang ukuran keberhasilannya kurang memadai. Melalui SAKIP, instansi pemerintah mulai merencanakan hasil atau *outcome* yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian serta melaporkan kinerjanya secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas pada publik.

Instansi pemerintah yang akuntabel adalah instansi yang menunjukkan komitmen kuat untuk menghasilkan kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dengan ukuran keberhasilan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan sesuai kerangka waktu. Proses ini akan berhasil apabila didukung komitmen penuh dari pimpinan birokrasi pada seluruh tingkat pemerintahan.

➤ TATA KELOLA DAN KINERJA YANG AKUNTABEL

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam Instruksi

Performance Accountability is the manifestation of the Government's institution obligation to account for the success/failure of the implementation of programs and activities mandated by stakeholders. This is carried out in order to achieve the organization's mission in a measurable manner with the set performance targets through the Government agency's performance reports which are compiled periodically.

Performance Accountability of Ministry of SOEs shows significant progress in the implementation of performance management and the increasing value of the Government Institution Performance Accountability System (SAKIP) of the Ministry of SOEs. This increasing achievement shows that the Ministry of SOEs has improved performance accountability, adhered to policies, implemented work culture, optimized performance results, and had a performance management information system for accountability.

Performance accountability is a condition in which government agencies have shifted their orientation from input and output orientations, to results oriented (outcome).

Before the implementation of the Government Institution Performance Accountability System (SAKIP) is applied, government agencies worked based on planning whose measure of success was inadequate. Through SAKIP, government agencies begin to plan outcomes that provide tangible benefits to the community and measure their achievements and report performance periodically as a manifestation of accountability to the public.

Accountable government agencies show strong commitment to produce performance that has been set in accordance with their duties and functions, and with measures of success that are specific, measurable, achievable, realistic, and in accordance with the time frame. This process will succeed if supported by full commitment from the bureaucratic leadership at all levels of government.

➤ *ACCOUNTABLE GOVERNANCE AND PERFORMANCE*

Performance accountability is an obligation manifestation of government agencies to account their success and failures of organizational mission in achieving purpose and objective that have been set periodically through accountability system. In Presidential Instruction No. 7 of 1999, it states

Presiden No. 7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Dikatakan juga dalam Inpres tersebut bahwa sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu:

that the purpose of the Government Agency Performance Accountability System is to encourage the creation of performance accountability of government agencies as one of the prerequisites for the creation of a good and reliable government. the Government Agency Performance Accountability System is carried out upon all main activities of government agencies that have contributed to the achievement of government agencies' vision and mission. In the Presidential Instruction, it also states that the targets of Government Agency Performance Accountability System are, as follow:

a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasisecara efisien, efektif dan responsif terhadapa aspirasi masyarakat dan lingkungannya
b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah
c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunannasional
d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

a. Making government agencies accountable so that it can operate efficiently, effectively and responsively to the aspirations of the community and its environment
b. Realization of government agencies transparency
c. Realization of community participation in implementing national development
d. The maintenance of public trust in the government

Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Kementerian BUMN. Dalam upaya memperoleh gambaran implementasi SAKIP, maka selanjutnya setiap instansi dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

The realization of this accountability was then compiled and delivered in the form of the Ministry of SOEs Performance Report. In an effort to obtain an overview of the implementation of SAKIP, each agency will be evaluated for the implementation of SAKIP as the implementation of Presidential Regulation Number 29 of 2014 concerning the Government Agency Performance Accountability System. In general, the purpose of evaluating the implementation of SAKIP is to:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1. Obtain information about the implementation of SAKIP.
2. Assessing the level of implementation of SAKIP;
3. Providing improvement suggestions for SAKIP implementation.
4. Monitoring recommendations follow-ups on the results of previous period evaluations.

Dalam proses penilaiannya, evaluasi SAKIP didasarkan pada 5 komponen pokok penilaian sebagai berikut:

In the assessment process, SAKIP evaluation is based on the 5 main components of the assessment as follows:

No	Component	Weight	Sub-component
1	*Performance Planning*	30%	*Strategic Planning, Yearly Performance Planning*
2	*Performance Measurement*	25%	*Fulfillment of measurement, measurement quality, measurement implementation*
3	*Performance Reporting*	15%	*Fulfillment of report, report quality, utilization of report*
4	*Internal Evaluation*	10%	*Fulfillment of evaluation, evaluation quality, utilization of evaluation result*
5	*Performance Achievement*	20%	*Reported performances, performance of the current year*

➤ RENSTRA 2015-2019

Perencanaan Kinerja merujuk pada RPJMN yang kemudian diturunkan ke dalam Renstra Kementerian BUMN Tahun 2015-2019 dengan arah kebijakan untuk mendukung Nawacita dan Roadmap BUMN. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan nasional, Kementerian BUMN merumuskan target ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa sasaran strategis (SS) organisasi. Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan yakni periode 2015-2019. Pada periode tersebut Kementerian BUMN menjalankan 11 sasaran strategis dengan 37 indikator kinerja utama. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan empat perspektif, yakni *stakeholder perspective, customers perspective, internal perspective* dan *learning and growth perspectives*.

Adapun penjelasan terkait ke empat perspektif tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perspektif Stakeholders

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholders*. *Stakeholders* (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

➤ *2015-2019 STRATEGIC PLAN*

Performance Planning refers to the RPJMN which is then revealed to the Ministry of SOEs Renstra 2015-2019 with policy directions to support Nawacita and the SOEs Roadmap. Performance planning is the process of preparing a performance plan as an elaboration of the goals and programs set out in the strategic plan, carried out by government agencies through various annual activities. In the performance plan an annual performance plan is established for all performance indicators at the target and activity levels. The performance plan preparation is carried out in line with the budget policy and preparation agenda, and is a commitment for the agency to achieve it in a given year.

In order to achieve the vision and mission of the national development, the Ministry of SOEs formulates the target in a more directed and operational form, manifested in the form of an organization's strategic target (SS). Strategic targets are the elaboration or implementation of mission statements that will be achieved or produced within the next 1 to 5 years, namely the period 2015-2019. During this period the Ministry of SOEs carried out 11 strategic objectives with 37 key performance indicators. This strategic target is based on four perspectives, namely stakeholders, customers, internal process and learning and growth perspectives.

The related explanations to the four perspectives are as follows:

a. Stakeholders perspective

This perspective includes the SS that the organization wants to fulfill in order to meet expectations so that it is considered successful from the stakeholders' perspective. Stakeholders are internal and external parties who directly or indirectly have an interest in the output or outcome of an organization, but do not directly use organizational services.

b. Perspektif Customer

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* dan/ atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait dengan pelayanan suatu organisasi.

c. Perspektif Internal Process

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

d. Perspektif Learning and Growth

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

b. Customers Perspective

This perspective includes the SS that the organization wants to realize to meet customer expectations and/or organizational expectations for the customer. Customers (service users) are external parties related to the service of an organization.

c. Internal Process Perspective

This perspective includes SS that wants to be realized through a series of processes managed by the organization in providing services and creating value for stakeholders and customers (value chain).

d. Learning and Growth Perspective

This perspective includes the SS in the form of ideal conditions for the internal resources of the organization to be realized or that should be owned by the organization to carry out business processes in order to produce output or organizational outcomes that are in accordance with customer and stakeholder expectations.


PERURI

05

KEBIJAKAN DAN PROGRAM RPU
RPU POLICY AND PROGRAM

SELAMA TAHUN 2018, BUMN TELAH MENJALANKAN PERANNYA DENGAN BAIK SEBAGAI STABILITATOR, DINAMISATOR, SEKALIGUS INOVATOR DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Throughout 2018, SOEs have carried out their roles well as stabilizers, dynamists and innovators in the national economy

SOEs Resturcturization and Privatization Program
Program Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN



Selama tahun 2018, BUMN telah menjalankan perannya dengan baik sebagai stabilitator, dinamisator, sekaligus inovator dalam perekonomian nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa BUMN merupakan salah satu instrumen utama negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat banyak BUMN yang kinerjanya kurang baik, maka BUMN perlu diberdayakan secara optimal.

Solusi akan peningkatan kualitas BUMN adalah berkaitan dengan proses restrukturisasi yang dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

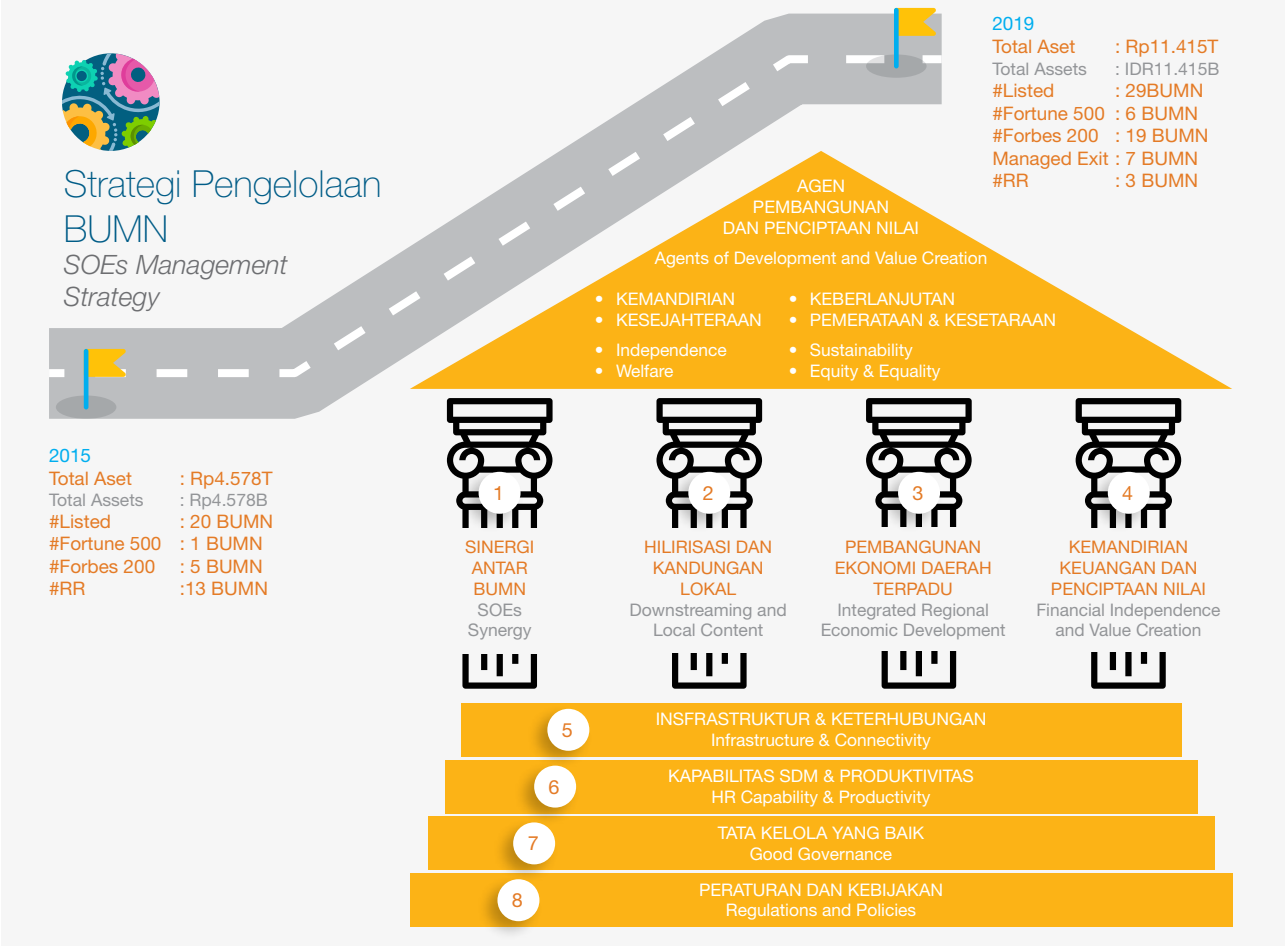
Selain itu, BUMN juga menjalankan program privatisasi yang merupakan penjualan saham ke masyarakat dan mengakibatkan berkurangnya persentase kepemilikan Pemerintah Republik Indonesia. Program privatisasi ini bertujuan agar nilai BUMN tersebut akan meningkat sesuai dengan tujuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak memberikan kerugian bagi Pemerintah. Sebaliknya nilai investasi Pemerintah di BUMN justru bertambah seiring dengan kemajuan BUMN setelah diberikan dana dan bantuan dari investor strategis.

Throughout 2018, SOEs have carried out their roles well as stabilizers, dynamists and innovators in the national economy. It indicates that SOEs are one of national main instruments to improve community welfare. Due to the fact that many SOEs have poor performance, SOEs need to be empowered optimally.

The solution to improve SOEs quality is related to the restructuring process carried out with the intention to make SOEs healthy so that they can operate efficiently, transparently and professionally. Restructuring is an effort made in the context of making SOEs healthy as one of the strategic steps to improve company's internal conditions with a view to improve company performance and increase company's value.

In addition, the SOEs also exercise privatization program in the form of sale of shares to public resulting in the reduced percentage of shares owned by the Government of the Republic of Indonesia. This privatization program aims to increase value of the respective SOEs in accordance with the objectives stipulated in the Laws and Regulations, so as not to give losses to the Government. On the contrary, the Government investment value in a SOEs actually increases along with the SOE's progress after receiving proceeds and assistance from strategic investors.

SASARAN STRATEGIS DALAM 5 TAHUN (2015-2019)
Strategic Targets within 5 Years (2015-2019)



Program Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN sendiri, dikelola atau dilaksanakan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang restrukturisasi, pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas, pengembangan usaha, dan kebijakan peta jalan (*roadmap*). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 yang telah diubah oleh PER-06/MBU/12/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Sementara sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 yang telah diubah oleh PER-06/MBU/12/2017, struktur organisasi Kedeputian Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha terdiri atas:

SOEs' Restructuring and Privatization Program is managed and carried out by Deputy of Restructuring and Business Development whose duty is to carry out policy formulation, coordination and synchronization of policy implementation in the field of Restructuring, utilization of the portfolio of minority ownership companies, business development, and roadmap policies. This is in accordance with SOE Ministerial Regulation Number PER-10/MBU/07/2015 which has been amended by PER-06/MBU/12/2017 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of State-Owned Enterprises.

Meanwhile as stipulated in SOE Ministerial Regulation Number PER-10/MBU/07/2015 which has been amended by PER-06/MBU/12/2017, the organizational structure of the Deputy for Business Restructuring and Development consists of:

a. Asisten Deputi Restrukturisasi BUMN dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas (PPKNM); dan
b. Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN.

Adapun fungsi utama dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

a. Assistant Deputy for SOEs Restructuring and Utilization of Enterprises with Minority Govt Ownership (PPKNM); and
b. Assistant Deputy of Business Development and Privatization of SOEs.

Main functions of Deputy of Restructuring and Business Development of Ministry of SOEs are as follows:

RESTRUKTURISASI & PPKNM
Restructuring & PPKNM

RESTRUKTURISASI
- Perumusan kebijakan dan identifikasi BUMN yang memerlukan penanganan restrukturisasi
- Pembinaan dan pengelolaan BUMN dalam restrukturisasi
- Penyiapan langkah-langkah strategis restrukturisasi BUMN
- Monev pelaksanaan restrukturisasi

PPKNM
- Penyiapan APS perusahaan minoritas
- Optimalisasi kepemilikan negara minoritas
- Pembinaan dan pengelolaan perusahaan minoritas
- Penyiapan bahan analisis isu-isu strategis dan *public expose* perusahaan minoritas (khusus perusahaan terbuka)

RESTRUCTURING
- Policy formulation and SOEs identification that requires Restructuring handling
- Fostering and Managing SOEs into Restructuring
- Strategic efforts of SOEs Restructuring
- Monitoring and evaluating implementation of Restructuring

PPKNM
- Preparation of A PS of minority companies
- Optimization of minority state ownership
- Guidance and management of minority companies
- Preparation of analysis materials on strategic issues and public expose of minority companies (specifically public companies)

PENGEMBANGAN USAHA & PRIVATISASI BUMN
SOEs Business Development & Privatization

PENGEMBANGAN BISNIS
- Penyusunan dan Evaluasi *Roadmap* BUMN
- Penyelarasan Roadmap dengan RJPP BUMN
- Penyusunan Aspirasi Pemegang Saham
- Penyelarasan Visi Pemerintah dengan Perencanaan Strategis BUMN
- Kebijakan Dividen BUMN

PRIVATISASI DAN SINERGI
- Kebijakan Privatisasi
- Perencanaan Privatisasi
- Pelaksanaan dan Pelaporan Privatisasi
- Identifikasi Potensi Sinergi
- Evaluasi dan Pelaporan Implementasi Sinergi

PMN, PENERUSAN PINJAMAN & PSO (DUKUNGAN NEGARA)
- Koordinasi Penyelesaian Pinjaman RDI/SLA
- Koordinasi Penyelesaian Aset BPYBDS
- Koordinasi pengusulan PMN
- Koordinasi Pelaksanaan PSO

BUSINESS DEVELOPMENT
- Preparation and Evaluation of the SOE Roadmap
- Aligning the Roadmap with RJPP SOE
- Compilation of Shareholders' Aspirations
- SOEs Dividend Policy

PRIVATIZATION AND SYNERGY
- Privatization Policy
- Privatization Planning
- Implementation and Report of Privatization
- Identifying Synergy Potential
- Evaluation and Implementation Report of Synergy

PMN, LOAN COMPANIES, PSO (GOVERNMENT SUPPORT)
- RDI/SLA Loan Settlement Coordination
- BPYBDS Asset Settlement Coordination
- PMN Proposal Coordination
- Coordination of Implementation of PSO

PENYEHATAN BUMN SAKIT
Restructuring Poor Performance SOEs

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PORTOFOLIO
Optimizing Portfolio management

PERENCANAAN STRATEGIS
Strategic Planning

PENGUATAN BUMN
Strengthening SOEs

PERBAIKAN STRUKTUR PERMODALAN DAN PENUGASAN
Improvement of Capital Structure Assignment

TUGAS TAMBAHAN
Additional duties

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINASI BUMNFINANCIAL STATEMENTS
Compilation of SOE Combined Financial Statements

PENCIPTAAN DAN PENINGKATAN NILAI BAGI NEGARA
Creation and Value Enhancement for the State

➤ RESTRUKTURISASI BUMN & PPKNM

Sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 11 tentang Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa Restrukturisasi BUMN adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan BUMN. Dimana persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham sebuah perusahaan. Adapun tujuan dan dasar hukum Restrukturisasi BUMN adalah sebagai berikut.

➤ *SOES & PPKNM RESTRUCTURING*

As stipulated in Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003 Article 1 paragraph 11 concerning State-Owned Enterprises, it is mentioned that SOEs Restructuring is an effort carried out in order to improve SOEs which is one of the strategic step to improve companies' internal condition, and improve performance and SOEs companies' values, in which investors' perceptions on companies' level of success is frequently related to stock price of a company. The objectives and legal basis of SOEs Restructuring are as follow:

Tujuan Restrukturisasi BUMN
(Pasal 72 ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2003)

1. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan
2. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak pada Negara
3. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen
4. Memudahkan pelaksanaan privatisasi

SOE Restructuring Objectives
(Article 72 paragraph 2 of the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003)

1. *Improving the performance and value of the company*
2. *Providing benefits in the form of dividends and taxes on the State*
3. *Producing products and services at competitive prices to consumers*
4. *Facilitating the implementation of privatization*



UU NO 19 TAHUN 2013

1. BADAN USAHA MILIK NEGARA
State-owned Enterprises

UU NO 40 TAHUN 2007

2. PERSEROAN TERBATAS
Limited Liability Company

UU NO 43 TAHUN 2005

3. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN
Merger, Consolidation, Takeover, and Change in the Shape of a SOE Legal Entity

PP NO 72 TAHUN 2016 jo. PP NO 44 TAHUN 2005

4. Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas
Procedures for Participation and Administration of State Capital in SOE and Limited Liability Companies

PP NO 45 TAHUN 2005

5. Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN
Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOEs

PER-01/MBU/2009 Jo. PER-05/MBU/2012

6. Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN oleh PT PPA (Persero)
SOE Restructuring and Revitalization Guidelines by PT PPA (Persero)

PER-06/MBU/12/2017 jo. PER-10/MBU/07/2015

7. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN
Organization and Work Procedure of the Ministry of SOEs

SK-27/MBU01/2019

8. Pembagian Badan Usaha Milik Negara yang Menjadi Tugas Pembinaan Deputi
Distribution of State-Owned Enterprises that are the Task of Fostering Deputies

Program Restrukturisasi BUMN ini, dikelola atau dilaksanakan oleh Asisten Deputi Restrukturisasi BUMN dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas (PPKNM). Fungsi utama Keasdepan Restrukturisasi & PPKNM adalah sebagai berikut:

This SOEs Restructuring Program is managed or carried out by the Assistant Deputy for SOEs Restructuring and Utilization of Minority State Ownership Portfolios (PPKNM). The main functions of the Future Restructuring & PPKNM are as follows.

RESTRUKTURISASI
Restructuring

GOALS PENYEHATAN BUMN SAKIT
Improvement of Ailing SOEs

- Perumusan kebijakan dan identifikasi BUMN yang memerlukan penanganan restrukturisasi
- Pembinaan dan pengelolaan BUMN dalam restrukturisasi
- Penyiapan langkah-langkah strategis restrukturisasi BUMN
- Monev pelaksanaan restrukturisasi

- Formulation of Policy and Identification of SOEs that require Restructuring handling
- Guidance and Management of BUMN in Restructuring
- Preparation of strategic steps for BUMN Restructuring
- Monitoring and evaluating the implementation of Restructuring

PPKNM
PPKNM

GOALS OPTIMALISASI PENGELOLAAN PORTOFOLIO
Optimization of Portfolio Management

- Penyiapan APS perusahaan minoritas
- Optimalisasi kepemilikan negara minoritas
- Pembinaan dan pengelolaan perusahaan minoritas
- Penyiapan bahan analisis isu-isu strategis dan *public expose* perusahaan minoritas (khusus perusahaan terbuka)

- APS Preparation of Minority Companies
- Optimizing Minority state ownership
- Fostering and Management of Minority Companies
- Preparing Material for Analyzing Strategic Issues and public expose of minority companies (special for public companies)

PORTOFOLIO

BUMN RESTRUKTURISASI

BUMN JASA SURVEY & KEUANGAN

PERUSAHAAN MINORITAS

	13,29%
PPLI	11,43%
SOCFIN	10,00%
	5,00%

Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam melakukan program Restrukturisasi BUMN adalah sebagai berikut:

1. Regulasi terkait restrukturisasi saat ini belum optimal mendukung percepatan proses restrukturisasi

   Inisiatif strategi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan melakukan perubahan/revisi regulasi yang terkait dengan restrukturisasi

Meanwhile, SOEs Restructuring program somehow encounters challenges, such as:

1. *Regulations related to restructuring are currently not optimal in supporting the acceleration of the restructuring process*

   The strategic initiative taken in dealing with these challenges is by making changes/revisions to regulations related to restructuring

2. Terbatasnya sumber pendananaan untuk kebutuhan restrukturisasi

   Inisiatif strategi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan melakukan pembentukan *leveraging* aset BUMN *idle*, sinergi dengan BUMN yang memiliki kapasitas finansial lebih baik serta dalam *value chain* yang saling mendukung.

3. Kurangnya kesepahaman dalam penyelesaian BUMN dengan kinerja kurang baik

   Inisiatif strategi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi antar instansi

Kementerian BUMN melalui Deputi Restrukturisasi BUMN dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas (PPKNM), khususnya Asisten Deputi Restrukturisasi BUMN dan PPKNM, menyusun strategi Rstrukturisasi melalui Sinergi BUMN, yakni sebagai berikut:

2. *Limited sources of funding for restructuring needs*

   The strategic initiative carried out in dealing with these challenges is by establishing leveraging of idle SOEs assets, synergizing with SOEs that have better financial capacity and in a mutually supportive value chain.

3. *Lack of understanding in resolving the SOEs with poor performances*

   The strategic initiative taken in dealing with these challenges is by increasing coordination between agencies

Ministry of SOEs, through Deputy for SOEs Restructuring and Utilization of Minority State Ownership Portfolios (PPKNM), particularly Assistant Deputy for SOEs Restructuring and PPKNM, arranges Restructuring strategies through SOEs Synergy, as follow:



Pelaksanaan Program Restrukturisasi BUMN di 2018

Di sepanjang tahun 2018, Kedeputian Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha telah melaksanakan Program Restrukturisasi terhadap 6 BUMN yang memiliki karakteristik permasalahan dan dengan rencana penanganan berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing entitas. Berikut ringkasan permasalahan utama 6 BUMN Restrukturisasi dan rencana penanganannya.

Implementation of SOEs Restructuring Program in 2018

Throughout 2018, Deputy of Restructuring and Business Development has conducted Restructuring Program on 6 SOEs that have problematic characteristics with different handling plan based on condition of each company. The following is a summary of main issues of 6 Restructuring SOEs and its handling plans.

No	BUMN SOEs	Key Issues	Rencana Penanganan Restrukturisasi Handling Plans and Restructuring
1	PT Surveri Udara Penas	• Alat produksi kamera dan SDM yang teknologinaya telah tertinggal • *Poorly technological advancement of its production tools (camera) and HR*	• Restrukturisasi SDM, operasional dan keuangan • Konversi hutang ke PPA menjadi Modal • *HR, Operational and Financial Restructuring* • *Conversion of debt to PPA becomes Capital*
2	PT Kertas Leces	• Stop operasi • Pembatalan putusan PKPU • Perseroan tidak memiliki hutan tanaman industri, sehingga tidak memiliki cukup bahan baku untuk beroperasi • *Operation stopped* • *Cancellation of PKPU Decision* • *The Company does not have its own industrial forest, so it does not have sufficient raw material for the operation*	• Proses PK atas putusan pailit karena pembatalan putusan homologasi/PKPU • Mengoperasionalkan produksi kertas coklat • *PK Process upon bankruptcy decision due to cancellation of the homologation/PKPU decision* • *Operating production brown papers*
3	PT Industri Gelas	• Stop Operasi • Rencana revitalisasi pabrik IGLAS • *Operation stopped* • *Plans for revitalizing IGLAS factory*	• Restrukturisasi SDM • Penanganan melalui skema mitra strategi/ investor • Transformasi bisnis • *HR Restructuring* • *Handling through strategic partner scheme/ investors* • *Business Transformation*
4	PT Industri Sandang Nusantara	• Terbatasnya aktivitas usaha Perseroan (makloon dan penyewaan fasilitas produksi) • *Limited business activities of the Company (makloon and rental of production facilities)*	• Business transformation and assets optimization • *Synergy with PT Primissima*
5	PT Kertas Kraft Aceh	• Stop operasi • Jual beli listrik sebagai kegiatan usaha sementara yang menghadapi tantangan penurunan BPP Wilayah • Kontinuitas suplai bahan baku untuk pabrik kertas • *Operation Stopped* • *Electricity buying and selling is a temporary business activity that faces the challenge of decreasing Regional BPP* • *Continuity of supply of raw materials for paper mills*	• Optimalisasi fasilitas pembangkit listrik • Pengoperasian kembali pabrik kertas • Pembentukan JV Hutan untuk menjamin kepastian bahan baku • Pembentukan JV Pabrik Kertas untuk produksi kertas kraft • *Optimization of electricity generation facilities* • *Re-operation of paper mills* • *Establishment of Forest JV to ensure certainty of raw materials* • *Establishment of JV Paper Factory for the production of kraft paper*

No	BUMN SOEs	Key Issues	Rencana Penanganan Restrukturisasi Handling Plans and Restructuring
6	PT Merpati Nusantara Airlines	• Sudah mendapatkan putusan PKPU/ Homologasi • Dalam proses restrukturisasi dan rencana privatisasi dengan melibatkan investor strategis • *Already got the PKPU/Homologation verdict* • *In the process of restructuring and privatization plans by involving strategic investors*	• Penyelesaian homologasi sesuai dengan kesepakatan para kreditur • Pelaksanaan privatisasi dengan melibatkan investor strategis dan penyelesaian beberapa persyaratan yang diminta oleh pihak investor strategis • *Settlement of homologation in accordance with the agreement of the creditors* • *The implementation of privatization by involving strategic investors and the completion of several requirements requested by strategic investors*

Sementara itu, perkembangan pelaksanaan Program Restrukturisasi BUMN yang telah dilakukan Kedeputian Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Restrukturisasi PT Industri Sandang Nusantara (Persero) / PT ISN

   a. Melakukan banyak program sinergi dengan BUMN-BUMN, antara lain memperoleh order penyediaan seragam kantor.
   b. Performance keuangan semakin membaik (laba usaha meningkat dari Rp1,9 M (2017) menjadi Rp25,8 M (2018P).
   c. Perusahaan mulai berfokus kepada sektor trading dengan proporsi ±70% dari total pendapatan Rp308 M (2018P).
   d. Dikarenakan kondisi perusahaan mulai membaik, sehingga saat ini kepercayaan kreditur sudah mulai muncul. PT ISN berhasil mendapatkan pendanaan dari PT KBI, PT JIEP, PT SIER dan PT KIM dalam rangka mendukung pengembangan produk sarung dan industri tekstil.
   e. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan: Transformasi kegiatan usaha PT ISN, optimalisasi aset-aset yang dimiliki, mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha hilir sektor TPT, dan mengembangkan kegiatan usaha melalui sinergi BUMN.
   f. Penyelesaian permasalahan sengketa lahan milik PT ABP (anak perusahaan PT ISN dan PT PPA)
   g. Sejalan dengan upaya percepatan program restrukturisasi serta dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan, PT ISN juga dalam proses untuk diinbrengkan kepada PT PPA bersama 7 BUMN dalam restrukturisasi lainnya dan 4 Perusahaan Minoritas.

Meanwhile, developments of the SOEs Restructuring Program that have been carried out by the Deputy of Restructuring and Business Development in 2018 are as follows:

1. *Restructuring Settlement of PT Industri Sandang Nusantara (Persero)/PT ISN*

   a. *Conducting many synergizing programs with SOEs, among others, obtaining an order for office uniforms.*
   b. *Financial performance has improved (operating income increased from IDR1.9 billion (2017) to IDR25.8 billion (2018P).*
   c. *The company began to focus on the trading sector with a proportion of ± 70% of the total revenue of IDR308 billion (2018P).*
   d. *Because the condition of the company got improved, so creditor trust has recently emerged. PT ISN managed to get funding from PT KBI, PT JIEP, PT SIER and PT KIM in order to support the development of sarong products and the textile industry.*
   e. *Advanced Restructuring and/or Revitalization Programs that are being/will be implemented: Transformation of PT ISN's business activities, optimization of assets owned, developing downstream business activities in the TPT sector, and developing business activities through SOEs synergy.*
   f. *Settlement of land dispute issues owned by PT ABP (a subsidiary of PT ISN and PT PPA)*
   g. *In line with efforts to accelerate the restructuring program and in order to increase the value of the company, PT ISN was also in the process of being deposited into PT PPA along with 7 other SOEs in restructuring and 4 Minority Companies.*

2. Restrukturisasi PT Survai Udara Penas (Persero) / PT Penas

   a. Dengan pelaksanaan program Stop Bleeding dan program sinergi dengan BUMN, tahun ini PT Penas mampu mencatat keuntungan sebesar Rp140 Juta (2018P) dimana ini menggambarkan peningkatan kinerja keuangan dari tahun 2017 yaitu mencatat kerugian Rp1,9 M.
   b. Telah dilaksanakan restrukturisasi operasional dan manajemen dengan skema *bad bank good bank* dimana PT Penas sebagai bad bank dan anak usaha pemetaan yang sehat sebagai *good bank*. PT PPA telah membantu pendirian anak usaha pemetaan tersebut melalui PT PPAK, yaitu PT Pratama Persada Airborne (PT Airborne). Sejak Januari 2018, PT Airborne telah dikonsolidasikan ke PT Penas sehingga secara konsolidasian PT Penas diharapkan sudah dapat mencatat keuntungan.
   c. Meningkatkan potensi pendapatan dengan melakukan Sinergi dengan BUMN Jasa Survei seperti PT Sucofindo, PT BKI, dan PT SI.seperti PT Sucofindo, PT BKI, dan PT SI.
   d. Pada bulan Agustus – November 2018, PT Penas melakukan penarikan dana RR yang digunakan untuk Revitalisasi dan Restrukturisasi SDM, pendirian anak usaha, dan kalibrasi peralatan. Selain itu juga PT Penas pada bulan Deseember 2018 mendapatkan setoran modal dari PT PPA untuk konversi trache B dan mengambil alih tagihan PPAF.
   e. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan:
      - Inbreng dalam Holding Restrukturisasi dengan PT PPA
      - Mengarahkan PT Penas untuk fokus pada bisnis aviasi dan PT Airbone (anak perusahaan) yang akan berfokus pada bisnis pemetaan. Pendanaan transformasi bisnis tersebut akan didukung oleh PT PPA sebagai agen penyehatan BUMN.

3. Restrukturisasi PT Kertas Kraft Aceh (Persero) / PT KKA

   a. Program *Stop Bleeding* dan program-program restrukturisasi dengan optimalisasi aset PT KKA, pendapatan PT KKA mengalami kenaikan semula Rp146 M (2017) menjadi Rp172 M (2018P).
   b. Proses rightsizing karyawan melalui layoff 934 orang telah diselesaikan dengan dukungan pendanaan dari PT PPA.

2. *Restructuring of PT Survai Udara Penas (Persero)/PT Penas*

   a. *With the implementation of Stop Bleeding program and the synergy program with SOEs, in this year, PT Penas was able to record a profit of IDR140 million (2018P), which illustrates an increase in financial performance from 2017, which recorded a loss of IDR1.9 billion.*
   b. *Operational and management restructuring has been implemented with 'bad bank good bank' scheme where PT Penas is a sound bad bank and a mapping business as a good bank. PT PPA has helped establish the mapping business subsidiary through PT PPAK, namely PT Pratama Persada Airborne (PT Airborne). Since January 2018, PT Airborne has been consolidated to PT Penas so that the consolidation of PT Penas is expected to be able to record profits.*
   c. *Increasing potential revenue by synergizing with SOEs Survey Services such as PT Sucofindo, PT BKI, and PT SI. Such as PT Sucofindo, PT BKI, and PT SI.*
   d. *In August - November 2018, PT Penas made a withdrawal of RR funds used for Revitalizing and Restructuring HR, establishing subsidiaries, and calibrating equipment. In addition, PT Penas in December 2018 received a capital deposit from PT PPA for trache B conversion and took over PPAF bills.*
   e. *Further Restructuring and/or Revitalization Programs that are being/will be implemented:*
      - *Depositing in the Restructuring Holding with PT PPA*
      - *Directing PT Penas to focus on aviation business and PT Airbone (a subsidiary) that will focus on the mapping business. Funding for the business transformation will be supported by PT PPA as a SOE restructuring agent.*

3. *Restructuring of PT Kertas Kraft Aceh (Persero)/PT KKA*

   a. *The Stop Bleeding program and restructuring programs by optimizing PT KKA's assets. PT KKA's revenue increased by IDR146 billion (2017) to IDR172 billion (2018P).*
   b. *The rightsizing process of employees through 934 layoffs has been completed with funding support from PT PPA.*

c. Optimalisasi fasilitas pembangkit listrik untuk memperoleh pendapatan untuk menutupi biaya operasional melalui skema sinergi dengan PT PLN, PT PJBS dan PT PPA.
d. Melakukan kajian skema operasi dan bisnis sebagai upaya untuk mengoperasikan kembali pabrik kertas kraft baik melalui pencarian investor maupun sinergi BUMN.
e. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan:
    - Pendirian JV pengelolaan hutan antara PT KKA, PT Inhutani IV, PT PPA dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). Tujuan pembentukan JV pengelolaan hutan adalah sebagai pemasok utama kebutuhan bahan baku pinus untuk Pabrik Kertas PT KKA secara penuh dan berkesinambungan. Pihak Pemda telah memberikan rekomendasi lahan, namun terdapat kendala untuk mengoperasikan JV ini yaitu belum adanya persetujuan dari pemegang saham lain (PT Alas Helau).
    - Pendirian JV Pabrik Kertas melalui sinergi BUMN dengan prasyarat kondisi off-taker produk minimum 30% dari PT Semen Indonesia Group (PT SMI) serta setoran modal sebesar Rp215 M dari sinergi BUMN dengan rincian PT SMI Rp160 M, PT PPA Rp30 M dan Perhutani Rp25 M. Dalam hal tidak ada setoran modal dari sinergi BUMN, dan pabrik kertas kraft tetap akan dioperasikan perlu ada tambahan modal Negara minimum sebesar Rp800 M (baik melalui PMN langsung atau PMN melalui PT PPA). Sinergi juga dilakukan dengan PT EMI sebagai pihak yang membantu dalam revitalisasi teknologi mesin pabrik kertas.

    - Restrukturisasi keuangan antara lain dengan melakukan *rescheduling* hutang perbankan dan melakukan *debt to equity swap* hutang PT PPA.
    - Berdasarkan proyeksi keuangan pasca restrukturisasi, Perusahaan dapat mencapai omzet penjualan Rp1,2T dengan profitabilitas antara 7%-15% dan IRR ±18%. Dalam hal tidak tersedia pendanaan, maka dapat dipertimbangkan *exit strategy* dengan dampak risiko yang paling minim.

c. Optimizing electricity generation facilities to obtain revenue to cover operational costs through a synergy scheme with PT PLN, PT PJBS and PT PPA.

d. Reviewing the scheme of operations and business as an effort to re-operate the kraft paper factory through both investor searches and SOEs synergies.

e. Further Restructuring and/or Revitalization Programs that are being/will be implemented:
    - *Establishment of a forest management JV between PT KKA, PT Inhutani IV, PT PPA and the Regional Development Company of Aceh (PDPA). The aim of establishing a forest management JV is to become the main and full supplier of pine raw materials for PT KKA's Paper Mill. The local government has given land recommendation, but there were obstacles to operate this JV, for example the lack of approval from other shareholders (PT Alas Helau).*

    - *Establishment of the JV Paper Factory through the SOEs synergy with the prerequisite of a minimum 30% off-taker product from PT Semen Indonesia Group (PT SMI) and a capital deposit of IDR215 billion from the SOEs synergy with details of PT SMI IDR160 billion, PT PPA IDR30 billion and Perhutani IDR25 billion. In the event that there is no capital deposit from the SOEs synergy, and the kraft paper factory will continue to be operated, there must be a minimum additional state capital of IDR800 billion (either through direct PMN or PMN through PT PPA). Synergy was also carried out with PT EMI as a party that helped in revitalizing paper mill machinery technology.*
    - *Financial restructuring, among others, by rescheduling banking debt and conducting debt to equity debt swap of PT PPA.*
    - *Based on financial projection after restructuring, the Company can reach sales turnover IDR1,2 trillion with profitability between 7%-15% and IRR ±18%. In the event that there is no funding available, so exit strategy can be considered with the most minimum risk impact.*

4. Restrukturisasi PT Industri Gelas (Persero) / PT Iglas

   a. Pelaksanaan program *Stop Bleeding* dan upaya-upaya restrukturisasi seperti optimalisasi aset melalui penyewaan lahan dan bangunan, dapat menyebabkan kerugian PT Iglas menurun dari semula Rp5,87 M (tahun 2017) menjadi Rp4,9 M (tahun 2018P). Stop operasi menghentikan beban biaya operasional sebesar Rp5 M per bulan.
   b. Memaksimalkan pendapatan PT Iglas dengan melanjutkan penjualan sisa persediaan botol sebesar 139 ton.
   c. Proses *rightsizing* karyawan melalui *layoff* 571 orang telah diselesaikan dengan membayar H2N dan kewajiban pensiun serta biaya pemeliharaan dan pengamanan aset dengan sumber pendanaan dari talangan PT PPA sebesar Rp50 M.
   d. Melakukan upaya-upaya hukum untuk mempertahankan aset lahan di Ngagel dari sengketa dengan Pemerintah Kota Surabaya.
   e. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan:
      - Melakukan program pencarian investor atau mitra strategis dalam rangka pengoperasian kembali pabrik PT Iglas baik untuk produksi botol maupun tranformasi ke segmen bisnis lain yang memungkinkan.
      - Optimalisasi aset PT Iglas dengan melakukan penyewaan bangunan serta melakukan penjajakan dengan BUMN maupun anak perusahaan BUMN dalam rangka penjualan sebagian aset PT Iglas.
      - Restrukturisasi utang melalui PKPU apabila telah diperoleh investor atau mitra strategis.
      - Dalam rangka percepatan restrukturisasi, PT Iglas sedang dalam proses inbreng saham kepada PT PPA, dimana PT PPA disini berperan sebagai agen penyehatan BUMN yang ditunjuk resmi oleh Pemerintah.

5. Restrukturisasi PT Kertas Leces (Persero)/ PT KL

   a. Dengan pelaksanaan program *Stop Bleeding*, kerugian PT KL menurun dari semula Rp232 M (tahun 2016) menjadi Rp17 M (tahun 2017P).
   b. PT KL telah berhenti beroperasi sejak tahun 2015 dikarenakan ketidaktersediaan pasok bahan baku serta tidak memiliki bisnis yang terintegrasi. Alat produksi mesin pulp dan kertas sudah berumur tua mengakibatkan operasional tidak efisien.

4. *Restructuring of PT Industri Gelas (Persero)/PT Iglas*

   a. *The implementation of the Stop Bleeding program and restructuring efforts such as asset optimization through leasing land and buildings, could cause PT Iglas's losses to decrease from the original IDR5.87 billion (in 2017) to IDR4.9 billion (in 2018P). Stop operations stop the burden of operational costs of IDR5 billion per month.*
   b. *Maximizing the income of PT Iglas by continuing to sell the remaining bottles of 139 tons.*

   c. *The rightsizing process of employees through 571 layoffs has been completed by paying H2N and pension obligations as well as the cost of maintaining and securing assets with funding sources from PT PPA's bail of IDR50 billion.*
   d. *Making legal efforts to defend land assets in Ngagel from a dispute with the Surabaya City Government.*

   e. *Further Restructuring and/or Revitalization Programs that are being/will be implemented:*
      - *Conducting an investor or strategic partner search program in the context of re-operating the PT Iglas plant for both bottle production and transformation to other possible business segments.*
      - *Optimizing the assets of PT Iglas by leasing buildings as well as exploring SOEs and subsidiaries of SOEs in order to sell part of the assets of PT Iglas.*

      - *Debt restructuring through PKPU if it has been obtained by investors or strategic partners.*
      - *In the context of accelerating restructuring, PT Iglas is in the process of depositing shares to PT PPA, where PT PPA here acts as an SOE restructuring agent officially appointed by the Government.*

5. *Restructuring of PT Kertas Leces (Persero)/PT KL*

   a. *With the implementation of the Stop Bleeding program, the loss of PT KL decreased from IDR232 billion (2016) to IDR17 billion (2017p)*
   b. *PT KL's operation stopped since 2015 due to unavailability of raw material and did not have an integrated business. Production tools, pulping and paper machines aged that resulted in inefficient*

c. PT KL dinyatakan pailit oleh PN Niaga Surabaya, dalam persidangan gugatan pembatalan proposal perdamaian oleh 15 eks karyawan PT KL yang tergabung dalam Pakar dan salah satu kreditur (CV Alex Supraptono Group) pada tanggal 25 September 2018. Terhadap putusan tersebut PT KL telah mengajukan memori Pembatalan Keputusan (PK) dan telah di jawab dengan kontra PK dari penggugat. Pada akhir Desember 2018, Direksi PT KL telah melakukan pengajuan tambahan PK untuk menjawab kontra PK dari penggugat, namun posisinya belum disampaikan ke Mahmakah Agung (MA). Sementara terkait putusan pailit yang diberikan pada PT KL, pengurus kepailitan sudah mulai melakukan lelang salah satunya yaitu lelang jaminan PT PPA berupa tanah di Jl. Radio.

6. Restrukturisasi PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) / PT MNA

a. Dengan pelaksanaan program *Stop Bleeding* dan upaya restrukturisasi, kerugian PT MNA menurun dari semula Rp957 M (tahun 2017) menjadi Rp626 M (tahun 2018P).
b. PT MNA telah berhenti operasi sejak Februari 2014/ *Air Operator Certificate* (AOC) 121 telah dicabut. Seluruh fasilitas produksi (pesawat terbang) berusia > 30 tahun dan dalam kondisi rusak (*Beyond Economic Repair*). PT MNA terus menerus mengalami kerugian yang mengakibatkan ekuitas negatif Rp8,64 T tahun 2016. Seluruh aset perusahaan telah dijaminkan kepada kreditur.
c. Proses *rightsizing* karyawan melalui *lay-off* 1.482 orang (97%) telah diselesaikan dengan dukungan pendanaan dari PT PPA.
d. Optimalisasi pendapatan dari anak perusahaan yaitu PT Merpati Training Center dan PT Merpati Maintenance Facility.
e. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan:
    1. Restrukturisasi Hutang melalui PKPU yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Keputusan Nomor 4/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Surabaya pada tanggal 14 November 2018.
    2. Penjajakan Investor:
        i. Telah dilakukan pencarian investor sejak April 2018 s.d. Agustus 2018 dan hanya 1 (satu) calon mitra yang berhasil didapatkan yaitu PT Intra Asia Corpora (PT IAC).

operation.

c. PT KL was declared bankrupt by PN Niaga Surabaya, in the trial for the cancellation of the peace proposal by 15 former PT KL employees who are members of an Expert and one of the creditors (CV Alex Supraptono Group) on September 25, 2018. With regard to this decision, PT KL has submitted a Cancellation Decision (PK) memory and has been answered with counter-PK from the plaintiff. At the end of December 2018, the Directors of PT KL submitted additional PK proposals to answer PK counterarguments from the plaintiff, but their position had not yet been submitted to Supreme Court (MA). Meanwhile, related to the bankruptcy decision given to PT KL, the bankruptcy management has begun conducting an auction, one of which is the auction of PT PPA's guarantee in the form of land on Jl. Radio.

6. Restructuring of PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)/ PT MNA

a. With the implementation of the Stop Bleeding program and restructuring efforts, the loss of PT MNA declined from IDR957 billion (in 2017) to IDR626 billion (in 2018P).
b. PT MNA's operation halted since February 2014/Air Operator Certificate (AOC) 121 had been revoked. All production facilities (aircraft) are> 30 years old and are in a damaged condition (Beyond Economic Repair). PT MNA continued to suffer losses resulting in negative equity of IDR8.64 trillion in 2016. All of the company's assets have been pledged to creditors.

c. The rightsizing process for employees through 1,482 lay-offs (97%) was completed with funding support from PT PPA.
d. Optimizing revenue from subsidiaries, namely PT Merpati Training Center and PT Merpati Maintenance Facility.
e. Further Restructuring and/or Revitalization Programs that are being/will be implemented:
    1. Debt Restructuring through PKPU which has been determined by the Commercial Court at the Surabaya District Court through Decree No. 4/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Surabaya dated November 14, 2018.
    2. Investigation of Investors:
        i. Investors search has been carried out since April 2018 to August 2018 and successfully has obtained only one potential partner,

ii. Dalam hal kesepakatan dengan investor tidak diperoleh, maka dapat dipertimbangkan exit strategy dengan dampak risiko yang paling minim.

namely PT Intra Asia Corpora (PT IAC).

ii. If any agreement with an investor is not obtained, an exit strategy can be considered with the most minimal risk impact.

Pemegang Saham Stakeholders	**Lembar Saham** Shares	**Modal** Capital	**%**
Negara RI *Republic of Indonesia*	1.905.468	1.905.468.000.000	0,116%
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	59.088	59.088.000.000	0,004%
Kreditur Separatis *Separate Creditors*	131.552.440	2.253.159.992.682	8,036%
Kreditur Konkuren *Concurrent Creditors*	62.938.604	2.155.957.643.769	3,844%
PT IAC	1.440.674.400	6.400.000.000.000	88,000%
Jumlah *Total*	1.637.130.000	12.773.673.636.451	100,000%

➤ PENGEMBANGAN USAHA DAN PRIVATISASI BUMN

Program Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha adalah dengan melakukan penyusunan dan evaluasi road map, sinkronisasi road map dengan RJPP, penyusunan aspirasi pemegang saham, kebijakan dividen, privatisasi dan sinergi, koordinasi pengusulan PMN, koordinasi penyelesaian RDI/SLA/BPYBDS dan koordinasi pelaksanaan PSO. Program Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN ini merupakan upaya Kementerian BUMN dalam meningkatkan peran, kinerja dan nilai BUMN/Perusahaan yang dilakukan sejalan dengan mengoptimalkan peran BUMN sebagai agent of development menuju BUMN masa depan yang memiliki daya saing regional bahkan global.

➤ *BUSINESS DEVELOPMENT AND SOES PRIVATIZATION*

Business Development Program and SOEs Privatization conducted by Deputy of Restructuring and Business Development aim to make and evaluate roadmap, roadmap synchronization with RJPP, preparation of stakeholders' aspirations, dividend policy, privatization and synergy, PMN Proposal Coordination, RDI/SLA/BPYBDS completion coordination and implementation coordination of PSO. Business Development Program and SOEs Privatization is an effort of Ministry of SOEs in improving roles, performance, and value of SOEs/Companies that is carried out in line with the optimization of SOEs roles as agents of development to actualize future SOEs that have regional and even global competitive capability.


MAKSUD DAN TUJUAN BUMN
Purpose and Objectives of SOEs
BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional
SOEs as one of economic parties that contributes to national economy and development
PROGRAM STRATEGIS PENGUATAN BUMN
Strategic Program of Strengthening SOEs
• Sebagai besar kinerja, skala usaha dan kontribusi BUMN belum optimal
• Diperlukan arah pengembangan dan pembinaan BUMN menuju BUMN Champion (*Roadmap*) yang disinkronkan dengan RJPP dan Kebijakan Dividen
• Most of performance, business scale and contribution of SOEs are not optimal yet
• Development direction and SOEs fostering to be Champion SOEs
KONSOLIDASI
Holding, Merger, Akuisisi, Inbreng
PRIVATISASI
Pasar Modal dan Investor
SINERGI
Antar BUMN, BUMN dan Anak, Antar Anak, Dalam Sektor dan Lintas Sektor
DUKUNGAN NEGARA
PMN, Penerusan Pinjaman & PSO
BUMN CHAMPION

SOEs HOLDING
Holding BUMN

Holding adalah perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan. Perusahaan induk berperan sebagai pemegang saham dalam beberapa perusahaan anak dengan tujuan agar kinerja perusahaan meningkat dan memungkinkan terciptanya nilai pasar perusahaan. Holding juga bisa diartikan sebagai perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham di perusahaan lain dan mengatur perusahaan lain tersebut.

SOEs Holding is parent company that oversees some other companies in a company group. The parent company plays a role as stakeholder in some subsidiaries aiming to increase companies' performance and create companies' market value. Holding can also be defined as a company that aims to own shares in other companies and regulate the companies.

Kementerian BUMN menyusun *Roadmap* BUMN yang terdiri dari 15 tema, dalam *roadmap* tersebut secara garis besar terdiri atas rencana pelaksanaan proyek-proyek BUMN, serta rencana restrukturisasi/*regrouping* BUMN ke dalam 12 Holding BUMN, sebagai berikut:

Ministry of SOEs arranges SOEs Roadmap consisting of 15 themes. The roadmap mainly consists of planned implementation of SOEs projects and plan of restructuring/ regrouping SOEs into 12 (twelve) SOEs Holding, as follows:



HOLDING PERUMAHAN
Housing Holding



HOLDING PERBANKAN DAN JASA KEUANGAN
Banking and Financial Services Holding



HOLDING INFRASTRUKTUR
Infrastructure Holding



HOLDING JASA SURVEI
Survey Services Holding



HOLDING FARMASI
Pharmaceutical Holding



HOLDING ASURANSI
Insurance Holding



HOLDING PPA
PPA Holding



HOLDING NATIONAL DEFENCE AND HIGH TECH INDUSTRY



HOLDING TRANSPORTASI UDARA
Air Transportation Holding



HOLDING MARITIM
Maritime Holding



HOLDING NEWS PUBLISHING AND MEDIA CORP



HOLDING KAWASAN
Regional Holding

Rencana restrukturisasi/*regrouping* BUMN ini, pada dasarnya harus memperhatikan ketentuan pasar modal, serta mempertimbangkan reaksi dari pasar yang sangat sensitif terhadap rencana perubahan organisasi perusahaan. Tantangan lain yang dihadapi adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *regrouping*, baik dari sisi jumlah BUMN maupun dari pemangku kepentingan lain yang terlibat, menyebabkan banyak kepentingan yang harus diselaraskan dengan tujuan dasar pembentukan *regrouping*, yaitu untuk menjadikan BUMN lebih besar, kuat, dan lincah. Pada tahun 2018, telah terbentuk Holding BUMN Minyak dan Gas dengan induk holding adalah PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan yaitu PT PGN (Persero), Tbk.

Plans for SOEs restructuring/regrouping basically needs to consider capital market provisions, and consider market reaction that is very sensitive to plan for change in company organization. Another challenge is that there are many parties involved in implementation of regrouping, both in terms of total SOEs and other involved stakeholders. It results in interest that must be aligned with the basic purpose of regrouping, namely to make SOEs bigger, stronger and agile. In 2018, the SOEs and Oil and Gas Holding Company was formed with the holding company, PT Pertamina (Persero) and its subsidiary, PT PGN (Persero), Tbk.

➤ HOLDING BUMN MINYAK DAN GAS

Konsolidasi PGN ke Pertamina sejalan dengan pengelolaan bisnis gas pada beberapa negara-negara produsen gas. Pembentukan Holding BUMN sektor Migas yang melibatkan PGN dan Pertamina bertujuan agar penyediaan sumber energi berupa gas dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dengan lebih baik. Keunggulan Pertamina yang mempunyai kontinuitas suplai gas yang berasal dari domestik maupun impor ditambah jaringan distribusi gas PGN yang luas, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu pemerintah terutama untuk merealisasikan integrasi pengelolaan gas dalam rangka peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik. Integrasi antara perusahaan yang mempunyai lini bisnis di sektor gas diharapkan dapat mendorong beberapa kunci pertumbuhan bisnis gas di Indonesia, yaitu kelangsungan penyaluran produksi gas hulu nasional, optimalisasi struktur pricing gas serta pengembangan infrastruktur industri gas yang terkoordinasi dengan model pengelolaan gas alam yang terintegrasi dan terkonsolidasi.

Pembentukan Holding Migas memberikan dampak positif bagi kedua perusahaan yaitu terciptanya nilai tambah dari sinergi operasional, sinergi capex, dan peningkatan kapasitas investasi. Sinergi operasional tercermin pada meningkatnya laba usaha dan laba bersih Holding Migas yang diproyeksikan mencapai USD11,7 miliar dan USD5,9 miliar pada tahun 2021. Sinergi capex diperoleh melalui berkurangnya tumpang tindih rencana investasi kedua perusahaan dalam beberapa tahun kedepan. Selain itu, Holding Migas akan meningkatkan kapasitas investasi hingga mencapai USD15,5 miliar (Nilai Kini) selama 14 tahun kedepan. Total penambahan aset yang dapat diperoleh

➤ *OIL AND GAS SOES HOLDING*

PGN consolidation to Pertamina is in line with gas business management in gas-producing countries. The establishment of Oil and Gas SOEs Holding that involves PGN and Pertamina aims provide better resources of energy in the form of gas that can be responsibly exploited by all Indonesian people. Pertamina's superiority, which has a continuous supply of gas from domestic and abroad, plus the extensive PGN gas distribution network is expected to contribute significantly in helping the government, especially to realize the integration of gas management in order to increase the use of domestic natural gas. Integration between companies that have business lines in the gas sector is expected to encourage several key growths of the gas business in Indonesia, namely the continuity of national upstream gas production distribution, optimization of gas pricing structures and development of coordinated gas industry infrastructure with integrated and consolidated natural gas management models.

Establishment of Oil and Gas Holding companies provides positive impacts on the two companies, namely added value of operational synergy, capex synergy, and increasing investment capacity. Operational synergy is reflected from the increasing operating and net profit of Oil and Gas Holding companies that is projected to reach USD11,7 billion and USD5,9 billion in 2021. Capex synergy is obtained through the reducing level of overlapping investment plans of both companies in several years ahead. In addition, Oil and Gas Holding companies will increase investment capacity to USD15,5 billion (recent value) for 14 years ahead. Total additional assets that can be obtained by Pertamina through

Pertamina melalui sinergi paska pembentukan holding diproyeksikan mencapai ±USD25,3 miliar atau setara dengan Rp329 triliun.

synergy after holding establishment was projected to reach ±USD25,3 billion or worth IDR329 trillion.

Manfaat Pembentukan Holding Migas, antara lain:

Benefits of the Oil and Gas Holding establishment, among others are:

1. Peningkatan Efisiensi Investasi

   Saat ini terjadi tumpang tindih infrastruktur yang dibangun oleh Pertamina dan PGN. Setelah dibentuknya Holding, Holding Migas mendelegasikan kepada sub holding gas sebagai representasi dalam pengelolaan gas bumi untuk melakukan kajian atas seluruh infrastruktur yang saat ini dimiliki secara menyeluruh dan juga rencana pengembangan ke depan terutama untuk menghindari pembangunan infrastruktur yang tumpang tindih atau tidak dibutuhkan yang akan disetujui oleh Holding. Diperkirakan akan terjadi efisiensi investasi sebesar ±USD900 juta dengan adanya pembenahan dari tumpang tindih infrastruktur.

1. *Increased Investment Efficiency*

   Currently there has been an overlap of infrastructure built by Pertamina and PGN. After the Holding establishment, the Oil and Gas Holding will delegate to gas sub holding as a representation in natural gas management to conduct a comprehensive review of all infrastructure currently owned as well as future development plans, especially to avoid overlapping or unnecessary infrastructure development that will be approved by Holding. Investment efficiency is estimated to reach ± USD900 million with improvements in overlapping infrastructure.

2. Peningkatan kapasitas leveraging dan perbaikan finansial

   Dengan kemampuan untuk blending harga dan efisiensi biaya, Holding Migas akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki struktur keuangan perusahaan. Dengan diinbrengkannya saham Negara atas PGN ke Pertamina akan meningkatkan aset Holding Migas secara konsolidasi akan memberikan penambahan kapasitas kumulatif investasi ±USD32 miliar antara 2017-2030.

2. *Leveraging capacity enhancement and financial improvement*

   With the price blending and cost efficiency capabilities, the Oil and Gas Holding will have the ability to improve company's financial structure. The transfer of the State's shares in PGN to Pertamina will increase the Oil and Gas Holding's consolidated assets to provide cumulative investment capacity addition of ± USD32 billion in 2017-2030.

3. Kebijakan dalam penentuan harga

   Holding Migas akan memiliki fleksibilitas untuk menentukan harga yang sesuai dengan tipe konsumen dimana *supplier* gas juga akan tetap mendapatkan pengembalian yang wajar. Untuk konsumen, akan dilakukan penentuan harga berdasarkan pendekatan regional dengan memastikan bahwa harga domestik masih lebih murah daripada harga impor. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk menjaga kesinambungan penyediaan gas dan juga untuk memberikan subsidi silang harga antara harga retail dan harga untuk industri.

3. *Pricing Policy*

   The Oil and Gas Holding will have the flexibility to determine prices that match the type of consumer where gas suppliers will also still get a reasonable return. For consumers, pricing will be made based on regional approach by ensuring that domestic prices are still cheaper than import prices. This is done with the hope of maintaining gas supply continuity and also to give cross-subsidy between retail prices and industry prices.

4. Optimalisasi aliran gas secara nasional

   Holding Migas dapat melakukan optimalisasi pengembangan distribusi gas dengan menggunakan rencana jaringan gas nasional akan terdiri dari kombinasi antara distribusi melalui pipa dan juga pengapalan. Hal ini akan memastikan suplai domestik antar wilayah.

5. Penurunan Biaya Produksi dan Distribusi.

   Sinergi dalam Holding Migas akan memberikan dampak positif terhadap harga jual gas nasional. Hal ini dikarenakan Holding Migas dapat menekan biaya penjualan melalui optimalisasi infrastruktur produksi dan jaringan distribusi gas yang sudah dimiliki oleh Pertamina dan PGN, sehingga tidak memerlukan biaya investasi untuk infrastruktur yang lebih besar.

➤ PERSIAPAN PEMBENTUKAN HOLDING BUMN LAINNYA

Selain Holding Migas tersebut, dilakukan koordinasi persiapan pembentukan Holding BUMN dalam rangka pencapaian *Roadmap* BUMN Tahun 2015-2019 diantaranya pembentukan holding infrastruktur, perumahan, farmasi, PPA, jasa survey, jasa keuangan, asuransi, NDHI, NPMC, transportasi udara, dan maritim.

Holding Infrastruktur

Pemerintah bermaksud untuk membentuk holding BUMN sektor Infrastruktur untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol. Holding tersebut terdiri dari oleh 6 perusahaan yaitu HK, Jasa Marga, Waskita, ADHI, Indra Karya dan Yodya dengan target waktu yang diperlukan untuk mengintegrasikan Holding BUMN sektor Infrastruktur kurang lebih selama 5 tahun.

Sinergi dari keunggulan kompetitif masing-masing diharapkan akan mampu mewujudkan target pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kebutuhan akan holding juga didorong oleh beberapa pertimbangan yang cukup mendesak, yaitu Indonesia masih sangat tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol, tingginya *backlog* berakibat pada *expressway density* yang rendah, yaitu sekitar 0,05 km/1.000 penduduk. Selanjutnya, Holding BUMN Infrastruktur akan menciptakan pendanaan secara mandiri dan berkelanjutan (*sustainable & self-financed*)

4. *Optimizing the flow of gas nationally*

   The Oil and Gas Holding can optimize the development of gas distribution using the national gas network plan which will combine distribution through pipelines and shipping. This will ensure domestic supply between regions.

5. *Decrease in Production and Distribution Costs*

   Synergy in the Oil and Gas Holding will have a positive impact on the national gas selling price. This is because the Oil and Gas Holding can reduce selling cost by optimizing the production infrastructure and gas distribution network already owned by Pertamina and PGN, so that investment cost for larger infrastructure is no longer required.

➤ *PREPARATION OF OTHER SOES HOLDING ESTABLISHMENT*

In addition to the Oil and Gas Holding, coordination of the establishment of SOEs Holding was carried out in order to achieve the SOEs Roadmap 2015-2019 included the establishment of infrastructure, housing, pharmaceutical, PPA, survey services, financial services, insurance, NDHI, NPMC, air transportation and maritime.

Infrastructure Holding

The government intends to establish an SOE infrastructure sector holding to accelerate the development of toll road infrastructure. The holding consists of 6 companies, namely HK, Jasa Marga, Waskita, ADHI, Indra Karya and Yodya with a target time needed to integrate the SOE Infrastructure Holding sector for approximately 5 years.

The synergy of each competitive advantage is expected to be able to realize the development targets set by the Government. The need for holding is also driven by several considerations that are quite urgent, namely Indonesia is still very lagging behind in terms of infrastructure development, especially toll roads, the high backlog results in a low expressway density, which is around 0.05 km/1,000 inhabitants. Furthermore, SOEs Holding Infrastructure will create funding independently and sustainably in achieving the toll road development target, synergizing in terms of

dalam pencapaian target pembangunan jalan tol, dengan bersinergi dari sisi pendanaan, investasi dan operasional melalui mendorong peningkatan kinerja pendapatan dan efisiensi biaya. Selain itu terbentuknya Holding akan mendorong BUMN Infrastruktur untuk menjadi *Regional Infrastructure Development* dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur yang dapat menyumbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui pembentukan Holding BUMN sektor Infrastruktur yaitu

a) *Unlock synergies*
Adanya tambahan dana untuk kebutuhan reinvestasi pada berbagai proyek, sinergi biaya terutama dalam proses pengadaan, dan potensi penghematan.

b) *Expertise improvement*
Integrasi kapabilitas, keahlian, dan inovasi antar entitas di dalam holding, implementasi *best practices*, dan pengembangan kompetensi baru

c) *Infrastructure integration*
Holding menjadi *region infrastructure developer* dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah

d) *End-to-end ownership*
Peluang *own & operate* yang terkonsentrasi pada property residensial dan komersial, kawasan industri (BOO) dan energi (BOOT) dan perluasan kemampuan untuk memaksimalkan *value* jangka Panjang.

Holding Perumahan

Selain pembentukan Holding BUMN Infrastruktur, terdapat pula pembentukan Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan pada *Roadmap* sektor Konstruksi dan Infrastruktur. Dalam keterkaitannya dengan program Pemerintah untuk pengembangan sektor perumahan nasional dan mengatasi *backlog* perumahan nasional, terdapat beberapa BUMN yang memiliki bidang usaha terkait langsung maupun tidak langsung terhadap program pengembangan tersebut yang dapat berperan sebagai agen pembangunan sektor perumahan dan kawasan, yaitu: Perumnas, PP, Wijaya Karya, Amarta Karya, Virama Karya, Indah Karya, dan Bina Karya. Melalui Kemen PUPR, Pemerintah berinisiatif mengurangi jumlah backlog perumahan dengan konsep penghunian hingga mencapai 5 juta unit di tahun 2019, untuk konsep kepemilikan

funding, investment and operations through encouraging increased revenue performance and cost efficiency. In addition, the establishment of Holding will encourage Infrastructure SOEs to become Regional Infrastructure Development by integrating infrastructure development that can contribute to Indonesia's economic growth.

The expected objectives can be achieved through the establishment of the SOEs sector holding infrastructure, namely

a) Unlock Synergies
Additional funds for reinvestment needs on certain projects, price synergy especially in procurement process and retrenchment potential.

b) Expertise Movement
Capability of integration, skills, and innovation between companies in holding, implementation of best practices, and new competency development

c) Infrastructure Integration
Holding becomes regional infrastructure developer and accelerates regional economic growth

d) End-to-end Ownership
Opportunity of own & operate that Is concentrated on residential and commercial properties, industrial (BOO) and energy (BOOT) areas, and capability expansion to maximize long-term value.

Housing Holding

Besides the establishment of Infrastructure SOEs Holding, Housing SOEs Holding and Area Development on Construction and Infrastructure sector Roadmap are also established. In relation with Government's program to develop national housing sector and overcome national housing backlog, there are several SOEs that have business fields directly or indirectly related to the development program that can act as agents of development in the housing and regional sectors, namely: Perumnas, PP, Wijaya Karya, Amarta Karya, Virama Karya, Indah Karya, and Bina Karya. Through the Ministry of PUPR, the Government took the initiative to reduce the number of housing backlogs with the concept of occupancy to reach 5 million units in 2019, for the concept of ownership of up to 6.8 million units and

hingga 6,8 juta unit dan untuk rumah tidak layak huni hingga 1,9 juta unit di tahun 2019. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah yang merupakan gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, pengembang baik BUMN dan swasta, organisasi dan lembaga perumahan maupun masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan akan hunian tersebut. Oleh karena itu, BUMN sebagai agen pembangunan nasional diharapkan dapat menjadi katalis dan mempercepat rencana pemerintah terkait Program Sejuta Rumah. Melalui pembentukan Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan, pengembangan perumahan nasional dapat dilakukan, menciptakan *value creation* bagi BUMN anggota holding, dan upaya peningkatan kapasitas pendanaan Holding ke depannya.

for uninhabitable homes to 1.9 million units in 2019. To support this, Government has launched a Million Houses Program which is a joint movement between the Central Government, Regions, both state-owned and private developers, housing organizations and institutions as well as the community to realize the need for housing. Therefore, SOEs, as agents of national development are expected to be a catalyst and accelerate government plans related to the Million Houses Program. Through the establishment of SOEs Housing and Regional Development Holding, national housing development can be carried out, creating value creation for SOEs holding members, and efforts to increase holding funding capacity in the future.

Holding lainnya

Mengacu pada *Roadmap* BUMN Tahun 2015-2019, selama tahun 2018 Kementerian BUMN telah melakukan persiapan sepuluh Holding BUMN melalui diskusi antar BUMN, Kementerian/Lembaga terkait dan penyusunan kajian. Holding tersebut antara lain:

Other Holdings

Referring to the SOEs Roadmap for 2015-2019, throughout 2018 the Ministry of SOEs has arranged ten SOEs Holding through discussions between SOEs, related Ministries/ Institutions and arrangement of studies. The holding includes:

Holding Jasa Keuangan

Pada sektor ekonomi kerakyatan terdapat rencana pembentukan holding jasa keuangan yang dilatarbelakangi oleh sulitnya akses terhadap produk jasa keuangan *lower end*, jumlah nasabah pengguna produk perbakan dan jasa keuangan di sisi *lower end* yang masih rendah, gap besar atas pendanaan dengan program pembangunan Pemerintah, sedikitnya lembaga jasa keuangan Indonesia yang dapat bersaing secara global, dinamika industri berupa inefisiensi dalam investasi yang dilakukan BUMN lembaga jasa keuangan tren global yaitu masuknya teknologi yang berpengaruh pada lembaga jasa keuangan Indonesia

Financial Services Holding

In the populist economic sector, there is a plan to establish a financial service holding which is motivated by the difficult access to lower end financial services products, total of customers using banking and financial services products on the lower end is still low, large gaps in funding with Government development programs, only few service institutions Indonesian finance that can compete globally, industry dynamics in the form of inefficient investment by SOEs financial services institutions in the global trend, namely the influx of technology that affects Indonesian financial services institutions.

Holding Jasa Survey

Pembentukan holding jasa survei dilatarbelakangi oleh belum optimalnya sinergi antar BUMN yang disebabkan adanya lini bisnis yang serupa dan saling beririsan, pertumbuhan tenaga ahli dan pangsa pasar sulit tercapai jika hanya dengan mengandalkan pertumbuhan organik, serta potensi pasar domestik yang masih terus bertumbuh serta luar negeri yang cukup menjanjikan, serta penetrasi pemain global yang sangat agresif, dan performa reliabilitas BUMN Jasa Survei relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan *benchmark* perusahaan global.

Survey Services Holding

The establishment of survey services holding is motivated by the lack of optimal synergies between SOEs due to the existence of similar and intersecting business lines, the growth of experts and market share is difficult to achieve if only by relying on organic growth, domestic market potential that continually grows and foreign market that is sufficiently promising, the highly aggressive penetration of global players, and the reliability performance of Survey Services SOEs is relatively lower compared to global company benchmarks.

Holding Asuransi

Sedangkan untuk holding asuransi dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat inklusi keuangan, terbatasnya ekspansi perusahaan asuransi nasional di level domestik, komposisi premi bruto asuransi kerugian atau umum yang lebih rendah dibandingkan jiwa, jangkauan sektor asuransi yang terbatas di kota-kota besar, kompetisi yang agresif terutama dari pemain asing asuransi, masyarakat Ekonomi ASEAN, dan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi digital asuransi yang masih terbatas.

Insurance Holding

As for holding insurance, the background is the low level of financial inclusion, limited expansion of national insurance companies at the domestic level, composition of gross premium of loss or general insurance is lower than life insurance, limited coverage of insurance sector in metropolitan areas, aggressive competition especially from foreign insurance players, ASEAN Economic community, and the quality of human resources and the use of digital insurance technology are still limited.

Holding Farmasi

Pada sektor pelayanan kesehatan terdapat rencana pembentukan holding farmasi. Pembentukan holding ini dilatarbelakangi oleh 6 (enam) hal yaitu keterbatasan akses, keterbatasan kapabilitas dan inovasi, kompetisi yang ketat, ketergantungan impor dan ekspor yang rendah, biaya *supply chain* yang tinggi, serta regulasi yang kompleks.

Pharmaceutical Holding

In the health service sector, there is a plan to establish a pharmaceutical holding. The establishment of this holding is motivated by six matters, namely limited access, limited capability and innovation, intense competition, low dependence on imports and exports, high supply chain costs, and complex regulations.

Holding PPA

Latar belakang pembentukan holding PPA adalah dalam rangka penyehatan BUMN sebagai anak perusahaan memberikan hasil yg lebih baik, potensi sinergi dalam bisnis holding dan optimalisasi nilai tambah saham pemerintah.

PPA holding

The background for the establishment of PPA holding is in order to restructure SOEs as a subsidiary in providing better results, provide potential synergies in the holding business and optimize the added value of government shares.

Holding *National Defence and High Tech Industry* (NDHI)

Pada sektor pertahanan strategis terdapat rencana pembentukan holding NDHI yang dilatarbelakagi oleh kurangnya komitmen, penegakkan dan koordinasi antar pemangku kepentingan, ketidakpastian permintaan pasar, skala bisnis masih kecil, keterbatasan kemampuan finansial, inovasi dan penguasaan teknologi masih terbatas, kurangnya pengembangan industri hulu pertahanan, dan ekosistem pertahanan yang kurang berkesinambungan.

National Defense and High Tech Industry (NDHI) Holding

In the strategic defense sector, there is a plan to establish an NDHI holding. It is motivated by a lack of commitment, enforcement and coordination among stakeholders, uncertainty in market demand, small business scale, limited financial capacity, limited innovation and mastery of technology, lack of development of upstream defense industries and lack of sustainability of defense ecosystems.

Holding Sarana dan Prasarana Udara

Dalam sektor transportasi udara, perlu dibentuk suatu holding BUMN yang dapat memenuhi kekurangan industri sarana dan prasarana udara saat ini yang antara lain adalah keterbatasan kapasitas, konektivitas yaitu keterbatasan rute perintis, keselamatan, keamanan, & regulasi, persaingan ketat antar maskapai pemenuhan terhadap meningkatnya profil pelanggan baru yg mengubah ekspektasi pelanggan.

Air Facility and Infrastructure Holding

In the air transportation sector, a SOEs holding needs to be established to meet the current shortcomings of the air infrastructure and facilities, which include limited capacity, connectivity namely limited pioneer routes, safety, security & regulation, fierce competition between airlines and fulfillment of increasing new customer profiles that change customer expectations.

Holding Maritim

Selain transportasi udara, holding BUMN lain yang akan dibentuk adalah holding maritim yang akan memenuhi kebutuhan ekosistem maritim yaitu konektivitas antar pelabuhan dan kapasitas yang belum, sinkronisasi antar pemangku kepentingan perlu diselaraskan, kualitas layanan yang perlu ditingkatkan, bisnis dalam ekosistem pelabuhan yang belum sinergistik, pemanfaatan teknologi yang belum menyeluruh.

Maritime Holding

In addition to air transportation, another SOEs holding that will be formed is a maritime holding that will meet the needs of the maritime ecosystem, namely inter-port connectivity and capacity, synchronization among stakeholders needs to be synergized, service quality that needs to be improved, businesses in port ecosystems that have not been synergistic, utilization technology that is not yet comprehensive.

Holding Kawasan

Pemerintah Indonesia beraspirasi untuk menciptakan supply chain nasional yang terintegrasi di tengah tantangan yang ada dan aspirasi tersebut dapat tercapai dengan efektif melalui pembentukan Holding BUMN Kawasan.

Regional Holding

The Indonesian government aims to create an integrated national supply chain in the midst of existing challenges. These aspirations can be achieved effectively through the establishment of Regional SOEs Holding.

Holding National Publishing and Media Corporation

Pada sektor telekomunikasi dan digital terdapat rencana pembentukan holding NPMC yang dilatarbelakagi oleh kemampuan kelompok Percetakan dan Media untuk bertumbuh, fokus terhadap bisnis, efisien, mempunyai kelincahan dan kemampuan untuk bersaing di pasar domestik dan global, BUMN kelompok Percetakan dan Media mempunyai beberapa tantangan besar yakni performa profitabilitas cenderung tidak optimal dan tidak stabil, unit bisnis yang serupa dan saling bersinggungan, dan pertumbuhan bisnis yang hanya mengandalkan pertumbuhan organik.

National Publishing and Media Corporation Holding

In the telecommunication and digital sector, there is a plan to establish an NPMC holding based on the ability of the Printing and Media groups to grow, focus on business, be efficient, have agility and the ability to compete in the domestic and global markets. SOEs Printing and Media have some major challenges namely performance profitability tends to be not optimal and unstable, business units are similar and intersect, and business growth only relies on organic growth.

Di samping pembentukan holding-holding dimaksud, sebagai tindak lanjut pembentukan holding tambang, pada 12 Januari 2018, PT Inalum melaksanakan aksi korporasi lainnya dengan menandatangani perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10% sesudah divestasi. Di tanggal 12 Juli 2018, PT Inalum menandatangani *Head of Agreement* Divestasi Saham PT Freeport Indonesia sebagai dasar kesepakatan yang berisi tentang struktur dan nilai transaksi divestasi sebesar AS$3,85 miliar. Kemudian, pada 27 dan 28 September 2018, PT Inalum melakukan penandatanganan Perjanjian Defenitif antara FCX, Rio Tinto, dan Perseroan yang meliputi:

a. Perjanjian Divestasi PTFI (*Divestment Agreement*).

b. Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (*Sales & Purchase Agreement*).

c. Perjanjian Pengambilan Bagian Saham PTFI (*Subscription Agreement*).

Pada tanggal 21 Desember 2018, PT Inalum berhasil menyelesaikan transaksi divestasi saham dan terbitnya IUPK oleh Kementerian ESDM.

In addition to the establishment of the holdings, as a follow up to the establishment of a mining holding, on January 12, 2018, PT Inalum carried out other corporate actions by signing a PT Freeport Indonesia Share Divestment agreement between the Central Government, Papua Provincial Government, Mimika Regency Government and the Company. Based on the agreement, the Papua Provincial Government and Mimika Regency will jointly have 10% of PT Freeport Indonesia's shares rights after the divestment. On July 12, 2018, PT Inalum signed a Head of Share Divestment Agreement for PT Freeport Indonesia's as a basis for an agreement containing the structure and value of the divestment transaction of US$3.85 billion. Afterwards, on September 27 and 28 2018, PT Inalum signed a Defenitive Agreement between FCX, Rio Tinto and the Company which included:

a. PTFI Divestment Agreement

b. PT Rio Tinto Indonesia Sales & Purchase Agreement.

c. PTFI Subscription Agreement.

On December 21, 2018, PT Inalum successfully completed the share divestment transaction and the issuance of IUPK by the Ministry of Energy and Mineral Resources.



Privatization of SOEs
Privatisasi BUMN

Sementara itu, pelaksanaan privatisasi mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2009 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi, dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta Profesi Lainnya.

Meanwhile, implementation of privatization refers to Government Regulation No. 33 of 2005 as amended by Government Regulation No. 59 of 2009 concerning Procedures for Privatization of Companies (Persero), and Regulation of the Ministry of SOEs No. PER-01/MBU/2010 concerning on Privatization, Annual Program Preparation of Privatization, and Institution Appointment and/or Supporting Profession and other Professions.

Tujuan pelaksanaan privatisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN adalah meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero. Kementerian BUMN melalui Kedeputian Rekstrukturisasi dan Privatisasi BUMN mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang privatisasi yang selanjutnya usulan tersebut diteruskan oleh Menteri BUMN kepada Komite Privatisasi untuk memperoleh arahan dan Menteri Keuangan untuk mendapatkan rekomendasi.

The objectives of implementation of privatization as amended in Article 74 of Law Number 19 of 2003 concerning SOEs are to improve performance and added value of the companies, and improve roles of community in the Companies' share ownership. Ministry of SOEs through Deputy of SOEs Restructuring and Privatization has duties to prepare policy making and coordination of policy implementation in the context of privatization that the proposal is further is forwarded by Ministry of SOEs to Privatization Committee in order to obtain directions and is forwarded to Ministry of Finance to obtain recommendations.

KEBIJAKAN PRIVATISASI
Privatization Policy

PENGEMBANGAN BUMN
Diutamakan penjualan saham melalui pasar modal
- Memperluas akses pendanaan
- Perbaikan Struktur Pemodalan
- Peningkatan Penerapan GCG

SOEs DEVELOPMENT
Prioritizing Stock Sales through Capital Market
- Expanding funding access
- Capital Structure Improvement
- Implementation of GCG Improvement

PENYELAMATAN BUMN
Melalui *Managed Exit* untuk mendapatkan investor
- Pendanaan
- Bahan Baku
- Pasar
- Teknologi

RESCUING SOEs
Through Managed Exit to get investors
- Funding
- Raw Material
- Market
- Technology

PERENCANAAN SESUAI ROADMAP DENGAN MEMPERHATIKAN KONDISI PASAR DAN PENUGASAN
Planning according to the roadmap taking into account market conditions and assignments

PERSETUJUAN KOORDINASI YANG INTENSIF DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT
Intensive coordination agreement with relevant Ministries / Agencies

PELAKSANAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRINSIP-PRINSIP GCG
Implementation in accordance with statutory provisions and GCG principles

SOEs Synergy
Sinergi BUMN

BUMN sebagai motor penggerak pembangunan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan beragam kemajuan di bidang peningkatan ekonomi bangsa, dituntut untuk mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk negeri ini. Sebagai instansi Pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara, Kementerian BUMN selalu mengawal perusahaan BUMN dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita.

SOEs, as activators of development having strategic roles to actualizing various advancement in improving national economy, are demanded to contribute in realizing sustainable development in Indonesia. As Government institution who is responsible and officiated for managing the state's assets, Ministry of SOEs always oversees SOEs companies in realizing Indonesia that is sovereign, independent and having mutual cooperation characteristic, as amended in Nawacita.

BUMN pun dituntut untuk saling menyatukan visi dan misi melalui sebuah sinergi dalam rangka memperbaiki ketimpangan serta memeratakan kesejahteraan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, Kementerian BUMN juga membentuk Holding BUMN agar BUMN memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelaborasi kekayaan alam dan sumber daya manusia, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

SOEs are also demanded to always integrate its vision and mission into a synergy in order to improve inequality and economic welfare of all Indonesian people. In addition, Ministry of SOEs also establishes SOEs Holding, so that SOEs are capable of elaborating natural and human resources in order to enhance Indonesian economic growth.

Sinergi ini juga bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang terus berkelanjutan.

The synergy aims to maintain improvement of sustainable community welfare, community's sustainable social life, quality of living environment, and inclusive development and realization of governance that maintains improvement of community's sustainable quality life.

Berbekal pengalaman dan jaringan yang luas di seluruh nusantara, BUMN melalui sinergi yang berkesinambungan mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan Indonesia hebat di masa depan dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional di berbagai bidang secara berkelanjutan, merata dan berkeadilan. Dari sini akan tercipta BUMN yang benar-benar hadir untuk negeri ini, dan lebih dekat dengan masyarakat serta lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan.

By pocketing experience and vast networks in all over Indonesia, SOEs, through sustainable synergy, takes advanced leaps to actualize great Indonesia in the future by improving infrastructure availability that is considered vital in accelerating national development in various fields in a sustainable, equal and equitable manner. It will then create SOEs that are reliable to the county, close to the community and caring of living environment.

Klasifikasi Sinergi antar BUMN:

1. Konsolidasi
   Sinergi beberapa BUMN melalui pembentukan Holding, Merger/Konsolidasi BUMN, sehingga memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, skala usaha yang lebih optimal, efisiensi dengan mengurangi redudansi dan inkonsistensi

Classification of Synergy between SOEs:

1. *Consolidation*
   Synergy of some SOEs through the establishment of Holding, Merger/Consolidated SOEs makes SOEs have stronger capital structure, more optimal business scale, and efficient in reducing redundancy and inconsistency

2. Aliansi
   Sinergi beberapa BUMN dengan membentuk *Joint Venture* dalam rangka pengembangan atau pembangunan proyek tertentu dengan sharing sumber daya yang dimiliki masing-masing BUMN

3. Kolaborasi
   Sinergi beberapa BUMN melalui Kerjasama dalam bentuk Kontrak untuk melakukan pengelolaan suatu kegiatan usaha atau pemasaran suatu produk dan sebagainya

4. Transaksional
   Sinergi antar BUMN dalam penyediaan barang dan/ atau jasa yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya

2. *Alliance*
   Synergy of some SOEs by establishing Joint Venture in order to develop and construct certain projects with shared SOEs resources

3. *Collaboration*
   Synergy of some SOEs through cooperation in the form of Contract in order to manage certain activities or marketing of products and so on.

4. *Transactional*
   Synergy of SOEs in providing goods and/or services needed in operating their business.

➤ REALISASI SINERGI TAHUN 2014-2018

Jumlah sinergi berdasarkan bentuk

Dari 54 BUMN yang menyampaikan data sinergi, rincian realisasi berdasarkan bentuk sinergi sebagai berikut:

➤ *SYNERGY REALIZATION 2014-2018*

Amount of synergy based on form

Of the 54 SOEs that deliver synergy data, the details of realization are based on the form of synergy as follows:

Bentuk Sinergi *Forms of Synergy*	Jumlah Proyek *Total Projects*	Prosentase *Percentage*
Aliansi Strategis / *Strategic Alliance*	50	1,98%
Kolaborasi / *Collaboration*	2.468	98,02%
Total	**2.518**	**100,00%**

Sinergi berdasarkan nilai proyek

Dari 54 BUMN yang menyampaikan data, realisasi sinergi berdasarkan nilai proyek sebagai berikut:

Synergy based on project value

Of 54 SOEs that deliver data, synergy realization based on project value are as follows:

Nilai Proyek *Project Value*	Jumlah Proyek *Total Project*	Prosentase *Percentage*
< 50 Milliar/*Billion*	1326	72.54%
50 – 100 Milliar/*Billion*	110	6.01%
> 100 Milliar/*Billion*	392	21.45%
Total	**1828**	**100,00%**

➤ *FINANCIAL SUPPORT*

➤ DUKUNGAN PENDANAAN

Salah satu tujuan pemerintah membangun infrastruktur adalah menekan biaya logistik serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Sebagai agen pembangunan, BUMN pun berkomitmen penuh mendukung upaya tersebut, diantaranya adalah pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian *Light Rail Transit* (LRT) terintegrasi untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).

Pembangunan Proyek LRT Jabodebek saat ini tengah berlangsung dan direncanakan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2019. Proyek ini direncanakan membutuhkan dana sekitar Rp27,5 triliun yang akan digunakan untuk pembelian sarana dan pengadaan prasarana proyek. Investasi proyek LRT Jabodebek memerlukan dukungan pemerintah dalam hal pembiayaan proyek, sebab selain nilainya sangat bersar, KAI masih harus berinvestasi pada sektor lain terhadap pekerjaan dari penugasan-penugasan yang pada sat ini sedang berjalan. Dukungan pemerintah untuk pendanaan proyek LRT Jabodebek ini diperlukan guna penyelesaian proyek.

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI serta dalam rangka melanjutkan dukungan terhadap proyek strategis nasional melalui penugasan kepada PT KAI, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT KAI yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Efek positif dari dukungan pemerintah ini akan membantu PT KAI agar tetap dapat melakukan perluasan pekerjaan dengan melakukan pinjaman ke pihak perbankan untuk proyek investasi lainnya. Dukungan pemerintah khusus untuk pembiayaan proyek LRT Jabodebek tersebut secara spesifik berupa penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai sebesar Rp3,6 triliun yang diberikan pada tahun 2018, sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia.

One of government's objectives in building infrastructure is to reduce logistic costs and increase inter-regional connectivity. As agents of development, SOEs are fully committed to support the efforts by, among others, building infrastructure and facilities of integrated Light Rail Transit (LRT) for Jakarta, Bogor, Depok and Bekasi areas.

The infrastructure of Jabodebek LRT Project is ongoing and is projected to start operating in the middle of 2019. The project fund estimation is around IDR27,5 trillion that will be utilized for the project's facilities and infrastructure procurements. Investment of Jabodebek LRT project needs supports from government in terms of project funds, because besides it requires big costs, KAI still has to invest on other sectors, especially on the work of assignments that are currently underway. Government support for funding the Jabodebek LRT project is needed for project completion.

To improve capital structure and business capacity of PT Kereta Api Indonesia (Persero) or PT KAI, and in order to continue supporting national strategic project through assignment to PT KAI, according to Presidential Regulation No. 98 of 2015 concerning the Acceleration of the Implementation of Integrated Light Rail/Light Rail Transit in the Jakarta, Bogor, Depok, and Bekasi Areas as amended several times by Presidential Regulation No. 49 of 2017 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation No. 98 of 2015 concerning the Acceleration of the Implementation of Integrated Light Rail/Light Rail Transit in the Jakarta, Bogor, Depok and Bekasi Areas, the addition of the state capital participation of the Republic of Indonesia into the share capital of PT KAI is originated from the State Budget 2018.

The positive effect of government's supports will help PT KAI expand its works by making a loan to banking parties for other investment projects. Specific government support for financing the Jabodebek LRT project is specifically in the form of an additional IDR3.6 trillion in State Equity Participation (PMN) given in 2018, as has been regulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 26 of 2018 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia to the Share Capital of the Company (Persero) of PT Kereta Api Indonesia.

Utilization of PMN

Penggunaan PMN

Rencana Penggunaan PMN sebesar Rp3,6 triliun sesuai kajian bersama dialokasikan untuk penyelenggaraan pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan prasarana termasuk pendanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi dan penyelenggaraan sarana yang meliputi pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, pengusahaan sarana, menyelenggarakan sistem tiket otomatis (*automatic fare collection*) yang dapat mendorong peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi yang ekonomis dan ramah lingkungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan mobilitas masyarakat serta untuk meningkatkan kapasitas usaha dan struktur permodalan perusahaan.

Manfaat Penambahan PMN

1. Bagi Perusahaan (disesuaikan dengan Kajian Bersama atau Surat Persetujuan Perubahan Penggunaan PMN)
   - Melaksanakan program Pemerintah sesuai Perpres No. 49 Tahun 2017
   - Mendukung proyek strategis nasional
   - Mendukung penyelenggaraan proyek LRT Jabodebek
   - Memperkuat struktur permodalan dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan

2. Bagi Pemerintah/Masyarakat
   Melalui PMN ini, akan dibangun jalur kereta api dan pengoperasian prasarana dan sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* yang terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (LRT Jabodebek). Bagi Pemerintah, merupakan sebuah peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi. Terkait dengan itu, melalui pelaksanaan proyek ini akan semakin diperluas jaringan transportasi berbasis kereta api dalam sistem transportasi nasional yang selanjutnya akan memperkuat *logistic system* nasional sebab moda angkutan ini bersifat massal serta ramah lingkungan. Manfaat lainnya atas pelaksanaan program ini adalah meningkatnya produktivitas nasional melalui sumbangan kinerja di sektor transportasi khususnya kereta api dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Plan for utilization of PMN worth IDR3,6 trillion that is in accordance with the collective study is allocated for infrastructure operation, infrastructure maintenance, infrastructure business including integrated Light Rail Transit infrastructure funding in Jakarta, Bogor, Depok and Bekasi areas and infrastructure operation that includes infrastructure procurement, infrastructure operation, infrastructure maintenance, infrastructure business. Automatic fare collection can encourage improvement of public services in economic and environmentally friendly transportation and encourage economic growth through community's convenient mobility and improvement of business capacity and companies' capital structure.

Advantages of Additional PMN

1. *For Companies (adapted to the Joint Study or Approval Letter for Changing the Use of PMN)*
   - *Carrying out Government's program in accordance with Presidential Decree No. 49 of 2017*
   - *Supporting national strategic projects*
   - *Supporting implementation of Jabodebek LRT project*
   - *Strengthening capital structure and maintaining companies' financial stability*

2. *For Government/Community*
   Through the PMN, railways and operation of infrastructure and facilities of integrated Light Railway/ Light Rapid Transit in Jakarta, Bogor, Depok and Bekasi areas (Jabodebek LRT) will be built. For Government, Government have managed to provide improvement of public services in the field of transportation. Related with that aforementioned, through the implementation of this project, railway-based transportation network will be expanded and further will strengthen national logistic system because this transportation mode is mass and environmentally friendly. Another benefit of implementing this program is the increase in national productivity through the contribution of performance in the transportation sector, especially railways, in an effort to encourage national economic growth.


PT KKDM
WASKITA
KKDM
WASKITA

06

KEBIJAKAN DAN PROGRAM INFRASTRUKTUR BISNIS

BUSINESS INFRASTRUCTURE POLICIES AND PROGRAMS

PROGRAM PENGELOLAAN SDM EKSEKUTIF BUMN MERUPAKAN SERANGKAIAN PROSES DALAM MEMPERSIAPKAN, MEMPERTAHANKAN, DAN MENGEMBANGKAN PIMPINAN BUMN UNTUK MEMASTIKAN KEBERLANGSUNGAN BUMN DALAM JANGKA PANJANG

The SOEs Executive HR management program is a series of processes in preparing, maintaining, and developing SOEs' leaders to ensure the sustainability of SOEs in the long term

The Ministry of SOEs Business Infrastructure Policies and Programs

Kebijakan dan Program Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN

Di antara tugas Kementerian BUMN yang dilakukan melalui unit kerja Kedeputian Bidang Infrastruktur Bisnis adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia eksekutif, pengelolaan data dan teknologi informasi pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta layanan hukum BUMN.

Among duties of Ministry of SOEs, Deputy for Business Infrastructure organizes policy making, coordination and synchronization of policy implementation in improving capacity of executive human resources management, data and information technology management, social and environmental responsibilities, and SOEs legal services.

Tantangan Pengelolaan BUMN
Challenges of SOEs Management



SOEs Executive Management Program

Program Pengelolaan Manajemen Eksekutif BUMN



Dalam konfigurasi global saat ini, tantangan pembangunan bangsa mulai bergeser tidak lagi berkisar pada penciptaan kesempatan usaha, namun mulai beralih pada membangun sendi-sendi kekuatan daya saing Negara. Faktor daya saing merupakan salah satu pilar bagi keberlangsungan pembangunan suatu Negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka pada konteks pengelolaan BUMN, di samping peningkatan kompetensi, peningkatan daya saing perusahaan merupakan kebutuhan yang penting sekaligus urgent untuk dilakukan. Salah satu faktor krusial yang perlu dikelola secara sistematis dan terintegrasi dengan program peningkatan daya saing perusahaan adalah *human capital*.

Program pengelolaan SDM Eksekutif BUMN merupakan serangkaian proses dalam mempersiapkan, mempertahankan, dan mengembangkan pimpinan BUMN untuk memastikan keberlangsungan BUMN dalam jangka panjang. Program ini juga bertujuan agar pimpinan BUMN dapat berkinerja unggul pada masa kini maupun di masa yang akan datang sejalan dengan visi, misi, serta sistem nilai BUMN. Pengelolaan korporasi BUMN yang modern memerlukan profil kepemimpinan yang berkarakter kuat, bersih dan mengedepankan nurani, kepemimpinan yang *visioner*, professional dan memiliki wawasan kebangsaan. Pemimpin di BUMN tidak hanya harus memiliki intuisi bisnis yang tajam, tetapi juga pro kerakyatan dan berwawasan global.

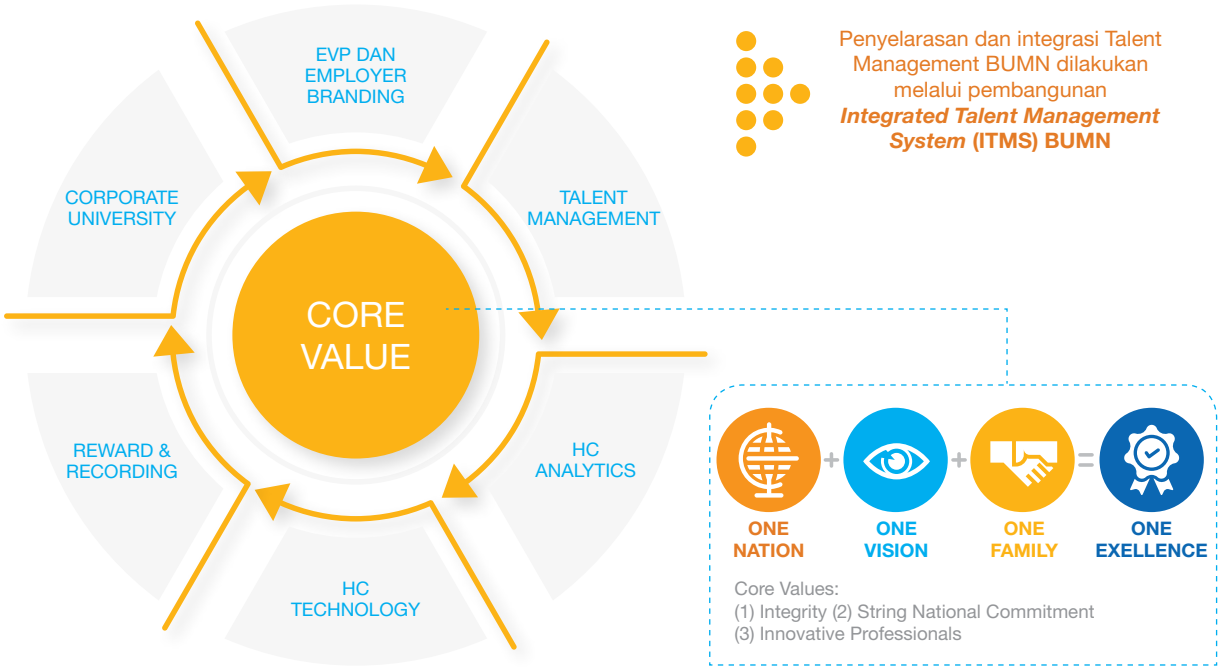
In today's global configuration, national development challenge has commenced to shift and no longer get revolved around business opportunity creation. However, it starts to develop the strength of national competitiveness. Competitive factor has become one of the pillars of national development sustainability. To run into the challenge, in the context of SOEs management and besides competency improvement, the company's competitive improvement is also a crucial need that must be managed systematically and must be integrated with the company's competitive improvement program, which is human capital.

The SOEs Executive HR management program is a series of processes in preparing, maintaining, and developing SOEs leaders to ensure SOEs long-term sustainability. The program also aims to present SOEs leaders having superior performance in the present and in the future, in line with vision, mission, and value system of SOEs. Modern SOEs corporation management requires strong, clean, conscience, visionary, professional, and national insightful leaders. Leaders in SOEs must not only have sharp business intuition, but also pro-people and have global insight.

Dalam konteks pengelolaan SDM Eksekutif BUMN, program yang dicanangkan adalah Penyelarasan dan Integrasi *Human Capital* BUMN, dimana pada tahun 2018 beberapa program strategis yang sudah dilakukan di antaranya: 1) Pembangunan *Integrated Talent Management System* (ITMS) BUMN, 2) *Redesign* Sistem Remunerasi Eksekutif BUMN, 3) Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Direksi BUMN, 4) Penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dan 5) Integrasi Parameter Kinerja BUMN.

In the context of SOEs Executive HR management, the program that was launched was the Alignment and Integration of SOEs Human Capital, where in 2018, several strategic programs that have been carried out include: 1) Development of SOEs Integrated Talent Management System (ITMS), 2) Redesign of SOEs Executive Remuneration Systems, 3) Feasibility and Proper Test of Prospective Directors of SOEs, 4) Assessment of Prospective Board of Commissioners/SOEs Supervisory Board, and 5) Integration of SOEs Performance Parameters.

PENYELARASAN DAN INTEGRASI HUMAN CAPITAL BUMN
Alignment and Integration of Human Capital SOEs

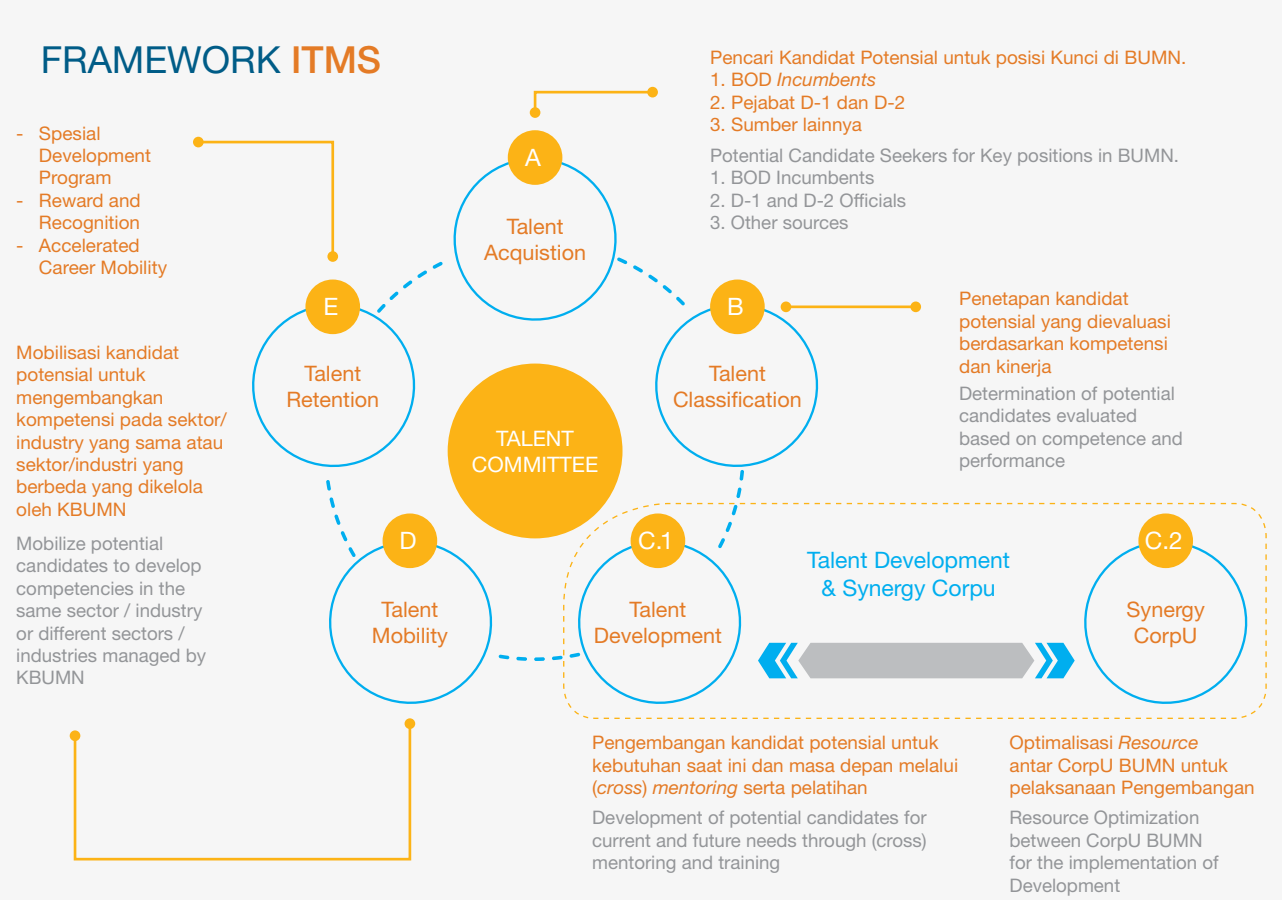


➤ ITMS BUMN

Dalam rangka mendukung ketersediaan dan kesiapan *talent* untuk *sustainable growth* BUMN, pengelolaan fungsi-fungsi *talent management* dengan sistematika dan mekanisme yang lebih baik, menjaga tata kelola proses pemilihan calon Direksi BUMN, meningkatkan daya tarik BUMN dalam mempertahankan dan/atau mengembangkan *talent* terbaik yang ada di BUMN, serta menjadikan BUMN sebagai salah satu sumber *talent* unggulan nasional, telah dirumuskan ITMS BUMN. Sistem ini merupakan proses yang terintegrasi dalam mempersiapkan, mengembangkan, dan meretensi *human capital* BUMN agar berkinerja unggul sejalan dengan visi, misi, dan nilai BUMN sebagaimana *Framework* Dasar berikut:

➤ *SOES ITMS*

In order to support availability and talent preparation for SOEs sustainable growth, SOEs ITMS has formulated functions of talent management with better systematics and mechanisms, governance maintenance of the selection process of candidates for SOEs Directors, increase of attractiveness of SOEs in maintaining and / or developing the best talents in SOEs, as well as making SOEs as one of the national leading talent sources. The system is an integrated process in preparing, developing, and retaining SOEs human resources so that it can perform superior aligned with vision, mission, and value of SOEs, as stipulated in the following Basic Framework:



➤ RE-DESIGN SISTEM REMUNERASI EKSEKUTIF BUMN

Untuk mendorong munculnya *best leaders* dari internal BUMN dan agar BUMN memiliki daya tarik serta memotivasi profesional handal untuk ikut berkiprah memajukan BUMN, telah dilakukan *re-design* sistem remunerasi eksekutif BUMN dengan mendasarkan pada filosofi sebagai berikut:

1) mengacu pada data pasar nasional maupun regional;
2) menjaga keadilan di antara sesama BUMN yang beragam skala dan kompleksitas usahanya;
3) mendorong pertumbuhan bisnis;
4) mendorong BUMN untuk menjadi *benchmark* di industrinya;
5) menghargai tanggung jawab dan pencapaian dalam mendukung program Pemerintah; serta
6) menjaga kepantasan dengan hasil dan kemampuan keuangan perusahaan.

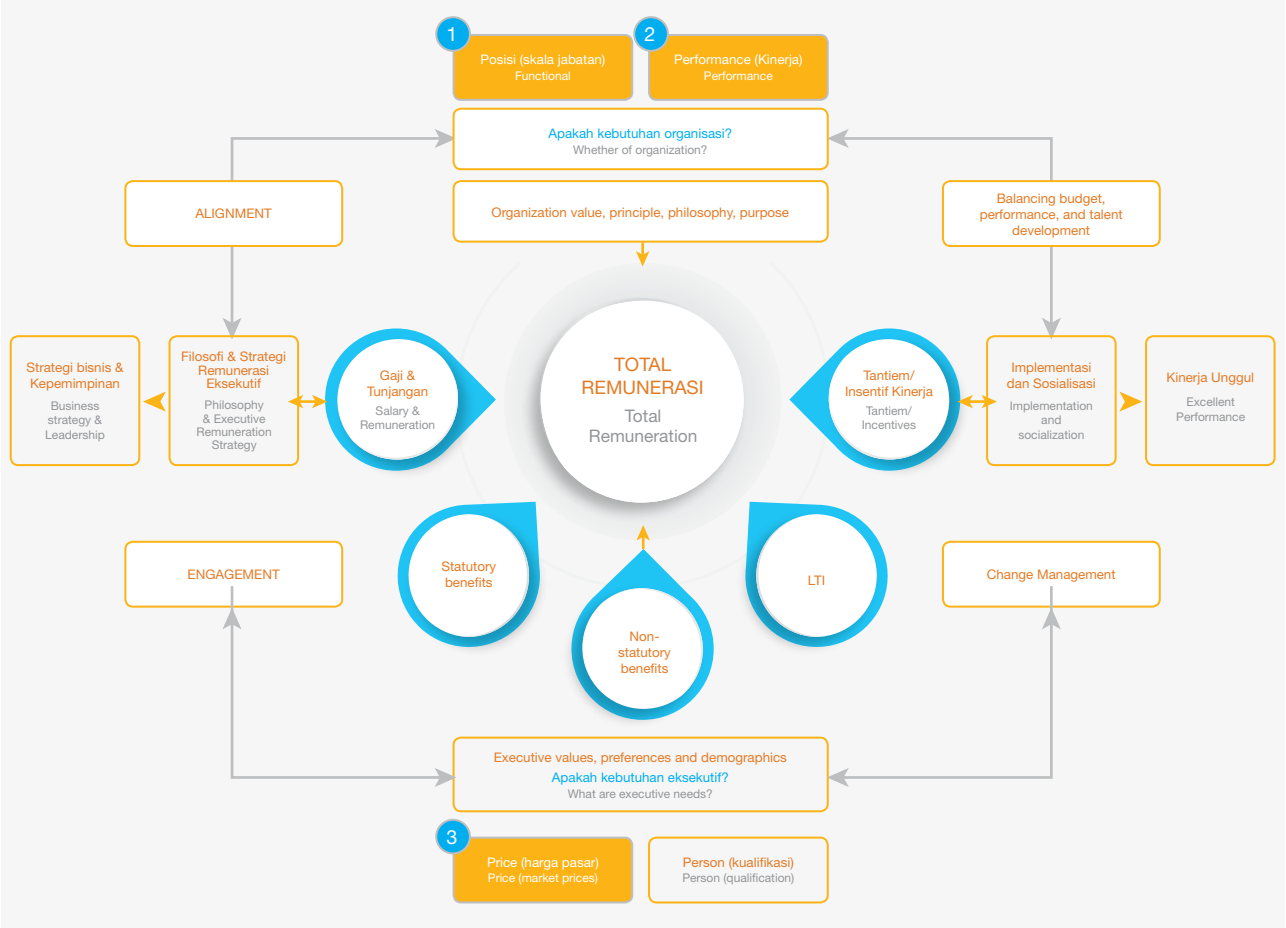
➤ *REDESIGNING OF SOES EXECUTIVE REMUNERATION SYSTEM*

To encourage the emergence of best leaders from internal SOEs and to make SOEs have the attraction and motivate reliable professionals to take part in advancing SOEs, a re-design of the SOEs executive's remuneration system has been carried out based on the following philosophies:

1) referring to national and regional market data;
2) maintaining justice among SOEs that vary in scale and complexity of their businesses;
3) encouraging business growth;
4) encouraging SOEs to become benchmarks in their industries;
5) respecting responsibilities and achievements in supporting Government programs; and
6) maintaining appropriateness with the results and financial capabilities of the company.

Pada tahun 2018, Kementerian BUMN bekerja sama dengan pihak independen yang profesional di bidang *reward system*, telah mengevaluasi dan menyempurnakan sistem remunerasi bagi Direksi dan Dekom/Dewas dimana sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014, menjadi pengaturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018.

In 2018, Ministry of SOEs cooperated with independent party that is specialized in the field of reward system, evaluated and perfected remuneration system for Directors and Board of Commissioners and Supervisors that was stipulated in Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014, becoming a regulation as stated in the Minister of SOEs Regulation Number PER-06/MBU/06/2018.

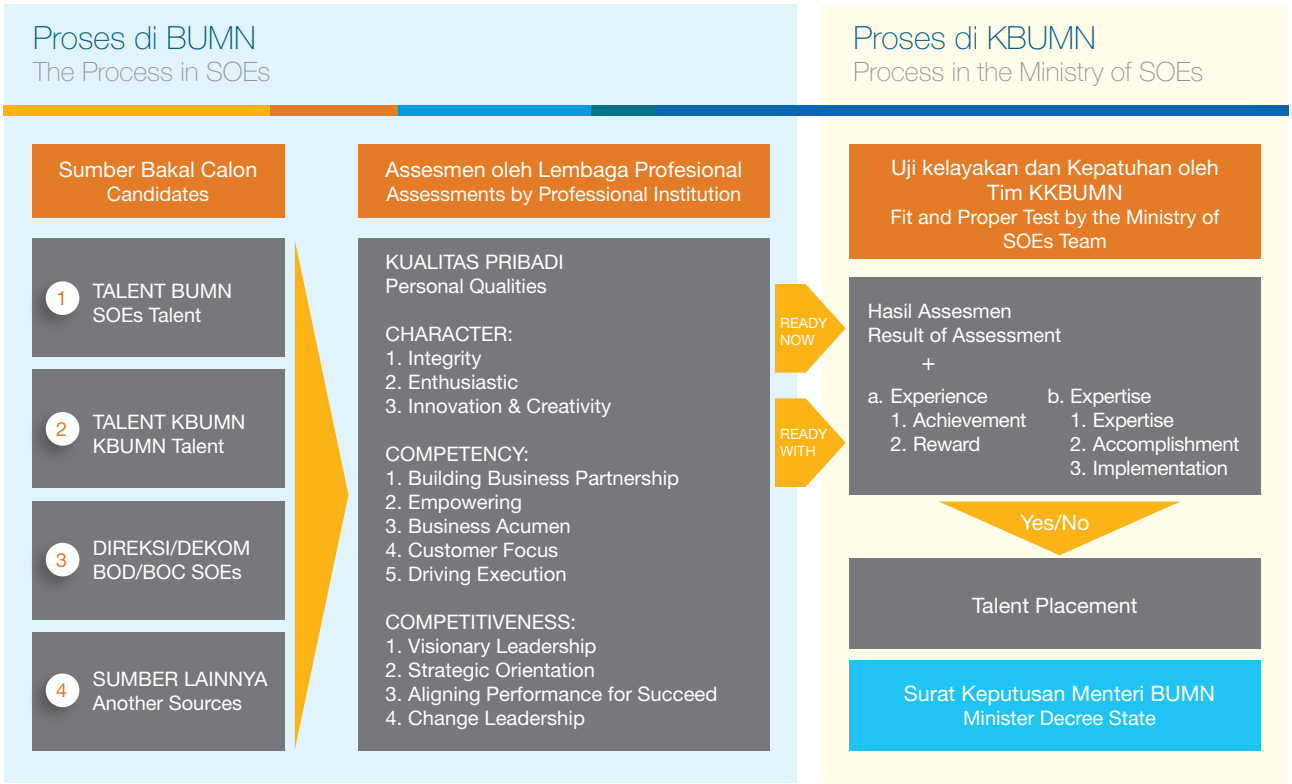


➤ UJI KELAYAKAN & KEPATUTAN BAKAL CALON DIREKSI BUMN

Merupakan mekanisme pemilihan Calon Direksi BUMN, dengan mengacu pada ketentuan PER-03/MBU/02/2015 sebagaimana *flow* berikut ini:

➤ *FIT AND PROPER TEST FOR SOES DIRECTOR CANDIDATES*

Fit and Proper test is a mechanism for Election of SOEs Board of Directors Candidates by referring to the provisions of PER-03/MBU/02/2015 as follows:



➤ PENILAIAN BAKAL CALON DEKOM/ DEWAS BUMN

Merupakan mekanisme pemilihan Calon Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN, dengan mengacu pada ketentuan PER-02/MBU/02/2015 sebagaimana flow di bawah ini:

➤ *ASSESSMENT OF SOES BOARD OF COMMISSIONERS / SUPERVISORY BOARD CANDIDATES*

It is a mechanism for selecting the SOEs Board of Commissioners/Supervisory Board candidates, with reference to the provisions of PER-02/MBU/02/2015 as the flow below:



➤ INTEGRASI PARAMETER KINERJA BUMN

BUMN telah dan terus berperan penting dan berkontribusi positif dalam pembangunan nasional sehingga perlu didorong peningkatan kinerjanya melalui pengukuran yang komprehensif baik berdasarkan standar yang lazim dalam dunia usaha maupun dalam menjalankan misi sebagai agen pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran atas kinerja BUMN harus mencakup seluruh aspek pengelolaan perusahaan, meliputi aspek keuangan, operasional, kapabilitas dinamis, dan tata kelola usaha yang sehat.

Saat ini, penilaian atas kinerja BUMN dilakukan menggunakan berbagai parameter/alat ukur, yang berimplikasi pada kurang efektif dan efisiennya proses penilaian serta kurang komprehensifnya hasil penilaian, sehingga kurang optimal pula bagi pengambilan keputusan oleh pemegang saham.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penilaian kinerja BUMN, maka dilakukanlah pengintegrasian parameter kinerja BUMN yang terdiri dari 3 (tiga) parameter kinerja eksisting, yaitu: Tingkat Kesehatan, *Good Corporate Governance* (GCG), dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama regulasi yang mengaturnya, alat ukur yang akan menjadi anchor adalah Tingkat Kesehatan dimana ke depan akan mengakomodir pula substansi dari GCG dan KPKU.

Salah satu perubahan yang esensial dari pengintegrasian ketiga parameter kinerja BUMN tersebut, adalah *shifting paradigm* dari semula "memotret kinerja yang telah terjadi" menjadi "memberikan apresiasi atas antisipasi masa depan", yang di antaranya diwujudkan dalam aspek kapabilitas dinamis terkait kepemimpinan, teknologi informasi, dan inovasi.

Selama tahun 2018, telah dilakukan penyusunan parameter kinerja BUMN model baru melibatkan beberapa pihak, di antaranya: BPKP, Forum Ekselen BUMN, perwakilan BUMN, profesional/independen, dan mantan Pimpinan Kementerian BUMN, serta telah diujicobakan kepada beberapa BUMN.

➤ *INTEGRATION OF SOES PERFORMANCE PARAMETERS*

SOEs have continued and do continue to play an important role and contribute positively in national development, so it needs to be encouraged to improve its performance through comprehensive measurements based on standards that are prevalent in the business world and in carrying out missions as agents of development. Therefore, SOEs performance measurement must cover all aspects of the company's management, including financial, operational, dynamic capability and sound business governance aspects.

Recently, the SOEs performance measurement is carried out using various parameters/measuring instruments, which have implications for the lack of effective and efficient assessment process and the lack of comprehensive assessment results, so it is not optimal for decision making by shareholders.

In the context of the effectiveness and efficiency of the SOEs performance evaluation, integration of SOEs performance parameters consists of 3 (three) existing performance parameters, namely: Health Level, Good Corporate Governance (GCG), and Superior Performance Assessment Criteria (KPKU). By considering various aspects, especially the regulations that govern it, the anchor of measuring instrument is the Health Level where in the future it will also accommodate the substance of GCG and KPKU.

One of the essential changes from the integration of the three SOEs performance parameters is the shifting paradigm from the beginning "photographing the existing performance" to "giving appreciation for the anticipation of the future", which is manifested in aspects of dynamic capability related to leadership, information technology, and innovation.

During 2018, the preparation of the performance parameters of the new SOEs model involved several parties, including: BPKP, the SOEs Excellent Forum, SOEs representatives, professionals/independents, and former Ministry of SOEs Managers, and all have been tested to several SOEs.

Guna menyokong pelaksanaan Penyelarasan dan Integrasi Human Capital BUMN sebagaimana uraian di atas, selama tahun 2018 Kementerian BUMN telah menetapkan beberapa kebijakan/regulasi sebagai berikut:

In order to support the implementation of the SOEs Human Capital Synchronization and Integration aforementioned, during 2018, the Ministry of SOEs has set several policies/ regulations as follows:

01 PERATURAN MENTERI
Ministerial Regulation

a. Persyaratan, Tata Cara Pegangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Dean Pengawas BUMN[1), 2)]
b. Pedoman penetapan penghasilan Direksi, dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN[3)]

a. Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and the SOEs Supervisory Board[1), 2)]
b. Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and SOEs Supervisory Board[3)]

02 ARAHAN RUPS (RKAP 2018
GMS Direction (RKAP 2018)

Arahan Pemegag Saham dalam Keputusan Rups RKAP 2018 agar BUMN
a. Menyelenggarakan *talent management*
b. Mengirimkan *talent pool* sebanyak 20%
c. Menyiapkan kandidat suksesor Direksi dari BOD-1 sebanyak 3 kandidat per posisi

Direction of Shareholders in the Decision of the 2018 RKAP GMS so that SOEs
a. Hold talent management
b. Sends 20% of talent pool
c. Prepare Board of Directors' successor candidates from BOD-1 as many as 3 candidates per position

Note:
1) Permen BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015
2) Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015
3) Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/06/2016
4) Surat Deputi IBIS Nomor: S-02/D7.MBU/01/2018 tanggal 2 Januari 2018
5) Surat Deputi IBIS Nomor: S-92/D7.MBU/04/2018 tanggal 26 April 2018

03 SHAREHOLDER ASPIRATION
(RKAP 2019)

a. Pengembangan *Integrated Talent Managemnet System* (ITMS)
b. Program Pengembangan dialokasikan dalam RKAP 5% dari Total Anggaran *Human capital* dalam 1 tahun

a. Integrated Talent Management System (ITMS) development

b. The Development Program is allocated in the RKAP of 5% of the Total Human Capital Budget in 1 year

04 PERSURATAN KBUMN LAINNYA
Other KBUMN Letter

a. Permintaan data talent pool ke seluruh BUMN[4)]
b. Implementasi ITMS secara profesional, tidak *like and dislaike*, sehingga talenta yang dikirimkan ke dalam ITMS dapat menjadi sumber talenta nasional[5)]

a. Request talent pool data to all SOEs[4)]

b. Professional implementation of ITMS, not like and dislike, so that the talent sent to the ITMS can be a source of national talent[5)]

Note:
1) Ministerial Regulation of SOEs No. PER-02/MBU/02/2015
2) Ministerial Regulation of SOEs No. PER-03/MBU/02/2015
3) Ministerial Regulation of SOEs No. PER-01/MBU/06/2016
4) Letter of Deputy of IBIS No. S-02/D7.MBU/01/2018 January 2, 2018
5) Letter of Deputy of IBIS No. S-92/D7.MBU/04/2018 April 26, 2018

Program Data and IT
Program Data dan TI



Dalam rangka meningkatkan daya saing BUMN untuk menghadapi persaingan dunia usaha yang kompetitif di era global seperti ini, sangat diperlukan dukungan sistem dan mekanisme pengambilan keputusan dan kebijakan secara cepat dan tepat oleh pejabat Kementerian BUMN. Untuk menunjang kegiatan tersebut, Kementerian BUMN membutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung kelancaran penyelesaian pekerjaan sehari-hari, baik di lingkungan Kementerian BUMN atau dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan BUMN.

In order to improve SOEs competitive advantages to face business competition in the global era, there is a need for system and mechanism to support quick and right decision and policy making by the Ministry of SOEs officials. For that reason, the Ministry of SOEs needs adequate work facilities and infrastructure to support smooth completion of daily work, both within the Ministry of SOEs or in the framework of carrying out its duties in guiding and overseeing SOEs.

Kementerian BUMN melalui Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis telah melakukan pengelolaan data dan teknologi informasi melalui beberapa program, selain membangun dan menerapkan sistem aplikasi Integrated Talent Management System (ITMS), Kementerian BUMN juga membangun dan menerapkan Sistem Berbagi Gagasan (SiBagas), dan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SiNadine).

The Ministry of SOEs through the Deputy of Business Infrastructure has conducted data and information technology management through several programs, including developing and implementing application systems such as Integrated Talent Management System (ITMS), Sistem Berbagi Gagasan (SiBagas), or Idea Sharing System (SiBagas), and Sistem Naskah Dinas Elektronik (SiNadine).

➤ SISTEM BERBAGI GAGASAN (SIBAGAS)

Dalam rangka mendorong proses transformasi Kementerian BUMN menjadi sebuah organisasi pembelajar (*learning organization*) perlu diciptakan atmosfer yang kondusif untuk dapat mengembangkan kapasitas diri melalui proses mendapatkan, menyimpan, menyebarluaskan, menerapkan, dan mengevaluasi/menyempurnakan pengetahuan yang ada baik yang sudah tertulis ataupun yang masih dalam diri masing-masing individu pegawai.

Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya yang terencana, sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* organisasi dalam bentuk manajemen pengetahuan. Guna mendorong implementasi manajemen pengetahuan saat ini, Kementerian BUMN telah membangun Sistem Berbagi Gagasan (SiBagas) yang dapat memfasilitasi penumbuhan, penyebaran, penyimpanan informasi, gagasan, dan pengetahuan.

Kementerian BUMN membangun *Knowledge Management System* (KMS) yang terdiri dari tiga bagian penting, yaitu *electronic sharing* (*e-sharing*), *electronic learning* (*e-learning*), dan *electronic repository* (*e-repository*).

Aplikasi Sistem Berbagi Gagasan (SiBagas) merupakan media implementasi KMS untuk *e-sharing*, yaitu pembelajaran sosial melalui berbagi ide/gagasan serta bekerja secara kolaboratif (*social learning and collaboration*). SiBagas mampu memfasilitasi; (1) penyampaian, pertukaran, pengayaan, dan penyebaran informasi, ide, gagasan, pemikiran dan pengetahuan di lingkungan Kementerian BUMN; (2) Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Melalui aplikasi ini, insan Kementerian BUMN dituntut untuk memasukan aktivitas berbagi pengetahuan melalui *www.sibagas.bumn.go.id* (SiBagas), sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Untuk mengaktivasi SiBagas di *Mobile Device*, terlebih dahulu harus men-*download* aplikasi SAP JAM di *Google Play* (Android) atau *App Store* (IOS).

Dengan penggunaan yang optimal atas aplikasi ini, diharapkan akan tercapai peningkatan efektivitas dan produktivitas seluruh komponen di Kementerian BUMN. Akhirnya, cita-cita menjadikan Kementerian BUMN sebagai *learning organization* dapat diwujudkan.

➤ *KNOWLEDGE/IDEAS SHARING SYSTEM (SIBAGAS)*

In order to encourage the Ministry of SOEs' transformation process into a learning organization, it is necessary to create an atmosphere that is conducive to developing self-capacity through the process of obtaining, storing, disseminating, implementing, and evaluating/refining existing knowledge both written and instilled in each employee.

Therefore, there is a need for planned, systematic, structured and continuous efforts involving all organizational stakeholders in the form of knowledge management. In order to encourage the knowledge management implementation, currently the Ministry of SOEs has built Sistem Berbagi Gagasan (SiBagas) or Knowledge/Ideas Sharing System that can facilitate the growth, dissemination, and storage of information, ideas and knowledge.

The Ministry of SOEs develops Knowledge Management System (KMS) which consists of three important parts, namely electronic sharing (e-sharing), electronic learning (e-learning), and electronic repository (e-repository).

The Sistem Berbagi Gagasan (SiBagas) or Knowledge/Ideas Sharing System Application is the KMS' media for the implementation of "e-sharing", i.e. social learning through ideas/knowledge sharing as well as collaborative work (social learning and collaboration). SiBagas is able to facilitate; (1) delivery, exchange, enrichment, and dissemination of information, ideas, thoughts and knowledge within the Ministry of SOEs; (2) communication, coordination and collaboration between employees in carrying out their duties and functions.

Through this application, the Ministry of SOEs's personnel is required to input knowledge sharing activities through www.sibagas.bumn.go.id (SiBagas) as one of the Key Performance Indicators (KPI) in the Employee Performance Target. To activate SiBagas in Mobile Device, you must first download the SAP JAM application on Google Play (Android) or App Store (IOS).

With an optimal use of this application, it is expected to realize an increase in the effectiveness and productivity of all components in the Ministry of SOEs. Eventually, the ideals of making the Ministry of SOEs a learning organization can be realized.

Pada prinsipnya, aplikasi manajemen pengetahuan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan tiga komponen dasar yaitu teknologi komunikasi, teknologi kolaborasi, dan teknologi storage & retrieval. Sistem *knowledge management* memiliki manfaat yang sangat berguna, diantaranya:

- Pengetahuan adalah asset paling berharga dan sumber *competitive advantage*;
- Tingkat kadaluwarsa pengetahuan sangat cepat, sekitar 500 hari, bahkan di beberapa sektor bisa lebih cepat lagi;
- "*reinventing the wheel*"; tidak tahu apa yang sudah diketahui; tidak tahu di mana mengakses pengetahuan, (*costly and inefficient activity*);
- Berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) adalah kekuatan: pengetahuan membangun kepercayaan dan kepercayaan membangun pengetahuan;
- Alur pengetahuan: ide - konsep - inovasi

Setiap insan Kementerian BUMN yang menggunakan fasilitas Sistem Berbagi Gagasan (SiBagas) ini, harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, sebagaimana berikut ini:

1. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi, ide, gagasan, dan pemikiran secara obyektif, rasional, dan beradab.
2. Berperilaku positif dan berpikiran terbuka.
3. Peka terhadap keberagaman latar belakang, karakter dan minat pengguna lain.
4. Menghormati ide dan pemikiran orang lain dan menjaga orisinalitas karya.
5. Menggunakan bahasa jelas, santun, dan mudah dipahami.
6. Tidak menggunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kepentingan kedinasan.
7. Tidak menyebarkan rahasia negara dan rahasia jabatan.
8. Tidak melakukan penghinaan, intimidasi, *bulliying*, ujaran kebencian atas dasar SARA dan keterbatasan.
9. Tidak menyebarkan konten pornografi dan pornoaksi atau hal-hal lain yang bertentangan dengan norma kesopanan.
10. Tidak menggunakan aplikasi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Aparatur Kementerian BUMN.
11. Pelanggaran kode etik menimbulkan konsekuensi teguran, penghapusan konten, penghapusan akun dan penegakan ketentuan dan peraturan organisasi.

In principle, knowledge management application can at least be used to identify and integrate three basic components, namely communication technology, collaboration technology, and storage & retrieval technology. The knowledge management system has very useful benefits, including:

- *Knowledge is the most valuable asset and source of competitive advantage;*
- *The level of knowledge expiration is very fast, around 500 days, even can be even faster in some sector;*
- *"Reinventing the wheel"; do not know what is known; do not know where to access knowledge, (costly and inefficient activity);*
- *Knowledge sharing is strength: knowledge builds trust, and trust builds knowledge;*
- *Knowledge flow: ideas - concept - innovation*

Each of the Ministry of SOEs's people who use the Knowledge/Ideas Sharing System (SiBagas) facility, must comply with the established code of conduct as follows:

1. *Deliver and disseminate information, ideas, knowledge and thoughts objectively, rationally and civilized.*
2. *Positive and open-minded behavior.*
3. *Be sensitive to the diversity of backgrounds, characters and interests of other users.*
4. *Respect the ideas and thoughts of others and maintain the originality of the work.*
5. *Use language clearly, politely, and easily understood.*
6. *Do not use for matters that are not related to official interests.*
7. *Do not disseminate state secrets and position secrets.*
8. *Do not commit humiliation, intimidation, bullying, expressions of hate on the basis of racial intolerance and limitations.*
9. *Do not spread pornographic content or other things that are contrary to the norms of politeness.*
10. *Do not use the application to do things that are contrary to the Ministry of SOEs Apparatus' Code of Conduct.*
11. *Code of Conduct Violations will result in reprimands, content deletions, account deletions, and enforcement of organizational rules and regulations.*

➤ SISTEM NASKAH DINAS ELEKTRONIK (SINADINE)

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi atau *e-government* dalam proses pemerintahan telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan *e-government* merupakan upaya Pemerintah untuk mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Tata Naskah Dinas Elektronik yang merupakan salah satu bentuk implementasi *e-government* tersebut, diyakini akan mempercepat proses dalam penanganan surat dan komunikasi kerja, karena prosedur standar yang biasanya dilakukan secara manual dialihkan pada sistem komputerisasi. Dengan Tata Naskah Dinas Elektronik, kinerja dalam hal koordinasi dan penanganan surat juga akan meningkat karena sistem aplikasi memungkinkan semua aktivitas berlangsung secara real time yang dibantu dengan teknologi informasi.

Selain itu, penerapan *e-government* dan Tata Naskah Dinas Elektronik juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pembuatan petunjuk pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN. Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik, tercapainya efektivitas dan efisiensi serta kelancaran proses penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Elektronik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Adapun sasaran dari Tata Naskah Dinas Elektronik, adalah:

1. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Elektronik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN;

➤ *ELECTRONIC OFFICE CORRESPONDENCE SYSTEM*

The use of communication and information technology or e-government in the governance process has proved to be able to improve the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of government administration. The use of e-government is an effort by the Government to develop government governance based on electronics in order to increase the productivity and quality of public services effectively and efficiently.

Naskah Dinas Elektronik or Electronic Office Correspondence System, which is one form of e-government implementation, is believed to accelerate the process in handling letters and work communications, as the standard procedures that are usually done manually are transferred to a computerized system. With the Electronic Office Document System, performance in terms of coordination and handling of letters will also increase because the application system allows all activities to take place in real time assisted by information technology.

In addition, the implementation of e-government and Electronic Office Correspondence are also in line with Law No. 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transactions, and Law No. 43 of 2009 regarding Archives.

The Guidelines for Electronic Office Correspondence System are intended as a reference in the management and creation of instructions for implementing Electronic Office Correspondence in all organizational units within the Ministry of SOEs. This Electronic Office Correspondence Manual is intended to create uniformity in the management of Electronic Office Correspondence, the achievement of effectiveness, efficiency and smooth process of Electronic Office Correspondence implementation in all organizational units within the Ministry of SOEs.

Targets of the Electronic Office Correspondence System are as follows:

1. *To achieve common understanding of the Electronic Office Correspondence System implementation in all units of the Ministry of SOEs organization;*

2. Terwujudnya keterpaduan Tata Naskah Dinas Elektronik pada seluruh unit di lingkungan Kementerian BUMN;

3. Lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam Tata Naskah Dinas;

4. Tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam Tata Naskah Dinas; dan

5. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Tata Naskah Dinas.

Sementara manfaat dari Tata Naskah Dinas Elektronik, adalah:

1. Terwujudnya percepatan *e-government*
   Pemanfaatan Tata Naskah Dinas Elektronik akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

2. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
   Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik akan memberikan manfaat berupa penghematan sumber daya, seperti tenaga, kertas, waktu, dan biaya karena mengurangi jumlah Naskah Dinas yang hams dicetak. Efektivitas dan efisiensi pekerjaan dapat dicapai dengan tersampaikannya informasi secara langsung atas Naskah Dinas atau informasi lainnya yang memanfaatkan teknologi informasi, tanpa bergantung pada keberadaan kurir.

3. Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi
   Pemanfaatan Tata Naskah Dinas Elektronik akan mendorong terjadinya reformasi birokrasi aparatur negara.

4. Mempercepat komunikasi dan proses koordinasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.

5. Kemudahan pengelolaan dokumen Naskah Dinas dan penggunaannya
   Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik akan memberikan keamanan dalam penyimpanan dokumen, kemudahan dalam menangani dokumen, dan keakuratan dalam pelacakan status dokumen.

2. To integrate the Electronic Office Correspondence System implementation in all units of the Ministry of SOEs;

3. To enable smooth communication and give ease in Office Correspondence System.

4. To achieve effectiveness and efficiency in Office Correspondence System; and

5. To realize the of use information technology in Office Correspondence System.

While the benefits of the Electronic Office Correspondence System are as follows:

1. Realization of e-government acceleration
The use of Electronic Office Correspondence System will support the realization of good government governance using information technology.

2. Realization of effective and efficient government management
The use of Electronic Office Correspondence System will provide benefits in the form of saving resources, such as power, paper, time, and cost because it reduces the number of Office documents that must be printed. Job effectiveness and efficiency can be achieved by delivering information directly in Office Correspondence or other information using information technology, without depending on the presence of couriers.

3. Realization of bureaucratic reform acceleration Utilization of Electronic Office Correspondence System will encourage the state apparatus bureaucracy reform.

4. Acceleration of communication and coordination processes between organization units in the Ministry of SOEs.

5. Ease of the management and use of the Electronic Office Management System
The Use of Electronic Office Management System will provide security in storing documents, ease of handling documents, and accuracy in tracking documents status.

Aplikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik (SiNadine) merupakan proses korespondensi dilakukan secara *online*/ elektronik sehingga proses tata persuratan dilingkungan Kementerian BUMN lebih efisien dan dilakukan dengan lebih cepat.

Aplikasi ini dibangun dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktifitas kerja serta tertib administrasi di lingkungan Kementerian BUMN untuk menerapkan sistem tata naskah elektronik dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan komputer dan aplikasi *web based* guna memproses naskah dinas dan mempermudah arus informasi/lalu lintas naskah dinas di lingkungan Kementerian BUMN.

Cakupan Sistem aplikasi ini antara lain:

1. Komunikasi Eksternal

Komunikasi Eksternal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dalam hal ini dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar dengan instansi di luar Kementerian BUMN.

2. Komunikasi Internal

Naskah Dinas Internal merupakan Naskah Dinas Korespondensi meliputi Nota Dinas, Memorandum dan Surat Undangan. Aplikasi SiNadine akan memberikan fasilitas untuk pembuatan konsep Naskah Dinas keluar berdasarkan template pedoman Tata Naskah Dinas (TND) Kementerian BUMN sampai dengan pengabsahan Naskah Dinas secara elektronik. Aplikasi SiNadine akan melakukan pengelolaan Naskah Dinas, pengagendaan dan penomoran Naskah Dinas keluar serta pendistribusian secara langsung, sehingga semua data tersimpan dalam *Database*. Untuk berkas Naskah Dinas keluar yang berbentuk dokumen fisik dilakukan scanning dan diunggah pada Aplikasi SiNadine menjadi *file Digital*.

3. Disposisi

Disposisi merupakan perintah atasan terhadap bawahan dalam menindaklanjuti surat masuk. Aplikasi SiNadine memberikan mekanisme pembuatan dan metode koordinasi antara pembuat dan penerima dalam menyelesaikan satu alur disposisi

The Electronic Office Correspondence System or called Sistem Naskah Dinas Elektronik (SiNadine) is a correspondence process carried out online/ electronically so that the correspondence process in the Ministry of SOEs becomes more efficient and faster.

This application was developed in order to improve work effectiveness and productivity as well as administration order in the Ministry of SOEs to implement the electronic office correspondence system using computer network-based technology and web-based applications to process office correspondence and facilitate information flow/traffic of official correspondences within the Ministry of SOEs.

The scope of this application system includes:

1. External Communication

External communication is the process of delivering office information which in this case is carried out through the incoming and outgoing letters with the agencies outside the Ministry of SOEs.

2. Internal Communication

Internal Office Correspondence is the Office Correspondence which includes Nota Dinas (Office Memo), Inter-Office Memo, and Invitation Letter. SiNadine application will provide facilities for the drafting of outgoing Office Correspondence based on the Ministry of SOEs's TND guideline template until the signing of the Electronic Office Correspondence. SiNadine application will directly carry out management, delivery schedule, sequence number arrangement, and distribution of outgoing office correspondence so that all data can be stored in a database. Physical documents of outgoing correpondence will be scanned and uploaded in SiNadine application in the form of the digital file.

3. Disposition

Disposition is an instruction from a superior to his/her subordinate in following up incoming letters. SiNadine application provides a drafting mechanism and coordination method between disposition maker and recipient in completing a disposition flow.

4. Pembuatan Naskah Dinas dengan *Template*

Pembuatan Naskah Dinas dengan menggunakan template akan memberikan kemudahan dan keseragaman, dalam hal ini aplikasi SiNadine. Proses melengkapi *template* dengan data yang diperlukan dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi penyunting teks (*text editor*) yang disediakan di situs (*web*), tanpa harus membuka aplikasi lain.

5. Penomoran Naskah Dinas

Penomoran seluruh Naskah Dinas Kementerian BUMN diagendakan melalui aplikasi SiNadine.

6. Pengagendaan Pengiriman/Ekspedisi Naskah Dinas Korespondensi Ekstern.

7. Fasilitas Arsip Elektronik

Penyimpanan seluruh Naskah Dinas dalam bentuk *Soft Copy* untuk memudahkan pencarian. Untuk kepentingan arsip, berkas Naskah Dinas Internal dicetak dan ditandatangani pejabat.

8. Fasilitas Pencetakan

Aplikasi SiNadine menyediakan fasilitas pencetakan data sesuai kebutuhan (harian, mingguan, bulanan, dan tahunan).

4. Writing Office Correspondence using a Template

Writing Office Correspondence using a template, in this case, SiNadine application will give ease and uniformity. The process of completing the template with the required data can be done directly through the text editor application provided on the site (web), no need to open another application.

5. Sequence Number of Office Correspondence

Sequence number of the Ministry of SOEs's office correspondence is made using SiNadine application.

6. Arrangement of External Correspondence Delivery.

7. Electronic Archive Facility

Storage of all Office Correspondence in Soft Copy for easy searching. For the purpose of archiving, Internal Office Correspondences are printed and signed by the officials.

8. Printing Facility

SiNadine application provides data printing facilities as needed (daily, weekly, monthly, and annually).



07

DUKUNGAN BUMN DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL

THE SUPPORT OF SOES TO THE NATIONAL STRATEGIC PROJECTS

BUMN TENGAH MENUNJUKKAN ERA KEBANGKITANNYA SETELAH SERANGKAIAN PROGRAM PENYEHATAN DAN PEMULIHAN PASCA KRISIS EKONOMI INDONESIA 1998. SALAH SATU INDIKATOR KEBANGKITAN BUMN SAAT INI ADALAH EKSISTENSI BUMN DALAM SEJUMLAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL

SOEs are proving its revival era after a series of health and recovery programs after the Indonesian economic crisis in 1998. One indicator of the SOEs revival era today is the presence of SOEs in several national strategic projects

The Support of SOEs to The National Strategic Projects
Dukungan BUMN dalam Proyek Strategis Nasional



BUMN merupakan milik negara yang pembentukannya ditetapkan dengan undang-undang, BUMN selaku agent of development, mengambil posisi untuk mencari keuntungan bagi negara dengan mengikuti tata kelola yang baik (governance). Di sisi lain, BUMN juga harus dapat berperan sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan pada publik.

SOEs are state-owned whose formation as determined by laws. SOEs, as agents of development, take a position to earn profits for the state by following the good governance. On the other hand, SOEs must also be able to act as public organizations that provide services to the public.

Saat ini, boleh dikatakan bahwa BUMN tengah menunjukkan era kebangkitannya setelah serangkaian program penyehatan dan pemulihan perusahaan dilakukan pasca krisis ekonomi Indonesia 1998. Salah satu indikator kebangkitan BUMN saat ini adalah dukungan dan keterlibatan BUMN dalam sejumlah proyek strategis nasional.

At present, SOEs can be considered as showing its revival era after an array of corporate health and recovery programs carried out following the 1998 Indonesian economic crisis. One indicator of the SOEs current revival is the support and involvement of SOEs in a batch of national strategic projects.

Pemerintah telah menetapkan proyek-proyek yang masuk kategori proyek strategis nasional, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan proyek strategis, diperlukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Adapun Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

The government has determined projects that fall into the category of national strategic projects, to meet basic needs and improve community welfare. Efforts are needed to accelerate the implementation of the National Strategic Project. The National Strategic Project is a project carried out by the Government, Regional Government, and/or business entity aiming to increase growth and equitable development in order to improve community welfare and regional development.

Proyek-proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional itu antara lain, proyek pembangunan infrastruktur jalan tol; proyek jalan nasional atau strategis nasional non-tol; proyek sarana dan prasarana kereta api antarkota; proyek kereta api dalam kota; proyek revitalisasi bandara; pembangunan bandara baru; proyek pembangunan bandara strategis lain; pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas; program satu juta rumah; pembangunan kilang minyak; proyek pipa gas atau terminal LPG; proyek energi asal sampah; proyek penyediaan infrastruktur air minum; proyek penyediaan sistem air limbah komunal; pembangunan tanggul penahan banjir; proyek pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) dan sarana penunjang; proyek bendungan; program peningkatan jangkauan *broadband*; proyek infrastruktur IPTEK strategis lainnya; pembangunan kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus; proyek pariwisata; proyek pembangunan *smelter*; dan proyek pertanian dan kelautan.

Included in the national strategic projects are toll road infrastructure development projects; non-toll national strategic or national road projects; intercity railway facilities and infrastructure projects; city railroad projects; airport revitalization project; construction of a new airport; other strategic airport development projects; new port development and capacity building; program of one million houses; construction of oil refineries; gas pipeline project or LPG terminal; waste-origin energy project; project for supplying drinking water infrastructure; project for providing communal wastewater systems; construction of a flood barrier; project for the construction of cross-border post (PLBN) and supporting facilities; dam project; broadband coverage enhancement program; other strategic of science and technology infrastructure projects; development of priority industrial zones or special economic zones; tourism project; smelter construction project; and agricultural and marine projects.

Upaya yang dilakukan Kementerian BUMN melalui BUMN telah sesuai dengan agenda pokok pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang dikenal dengan Nawacita, di mana rumusan Nawacita memiliki tiga ciri utama, yakni Negara Hadir, Membangun dari Pinggiran, dan Revolusi Mental. Nawacita adalah konsep besar untuk memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Untuk mewujudkan sembilan cita/harapan/keinginan dimaksud, diperlukan kerja nyata, dimulai dari pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya akselerasi di berbagai bidang.

Efforts made by the Ministry of SOEs through SOEs are in accordance with the main agenda of Joko Widodo - Jusuf Kalla government known as Nawacita, as the formulation of Nawacita has three main characteristics, namely the Presence of State, Building from the Periphery, and Mental Revolution. Nawacita is a great concept for advancing Indonesia to become sovereign and independent with a good personality. To manifest those nine intended goals, the real work is needed, starting from the construction of foundations and continuing with efforts to accelerate in various fields.

Land Connectivity
Konektivitas Darat

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata, tentu saja harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai agar laju perekonomian di daerah dapat tumbuh dan berkembang untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Salah satu upaya Pemerintah adalah dengan membangun konektivitas darat dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing di daerah, melalui proyek pembangunan infrastruktur berupa jalan tol dan kereta api yang merupakan satu di antara proyek prioritas Pemerintah. Pembangunan infrastruktur jalan tol dan kereta api ini, diharapkan akan mendatangkan efek manfaat yang berkesinambungan.

To increase equitable economic growth surely must need support by the availability of adequate facilities and infrastructures for the growth and development of the economy in regions for the surrounding community welfare. One of the Government's efforts is to build land connectivity to increase productivity and competitiveness in the region; this is done through infrastructure development projects including toll roads and railways as the Government's priority projects. The construction of the toll road and railroad infrastructure is expected to bring sustainable effects.

JALAN TOL / *TOLL ROADS*

Pertumbuhan ekonomi inklusif untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia, tentu saja membutuhkan konektivitas antar daerah yang memadai. Ekonomi yang inklusif merupakan kondisi di mana kesempatan masyarakat mengupayakan peningkatan kesejahteraan menjadi lebih terbuka dan meluas, terutama bagi mereka yang memiliki berbagai keterbatasan ekonomi. Melalui ekonomi yang bersifat inklusif, dampak pembangunan akan dapat menetes dan dirasakan hingga ke masyarakat yang berada di kelompok terbawah. Ekonomi inklusif akan mampu diraih salah satunya apabila konektivitas yang menghubungkan antar daerah di Indonesia dapat terwujud dengan baik.

Inclusive economic growth to realize Indonesia's development aspirations surely requires adequate connectivity between regions. An iclusive economy is a condition in which the community gets the wider and more open opportunity to improve welfare, especially for those with various economic limitations. Through an inclusive economy, the impact of the development will be highlighted and enjoyed by the people in the lowest group. An inclusive economy will be able to be achieved if the connectivity between regions in Indonesia can be actualized well.

Salah satu yang terus diupayakan Pemerintah adalah dengan membangun konektivitas darat, berupa jalan tol dari pulau Sumatera hingga Papua. Akses tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan efisiensi waktu perjalanan yang akan berdampak positif terhadap aktivitas manusia, logistik barang dan jasa, yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata. Selain mempersingkat waktu tempuh antar daerah serta memecah kepadatan lalu lintas, keberadaan jalan tol akan menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah setempat.

The Government continually strives to develop land connectivity, one of which is toll roads from Sumatra to Papua. This access is expected to increase the convenience and efficiency of travel time which will give a positive impact on human activities, logistics of goods and services to improve the community's economy fairly. In addition to shortening travel time between regions and breaking traffic density, the existence of toll roads will support the economic growth and development of the local area.

➤ TRANS SUMATERA

➤ *TRANS SUMATERA*



Jalan Tol Medan-Binjai

Jalan Tol Medan–Binjai adalah jalan tol sepanjang 25,4 kilometer yang menghubungkan dua kota di Sumatera Utara, yakni Medan dan Binjai. Ground breaking jalan tol ini dilaksanakan Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2015. Jalan tol Medan-Binjai akan membagi beban kendaraan dengan Jalan Medan-Binjai yang merupakan salah satu ruas terpadat dalam Jalan Raya Lintas Sumatera yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh dengan biaya investasi sebesar Rp2,5 triliun.

Jalan tol ini merupakan bagian dari mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Bakauheni hingga Aceh dan termasuk dalam 8 proyek prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Ruas tol Medan-Binjai terbagi ke dalam 3 seksi; Seksi I Tanjung Mulia-Helvetia sepanjang 6,07 kilometer, Seksi II Helvetia- Sei Semayang sepanjang 9,05 kilometer, dan Seksi III Sei Semayang-Binjai sepanjang 10,32 kilometer.

PT Hutama Karya (Persero) selaku BUMN yang menjalankan penugasan proyek ini, menargetkan jalan tol Medan-Binjai akan segera beroperasi seluruhnya pada Desember 2019. Secara keseluruhan, progres pembangunan jalan tol ini sudah mencapai 89% lebih untuk konstruksi dan 92% lebih untuk pengadaan lahan (termasuk jalan akses). Untuk seksi Helvetia – Sei Semayang dan Sei Semayang – Binjai sudah mulai beroperasi. Sementara untuk Seksi Tanjung Mulia – Helvetia ditargetkan selesai pada Desember 2019 dengan progres pengadaan tanah sampai saat ini sudah mencapai 74,75%. Jalan tol Medan-Binjai ini diharapkan dapat membagi beban kendaraan dari Jalan Raya Lintas Sumatera yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh.

Jalan Tol Palembang-Indralaya

Jalan Tol Palembang-Indralaya merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang akan menghubungkan koridor-koridor ekonomi di Sumatera Selatan. Tol Palembang-Indralaya atau disingkat Tol Palindra merupakan jalan tol yang dibangun di Palembang, Sumatera Selatan. Tol ini mempunyai panjang sepanjang 21,93 kilometer yang dibagi dalam 3 seksi: Seksi I, Palembang-Pemulutan sepanjang 7,00 kilometer, Seksi II Pemulutan-KTM Rambutan sepanjang 4,90 kilometer, serta Seksi III dari KTM Rambutan-Indralaya sepanjang 9,94 kilometer.

Medan-Binjai Toll Road

The 25.4-kilometer Medan-Binjai Toll Road connects two cities in North Sumatra, namely Medan and Binjai. The ground breaking of the toll road was carried out by President Joko Widodo on January 27, 2015. The toll road will divide the vehicle load with Jalan Medan-Binjai as one of the densest sections in the Trans Sumatra Main Road that connects Medan and Banda Aceh with an investment cost of Rp2.5 trillion.

This toll road is part of the Trans Sumatra Toll Road project that connects Bakauheni to Aceh and is included in the eight priority projects launched by President Joko Widodo. The Medan-Binjai toll road segment is divided into three sections; Section I of Mulia Cape-Helvetia is 6.07 kilometers long, Section II of Helvetia-Sei Semayang is 9.05 kilometers long, and Section III of Sei Semayang-Binjai is 10.32 kilometers long.

PT Hutama Karya (Persero) as the SOEs carrying out the assignment of this project targets the Medan-Binjai toll road to be in full operation in December 2019. On the whole, the construction progress of this toll road has reached approximately 89% for construction and 92% for land acquisition (including access roads). For the sections of Helvetia - Sei Semayang and Sei Semayang – Binjai, they have commenced the operations. Meanwhile, the Tanjung Mulia - Helvetia Section is targeted for completion in December 2019 with land procurement progress have reached 74.75% up to the present. The Medan-Binjai toll road is expected to break down the vehicle load from the Cross-Sumatra Main Road that connects Medan and Banda Aceh.

Palembang-Indralaya Toll Road

The Palembang-Indralaya Toll Road is part of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS) which will connect economic corridors in South Sumatra. Palembang-Indralaya Toll Road or abbreviated as Palindra Toll Road is a toll road built in Palembang, South Sumatra. The toll road has a length of 21.93 kilometers divided into three sections: Section I of Palembang-Pemulutan is along 7.00 kilometers, Section II of Pemulutan-KTM Rambutan is along 4.90 kilometers, and Section III of KTM Rambutan-Indralaya is along 9.94 kilometers.

Proyek tol ini digarap oleh PT Hutama Karya (Persero), dengan biaya investasi sebesar Rp3,30 triliun ini, telah beroperasi sepenuhnya per September 2018. Presiden Joko Widodo membuka jalan tol ini dengan melakukan peletakan batu pertama jalan Tol Palembang-Inderalaya (Palindra) di Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 30 April 2015. Pada Oktober 2017, Presiden Joko Widodo telah meresmikan ruas jalan seksi I Palembang-Pemulutan. Sementara untuk Seksi II dan III sudah beroperasi sejak September 2018.

This toll road project was managed by PT Hutama Karya (Persero) with an investment of Rp3.30 trillion. It comes through the full operation as of September 2018. President Joko Widodo launched the construction of this toll road by laying the first stone of Palembang-Inderalaya (Palindra) toll road in Ogan Ilir, Palembang, South Sumatra, on April 30, 2015. In October 2017, President Joko Widodo inaugurated the section I of Palembang-Pemulutan. Meanwhile, for Section II and III, they have been operating since September 2018.

Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar

Jalan Tol Bakauheni–Bandar Lampung–Terbanggi Besar (Jalan Tol Bakter) adalah jalan tol sepanjang 140,94 kilometer yang rutenya dimulai dari Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) hingga Terbanggi Besar (Lampung Tengah). Pembangunan ruas tol ini dilakukan oleh konsorsium BUMN, yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, serta PT Adhi Karya melalui skema penugasan.

Jalan tol ini merupakan jaringan dari Jalan Trans Sumatera. Peresmian pembangunan jalan tol ini dilakukan pada 30 April 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan dibagi dalam 4 Seksi: Seksi 1 yang dikerjakan PT PP (Persero) Tbk, Seksi 2 pekerjaan konstruksinya oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Seksi 3 ditangani PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Seksi 4 dikerjakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Progres proyek jalan tol ini, untuk pembebasan lahan telah mencapai 100%, begitupun dengan konstruksi yang sudah mencapai 100%. Jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar dengan nilai investasi Rp16,8 triliun ini, merupakan bagian dari rangkaian jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Bakauheni hingga Aceh.

Bakauheni-Terbanggi Besar Toll Road

Bakauheni – Bandar Lampung – Terbanggi Besar Toll Road (Bakter Toll Road) is a 140.94 kilometer toll road with the route starts from Bakauheni Port (South Lampung) to Terbanggi Besar (Central Lampung). The construction of this toll road is carried out by a SOEs consortium, consisting of PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, and PT Adhi Karya through an assignment scheme.

This toll road is a network of the Trans Sumatra Road. The commencement of the toll road construction was carried out on April 30, 2015 by President Joko Widodo. The development is divided into four sections: Section 1 is done by PT PP (Persero) Tbk, Section 2 of its construction is worked on by PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Section 3 is handled by PT Adhi Karya (Persero) Tbk, and Section 4 is done by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

The progress of this toll road project for land acquisition and construction has reached 100%, The Bakauheni-Terbanggi Besar toll road with an investment value of IDR16.8 trillion is part of a series of Trans Sumatra toll roads that connect Bakauheni to Aceh.

Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Ruas Tol Pekanbaru-Dumai merupakan proyek Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 131,48 kilometer yang membelah 5 wilayah di Provinsi Riau, antara lain Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai. Jalan tol ini merupakan 1 dari 3 jalan tol terpanjang di rangkaian Jalan Tol Trans Sumatera.

Pekanbaru-Dumai Toll Road

The Pekanbaru-Dumai Toll Road is a Trans Sumatra Toll Road project that stretches along 131.48 kilometers and divides five regions in Riau Province, including Pekanbaru City, Kampar Rgency, Siak, Bengkalis, and Dumai City. It is one of the three longest toll roads in the Trans Sumatra Toll Roads series.

Jalan tol Pekanbaru-Dumai dibagi dalam 6 bagian (seksi), yakni Seksi I Pekanbaru-Minas dengan panjang 12,17 kilometer, Seksi II Minas-Kandis Selatan dengan panjang 26,04 kilometer, Seksi III Kandis Selatan-Kandis Utara dengan panjang 18,65 kilometer, Seksi IV Kandis Utara-Duri Selatan dengan panjang 27,98 kilometer, Seksi V Duri Selatan-Duri Utara dengan panjang 30,21 kilometer, dan Seksi VI Duri Utara-Dumai dengan panjang 25,44 kilometer.

The Pekanbaru-Dumai toll road is divided into six sections, namely Section I of Pekanbaru-Minas with a length of 12.17 kilometers, Section II of Minas-South Kandis with a length of 26.04 kilometers, Section III of South Kandis-North Kandis with a length of 18, 65 kilometers, Section IV of North Kandis-South Duri with a length of 27.98 kilometers, Section V of South Duri-North Duri with a length of 30.21 kilometers, and Section VI of Utara Duri-Dumai with a length of 25.44 kilometers.

Pembangunan jalan tol yang dimulai pada bulan Desember 2016 dan digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) ini, membutuhkan investasi mencapai Rp16,21 triliun. Progres konstruksi jalan tol yang sudah mencapai 40% lebih ini, ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Januari 2020.

The construction of the toll road commenced in December 2016 and was worked on by PT Hutama Karya (Persero) with an investment of IDR 16,21 trillion. The progress of toll road construction has reached more than 40% and is targeted to be in full operation by January 2020.

Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang

Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang dengan panjang 112,2 kilometer ini, merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang direncanakan akan membentang dari utara Pulau Sumatera sampai selatan menyambungkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai provinsi Lampung. Ruas ini terbagi kedalam tiga seksi yakni: (1) Seksi I: Terbanggi Besar – Mengala; (2) Seksi II: Menggala – Sp. Pematang; (3) Seksi III: Sp. Pematang – Kayu Agung.

Dengan adanya pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian Lampung sebagai Serambi Sumatera. Jalan tol ini diperkirakan menelan biaya investasi sebesar Rp11,87 triliun, di mana progres pembebasan lahan sampai dengan saat ini telah mencapai 83,98% dan untuk konstruksi jalan tol ini sudah mencapai 85,59% lebih, dan ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2019.

Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung

Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung dengan nilai investasi Rp 10,1 triliun ini, merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang direncanakan akan membentang dari utara Pulau Sumatera sampai selatan menyambungkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai provinsi Lampung. Ruas ini terletak di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan dengan panjang total 77 kilometer. Ruas ini terbagi kedalam tiga seksi yakni: (1) Seksi I: Terbanggi Besar – Mengala; (2) Seksi II: Menggala

Terbanggi Besar - Pematang Panggang Toll Road

Terbanggi Besar - Pematang Panggang Toll Road with a length of 112.2 kilometers becomes part of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS), planned to stretch from the north of Sumatra Island to the south connecting Nangroe Aceh Darussalam to Lampung. It is divided into three sections, namely: (1) Section I: Terbanggi Besar – Mengala; (2) Section II: Menggala – Sp. Pematang; (3) Section III: Sp. Pematang - Kayu Agung.

The construction of the Trans Sumatra toll road is expected to encourage the economy growth of Lampung as Serambi Sumatera. This toll road is estimated to cost an investment of IDR 11.87 trillion. The progress of land acquisition up to the present has reached 83.98% and the construction of this toll road has reached over 85.59%. It is targeted to be in operation by 2019.

Pematang Panggang - Kayu Agung Toll Road

Pematang Panggang - Kayu Agung Toll Road with an investment of IDR 10.1 trillion is part of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). It is planned to stretch from the north of Sumatra Island to the south, connecting Nangroe Aceh Darussalam to Lampung province. This section is located in Lampung Province and South Sumatra Province with a total length of 77 kilometers. It is divided into three sections, namely: (1) Section I: Terbanggi Besar – Mengala; (2) Section II: Menggala – Sp. Pematang; (3) Section III: Sp. Pematang

– Sp. Pematang; (3) Seksi III: Sp. Pematang – Kayu Agung. Untuk progres pembebasan lahan sampai dengan saat ini telah mencapai 100% dan untuk konstruksi jalan tol tercatat telah mencapai 94,79%, serta ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2019.

- Kayu Agung. The progress of land acquisition up to the present has reached 100% and toll road construction has reached 94.79%. It is targeted to be in operation by 2019.

Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung

Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung (Kapal Betung) ini merupakan yang terpanjang di luar Pulau Jawa dan kedua di Sumatera setelah Sumatera Utara. Jalan Tol Kayuagung–Palembang–Betung adalah megaproyek infrastruktur jalan tol sepanjang 111,69 kilometer dari Kayuagung hingga Betung (Banyuasin), dengan nilai investasi sekitar Rp20,94 triliun. Adapun rincian jalan tol Kapal Betung itu meliputi, Seksi I; Kayu Agung–Jakabaring sepanjang 33,50 kilometer, Seksi II; Jakabaring–Palembang sepanjang 33,90 kilometer dan Seksi III; Palembang–Betung sekitar 44,29 kilometer.

Progres konstruksi pembangunan jalan tol yang digarap oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini, untuk Seksi I mencapai 59,17% sementara Seksi II mencapai 75,08% dan Seksi III telah mencapai 100,00%. Proyek Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung ini ditargetkan mulai beroperasi tahun 2019.

Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi

Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera dan masuk agenda pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan jalan tol yang memiliki panjang 61,7 kilometer tersebut dibagi menjadi 7 seksi. Proyek yang di garap PT Jasa Marga Kualanamu Tol ini, menelan investasi sebesar Rp 4,96 triliun.

Jalan tol ini akan menghubungkan Kota Medan dengan Bandara Kualanamu dan kota Medan dengan kawasan industri Kuala Tanjung serta kawasan pariwisata Danau Toba. Peletakan batu pertama tanda dimulainya konstruksi dilaksanakan pada 23 September 2014. Progres pembebasan lahan untuk ruas tol ini sudah mencapai 99,98% di luar Seksi II sampai dengan Seksi VI yang sudah beroperasi.

Kayu Agung - Palembang – Betung Toll Road

Kayuagung-Palembang-Betung Toll Road (Betung Ship) is the longest route outside Java and second in Sumatra after North Sumatra. Kayuagung – Palembang – Betung Toll Road is a 111.69-kilometer toll road infrastructure mega-project from Kayuagung to Betung (Banyuasin), with an investment of approximately IDR 20.94 trillion. The details of the Betung Kapal toll road include, Section I; Kayu Agung – Jakabaring, with 33.50 kilometers long, Section II; Jakabaring – Palembang is 33.90 kilometers long and Section III; Palembang – Betung is approximately 44.29 kilometers.

The construction progress of the toll road construction worked on by PT Waskita Karya (Persero) Tbk for Section I reached 59.17%, Section II reached 75.08% and Section III reached 100.00%. The Kayu Agung - Palembang - Betung Toll Road Project is targeted to start operating in 2019.

Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Toll Road

Medan-Tebing Tinggi Toll Road is part of the Trans Sumatra Toll Road and is included to the regional development agenda of North Sumatra Province. This construction of the 61.7 kilometer toll road is divided into seven sections. The project, which was worked on by PT Jasa Marga Kualanamu Tol, cost an investment of IDR 4.96 trillion.

This toll road will connect Medan City with Kualanamu Airport and Medan city with Kuala Tanjung industrial area and Lake Toba tourism area. The groundbreaking of the construction commencement was carried out on September 23, 2014. The progress of land acquisition for this toll road has reached 99.98% outside of Section II to Section VI which is already operating.

➤ TRANS JABODETABEK

Sebagai pusat perekonomian, Propinsi DKI Jakarta memerlukan jaringan transportasi yang memadai dan terintegrasi dengan daerah lain di sekitarnya. Pembangunan jalan tol Jabodatabek akan meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan logistik dari dan menuju Jakarta. Terus bertambahnya panjang jalan tol di Jabodetabek diharapkan dapat memperlancar arus transportasi di wilayah ini dan akan berperan dalam mengurangi biaya logistik di Indonesia. Saat ini, BUMN turut berperan dalam pembangunan 10 ruas tol dari total 13 ruas tol Jabodetabek yang dibangun dengan total panjang 265 km.

Jalan Tol Bogor Outer Ring Road

Jalan Tol Lingkar Luar Bogor atau Bogor Outer Ring Road adalah nama rangkaian jalan tol sepanjang 5,8 kilometer yang melingkari kota Bogor, menghubungkan Sentul Selatan hingga Dramaga. Jalan Tol Lingkar Luar Bogor rencananya dibangun sebagai jalan tol berlajur 2x2 dan secara bertahap akan berlajur 2x3 dengan disain kecepatan maksimum 80 kilometer per jam.

Jalan Tol ini, diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di Kota Bogor dan sekitarnya serta memudahkan akses masyarakat Bogor untuk sampai ke Jakarta, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tol Jakarta-Cikampek dan Bandung. Pembangunan jalan tol ini terbagi dalam 3 seksi, untuk Seksi I yakni Sentul Selatan—Kedunghalang telah beroperasi pada November 2009; Seksi II yakni Kedunghalang—Simpang Yasmin dibagi dalam dua bagian, yakni Seksi II A dan II B, dimana Seksi II A dengan ruas Kedunghalang-Kedungbadak telah beroperasi pada 30 Mei 2014, sementara ruas Kedungbadak-Simpang Yasmin sepanjang 2,65 kilometer juga telah beroperasi pada 7 Juni 2018; adapun Seksi III yakni Simpang Yasmin—Salabenda sepanjang 3,2 kilometer masih dalam proses amandemen serta lelang kontraktor dan konsultan.

Proyek jalan tol Seksi II B dan Seksi III dalam rangka mempercepat pembangunan jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) ini, dibangun dan dikelola oleh PT Marga Sarana Jabar yang merupakan perusahaan patungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (55%), PT CMNP (30%), dan PT Jasa Sarana Jabar (15%) dengan nilai investasi proyek sebesar Rp2,05 triliun.

➤ *TRANS JABODETABEK*

As an economic centre, DKI Jakarta Province requires adequate and integrated transportation network in Jakarta and its surrounding areas. Construction of Jabodetabek toll roads will improve logistic transportation traffic from and to Jakarta. The increasing length of toll roads in Jabodetabek is expected to be able to smoothen transportation flow in this area and it will play a role in reducing logistic costs in Indonesia. Recently, SOEs play roles in developing 10 out of 13 toll roads in Jabodetabek that are constructed with total length of 265 km.

Bogor Outer Ring Road Toll Road

The Bogor Outer Ring Road is the name of a series of 5.8-kilometer toll roads that encircle the city of Bogor, connecting South Sentul to Dramaga. The Bogor Outer Ring Road is planned to be built as a 2x2 toll road and will gradually be 2x3 lined with a maximum speed plan of 80 kilometers per hour.

This Toll Road is expected to be a solution to break down the traffic jam in Bogor City and its surroundings as well as facilitate access of the Bogor commuters to get to Jakarta, Soekarno Hatta International Airport, Jakarta-Cikampek Toll Road and Bandung. The construction of this toll road is divided into three sections, which Section I of South Sentul - Kedunghalang has been operating in November 2009; Section II of Kedunghalang - Yasmin Intersection is divided into two parts, namely Section II A and II B. Section II A with the Kedunghalang-Kedungbadak section has been operating on May 30, 2014, while the 2.65-kilometer section of Kedungbadak-Simpang Yasmin has also been operating on June 7, 2018. As for Section III, namely the Simpang Yasmin – Salabenda stretching along 3.2 kilometers is still in the process of amendment and auction of contractors and consultants.

The Section II B and Section III toll road project in order to accelerate the construction of the Bogor Outer Ring Road (BORR) toll road, was built and managed by PT Marga Sarana Jabar as a joint venture company of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (55%), PT CMNP (30%), and PT Jasa Sarana Jabar (15%) with a project investment value of IDR 2.05 trillion.

Jalan Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi

Jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) memiliki panjang total 54,10 kilometer ini, terdiri atas empat seksi. Seksi I Ciawi-Cigombong sepanjang 15,35 kilometer, seksi II Cigombong- Cibadak sepanjang 11,90 kilometer, seksi III Cibadak-Sukabumi Barat sepanjang 13,70 kilometer, serta seksi IV Sukabumi Barat-Sukabumi Timur sepanjang 13,15 kilometer. Proyek pembangunan tol Bocimi yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini menghabiskan investasi yang diperkirakan sebesar Rp15,95 triliun.

Proyek Tol Bocimi sebenarnya telah dimulai sejak 1997 tetapi mangkrak, dan pada akhir 2015 pengerjaan tol itu dimulai kembali setelah tiga kali peresmian, yakni April dan Desember 2011, terakhir Februari 2015. Secara keseluruhan, Tol Bocimi ini menghubungkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi. Progres pembangunan jalan tol untuk Seksi I Ciawi-Cigombong sepanjang 15,35 kilometer sudah mencapai 100% sementara untuk tiga seksi lainnya masih dalam proses pembebasan dan pengadaan lahan.

Jalan Tol Depok – Antasari

Jalan Tol Depok-Antasari atau Desari adalah jalan tol penghubung Jakarta dengan Depok sepanjang 21,6 km. Jalan tol yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini, melintasi Kota Jakarta Selatan dan Kota Depok. Tol dengan nilai investasi Rp4,2 triliun ini, terbagi menjadi 3 seksi. Pembangunan jalan tol ini masih terus dilaksanakan, dengan kontraktor PT Girder Indonesia untuk Seksi I dan II.

Adapun progres konstruksi pembangunan Seksi I Antasari-Brigif dengan panjang 5,80 km telah mencapai 100% sementara progres pembebasan lahan mencapai 93,02% karena terdapat beberapa bidang lahan jalan akses warga yang masih dalam proses pembebasan di BPN. Sementara untuk progres konstruksi pembangunan Seksi II Brigif-Sawangan dengan panjang 6,30 km telah mencapai 45,93% dan progres pembebasan lahan mencapai 84,34%. Sementara untuk Seksi III Sawangan-Bojonggede dengan panjang 9,50 km masih dalam proses.

Bogor - Ciawi – Sukabumi Toll Road

The Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) toll road has a total length of 54.10 kilometers, consisting of four sections. Section I of Ciawi-Cigombong is 15.35 kilometers long, section II of Cigombong-Cibadak is with a length of 11.90 kilometers, section III Cibadak-West Sukabumi stretches along 13.70 kilometers, and section IV of West Sukabumi-East Sukabumi is with a length of 13.15 kilometers. The Bocimi toll road construction project was worked on by PT Waskita Karya (Persero) Tbk and spent an estimated investment of IDR 15.95 trillion.

The Bocimi Toll Project has actually started since 1997 but has stalled. At the end of 2015, the toll road construction was restarted after three inaugurations, namely April and December 2011, and last February 2015. Mainly, Bocimi Toll Road connects Bogor Regency, Bogor City, Sukabumi Regency, and Sukabumi City. The construction progress of toll roads for Ciawi-Cigombong Section I along 15.35 kilometers has reached 100%. Meanwhile, the other three sections is still in land acquisition and procurement processes.

Depok - Antasari Toll Road

The Depok-Antasari or Desari Toll Road is a toll road connecting Jakarta to Depok with total length of 21,6 km. This toll road that was worked by PT Waskita Karya (Persero) Tbk crosses South Jakarta City and Depok City. The toll road with an investment value of IDR4.2 trillion is divided into three sections. The construction of this toll road is still ongoing, with PT Girder Indonesia as the contractor for Section I and II.

The construction progress of the Antasari-Brigif Section I with a length of 5.80 km has reached 100%. Meanwhile, the progress of land acquisition has reached 93.02% because there are several land fields of access for residents that are still in the release process at the BPN. At the same time, the construction progress of Section II Brigif-Sawangan with a length of 6.30 km has reached 45.93% and the progress of land acquisition has reached 84.34%. While, for Section III Sawangan-Bojonggede with a length of 9.50 km, it is still in process.

Jalan Tol Cinere-Serpong

Jalan Tol Cinere-Serpong sepanjang 10,14 kilometer adalah salah satu jalan tol yang merupakan bagian dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta II atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) II. Jalan tol yang menghubungkan Tangerang Selatan dengan Kota Depok ini melintasi beberapa kawasan, seperti Jombang, Ciputat, Pamulang, Pondok Cabe dan Cinere. Jalan tol ini dikelola oleh PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk (55%).

Pembangunan jalan tol ini masih terus dilaksanakan, dimana progres pembebasan lahan telah mencapai 79,23% dan konstruksi mencapai 49,39%. Poyek dengan nilai investasi Rp2,22 triliun ini, ditargetkan dapat beroperasi pada Triwulan II 2019.

Cinere-Serpong Toll Road

Cinere-Serpong Toll Road stretches along 10.14 kilometers and becomes one of the toll roads that are part of the Jakarta II Outer Ring Road (JORR) II. This toll road, which connects South Tangerang and Depok City, crosses several regions, such as Jombang, Ciputat, Pamulang, Pondok Cabe and Cinere. It is managed by PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), which the majority of its shares are owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk (55%).

The construction of this toll road is still ongoing as the progress of land acquisition has reached 79.23% and the construction has reached 49.39%. The project that cost an investment of IDR2.22 trillion is targeted to be in operation in the second quarter of 2019.

Jalan Tol Kunciran-Serpong

Jalan Tol Kunciran-Serpong sepanjang 11,2 kilometer ini juga merupakan bagian dari pengembangan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta II atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) II. Jalan tol yang akan menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta hingga Cibitung ini, berfungsi memecah lalu lintas yang saat ini menumpuk di dalam kota Jakarta. Jalan tol ini juga akan terhubung dengan Jalan Tol Jakarta-Tangerang, Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran, Jalan Tol Jakarta-Serpong, serta Jalan Tol Serpong-Cinere.

Jalan tol ini dikelola oleh PT Marga Trans Nusantara yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk (60%). Proyek tol yang diperkirakan akan menelan investasi sekitar Rp3,48 triliun ini, ditargetkan dapat beroperasi pada Triwulan II 2019. Pembangunan jalan tol ini masih terus dilaksanakan, dimana progres pembebasan lahan telah mencapai 98,70% dan konstruksi mencapai 84,14%.

Kunciran-Serpong Toll Road

The Kunciran-Serpong Toll Road stretches along 11.2 kilometers and is also part of the development of the Jakarta Outer Ring Road (JORR) II. The toll road that will connect Soekarno-Hatta Airport to Cibitung serves to break down the current traffic in Jakarta. It will also be connected to Jakarta-Tangerang Toll Road, Cengkareng-Batuceper-Kunciran Toll Road, Jakarta-Serpong Toll Road, and Serpong-Cinere Toll Road.

This toll road is managed by PT Marga Trans Nusantara, which the majority of shares are owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk (60%). Estimated to cost approximately IDR 3.48 trillion, it is targeted to operate in the second quarter of 2019. The construction is still ongoing as the progress of land acquisition has reached 98.70% and construction has reached 84.14%.

Jalan Tol Kunciran-Cengkareng

Jalan Tol Kunciran-Cengkareng atau tol Kunciran-Bandara sepanjang 14,19 kilometer ini menjadi sangat vital karena akan menjadi akses tol alternatif (selain tol yang sudah ada) ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jalan tol ini dikelola oleh PT Jasamarga Kunciran Cengkareng yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk (76,24%).

Proyek tol senilai Rp 5,01 triliun ini akan dibangun dengan empat seksi. Keempat seksi itu yakni seksi I yakni Kunciran–IC Sultan Ageng Tirtayasa sepanjang 2,04 kilometer, seksi II yakni IC Sultan Ageng Tirtayasa–on/off ramp Benteng Betawi sepanjang 3,50 kilometer, seksi III yakni on/off ramp Benteng Betawi–IC Husein Sastranegara 6,50 kilometer, dan seksi IV yakni IC Husein Sastranegara–Benda Junction sepanjang 2,15 kilometer. Pembangunan jalan tol ini masih terus dilaksanakan, dimana progres pembebasan lahan telah mencapai 58,51% dan konstruksi mencapai 43,67%.

Jalan tol yang ditargetkan dapat beroperasi pada Triwulan IV 2019 ini, juga termasuk dalam bagian dari pengembangan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta II atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) II. Jalan tol ini akan terkoneksi dengan ruas tol Cinere-Serpong dan Serpong-Kunciran yang juga dimiliki oleh PT Jasa Marga Tbk melalui anak usahanya PT Cinere Serpong Jaya dan PT Marga Trans Nusantara.

Kunciran-Cengkareng Toll Road

The Kunciran-Cengkareng Toll Road or Kunciran-Airport toll road with a length of 14.19 kilometers has become very vital because it will become an alternative toll road access (in addition to existing toll roads) to Soekarno-Hatta International Airport. It is managed by PT Jasamarga Kunciran Cengkareng, which shares are mostly owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk (76.24%).

The toll road project worth IDR 5.01 trillion will be built into four sections. These are Section I, Kunciran-IC Sultan Ageng Tirtayasa with a length of 2.04 kilometers, section II IC Sultan Ageng Tirtayasa - on/off ramp Benteng Betawi with a length of 3.50 kilometers, section III on/off Benteng Betawi-IC Husein Sastranegara with the length of 6.50 kilometers, and section IV IC Husein Sastranegara – Benda Junction along 2.15 kilometers. The construction is still ongoing as the progress of land acquisition has reached 58.51% and construction has reached 43.67%.

The toll road is targeted to be in operation in the fourth quarter of 2019 and is also included in the part of the Jakarta Outer Ring Road (JORR) II development. It will connect Cinere-Serpong and Serpong-Kunciran toll roads which are also owned by PT Jasa Marga Tbk through its subsidiary PT Cinere Serpong Jaya and PT Marga Trans Nusantara.

Jalan Tol Jakarta – Cikampek II (Elevated)

Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) adalah sebuah jalan tol layang yang dibangun sepanjang 36,40 kilometer guna mengurangi kemacetan panjang yang berada di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) terdiri dari 9 seksi yaitu seksi Cikunir-Bekasi Barat sepanjang 2,99 kilometer, seksi Bekasi Barat-Bekasi Timur sepanjang 3,63 kilometer, seksi Bekasi Timur -Tambun 4,34 kilometer, seksi Tambun-Cibitung 3,30 kilometer, seksi Cibitung-Cikarang Utama 4,46 kilometer, seksi Cikarang Utama-Cikarang Barat 2,72 kilometer, seksi Cikarang Barat-Cibatu 3,16 kilometer, seksi Cibatu-Cikarang Timur 2,45 kilometer dan seksi Cikarang Timur-Karawang Barat 9,79 kilometer.

Jakarta - Cikampek II Toll Road (Elevated)

Jakarta-Cikampek II (Elevated) Toll Road is an elevated toll road built along 36.40 kilometers in order to reduce long traffic along Jakarta-Cikampek Toll Road.

Its construction consists of 9 sections namely the Cikunir-Bekasi Barat section of 2.99 kilometers, section of West Bekasi-East Bekasi with the length of 3.63 kilometers, section East Bekasi-Tambun with the length of 4.34 kilometers, section Tambun-Cibitung with the length of 3.30 kilometers, Cibitung-Main Cikarang section with the length of 4.46 kilometers, Main Cikarang-West Cikarang section with the length of 2.72 kilometers, West Cikarang-Cibatu section with the length of 3.16 kilometers, Cibatu-East Cikarang section with the length of 2.45 kilometers and East Cikarang-West Karawang section with the length of 9,79 kilometers.

Hak pengusahaan dan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) dipegang oleh PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 80% dan PT Ranggi Sugiron Perkasa sebesar 20%. Jalan tol dengan investasi sebesar Rp 16,23 triliun ini, telah mencapai progres konstruksi sebesar 63,45%, sementara itu progres pembebasan lahan telah mencapai 100,00% dan ditargetkan dapat beroperasi pada Triwulan IV 2019.

The concession and construction of Jakarta-Cikampek II (Elevated) Toll Road is held by PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), whose 80% and 20% share ownership are owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk and PT Ranggi Sugiron Perkasa respectively. This toll road which worth an investment of IDR 16.23 trillion has reached construction progress of 63.45%, while the progress of land acquisition has reached 100.00. It is targeted to be in operation in the fourth quarter of 2019.

Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan

Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan sepanjang 64 kilometer dibangun untuk memperlancar alur distribusi barang dan jasa serta mengurangi kepadatan pada jalur eksisting Jakarta – Cikampek. Proyek jalan tol ini akan dioperasikan oleh PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) yang sebagaian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk (80%).

Percepatan pembebasan lahan proyek jalan tol ini dilakukan setelah terbit Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.1252-Pemksm/2018 tentang Penetapan Lokasi atau Penlok untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan pada tanggal 30 November 2018. Dalam Surat Keputusan tersebut, Penlok mencakup empat kabupaten dan satu kotamadya yang terdiri dari 37 kelurahan/desa. Setelah Penlok ini terbit, maka dilanjutkan proses tahapan pelaksanaan pengadaan tanah.

Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan yang terbagi dalam tiga paket ini, merupakan akses jalan tol yang dimulai dari Jati Asih menuju Sadang. Jalan Tol Japek II Selatan terintegrasi dengan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan Jalan Tol Purbaleunyi. Nantinya, terdapat tujuh Gerbang Tol (GT) di Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan. Ketujuh GT tersebut adalah GT Jati Asih, Bantar Gebang, Setu, Sukaragam, Taman Mekar, Kutanegara, dan Sadang. Proyek dengan nilai investasi Rp 14,69 triliun ini ditargetkan dapat beroperasi pada Triwulan IV 2021.

Jakarta - Cikampek II Selatan Toll Road

The Jakarta - Cikampek II Selatan Toll Road that strecthes along 64 kilometers is built to facilitate the distribution of goods and services and reduce density on the existing Jakarta - Cikampek line. This toll road project will be operated by PT Jasamarga Japek Selatan (JJS), which is mostly owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk (80%).

The acceleration of land acquisition for the toll road project was carried out after the issuance of the West Java Governor Decree No. 593/Kep.1252-Pemksm/2018 concerning Determination of Location or Penlok for the construction of the Jakarta - Cikampek II Selatan Toll Road on 30 November 2018. In the Decree, Penlok covers four districts and one municipality consisting of 37 sub-districts/villages. After this Penlok is published, the implementation of land acquisition will resume.

Jakarta - Cikampek II Selatan Toll Road, which is divided into three packages, is a toll road access that starts from Jati Asih towards Sadang. The Japek II Selatan Toll Road is integrated with the Jakarta Outer Ring Road (JORR) Toll Road and Purbaleunyi Toll Road. Afterwards, there will be seven Toll Gates (GT) on Jakarta - Cikampek II Selatan Toll Road. Those are Jati Asih GT, Bantar Gebang, Setu, Sukaragam, Taman Mekar, Kutanegara, and Sadang. The project with an investment worth f Rp 14.69 trillion is targeted to be in operation in the fourth quarter of 2021.

Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu

Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Becakayu adalah jalan tol berkonstruksi layang yang dibangun di atas sungai Kalimalang di kota Jakarta Timur dan Bekasi untuk mengurai kemacetan di sekitar Kalimalang. Jalan tol ini dimulai pembangunannya pada tahun 1996 oleh PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, namun terhenti dua tahun kemudian, akibat krisis moneter yang melanda.

Tol Becakayu memiliki total panjang 20,57 km terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi I (Kasablanka-Jaka Sampurna) dan Seksi II (Jaka Sampurna-Duren Jaya). Ruas tol Becakayu ini menelan biaya investasi Rp8,54 triliun, dan dikelola oleh PT Waskita Toll Road, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Sejak jalan tol ini dilanjutkan pembangunannya bulan Januari 2015, akhirnya pada 3 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Seksi IB dan IC Tol Becakayu ruas Cipinang Melayu-Jakasampurna. Secara keseluruhan proses pembangunan Tol Becakayu untuk konstruksi telah mencapai 86,87%, sementara itu progres pembebasan lahan sebesar 90,05%.

Jalan Tol Cimanggis – Cibitung

Jalan Tol Cimanggis – Cibitung merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) II yang digarap dikelola oleh PT Waskita Toll Road, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Jalan tol ini ditujukan untuk mengurangi beban kendaraan pada jalur yang melalui pusat kota Jakarta serta sebagai upaya untuk mendukung penyediaan prasarana transportasi di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dengan total panjang 26,47 kilometer, tol ini dibagi menjadi dua seksi, dimana seksi I dengan ruas Cimanggis-Transyogi adalah sepanjang 3,17 kilometer dan Transyogi-Cibitung sepanjang 23,30 kilometer.

Progres pembangunan tol dengan nilai investasi Rp8,68 triliun ini, untuk konstruksi telah mencapai 37,53%, sementara itu progres pembebasan lahan sebesar 70,12%. Proyek ini ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2019.

Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Toll Road

Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Toll Road or Becakayu is an elevated construction toll road built on Kalimalang river in East Jakarta and Bekasi cities to break down the traffic surrounding Kalimalang. The toll road commenced its construction in 1996 by PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, but was stopped two years later due to the monetary crisis.

Becakayu Toll Road has a total length of 20.57 km consisting of 2 sections namely Section I (Kasablanka-Jaka Sampurna) and Section II (Jaka Sampurna-Duren Jaya). The Becakayu toll road costs an investment of IDR 8.54 trillion, and is managed by PT Waskita Toll Road, which shares are mostly owned by PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Since the toll road has resumed the construction in January 2015, finally on November 3, 2017, President Joko Widodo inaugurated the IB Section and IC Becakayu Tol Cipinang Melayu-Jakasampurna section. On the whole, the construction process of Becakayu Toll Road for construction has reached 86.87%, while the progress of land acquisition is 90.05%.

Cimanggis – Cibitung Toll Road

Cimanggis - Cibitung Toll Road is part of the Jakarta Outer Ring Road (JORR) II managed by PT Waskita Toll Road, which shares are mostly owned by PT Waskita Karya (Persero) Tbk. It is intended to reduce the vehicles loads on the route through the center of Jakarta and to support the provision of transportation infrastructure in DKI Jakarta and West Java. With a total length of 26.47 kilometers, it is divided into two sections, namely section I of Cimanggis-Transyogi section stretching along 3.17 kilometers and Transyogi-Cibitung is 23.30 kilometers long.

Its construction progress is worth IDR 8.68 trillion and the construction has reached 37.53% while the progress of land acquisition is 70.12%. This project is targeted to be in operation in 2019.

➤ TRANS JAWA

Jalan tol Trans Jawa adalah jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa. Utamanya menghubungkan dua kota besar yaitu Jakarta dan Surabaya. Jalan tol ini dibangun diharapkan dapat meningkatkan perkembangan wilayah & peningkatan ekonomi, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang yang pada akhirnya menurunkan biaya logistik di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2018, jalan tol Jakarta-Surabaya sudah tersambung dengan total panjang 782 km.

Jalan Tol Semarang – Batang

Jalan Tol Batang–Semarang, adalah jalan tol yang terbentang sepanjang 75 kilometer yang menghubungkan daerah Batang dengan Semarang, Jawa Tengah. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

Proyek tol ini dimulai pembangunannya dengan ground breaking oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Juni 2016. Pembangunan jalan tol ini terbagi menjadi 5 seksi: Seksi I, Awal proyek - Batang Timur (3,20 km); Seksi II, Batang Timur - Weleri (36,35 km); Seksi III, Weleri - Kendal (11,05 km); Seksi IV, Kendal - Kaliwungu (13,50 km); dan Seksi V, Kaliwungu - Krapyak (10,90 km).

Tol Batang-Semarang merupakan bagian dari tol Trans Jawa yang pembangunannya telah dimulai sejak Juni 2016. Hak konsesi tol dengan nilai investasi Rp11,05 triliun ini, dipegang oleh PT Jasamarga Semarang-Batang yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasamarga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road. Untuk progres pembebasan lahan sampai saat ini sudah mencapai 90,12%, dan progres konstruksi pembangunan tol sudah mencapai 100%.

➤ *TRANS JAVA*

Trans Java Toll Roads connect cities in Java Island. The main objective of this toll roads is to connect two big cities in Java, namely Jakarta and Surabaya. This toll roads construction is expected to be able to increase regional development & economic improvement, increase community's and goods' mobility and accessibility that eventually will reduce logistic costs in Indonesia and will increase community welfare. Until the end of 2018, Jakarta-Surabaya toll roads have been connected with total length of 782 km.

Semarang – Batang Toll Road

Batang-Semarang Toll Road is a 75-kilometer toll road that connects the Batang area to Semarang, Central Java. It is part of the Trans Java Toll Road which will connect Merak, Banten to Banyuwangi, East Java.

The toll road project began construction with a ground breaking by President Joko Widodo on June 17, 2016. Its construction is divided into fice sections: Section I, Beginning of the project - Batang Timur (3.20 km); Section II, East Batang - Weleri (36.35 km); Section III, Weleri - Kendal (11.05 km); Section IV, Kendal - Kaliwungu (13.50 km); and Section V, Kaliwungu - Krapyak (10.90 km).

The Batang-Semarang toll road is part of the Trans Java toll road whose construction has been started since June 2016. The toll concession with an investment value of IDR 11.05 trillion are held by PT Jasamarga Semarang-Batang, whose shares are mostly owned by PT Jasamarga (Persero) Tbk and PT Waskita Toll Road. The progress of land acquisition up to the present has reached 90.12%, and the progress of construction of toll road construction has reached 100%.

Jalan Tol Solo – Ngawi

Jalan tol dengan nilai investasi Rp11,34 triliun ini, merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang meghubungkan Jakarta dengan kota – kota lain di bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Jalur ini nantinya akan menjadi jalur utama distribusi penumpang, barang, dan jasa. Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Jawa yang melewati Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Sragen (Provinsi Jawa Tengah) dan Ngawi (Provinsi Jawa Timur).

Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi memiliki total panjang 90,43 kilometer yang dikelola oleh PT Jasamarga Solo Ngawi Jaya, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road. Sejak pencanangan pembangunan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 April 2015, di Ngawi, Jawa Timur, progres pembebasan lahan telah mencapai 98,44% sedangkan untuk konstruksi pembangunan tol Solo-Ngawi telah mencapai 100 %.

Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan roda perekonomian yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur. Tol tersebut juga memiliki tingkat kelayakan marjinal sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial.

Solo - Ngawi Toll Road

With an investment value of Rp. 11.34 trillion, this toll road is part of the Trans Java Toll Road that connects Jakarta with other cities in the central and eastern part of Java. Subsequently, this track will become the main route for the distribution of passengers, goods and services. The construction of Solo-Ngawi Toll Road is part of the Trans Java Toll Road network that passes through Boyolali, Karanganyar, Sragen (Central Java Province) and Ngawi (East Java Province) Regencies.

Solo-Ngawi toll road has a total length of 90.43 kilometers managed by PT Jasamarga Solo Ngawi Jaya, which shares are mostly owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk and PT Waskita Toll Road. Since the construction launching by President Joko Widodo on April 30, 2015, in Ngawi, East Java, the progress of land acquisition has reached 98.44% while the construction of the Solo-Ngawi toll road has reached 100%.

The construction of Solo-Ngawi Toll Road is part of Trans Java Toll Road network that has a key role in running the economy which connects Central Java with East Java. The toll road also has a marginal level of feasibility. Thus, it needs government support to improve financial feasibility.

Jalan Tol Ngawi – Kertosono

Jalan Tol Ngawi–Kertosono adalah jalan tol sepanjang 87,02 kilometer yang di mulai dari Kabupaten Ngawi sampai Kertosono, ini melewati Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun. Progres pembangunan jalan tol dengan nilai investasi Rp 3,83 triliun ini sudah selesai 100% baik proses konstruksi maupun pembebasan lahan terhitung sejak dilakukannya pencanangan pembangunan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 April 2015, di Ngawi, Jawa Timur.

Pengelola Jalan Tol Ruas Ngawi-Kertosono ini adalah PT Jasamarga Ngawi Kertosono, yang sebagian besar sahamnya juga dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road. Pembangunan jalan tol ini dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mewujudkan jalan tol Trans Jawa.

Ngawi – Kertosono Toll Road

Ngawi-Kertosono Toll Road is a 87.02-kilometer toll road that starts from Ngawi Regency to Kertosono, passing through Magetan Regency and Madiun Regency. This project is worth an investment of IDR 3.83 trillion and Its construction progress has been completed 100% for both the construction and land acquisition process starting from the construction launching by President Joko Widodo on 30 April 2015, in Ngawi, East Java.

The manager of Ngawi-Kertosono Section Toll Road is PT Jasamarga Ngawi Kertosono, which shares are mostly owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk and PT Waskita Toll Road. Its construction is done in order to support the realization of the Government's programs of Trans Java toll road.

Jalan Tol Gempol – Pasuruan

Jalan Tol Gempol-Pasuruan adalah sebuah jalan tol sepanjang 34,2 kilometer yang menghubungkan daerah Gempol dengan Kota Pasuruan. Jalan tol dengan nilai investasi Rp 4,03 triliun ini, merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Pelabuhan Merak hingga ke Banyuwangi.

Pengelola Jalan Tol Gempol-Pasuruan ini adalah PT Jasamarga Gempol Pasuruan, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Progres pembangunan jalan tol ini, sudah selesai 100 % baik itu proses konstruksi maupun pembebasan lahan.

Jalan Tol Pandaan - Malang

Jalan Tol Pandaan-Malang adalah sebuah jalan tol sepanjang 37,62 kilometer yang menghubungkan daerah Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan Malang, Jawa Timur. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol yang menghubungkan dua kota terbesar di Jawa Timur yaitu Surabaya dan Malang.

Jalan Tol Pandaan-Malang ini dikelola oleh PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) di mana perusahaan tersebut didirikan oleh 3 BUMN, yaitu PT Jasamarga (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 60%, PTPP sebesar 30% dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar 5%.

Dengan berfungsinya Jalan Tol Pandaan-Malang ini, maka jarak tempuh antara Pandaan, Pasuruan sampai dengan Kota Malang nantinya akan menghemat waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dibandingkan melalui jalan nasional yang tersedia saat ini. Rencana jalan tol ini merupakan kelanjutan dari ruas jalan tol Gempol-Pandaan yang saat ini sudah dioperasikan untuk menghubungkan kota Surabaya-Malang.

Progres pembangunan jalan tol dengan nilai investasi sekitar Rp 5,97 triliun ini, proses pembebasan lahan telah mencapai 93,1 %, sementara untuk konstruksi sudah mencapai 80 %, dan ditargetkan akan dioperasikan pada Triwulan I Tahun 2019.

Gempol – Pasuruan Toll Road

Gempol-Pasuruan Toll Road is a 34.2-kilometer toll road that connects the Gempol area with Pasuruan City. This toll road with an investment value of IDR 4.03 trillion is part of Trans Java toll road that connects Merak Port to Banyuwangi.

The manager of Gempol-Pasuruan Toll Road is PT Jasamarga Gempol Pasuruan, whose majority of the shares are owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Its construction progress has been 100% completed, both in the process of construction and land acquisition.

Pandaan – Malang Toll Road

Pandaan-Malang Toll Road is a 37.62-kilometer toll road that connects Pandaan, Pasuruan Regency with Malang, East Java. This toll road is part of the toll road that connects the two largest cities in East Java, namely Surabaya and Malang.

Pandaan-Malang Toll Road is managed by PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) since the company was founded by three SOEs, namely PT Jasamarga (Persero) Tbk with 60% share ownership, PTPP with 30% share ownership and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) by 5%.

Through the functioning of Pandaan-Malang Toll Road, the distance between Pandaan, Pasuruan and Malang City will save time approximately one hour of travel compared to the currently available national roads. The plan for this toll road is a continuation of thGempol-Pandaan toll road which is currently being operated to connect the city of Surabaya-Malang.

The progress of toll road construction has an investment value of approximately IDR 5.97 trillion. The land acquisition process has reached 93.1% while construction has reached 80%. It is targeted to be operated in the First Quarter of 2019.

Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi

Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi adalah jalan tol sepanjang 172,91 kilometer dalam rangka memperlancar alur distribusi barang dan jasa serta menyambungkan Jalan Tol Trans Jawa. Jalan tol ini akan terintegrasi dengan Pelabuhan Ketapang yang merupakan pelabuhan penyeberangan dari Jawa ke Bali. Jalan tol dengan nilai investasi 23,39 triliun ini, ditargetkan selesai pada Triwulan II tahun 2022 sehingga tol ini akan melengkapi seluruh rute Jalan Tol Trans Jawa dari Merak di ujung barat hingga Banyuwangi di ujung timur. Pengelola Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi ini adalah PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Probolinggo-Banyuwangi Toll Road

Probolinggo-Banyuwangi Toll Road is a 172.91-kilometer toll road built to facilitate the distribution of goods and services and to connect Trans Java Toll Road. It will be integrated with Ketapang Port as a ferry port from Java to Bali. This toll road with an investment value of IDR 23.39 trillion is due for completion in the second quarter of 2022 to complete the entire Trans Java Toll Road route from Merak at the west end to Banyuwangi on the east end. The manager of the Probolinggo-Banyuwangi Toll Road is PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi, which shares are mostly owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Jalan Tol Pejagan – Pemalang

Jalan Tol Pejagan–Pemalang adalah tol yang terbentang sepanjang 57,50 kilometer yang menghubungkan daerah Pejagan, Brebes dengan Pemalang, Jawa Tengah. Jalan Tol ini adalah kelanjutan dari Jalan Tol Kanci-Pejagan yang menghubungkan Pejagan, Brebes dengan Kabupaten Brebes. Pengusahaan Jalan Tol Pejagan – Pemalang dilaksanakan oleh PT Pejagan Pemalang Tol Road dengan nilai investasi Rp 6,84 triliun.

Jalan Tol Pejagan – Pemalang memiliki 4 seksi, yaitu Seksi 1 (Pejagan – Brebes Barat) dengan panjang 14,20 kilometer yang telah beroperasi pada bulan Juni 2016, Seksi 2 (Brebes Barat – Brebes Timur) sepanjang 6,00 kilometer yang beroperasi pada bulan Juni 2016, Seksi 3 (Brebes Timur – Tegal Timur) panjang 10,40 kilometer dan Seksi 4 (Tegal Timur – Pemalang) yang memiliki panjang 26,90 kilometer. Progres pembangunan jalan tol ini sudah selesai 100% baik proses konstruksi maupun pembebasan lahan serta sudah dioperasikan di tahun 2018 ini.

Pejagan – Pemalang Toll Road

Pejagan-Pemalang Toll Road is a 57.5- kilometer toll road that connects Pejagan, Brebes and Pemalang, Central Java. It is a continuation of Kanci-Pejagan Toll Road that connects Pejagan, Brebes and Brebes Regency. The concession of Pejagan - Pemalang Toll Road is carried out by PT Pejagan Pemalang Tol Road with an investment value of IDR 6.84 trillion.

Pejagan - Pemalang Toll Road has four sections, namely Section 1 (Pejagan - West Brebes) with a length of 14.20 kilometers which has been in operation since June 2016, Section 2 (West Brebes - East Brebes) along 6.00 kilometers which has operated in June 2016, Section 3 (East Brebes - East Tegal) is 10.40 kilometers long and Section 4 (East Tegal - Pemalang) which has a length of 26.90 kilometers. Its construction progress has been completed 100% both in construction and land acquisition and has been operated in 2018.

Jalan Tol Pemalang – Batang

Jalan Tol Pemalang–Batang atau disingkat Jalan Tol Pematang, adalah jalan tol yang terbentang sepanjang 39,2 kilometer yang menghubungkan daerah Pemalang dengan Batang, Jawa Tengah. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Proyek Jalan Tol Pemalang-Batang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk mulai tahun 2016.

Pemalang – Batang Toll Road

Pemalang-Batang Toll Road, or shorten as Pematang Toll Road, is a 39.2 kilometer toll road that connects Pemalang with Batang, Central Java. It is part of Trans Java Toll Road which will connect Merak, Banten to Banyuwangi, East Java. The Pemalang-Batang Toll Road Project is a National Strategic Project (PSN) carried out by PT Waskita Karya (Persero) Tbk starting in 2016.

Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Tol Trans Jawa hingga Surabaya ini menghabiskan investasi sekitar Rp 7,2 triliun. Progres pembangunan jalan tol ini, untuk proses pembebasan atau pengadaan lahan telah mencapai 98,49%, sementara untuk proses konstruksi sudah mencapai 98,8%.

The construction of the toll road that connects Trans Java Toll Road to Surabaya spends around IDR 7.2 trillion in investment. The construction progress of this toll road, for land acquisition or procurement has reached 98.49%, while the construction process has reached 98.8%.

Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo

Pembangunan tol Pasuruan – Probolinggo sepanjang 31,30 kilometer ini, terbagi menjadi tiga seksi. Seksi I dari Grati – Tongas sepanjang 12,59 kilometer, seksi II dari Tongas – Probolinggo Barat sepanjang 6,88 kilometer dan seksi III dari Probolinggo Barat – Probolinggo Timur sepanjang 11,83 kilometer. Tol Pasuruan – Probolinggo (Paspro) merupakan bagian dari tol Trans Jawa yang dicanangkan pemerintah dan melewati tiga daerah sekaligus. Meliputi Kabupaten Pasuruan dengan panjang 8 kilometer, Kabupaten Probolinggo dengan panjang 22,1 kilometer, dan Kota Probolinggo dengan panjang 1,2 kilometer.

Pasuruan - Probolinggo Toll Road

The construction of 31.30-kilometer Pasuruan - Probolinggo toll road is divided into three sections. Section I of Grati - Tongas is 12.59 kilometers long, section II of Tongas - Probolinggo Barat is 6.88 kilometers and section III of Probolinggo Barat - Probolinggo Timur is 11.83 kilometers. Pasuruan - Probolinggo (Paspro) toll road is part of Trans Java toll road launched by the government and passes through three regions at once including eight kilometers in Pasuruan Regency, 22.1 kilometers in Probolinggo Regency, and 1.2 kilometers in Probolinggo City.

Pembangunan jalan tol yang yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini menghabiskan investasi sekitar Rp 3,87 triliun. Progres pembangunan jalan tol ini, untuk proses pembebasan atau pengadaan lahan telah mencapai 98,69%, sementara untuk proses konstruksi sudah mencapai 97,44%.

The construction was carried out by PT Waskita Karya (Persero) Tbk and spent an investment of approximately IDR 3.87 trillion. Its construction progress for land acquisition or procurement has reached 98.69%, while the construction process has reached 97.44%.

➤ TRANS KALIMANTAN

Jalan Tol Balikpapan – Samarinda

Jalan Tol Balikpapan - Samarinda direncanakan akan menghubungkan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, karena selama ini kedua kota tersebut hanya dihubungkan dengan satu poros jalan. Sebagai kota yang tergolong terbesar di Provinsi Kalimantan Timur dan banyak melayani aktifitas dan kegiatan lintas provinsi, menyebabkan kebutuhan akan waktu tempuh antar kota yang lebih singkat serta harus sesuainya standar jalan yang ada.

➤ *TRANS KALIMANTAN*

Balikpapan - Samarinda Toll Road

Balikpapan - Samarinda Toll Road is planned to connect Balikpapan City and Samarinda City, since the two cities are only connected with one road shaft thus far. As the largest city in East Kalimantan Province that serves many cross-province activities, it causes the need for inter-city travel time to be shorter and must comply with existing road standards.

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menjadi salah satu ruas yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Joko Widodo dengan panjang rute 99,35 kilometer. Progres pembangunan jalan tol dengan nilai investasi sekitar Rp 9,97 triliun ini, untuk proses pembebasan lahan telah mencapai 99,18%, sementara untuk proses konstruksi sudah mencapai 80,89%.

Balikpapan-Samarinda Toll Road is one of the sections included in President Joko Widodo's National Strategic Project (PSN) with a 99.35-kilometer long route. With an investment value of approximately IDR 9.97 trillion, the progress of toll road construction for the land acquisition process has reached 99.18%, while the construction process has reached 80.89%.

Pengelola Jalan Tol Balikpapan-Samarinda ini adalah PT Jasamarga Balikpapan Samarinda, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pembangunan jalan tol ini dibagi menjadi 5 seksi yakni Seksi I ruas KM 13 Balikpapan-Samboja sepanjang 22,03 kilometer, serta Seksi II ruas Samboja-Muara Jawa, Seksi III ruas Muara Jawa-Palaran, Seksi IV ruas Palaran-Jembatan Mahkota II dengan total panjang keselurahan 66,23 kilometer dan Seksi V ruas KM 13 Balikpapan-Sepinggan sepanjang 11,09 kilometer.

The manager of Balikpapan-Samarinda Toll Road is PT Jasamarga Balikpapan Samarinda, which is mostly owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk. The construction of this toll road is divided into five sections, namely Section I of KM-13 Balikpapan-Samboja section along 22.03 kilometers, Section II of Samboja-Muara Jawa section, Section III of Muara Jawa-Palaran section, Section IV of Palaran-Jembatan Mahkota II section with a total an overall length of 66.23 kilometers and Section V of KM 13 Balikpapan-Sepinggan stretching along 11.09 kilometers.

➤ TRANS SULAWESI

Jalan Tol Manado – Bitung

Jalan Tol Manado - Bitung merupakan jalan tol yang menghubungkan kota Manado hingga kota Bitung yang berada di provinsi Sulawesi Utara. Pembangunan jalan tol dengan nilai investasi Rp 5,12 triliun ini dalam rangka pengembangan transportasi, peningkatan ekonomi, dan pengembangan wilayah di provinsiSulawesi Utara. Jalan tol ini memiliki panjang 39,90 kilometer yang dibagi dalam empat Seksi dan perkiraan selesai pada Triwulan II tahun 2019 untuk Seksi I A (Manado-Sukur), I B (Sukur-Airmadidi), dan II A (Airmadidi-Danowudu) sementara untuk Seksi II B (Danowudu-Bitung) diperkirakan selesai pada Triwulan III tahun 2019.

Pengelola Jalan Tol Manado - Bitung ini adalah PT Jasamarga Manado Bitung, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Progres pembangunan jalan tol ini, untuk proses pembebasan lahan telah mencapai 70,44%, sementara untuk proses konstruksi sudah mencapai 31,72%.

➤ *TRANS SULAWESI*

Manado – Bitung Toll Road

Manado - Bitung Toll Road is a toll road that connects Manado city to Bitung city in North Sulawesi. The construction of the toll road with an investment value of Rp 5.12 trillion aims to develop transportation, improve the economy, and develop the regions in North Sulawesi. This toll road has a length of 39.90 kilometers, divided into four section. It is estimated to be completed in the second quarter of 2019 for IA Section (Manado-Sukur), IB (Sukur-Airmadidi), and II A (Airmadidi-Danowudu). Meanwhile, for Section II B (Danowudu-Bitung), it is estimated to be completed in the third quarter of 2019.

The manager of the Manado - Bitung Toll Road is PT Jasamarga Manado Bitung, which is mostly owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk. The toll road's construction progress for the land acquisition process has reached 70.44%, while the construction process has reached 31.72%.

KERETA API *RAILWAY*



Pertumbuhan ekonomi inklusif untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia, tentu saja membutuhkan konektivitas antar daerah yang memadai. Ekonomi yang inklusif merupakan kondisi di mana kesempatan masyarakat mengupayakan peningkatan kesejahteraan menjadi lebih terbuka dan meluas, terutama bagi mereka yang memiliki berbagai keterbatasan ekonomi. Melalui ekonomi yang bersifat inklusif, dampak pembangunan akan dapat menetes dan dirasakan hingga ke masyarakat yang berada di kelompok terbawah. Ekonomi inklusif akan mampu diraih salah satunya apabila konektivitas yang menghubungkan antar daerah di Indonesia dapat terwujud dengan baik.

Inclusive economic growth to manifest Indonesia's development goals absolutely requires adequate connectivity between regions. An inclusive economy is a condition in which the community get the wider and more open opportunity to improve welfare, especially for those who have various economic limitations. Through an inclusive economy, the impact of development will be highlighted and enjoyed by the people in the lowest group. An inclusive economy will be able to be achieved, if the connectivity between regions in Indonesia can be actualized well.

Salah satu yang terus diupayakan Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif guna mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia adalah membangun konektivitas darat berupa pengembangan moda transportasi Kereta Api beserta sarana dan parasarananya. Akses dengan moda transportasi Kereta Api ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan efisiensi waktu perjalanan yang akan berdampak positif terhadap aktivitas manusia, logistik barang dan jasa, yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata.

The Government continually strives to support inclusive economic growth in order to realize Indonesia's development goals, one of which is to develop land connectivity by developing modes of rail transportation and its facilities and infrastructure. Access to the railroad transportation mode is expected to increase the convenience and efficiency of travel time which will give a positive impact on human activities, logistics of goods and services, whose purpose is to improve the equity of the social economy.

➤ LRT JABODEBEK

Pembangunan Proyek LRT Jabodebek saat ini tengah berlangsung dan direncanakan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2019. Proyek ini direncanakan membutuhkan dana sekitar Rp 27,5 triliun yang akan digunakan untuk pembelian sarana dan pengadaan prasarana proyek. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI ditugaskan oleh Pemerintah untuk menjadi penyelenggara pengoperasian prasarana dan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek).

Inti dari penugasan kepada PT KAI disini adalah melakukan pengadaan sarana kereta api untuk mengoperasikan proyek LRT Jabodebek ini, sementara untuk pembangunan infrastruktur dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA selaku penyedia kereta. Sinergi kegia BUMN ini diharapkan dapat memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar LRT Jabodebek.

Progres Pembangunan Proyek LRT Jabodebek

Progres fisik sampai dengan 31 Desember 2018

1. Prasarana (Adhi Karya) nilai kontrak Rp20,1 triliun

    - Posisi 31 Desember 2018: 55,93% seharusnya 79,31% (deviasi 23,38%)
        - Segemen Cawang – Cibubur → 75,95 %
        - Segmen Cawang – Kuningan – Dukuh Atas → 43,99%
        - Segmen Cawang – Bekasi Timur→ 50,26%

2. Sarana (INKA) nilai kontrak Rp4,5 triliun

    - Posisi per 31 Desember 2018 10,62% dari rencana 22,79% (deviasi 12,17%)
    - Keterlambatan disebabkan pengiriman Carbody karena adanya Topan Jebi dan keterlambatan kedatangan kabel dari PT LEN & Indosat (Tetra Radio Komunikasi) yang berpotensi berpengaruh terhadap ketepatan keseluruhan penyelesaian proyek termasuk keterlambatan pengiriman produk di tahap pertama

➤ *LRT JABODEBEK*

The construction of Jabodebek LRT Project is currently on-going and is planned to commence the operation in mid-2019. The project is planned to require fund approximately IDR 27.5 trillion to be used for the purchase of facilities and procurement of project infrastructure. PT Kereta Api Indonesia (Persero) or PT KAI was assigned by the Government to become the operator of the operation of Light Rail Transit (LRT) Integrated infrastructure and facilities in Jakarta, Bogor, Depok and Bekasi Areas (Jabodebek).

The core of the assignment to PT KAI is to procure train facilities to operate Jabodebek LRT project, while infrastructure construction is carried out by PT Adhi Karya (Persero) Tbk and PT Industri Kereta Api (Persero) or PT INKA as train providers. This SOE synergy is expected to have a positive effect on the economic growth of the community surrounding Jabodebek LRT.

Construction Progress of Jabodebek LRT Project

Physical progress up to December 31, 2018

1. *Infrastructure (Adhi Karya) has a contract value of IDR 20.1 trillion*
    - *Position on 31 December 2018: 55.93%. It should be 79.31% (deviation of 23.38%)*
        - *Cawang - Cibubur Segment → 75.95%*
        - *Cawang - Kuningan - Dukuh Atas Segment → 43.99%*
        - *Cawang - East Bekasi Segment → 50.26%*

2. *Facility (INKA) contract value of IDR 4.5 trillion*

    - *Position as of December 31, 2018 was 10.62% from the target of 22.79% (deviation of 12.17%)*
    - *The delay was due to the Carbody delivery since the occurance of Typhoon Jebi and the delay in the arrival of cables from PT LEN & Indosat (Tetra Radio Communications) which could potentially affect the accuracy of the whole project completion including the delay in product delivery in the first stage*

Biaya Pembangunan LRT Jabodebek

- Biaya pembangunan prasarana LRT Jabodebek sebesar Rp513,8 miliar/km, lebih rendah bila dibandingkan LRT Jakarta (Rp1.020,1 miliar/km) dan MRT Jakarta Fase 1 elevated (Rp1.090,2 miliar/km). Namun lebih tinggi dari LRT Sumatera Selatan (Rp466,6 miliar/km)
- Biaya pembangunan prasarana dan sarana LRT Jabodebek sebesar Rp673 miliar/km, lebih rendah bila dibandingkan negara lain seperti Pakistan Rp797 miliar/km, Malaysia Rp817 miliar/km, Filipina Rp903 miliar/km, Dubai Rp1.026 miliar/km, Calgary Kanada Rp2.197 miliar/km.

Jabodebek LRT Construction Costs

- *The cost of constructing Jabodebek LRT infrastructure is IDR513.8 billion/km, lower than Jakarta LRT (IDR1,020.1 billion/km) and Jakarta Phase 1 elevated MRT (IDR1,090.2 billion/km). On the other hand, it is higher than South Sumatra LRT (IDR 466.6 billion/km)*
- *The cost of constructing Jabodebek LRT infrastructure and facilities is IDR673 billion/km, lower than the other countries such as Pakistan IDR797billion/km, Malaysia IDR817 billion/km, Philippines IDR903 billion/km, Dubai IDR1,026 billion/km, Calgary Canada IDR2,197 billion/km.*

Perbandingan dengan Negara Lain
Comparison of Costs with Other Countries







	LRT CALGARY KANADA	LRT DUBAI UNI EMIRATE ARAB	LRT MANILA LINE 7 FILIPINA	LRT KENALA JAYA MALAYSIA	LRT LAHORE PAKISTAN
TAHUN OPERASI OPERATION YEAR	2026	2009	2019	2016	2018
TIPE JALUR TYPE OF TRACK	At grade	Elevated, at grade	Elevated	Elevated, at grade	Elevated
PANJANG (KM) LENGTH (KM)	20	76	23	34,7	27,1
TOTAL BIAYA (RP MILIAR) TOTAL COSTS (Rp. BILLION)	43.940	78.000	20.790	28.350	21.600
BIAYA PER KM (RO MILIAR/KM) COSTS PER KM	2.197	1.026	903	817	817
REFERENSI REFERENCE	www.railway-technology.com	www.alihareel.net	www.railway-technology.com	www.railway-technology.com	Lahore Metro

BIAYA LRT JABODETABEK
JABODEBEK LRT COST

RP. 673 MILIAR/KM BILLION/KM



➤ LRT SUMATERA SELATAN

Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan untuk mendukung penyediaan angkutan umum massal. Total nilai proyek LRT Sumatera Selatan sebesar Rp10,9 triliun. Lintas pelayanan LRT dimulai dari stasiun Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II hingga Jakabaring Sport City. LRT ditargetkan untuk beroperasi pada Agustus 2018 dalam rangka mendukung perhelatan kompetisi olahraga Asian Games 2018. Kota Palembang adalah salah satu kota besar di Indonesia yang tengah bertumbuh pesat. Keberadaan transportasi umum massal diperlukan sebagai upaya preventif prediksi peningkatan kepadatan lalu lintas di Kota Palembang.

Tahap konstruksi proyek LRT Sumatera Selatan dimulai sejak tahun 2015 dengan landasan hukum Perpres Nomor 116 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan di Sumatera Selatan tanggal 20 Oktober 2015. Pemerintah menugaskan PT Waskita Karya Tbk untuk membangun prasarana LRT meliputi jalur termasuk konstruksi jalur layang, stasiun dan fasilitas operasi. Serangkaian uji coba dilaksanakan sejak Mei hingga Juli 2018, termasuk uji coba terbatas dengan penumpang pada 23-31 Juli 2018. Operasi penuh LRT Palembang dimulai pada 1 Agustus 2018, dengan 6 stasiun prioritas dibuka untuk melayani penumpang dari dan menuju tempat pertandingan Pesta Olahraga Asia 2018. LRT Palembang memiliki 13 stasiun yang terbagi dalam 5 zona, dan memiliki 1 depo.

➤ *LRT IN SOUTH SUMATERA*

Construction of Light Rail Transit (LRT) in Palembang, South Sumatera to support the provision of mass public transportation. The total value of the South Sumatera LRT project is Rp10.9 trillion. The LRT service line starts from Sultan Mahmud Badaruddin II International Airport Station to Jakabaring Sport City. The LRT is targeted to operate in August 2018 in support of the 2018 Asian Games sports competition. Palembang City is one of the major cities in Indonesia that is growing rapidly. The existence of mass public transportation is needed as a preventive measure to predict an increase in traffic density in the city of Palembang.

The construction phase of the South Sumatera LRT project began in 2015 with the legal basis of Presidential Regulation No. 116 of 2015 concerning the acceleration of the implementation of light rail in South Sumatera on October 20, 2015. The government has assigned PT Waskita Karya Tbk to build LRT infrastructure including lines including the construction of elevated lines, stations and operating facilities. A series of trials were conducted from May to July 2018, including limited trials with passengers on 23-31 July 2018. Palembang's LRT full operation begins on 1 August 2018, with 6 priority stations opened to serve passengers to and from the 2018 Asian Games. LRT Palembang has 13 stations divided into 5 zones, and has 1 depot.

Sea Connectivity
Konektivitas Laut



Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Pemerintah memperkuat konektivitas laut baik sarana maupun prasarana dengan mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Dengan memperkuat konektivitas laut, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menciptakan perkembangan perekonomian secara nasional. Pemerintah berharap, melalui penguatan konektivitas laut ini, akan tercipta pembangunan dan peningkatan ekonomi yang merata, dimana harga kebutuhan pokok di desa-desa tidak jauh berbeda dengan harga kebutuhan pokok di kota besar.

Indonesia is the largest archipelagic country in the world that has a great potential to become the world's maritime axis. To reach this goal, the Government strengthens marine connectivity for both facilities and infrastructure by encouraging infrastructure development and maritime connectivity through the development of sea tolls, seaports, logistics, shipping industries, and maritime tourism.

The strengthening of sea connectivity is expected to increase regional economic growth and manage to establish economic development in national scale. The government has optimism that through strengthening this sea connectivity, the equal development and economic improvement will be manifested as the prices of basic necessities in villages are similar from the ones in the large cities.

Pengembangan Terminal Multi Purpose Kuala Tanjung

Pengembangan pelabuhan di Kuala Tanjung menjadi pelabuhan hub internasional sebagai pintu masuk ke wilayah barat Indonesia. Dengan hub internasional diharapkan Indonesia dapat menikmati demand pelabuhan yang selama ini dinikmati oleh Singapura dan Malaysia. Berdasarkan dari Rencana Pelabuhan Kuala Tanjung tahun 2012, pembangunan pelabuhan dengan nilai investasi Rp4,02 triliun ini, akan mengakomodir kargo untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Pelabuhan Belawan.

Dengan adanya Pelabuhan Kuala Tanjung maka pelabuhan ini akan menjadi hub internasional di kawasan barat Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Bitung. Berbagai sarana dan prasarana infrastruktur telah disiapkan untuk mendukung fungsi pelabuhan ini. Selain menjadikan hub internasional di kawasan barat Indonesia diharapkan nantinya Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai pelabuhan transshipment dan pelabuhan untuk mendukung Kuala Tanjung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pelabuhan Kuala Tanjung ini dikelola oleh PT Prima Multi Terminal yang merupakan anak usaha gabungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Peindo I dengan kepemilikan saham sebesar 55,00% dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham 30,00% serta PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham 5,00%.

Hingga 31 Desember 2018, progres fisik untuk pembangunan proyek pengembangan Terminal Multi Purpose Kuala Tanjung sudah mencapai 99,42%. Pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksikan akan menjadi pelabuhan terbesar dan merupakan pintu masuk Pulau Sumatera. Keberadaan pelabuhan ini diharapkan dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi hub bagi pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di Pulau Sumatera. Pelabuhan Kuala Tanjung ini sudah beroperasi sejak Desember 2018 dan telah melakukan ekspor perdananya sebanyak 205 TEUs dengan menggunakan Kapal Wan Hai Lines 505.

Development of Kuala Tanjung Multi Purpose Terminal

The development of port in Kuala Tanjung aims to become an international hub port as the entrance to the western region of Indonesia. Through the international hub, Indonesia is expected to be able to benefit port demand which has been experienced by Singapore and Malaysia. Based on the 2012 Kuala Tanjung Port Plan, the construction of the port with an investment value of IDR 4.02 trillion will accommodate cargo to support the development of Sei Mangkei Special Economic Zone (KEK) and Belawan Port.

Through Kuala Tanjung Port, this port will become an international hub in western Indonesia after Tanjung Priok Port and Bitung Port. Various infrastructure facilities and infrastructure have been arranged to support the port function. In addition to making the international hub in western Indonesia, Kuala Tanjung Port is expected to have two main functions, namely as a transshipment port and port to support Kuala Tanjung as a Special Economic Zone (SEZ).

Kuala Tanjung Port is managed by PT Prima Multi Terminal which is a joint subsidiary of a State-Owned Enterprise (BUMN) consisting of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or Peindo I with share ownership of 55.00%, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk with 30.00% share ownership, and PT Waskita Karya (Persero) Tbk with 5.00% share ownership.

As of December 31, 2018, the physical progress for the development of Kuala Tanjung Multi Purpose Terminal project has reached 99.42%. Kuala Tanjung Port is projected to be the largest port and the entrance to Sumatra Island. The existence of this port is expected to reduce logistics costs and improve Indonesia's logistical competitiveness with other countries in the world. Kuala Tanjung Port will be the hub for the ports on Sumatra island. Kuala Tanjung Port has been operating since December 2018 and has carried out its first export of 205 TEUs using Wan Hai Ship Lines 505.

Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I menyiapkan lahan untuk pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Pengembangan ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung.

Pelindo I bekerja sama dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Dalam hal ini, kedua BUMN tersebut telah membentuk anak usaha di mana saham mayoritasnya dipegang Pelindo I yaitu sebesar 90,00% yakni PT Prima Pengembang Kawasan. Proyek dengan nilai investasi Rp 34,68 triliun ditargetkan akan selesai pada tahun 2035.

Pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan mampu terintegrasi dengan kawasan industri yang mampu mendorong perekonomian wilayah maupun nasional. Kawasan Industri Terintegrasi Kuala Tanjung yang terletak di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, memiliki keunggulan antara lain lokasi yang strategis, berada di selat malaka, lahan yang cukup luas (3000 ha) sehingga dapat menampung industri skala besar, akses ke pelabuhan laut dalam yang dapat melayani kapal ukuran terbesar, serta pemanfaatan infrastruktur dan fasillitas dasar secara bersama.

Development of Kuala Tanjung Industrial Estate

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) or Pelindo I set up the land for the development of Kuala Tanjung industrial area, North Sumatra. The development is a mandate of the Presidential Regulation (Perpres) No. 81 of 2018 concerning the Acceleration of Construction and Operation of Kuala Tanjung Port and Industrial Zone.

Pelindo I cooperates with PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum). In this case, the two SOEs have formed a subsidiary with the majority of shares are held by Pelindo I equal to 90.00%, namely PT Prima Kawasan Developer. The project with an investment of IDR 34.68 trillion is targeted to be in completion by 2035.

Kuala Tanjung Port is expected to be able to be integrated with industrial estates that manage to encourage the regional and national economies. Kuala Tanjung Integrated Industrial Zone, located in Batubara Regency, North Sumatra, has many advantages such as a strategic location, located in the Malaka Strait, a large area of 3000 ha to manage accommodating the large-scale industries, access to deep sea ports that can serve the largest size vessels, as well as joint utilization of infrastructure and basic facilities.

Pembangunan Terminal Kijing

Pengembangan Terminal Kijing adalah pengembangan pelabuhan yang terletak di provinsi Kalimantan Barat, di kabupaten/kota Mempawah. Lokasi Pelabuhan Pontianak yang strategis menjadikan pertumbuhan arus barang di pelabuhan ini sangat tinggi. Dengan keterbatasan Pelabuhan Pontianak saat ini yang sudah sangat padat, sehingga sulit untuk mengakomodir kapal-kapal besar. Untuk itu, diperlukan pembangunan pelabuhan baru yang berada di sisi laut sehingga tetap dapat mengakomodir permintaan pasar serta dapat memberikan dampak terhadap peningkatan investor dalam mengembangkan industri perkebunan dan pertambangan.

Proyek pengembangan Terminal Kijing ini direncanakan memiliki kapasitas 950 ribu Teus Petikemas, 8,34 juta ton CPO, dan 15 juta ton curah kering. Phase I untuk pengembangan Terminal Kijing dengan nilai investasi Rp5,05 triliun ini antara lain:

Construction of Kijing Terminal

Kijing Terminal Development is the development of a port located in West Kalimantan, Mempawah district/city. The strategic location of Pontianak Port contributes to the rapid growth of the flow of goods at this port. With the limitation of high density of the current Pontianak Port, it becomes problematic to accommodate large vessels. Therefore, the construction of a new port on the sea side is needed to manage accommodating the market demand and can have an impact on increasing investors in developing the plantation and mining industries.

The Kijing Terminal development project is planned to have a capacity of 950 thousand Teus Container, 8.34 million tons of CPO, and 15 million tons of dry bulk. Phase I for Kijing Terminal development with an investment of Rp5.05 trillion includes:

- Pembangunan Terminal Peti Kemas (18.9 Ha)
- Pembangunan Terminal Curah Cair (16.5 Ha)
- Pembangunan Terminal Curah Kering (14 Ha)
- Pembangunan Terminal Multipurpose (16.3 Ha)
- Pembangunan Causeway 3,5 km

Pengembangan Terminal Kijing ini dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II dengan jangka waktu proyek dari tahun 2017 hingga 2021, di mana diharapkan pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan internasional pertama di Kalimantan.

- *Construction of Container Terminals (18.9 Ha)*
- *Construction of a Liquid Bulk Terminal (16.5 Ha)*
- *Construction of Dry Bulk Terminal (14 Ha)*
- *Construction of a Multipurpose Terminal (16.3 Ha)*
- *Causeway construction 3.5 km*

The Kijing Terminal development is carried out by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or Pelindo II with a project period 2017-2021, and this port is expected to become the first international port in Kalimantan.

Pengembangan Terminal dan Inland Waterways Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL)

Pengembangan Terminal dan Inland Waterways Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi jalur kanal sungai sebagai alternatif transportasi logistik. Optimalisasi ini akan menghubungkan *area off the road* Pelabuhan Tanjung Priok dengan area hinterland. Pengembangan Terminal dan Inland Waterways Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) dengan nilai investasi Rp3,41 triliun ini, sangat dibutuhkan untuk efisiensi, juga untuk mengurangi beban jalan raya. Karena saat ini kawasan Tanjung Priok sudah sangat padat sehingga perlu ada alternatif proses pengangkutan.

Pengembangan Terminal dan Inland Waterways Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) ini dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II dengan jangka waktu proyek dari tahun 2018 hingga 2021, dimaksudkan untuk memberikan moda transportasi alternatif yang lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan, yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan kawasan industri di Timur Jakarta. Pengembangan Terminal dan Inland Waterways Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) yang dimaksud antara lain:

- Pembangunan Terminal Peti Kemas
- Pembangunan Terminal Curah
- Pekerjaan Pengerukan (-5 mLWS)
- Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan di Alur Kanal Eksisting

- Pendalaman dan Pelebaran Kanal
- Pembebasan Lahan 200 Ha
- Pembangunan Jalan Akses (*Fly over* dan Jalur Kereta Api)
- Pengadaan Alat Bongkar Muat

Development of Terminal and Inland Waterways of Cikarang-Bekasi-Java-Sea (CBL)

The development of Terminal and Inland Waterways of Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) aims to optimize the potential of river canal lines as an alternative to logistics transportation. This optimization will connect off the road of Tanjung Priok Port with the hinterland area. The development of Terminal and Inland Waterways of Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) with an investment value of IDR 3.41 trillion is needed for efficiency and also to reduce the main road loads. In this case, Tanjung Priok area is currently very dense, thus an alternative for transportation process becomes necessary.

The development of Terminal and Inland Waterways of Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) is carried out by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or Pelindo II with a project period from 2018 to 2021. This project is intended to provide alternative modes of transportation that are more effective, efficient and eco-friendly as it connects Tanjung Priok Port with industrial estates in East Jakarta. The development of Cikarang-Bekasi-Java Sea (CBL) Terminal and Inland Waterways includes:

- *Construction of Container Terminals*
- *Construction of Bulk Terminal*
- *Dredging Work (-5 mLWS)*
- *Work on Bridge Reconstruction in Existing Channel Grooves*
- *Channel deepening and widening*
- *Land acquisition of 200 ha*
- *Construction of Access Roads (Fly over and Railroad Tracks)*
- *Procurement of loading and unloading equipment*

Pembangunan Fly Over Menuju Terminal Teluk Lamong

Pembangunan fly over menuju Terminal Teluk Lamong dengan nilai investasi Rp 1,3 triliun ini merupakan jalan akses antara Terminal Teluk Lamong (TTL) dengan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya. Dengan dibangunnya fly over yang nantinya terintegrasi dengan TTL ini, diharapkan bisa lebih mempercepat pergerakan arus barang baik secara lokal maupun regional menuju dan dari pelabuhan. Selain itu, kemacetan di jalan raya yang biasa digunakan oleh para pengguna kendaraan roda dua akan berkurang karena langsung terhubung ke jalan tol dari pintu tol Romokalisari.

Pembangunan fly over yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III ini, diharapkan dapat menjawab masalah kemacetan di Jalan Kalianak dan Osowilangun yang kerap dilewati truk dan kendaraan pribadi. Sehingga nantinya truk petikemas yang akan menuju TTL sudah bisa terintegrasi langsung dari tol menuju pelabuhan.

Hingga 31 Desember 2018, progres fisik untuk pembangunan fly over menuju Terminal Teluk Lamong sudah mencapai 30,04% dengan relisasi proyek sebagai berikut:

- Proses finalisasi Detailed Engineering Design (DED),
- Penerbitan Penetapan lokasi di Pemprov Jatim
- Pembangunan Pada Section 1 selesai 100%
- Pembebasan 20 Alas Hak dari total 35 Alas Hak

Fly Over Towards Teluk Lamong Terminal Construction

The fly over construction to Teluk Lamong Terminal with an investment of IDR 1.3 trillion is an access road between Terminal Teluk Lamong (TTL) and the West Outer Ring Road (JLLB) Surabaya. With the flyovers construction that will later be integrated with TTL, it is expected to accelerate the movement of goods flow both locally and regionally to and from the port. In addition, congestion on the highway that is usually used by users of two-wheeled vehicles will be reduced as it is directly connected to the toll road from Romokalisari toll gate.

The construction of fly over is carried out by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) or Pelindo III and is expected to be able to respond the problems of congestion on Jalan Kalianak and Osowilangun which are often passed by trucks and private vehicles. Therefore, later the container truck going to TTL can be integrated directly from the toll road to the port.

As of December 31, 2018, the physical progress for the fly over construction to Teluk Lamong Terminal has reached 30.04% with the relocation of the project as follows:

- *The process of finalizing Detailed Engineering Design (DED),*
- *Issuance of location determination in East Java Provincial Government*
- *The completion of Section 1 Construction reached 100%*
- *Exemption from 20 Rights from a total of 35 Rights*

Pengadaan Lahan/Reklamasi Lahan Terminal Manyar ± 40 Ha

Proyek pengadaan lahan/reklamasi lahan Terminal Manyar ± 40 Ha ini dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III yang berlokasi di Terminal Manyar Pelabuhan Gresik Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Proyek dengan nilai investasi Rp 872,35 miliar ini ditargetkan selesai pada Desember 2020 dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan *supply power plant* mandiri kawasan industri terpadu Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. JIIPE adalah sebuah kawasan industrial, yang terintegrasi dengan pelabuhan laut dalam, lahan pemukiman dan kawasan industrial di Gresik, Jawa Timur.

Land Procurement/Reclamation of Terminal Manyar Land ± 40 Ha

The land acquisition/reclamation project of Manyar Terminal ± 40 Ha is carried out by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) or Pelindo III located in Manyar Terminal, Gresik Port, Manyar District, Gresik Regency, East Java. The project with an investment of IDR 872.35 billion is targeted for completion in December 2020 with the aim of supporting the demand of Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) integrated industrial estate supply plant, Gresik, East Java. JIIPE is an industrial area, integrated with deep sea ports, residential land and industrial areas in Gresik, East Java.

Perkerasan Container Yard CCC-CDC di Pelabuhan Tenau Kupang

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III melakukan perkerasan Container Yard CCC-CDC di Pelabuhan Tenau Kupang dengan nilai investasi Rp 16 miliar. Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan salah satu dari 23 pelabuhan feeder di Indonesia guna pengembangan program tol laut yang di usung oleh Presiden Joko Widodo, guna menjadikan Indonesia poros maritim dunia dan mampu untuk menggerakkan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan NTT salah satunya.

Pengembangan Pelabuhan Tenau Kupang ini, ditujukan agar dapat disinggahi kapal-kapal berukuran besar. Dengan adanya pengembangan pelabuhan Tenau Kupang ini membuktikan keseriusan Pemerintah untuk menjadikan laut Indonesia poros maritim. Proyek perkerasan Container Yard CCC-CDC di Pelabuhan Tenau Kupang ini, telah selesai pada Juli 2018 dengan luas Container Yard (CY) 10.057,11 meter persegi, dan Kapasitas ±1.400 TEU's.

Pavement of Container Yard CCC-CDC in Port of Tenau Kupang

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) or Pelindo III conducted a Container Yard CCC-CDC pavement in Port of Tenau Kupang with an investment of IDR 16 billion. Port of Tenau Kupang, East Nusa Tenggara (NTT), is one of 23 feeder ports in Indonesia to develop a sea highway program. It is being initiated by President Joko Widodo one of which is to make Indonesia as a a global maritime axis and able to encourage the center of economic growth in NTT region.

The Port of Tenau Kupang development is intended to be able to be visited by large vessels. The development of Tenau Kupang port demonstrates the Government commitment to make the Indonesian sea as a maritime axis. The Container Yard CCC-CDC pavement project in Port of Tenau Kupang was completed in July 2018 with an area of 10,057.11 square meters Container Yard (CY) and ± 1,400 TEU's capacity.

Pembangunan Terminal Penumpang di Pelabuhan Ippi

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III melakukan pembangunan Terminal Penumpang di Pelabuhan Ippi dengan nilai investasi Rp 16,65 miliar. Pembangunan Terminal Penumpang di Pelabuhan Ippi yang berlokasi di Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur ini, telah selesai pada Juni 2018 dengan membangun Gedung Terminal 2 lantai berkapasitas ± 750 penumpang.

Posisi Ende yang strategis di tengah–tengah Pulau Flores dengan hinterland Ende dan kota–kota Flores di sisi pantai selatan akan sangat diminati. Terlebih dengan potensi wisata Danau Kelimutu yang sedang melejit namanya akan jadi gula manis yang siap menarik antusiasme wisatawan yang datang dengan kapal pesiar untuk sandar di Pelabuhan Ippi.

Construction of Passenger Terminals at Ippi Port

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) or Pelindo III carried out the construction of a Passenger Terminal at Ippi Port with an investment of IDR 16.65 billion. Construction of a Passenger Terminal at Ippi Port located in Tetandara Sub-District, South Ende District, Ende Regency, East Nusa Tenggara, was completed in June 2018 by building a 2-storey Terminal Building with a capacity of ± 750 passengers.

The strategic position of Ende in the middle of Flores Island with Ende hinterland and Flores city on the south coast side will be in the great demand. With the skyrocketing tourism potential of Kelimutu Lake in particular, this fame will attract the enthusiasm of tourists who come by cruise ship to dock at Ippi Port.

Pembangunan Terminal Penumpang di Waingapu

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III melakukan revitalisasi terminal penumpang di Waingapu yang bertujuan memberikan peningkatan kenyamanan terhadap penumpang serta melakukan standarisasi

Construction of Passenger Terminals in Waingapu

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) or Pelindo III revitalized the passenger terminal in Waingapu which aims to increase the convenience and standardized passenger handling to the passenger. The construction of a Passenger Terminal

dalam penanganan penumpang. Pembangunan Terminal Penumpang di Waingapu dengan nilai investasi Rp 25 miliar ini ditargetkan dapat selesai pada Desember 2019, berupa pembangunan Gedung Terminal 2 lantai berkapasitas ± 750 penumpang.

in Waingapu with an investment of IDR 25 billion is targeted to be completed in December 2019, with the construction of a 2-storey Terminal Building with a capacity of ± 750 passengers.

Pembangunan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim. Upaya yang dilakukan Pelindo III ini untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan dengan pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia Timur.

This development is carried out in order to improve public services to accelerate national economic development based on maritime affairs. The efforts made by Pelindo III are to improve the connectivity and service with small ports in Eastern Indonesia.

Pembangunan Jembatan Penghubung Container Yard Bongkar dan Container Yard Muat di Kupang

Construction of Container Yard Unloading Bridge and Container Yard Load in Kupang

Pembangunan jembatan penghubung container yard bongkar dan container yard muat di Kupang, dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III dengan nilai investasi Rp 35,50 miliar dan ditargetkan selesai pada Juli 2020. Pembangunan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan untuk memacu pertumbuhan perdagangan di Indonesia Timur.

Construction of a bridge connecting container yard and container yard loading in Kupang, is carried out by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) or Pelindo III with an investment of Rp 35.50 billion and is targeted to be completed by July 2020. This development is carried out in order to improve public services and to spur trade growth in Eastern Indonesia.

Pembangunan Makassar New Port

Construction of Makassar New Port

Pembangunan Makassar New Port (MNP) dengan nilai investasi Rp 1,89 triliun ini, bertujuan untuk memindahkan sebagian kegiatan yang ada di Pelabuhan Makassar saat ini, sehingga efektivitas bongkar muat barang dapat lebih meningkat. Keberadaan MNP akan ikut menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan secara luas dan Indonesia secara umum.

The construction of Makassar New Port (MNP) with an investment of IDR 1.89 trillion aims to shift some of the existing activities at the Port of Makassar at this time to incrcease the effectiveness of loading and unloading of goods. The existence of MNP will support the economic growth of South Sulawesi Province widely and Indonesia in general.

Selain itu, pembangunan MNP yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV ini, juga merupakan program nasional poros maritim yang lebih dikenal dengan Tol Laut. Pembangunan MNP itu sejalan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Infrastruktur.

In addition, MNP development carried out by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) or Pelindo IV is also a national maritime axis program widely known as Sea Toll Road. The development of MNP is in line with the issuance of Presidential Regulation (Perpres) No. 3 of 2016 concerning Infrastructure Program Acceleration.

Sejak pelaksanaan *Ground Breaking* MNP tanggal 22 Mei 2015 oleh Presiden Joko Widodo, pembangunan Makassar New Port yang dibagi dalam tiga Paket ini, telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hingga Desember tahun 2018, untuk Paket A telah mencapai 100 % dan Paket B mencapai 92,46 % sementara Paket C telah mencapai 81,82%.

Since the implementation of MNP Ground Breaking on 22 May 2015 by President Joko Widodo, the construction of the Makassar New Port, which has been divided into three packages, has shown significant development. Up to December 2018, Package A has reached 100% and Package B has reached 92.46%. Meanwhile, Package C has reached 81.82%.

Untuk mendukung pelabuhan tersebut, Pemerintah juga membangun akses jalan di sisi laut. Pembebasan lahan telah dilaksanakan secara simultan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. Material pembangunan terus didatangkan ke lokasi via darat dan selanjutnya melalui akses laut, sehingga tidak akan merusak jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

To support the port, the Government also built road access on the sea side. Land acquisition has been carried out simultaneously with the Government of South Sulawesi Province and Government of Makassar City. The construction material proceeded to be brought to the location via land and later through sea access, so it will not damage the road and disrupt the smooth flow of traffic.

Seperti program Tol Laut yang lain yang mengedepankan konektivitas, pelabuhan MNP ini juga akan terkoneksi dengan jalur rel kereta api Makassar - Pare-pare dan Kawasan Industri Makassar (Kima) proyek MNP. Sinergi di antara BUMN dan Pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kota, telah berjalan dengan sangat baik untuk mewujudkan Makassar New Port.

Like other Sea Tol programs that prioritize connectivity, the MNP port will also be connected with the Makassar - Pare-pare railroad and the Makassar Industrial Estate (Kima) MNP project. Synergy between SOEs and the Government, both at the provincial and city levels, has been going very well to realize Makassar New Port.

Pengembangan Pelabuhan Bitung

Pelabuhan ini dipilih sebagai Pelabuhan Hub Internasional di Kawasan Timur Indonesia dengan pertimbangan bahwa pertumbuhan di wilayah Timur Indonesia memiliki potensi lebih tinggi dibandingkan dengan Wilayah Barat Indonesia. Pelabuhan ini akan mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang dinyatakan sebagai salah satu prioritas pemerintah.

Pelabuhan Bitung telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Hub Internasional melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Proyek ini digarap oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV dengan jangka waktu pengembangan proyek selama tiga tahun yakni 2016-2018.

Per 31 Desember 2018, proyek dengan nilai investasi Rp365 miliar ini, telah selesai dikerjakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelabuhan ini akan mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang dinyatakan sebagai salah satu prioritas Pemerintah.

Port of Bitung Development

This port was chosen as the International Hub Port in Eastern Region of Indonesia with the consideration that the growth in this area has a higher potential compared to the Western Region of Indonesia. This port will support the development of Bitung Special Economic Zone (SEZ) which is stated as one of the government's priorities.

Bitung Port has been designated as an International Hub Port through Presidential Regulation No. 2 of 2015 concerning the 2015-2019 RPJMN. This project was carried out by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) or Pelindo IV with a three-year project development period, 2016-2018.

As of December 31, 2018, this project with an investment value of IDR 365 billion has been completed according to the set target. This port will support the development of Bitung Special Economic Zone (KEK) which is stated as one of the Government's priorities.

Pengembangan Pelabuhan Ambon

Salah satu pelabuhan yang dikembangkan BUMN adalah Pelabuhan Ambon yang diharapkan bisa menjadi pelabuhan direct call di kawasan Maluku. Dasar kebijakan tersebut didukung oleh kepentingan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan biaya pengiriman yang lebih murah. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV, selaku pengelola pelabuhan tersebut, menilai bahwa direct call

Development of Ambon Port

One of the ports developed by SOEs is Ambon Port which is expected to become a direct call port in Maluku region. The basis of t policy is supported by the interests of local government to get cheaper shipping costs. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) or Pelindo IV, as the port manager, considers that direct call is a way to reduce cost efficiency from one port to another port in creating products from

merupakan cara menekan efisiensi biaya dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain dalam menciptakan produk-produk dari kawasan timur Indonesia agar memiliki daya saing yang kuat di pasar mancanegara.

eastern Indonesia. Therefore, this will give a strong competitiveness in foreign markets.

Untuk mengoptimalkan peran Pelabuhan Ambon, Pelindo IV mengembangkan pelabuhan ini dengan jangka waktu pengembangan proyek selama tiga tahun yakni 2016-2018. Per 31 Desember 2018, proyek dengan nilai investasi Rp84,5 miliar ini, telah selesai dikerjakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelabuhan Ambon sendiri, menjadi salah satu dari sembilan proyek melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) di kawasan pelabuhan kelolaan PT Pelindo IV.

To optimize the role of Ambon Port, Pelindo IV develops this port with a three-year project development period, 2016-2018. As of December 31, 2018, this project with an investment value of IDR 84.5 billion has been completed according to the set target. Ambon Port is one of nine projects through the State Capital Participation (PMN) in the managed port area of PT Pelindo IV.

Pengembangan Pelabuhan Kendari

Development of Kendari Port

Pengembangan Pelabuhan Kendari di Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang digarap pengembangannya oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV. Melaui pengembangan pelabuhan ini, ekspor Sulawesi Tenggara diharapkan akan naik pesat, karena komoditas yang akan di ekspor tidak perlu lagi di angkut ke Surabaya atau Tanjung Priok, Jakarta.

Kendari Port Development in Southeast Sulawesi is one of the National Strategic Projects developed by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) or Pelindo IV. Through the development of this port, Southeast Sulawesi's exports are expected to rise rapidly since the exported commodities do not need to be transported to Surabaya or Tanjung Priok, Jakarta.

Untuk mengoptimalkan ekspor Sulawesi Tenggara, Pelindo IV mengembangkan pelabuhan ini dengan jangka waktu pengembangan proyek selama tiga tahun yakni 2016-2018. Per 31 Desember 2018, proyek dengan nilai investasi Rp623,4 miliar ini, telah selesai dikerjakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

To optimize Southeast Sulawesi's exports, Pelindo IV has developed this port with a three-year project development period, 2016-2018. As of December 31, 2018, this project with an investment value of IDR 623.4 billion has been completed according to the set target.

Pengembangan Pelabuhan Tarakan

Development of Tarakan Port

Pelabuhan Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), merupakan salah satu pelabuhan yang dijadikan proyek tol laut. Proyek ini digarap pengembangannya oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV. Per 31 Desember 2018, proyek dengan nilai investasi Rp112,2 miliar ini, telah selesai dikerjakan.

Tarakan Port in North Kalimantan (Kaltara), is one of the ports used as a sea highway project. This project was developed by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) or Pelindo IV. As of December 31, 2018, this project with an investment value of IDR 112.2 billion has been completed.

Salah satu tujuan proyek pengembangan Pelabuhan Tarakan ini adalah untuk mendorong pembangunan di wilayah Timur yang masih tertinggal. Pengembangan pelabuhan ini akan dapat membantu masyarakat sekitar Kalimantan Utara, terutama dalam mendorong konektivitas laut dan meningkatkan daya saing di wilayah Timur Indonesia.

One of the objectives of Tarakan Port development project is to encourage development in the Eastern region which is still lagging behind. The development of this port will be able to help communities around North Kalimantan, especially in promoting sea connectivity and increasing competitiveness in the Eastern part of Indonesia.

Pengembangan Pelabuhan Ternate

Proyek Replacement Dermaga Pelabuhan Ternate yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV sudah selesai dikerjakan per Desember 2018, dengan nilai investasi Rp78,42 miliar. Renovasi terhadap dermaga yang pertama kali dibangun tahun 1965 tersebut dilakukan untuk memperkuat konstruksi dermaga dan memperluas area bongkar muat barang.

Setelah direnovasi, saat ini Pelabuhan Ternate mampu menopang kurang lebih 2 Container Crane pada saat yang bersamaan serta memungkinkan kapal-kapal yang lebih besar untuk bersandar. Dampaknya, kegiatan bongkar muat logistik menjadi lebih cepat dan lancar sehingga semakin meningkatkan geliat perekonomian di Indonesia Timur khusunya di daerah Ternate dan sekitarnya.

Development of Ternate Port

The Replacement Project of Ternate Port Pier managed by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) or Pelindo IV has been completed as of December 2018, with an investment value of IDR 78.42 billion. The dock, which was first built in 1965, undergoes the renovation to strengthen the construction of the pier and expand the area of loading and unloading of goods.

After the renovation, Ternate Port is currently able to support approximately two Container Cranes at the same time and allow larger vessels to lean on. As a result, logistics loading and unloading activities have become faster and smoother to further increases the economic activities in Eastern Indonesia, especially in Ternate and the surrounding areas.

Pengembangan Pelabuhan Jayapura

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV telah mengembangkan Pelabuhan Jayapura yang difungsikan untuk mendukung program Tol Laut di kawasan Timur Indonesia. Pengembangan Pelabuhan Jayapura juga untuk mempercepat perubahan status Pelabuhan Jayapura menjadi pelabuhan ekspor agar komoditi yang ada di Papua bisa langsung dikirim ke luar negeri tanpa harus transit di pelabuhan lain.

Pelabuhan Jayapura merupakan salah satu pelabuhan kelolaan Pelindo IV yang masuk dalam salah satu proyek strategis nasional dengan nilai investasi Rp184,56 miliar. Per September 2018, untuk pengembangan dermaga 150x10 meter persegi dan Replacement 150x30 meter persegi telah selesai dikerjakan. Pengembangan infratruktur maupun supratruktur di pelabuhan Jayapura pun dilakukan secara simultan agar ke depannya mampu memangkas ongkos logistik di wilayah timur khususnya di Papua.

Development of Jayapura Port

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) or Pelindo IV has developed Jayapura Port which is used to support the Sea Toll program in Eastern Indonesia. The development of Jayapura Port is also to accelerate the change in the status of Jayapura Port to become an export port. Thus, the commodities in Papua can be sent directly abroad without any transit in another port.

Jayapura Port is one of the ports managed by Pelindo IV which is included in one of the national strategic projects with an investment of IDR 184.56 billion. As of September 2018, the development of pier of 150x10 sqm and Replacement of 150x30 sqm has been completed. The development of infrastructure in Jayapura port was carried out simultaneously thus in the future it would be able to reduce logistics costs in the eastern region, especially in Papua.

Pengembangan Pelabuhan Sorong

Pengembangan Pelabuhan Sorong merupakan pengembangan konektivitas jaringan transportasi untuk kawasan Indonesia bagian timur, antara lain dengan pembangunan pelabuhan petikemas yang efisien untuk memfasilitasi sistem logistik yang murah. Proyek ini digarap oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV dengan jangka waktu pengembangan proyek selama tiga tahun yakni 2016-2018.

Development of Sorong Port

The development of Sorong Port is a development of transportation network connectivity for the eastern part of Indonesia, including the construction of efficient container ports to facilitate affordable logistics systems. This project was worked out by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) or Pelindo IV with a three-year project development period, 2016-2018.

Per September 2018, proyek dengan nilai investasi Rp247,85 miliar ini, telah selesai dikerjakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Baik itu reklamasi dan dinding penahan tanah seluas 5 hektare, perkerasan lapangan penumpukan seluas 5 hektar, maupun pembangunan dermaga seluas 250 x 30 meter persegi.

As of September 2018, this project with an investment value of IDR 247.85 billion has been completed according to the set target. This includes the reclamation and retaining walls of 5 hectares, 5 hectares of piling pavement, and construction of a 250 x 30 sqm pier.

Pengembangan Pelabuhan Manokwari

Development of Manokwari Port

Pengembangan Pelabuhan Manokwari digarap oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV dengan target penyelesaian hingga Desember 2018. Proyek pembangunan dermaga seluas 75 x 30 meter persegi ini, bertujuan untuk kemajuan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Provinsi Papua Barat.

Manokwari Port Development is carried out by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) or Pelindo IV with a target of completion up to December 2018. This pier construction project covering an area of 75x 30 sqm aims to advance the region and encourage regional economic growth, especially West Papua.

Per September 2018, proyek dengan nilai investasi Rp 42,11 miliar ini, telah selesai dikerjakan atau melampaui target yang telah ditetapkan. Pembangunan dermaga ini bertujuan untuk memperlancar pelayaran dan aktivitas bongkar muat petikemas yang dikelolah olah otaritas pelabuhan.

As of September 2018, this project with an investment of IDR 42.11 billion has been completed or has exceeded the set target. The construction of this pier aims to facilitate shipping and container loading and unloading activities managed by port autonomy.

Pengembangan Pelabuhan Merauke

Development of Merauke Port

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV telah mengembangkan Pelabuhan Merauke dan akan difungsikan mendukung program Tol Laut Pemerintah. Pengembangan yang dimaksud adalah pembangunan dermaga berukuran 75x30 meter dan pembangunan pondasi Fix Crane di Pelabuhan Merauke.

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) or Pelindo IV has developed Merauke Port and will be used to support the Government's Sea Toll program. The development is the construction of a 75x30 m dock and a Fix Crane foundation in Merauke Port.

Pengembangan Pelabuhan ini ditargetkan selesai hingga Desember 2018, namun per September 2018, proyek dengan nilai investasi Rp 95,38 miliar ini, telah selesai dikerjakan. Pengembangan pelabuhan ini dilakukan untuk menambah mobilisasi armada dan jasa pengangkut logistik yang saat ini mulai bergeliat.

The development of this Port is targeted to be completed until December 2018. On the contrary, as of September 2018, this project with an investment of IDR 95.38 billion has been completed. The port development is carried out to increase the growing of fleet mobilization and logistics transport services.

Pembangunan Dermaga VII Pelabuhan Penyeberangan Merak

Construction of Dock VII for Merak Ferry Port

Pembangunan Dermaga VII Pelabuhan Penyeberangan Merak yang digarap oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan bagian dari perencanaan dan penataan pelabuhan Merak sebagai destinasi. Ke depannya, Pelabuhan Merak tidak hanya menjadi simpul transportasi

The construction of Merak Ferry Seaport VII Port which was worked on by PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and is part of the planning and structuring of Merak port as a destination. Onwards, Merak Port will not only become a transportation hub but also will be developed into an

tetapi akan dikembangkan menjadi simpul ekonomi melalui pengembangan properti dan lifestyle untuk menarik minat pelanggan non-penyeberangan.

Pembangunan Dermaga VII ini juga guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan jasa penyeberangan Pelabuhan Merak-Bakauheni, Lampung. Saat ini, jumlah dermaga yang ada di Pelabuhan Merak tercatat enam dermaga sehingga perlu adanya penambahan satu dermaga lagi. Kemungkinan tujuh dermaga itu dapat menampung ribuan kendaraan sehingga arus penyeberangan Merak-Bakauheni berjalan lancar tanpa antrean panjang.

Proyek pembangunan yang ditargetkan selesai pada tahun 2019 ini, dibangun dengan anggaran yang berasal dari PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp238 miliar (kontrak induk) dan Rp248 miliar (kontrak addendum). Per 30 Desember 2018, progres pembangunan dermaga ini telah mencapai 90,34% dan optimis akan selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pembangunan Dermaga VII Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni

Salah satu proyek pembangunan dermaga yang digarap PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah pembangunan Dermaga VII Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni yang juga merupakan bagian dari perencanaan dan penataan pelabuhan yang tidak hanya menjadi simpul transportasi tetapi juga menjadi simpul ekonomi melalui pengembangan properti dan *lifestyle* untuk menarik minat pelanggan non-penyeberangan.

Dermaga VII Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Provinsi Lampung ini, memberikan pelayanan dan kenyamanan maksimal kepada para penumpang karena dilengkapi fasilitas modern. Kelebihan lainnya, pelayanan di Dermaga VII ini hemat waktu seperti waktu berlayar kapal yang lebih efisien.

Proyek ini, dibangun dengan anggaran yang berasal dari PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp221 miliar. Per 30 September 2017, pembangunan dermaga ini telah selesai dikerjakan sesuai dan dengan target yang telah ditetapkan.

economic hub through the development of property and lifestyle center to attract non-crossing customers.

The construction of Dock VII is also intended to improve services to the people who use the crossing services of Merak-Bakauheni Port, Lampung. At present, there are six docks in Merak Port, so one more dock is needed. It is possible that the seven piers can accommodate thousands of vehicles in order to make the flow of Merak-Bakauheni crossing runs smoothly without long lines.

The development project targeted for completion in 2019 is built with a budget that comes from PMN (State Capital Participation) of IDR 238 billion (master contract) and IDR 228 billion (addendum contract). As of December 30, 2018, the construction of pier has reached 90.34% and is optimistic to be in completion in accordance with the set targets.

Construction of Dock VII for Bakauheni Ferry Port

One of the dock construction projects that PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) is working on is the construction of Bakauheni Ferry Port Dock VII. This project is also part of port planning and structuring which is not only a transportation hub but also an economic hub through the development of property and lifestyle center to attract customers non-crossing.

Dock VII Bakauheni Port, South Lampung, Lampung Province, provides maximum service and comfort to passengers as it is fully equipped with modern facilities. Another advantage, the service at Dock VII, is time-saving for instance the sailing time becomes more efficient.

This project was built with a budget originating from PMN (State Capital Participation) of IDR 221 billion. As of September 30, 2017, the construction of this dock has been completed according to the target set.

Air Connectivity
Koneksi Udara



Jaringan koneksi udara menjadi salah satu yang sangat penting keberadaannya, mengingat persinggungan fisik antara Indonesia dengan dunia internasional dilakukan melalui bandara. Untuk mendukungnya, kesiapan bandar udara dan transportasi pendukung yang menyokongnya sangat penting. Karena itulah, Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) giat mengembangkan proyek infrastruktur transportasi tersebut untuk memperkuat konektivitas udara nasional serta mengurangi beban bandara-bandara yang sudah overload. Pemerintah terus memulai pembangunan bandara-bandara baru di daerah pinggiran dan terpencil, dimana kehadiran bandar udara dipercaya menjadi salah satu pemicu peningkatan ekonomi suatu daerah.

The network of air connection is one of the most important ones, given the physical contact between Indonesia and the international world through the airport. To support it, the readiness of airports and the supporting transportation becomes more essential. Therefore, the Government through State-Owned Enterprises (BUMN) is actively developing these transportation infrastructure projects to strengthen national air connectivity and reduce the airports loads that have been overloaded. The government continues to start the construction of new airports in the suburbans and remote areas as the presence of airports is assumed to be one of the triggers for improving the regional economy.

Kehadiran simpul transportasi yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap, tentunya juga meningkatkan pergerakan barang dan manusia. Seiring dengan itu, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan semakin meningkat. Konektivitas udara juga menjadi kunci untuk memajukan pariwisata Indonesia.

The presence of transportation nodes that have quite complete facilities absolutely also increases the movement of goods and people. Along with that, the economic growth in the area will increase. Air connectivity is also the key to advancing Indonesian tourism.

BUMN sektor konektivitas udara juga berhasil mencatatkan kinerja positif selama kurun waktu 4 tahun terakhir dalam hal peningkatan jumlah penumpang yang dibukukan oleh Garuda Group, peningkatan jumlah penumpang yang berhasil dilayani AP I & AP II dalam kurun waktu 4 tahun, dan peningkatan *traffic movement* yang dilayani Airnav. Peningkatan kinerja ini juga berimbas pada peningkatan kontribusi BUMN sektor udara terhadap negara, berupa pajak dan dividen yang diberikan kepada negara. Pengembangan konektivitas udara pun mau tidak mau berimbas pada meningkatnya belanja modal atau Capex.

The SOEs in air connectivity sector also managed to record positive performance over the past four years in increasing the number of passengers booked by Garuda Group, increasing the number of passengers served by AP I & AP II in four years, and increasing the traffic movement served by Airnav. It also affected the contribution of the SOEs in air sector to the state, in taxes and dividends given to the state. The development of air connectivity also will affect the increase in capital expenditure or Capex.

PERKEMBANGAN KINERJA OPERASI BUMN SEKTOR KONEKTIVITAS UDARA
Development of SOE Operational Performance in Air Connectivity Sector

AP I & AP II

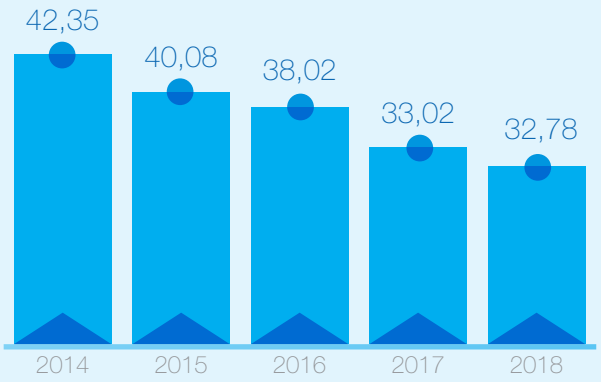
Jumlah Bandara dikelola
Total managed Airport
28

Jumlah Provinsi
Total Provinces
24



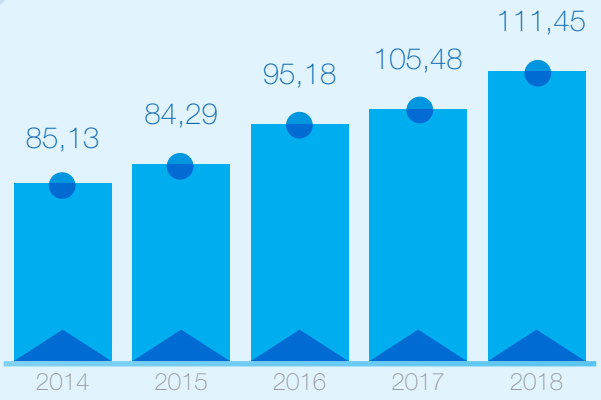
Angkasa Pura | AIRPORTS

Jumlah penumpang terlayani Angkasa Pura I (dalam juta)
Total Served Passengers Angkasa Pura I (in Million)



ANGKASA PURA II
INDONESIA'S AIRPORT COMPANY

Jumlah penumpang terlayani Angkasa Pura II (dalam juta)
Total Served Passengers Angkasa Pura II (in Million)

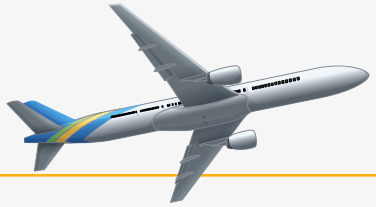


Jumlah Penumpang di layani
Total Served Passengers

dalam Juta
in Million

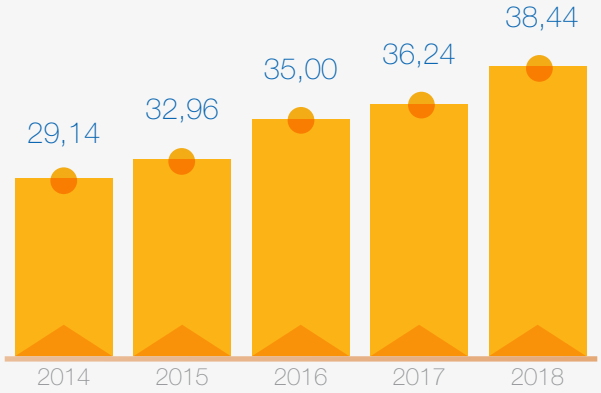


GARUDA INDONESIA

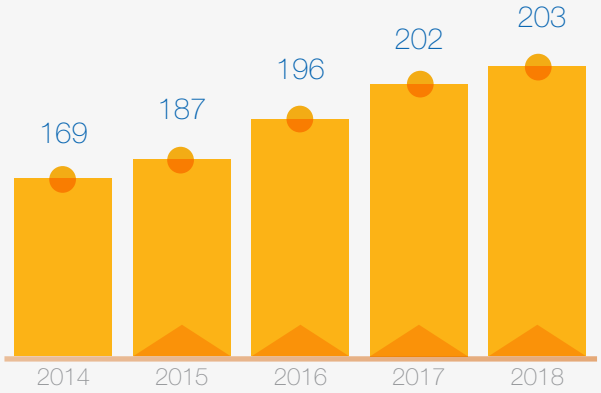


Garuda Indonesia
The Airline of Indonesia

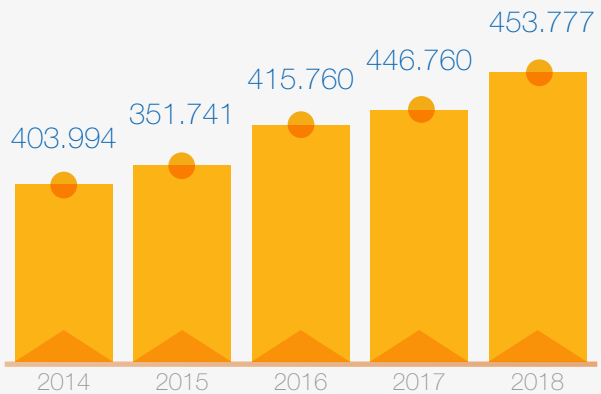
Jumlah Penumpang (dalam juta)
Total Passengers (in million)



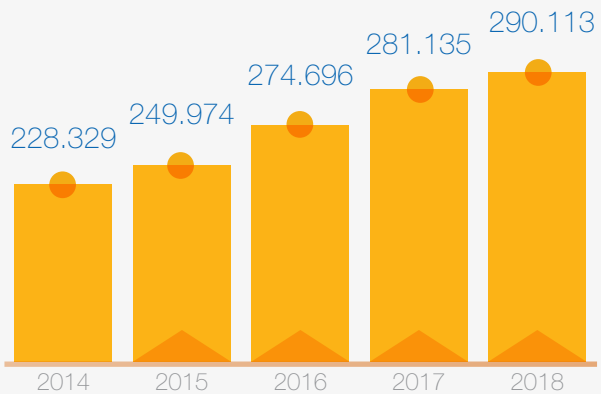
Jumlah Armada (jumlah pesawat)
Total Fleets (total airplanes)



Kargo Diangkut (ton)
Cargo Transported (tons)



Frekuensi (jumlah penerbangan)
Frequency (total flights)



JARINGAN PENDUKUNG TRANSPORTASI UDARA
Supporting Network for Air Transportation



BANDARA / *AIRPORT*

Pengembangan Bandara Udara Ahmad Yani Semarang

Proyek Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I, untuk menampung tingkat pertumbuhan trafik penumpang, dimana sebelumnya kapasitas bandara ini hanya mampu untuk menampung trafik penumpang sebanyak 1 juta penumpang. Selain itu, dilakukan juga pengembangan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan layanan.

Development of Ahmad Yani Airport in Semarang

The Ahmad Yani Airport Development Project in Semarang is carried out by PT Angkasa Pura I (Persero) or AP I, to accommodate the growth rate of passenger traffic, whereas previously the airport's capacity was only able to accommodate the passenger traffic by 1 million. In addition, the development of facilities and infrastructure is also carried out to maximize services.

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah juga konsentrasi terhadap pengembangan bandar udara strategis untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah. Salah satunya adalah Bandar Udara Ahmad Yani dengan luas terminal 59.406 m2, kapasitas 6 juta penumpang/tahun.

Bandara Ahmad Yani yang merupakan bandara di atas air (*floating*) pertama di Indonesia ini, sangat artistik dengan konsep *eco airport* dan *go green*. Lampu jalan pakai solar cell, pengolahan airnya *reserve osmosis* dan me-*recycle* air payau dan air hujan untuk operasional. Bandar Udara Ahmad Yani Semarang yang diresmikan pada 7 Juni 2018 ini, telah beroperasi penuh pada November 2018.

In order to increase the economic growth through infrastructure development in Indonesia, the Government also makes a priority on developing strategic airports to support the improvement of regional economy. One of them is Ahmad Yani Airport with a terminal area of 59,406 sqm and a capacity of 6 million passengers/year

Ahmad Yani Airport, the first floating airport in Indonesia, is very artistic by carrying eco-airport and go green concepts. The street lights use solar cell, reserve osmosis water treatment and recycle pond water for the operation. Ahmad Yani Airport Semarang, which was inaugurated on June 7, 2018, has been fully operational in November 2018.

Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin

Proyek revitalisasi Bandar Udara Syamsudin Noor dilakukan untuk menampung tingkat pertumbuhan trafik penumpang, sedangkan sebelumnya kapasitas bandara hanya mampu untuk menampung sebanyak 1,3 juta penumpang. Selain itu, dilakukan juga pengembangan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan layanan.

Nantinya, Bandar Udara Syamsudin Noor diharapkan mampu menciptakan bandara berstandar internasional dengan kapasitas penumpang di tahap *ultimate* mencapai 7 juta penumpang, dan melayani pergerakan pesawat sebanyak 79.775 pergerakan. Proyek revitalisasi bandara dengan nilai invesatsi Rp2,298 triliun ini, ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2019.

Setelah memulai pembangunan bandara-bandara baru di daerah pinggiran dan terpencil, Pemerintah mulai fokus pada pengembangan dan pembangunan bandara yang lebih besar. Rencana ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah. Revitalisasi bandar udara bertujuan untuk meningkatkan akses ke daerah sehingga akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan. Hal ini terkait dengan Nawacita ketujuh yang direprsentasikan dengan sentuhan pada bandara-bandara yang bisa memacu ekonomi secara global, dan secara pemanfaatannya bisa dipakai secara merata.

Development of Syamsudin Noor Airport in Banjarmasin

The Syamsudin Noor Airport revitalization project was carried out to accommodate the growth rate of passenger traffic, while previously the airport's capacity was only able to accommodate 1.3 million passengers. In addition, the development of facilities and infrastructure is also carried out to maximize services.

Onwards, Syamsudin Noor Airport is expected to be able to create an international standard airport with passenger capacity reaching 7 million passengers, and serving aircraft movements of 79,775 movements. The airport revitalization project with a value of IDR2.298 trillion is targeted to start operating in October 2019.

After starting the construction of new airports in the suburbans and remote areas, the Government begins to focus on developing and building larger airports. This plan is included in the Government's National Strategic Project (PSN). The revitalization of airports aims to increase access to the regions to ultimately encourages economic growth in those regions. This is related to the implementation of the seventh Nawacita represented by the revamp on airports that can encourage the economy globally, and its utilization can be conudcted fairly.

Adapun proyek revitalisasi bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I ini, terus dikebut untuk meningkatkan kapasitas badara agar lebih lengkap dari segi fasilitas dan pelayanan serta memiliki daya tampung yang lebih besar untuk menampung tingkat pertumbuhan trafik penumpang.

The airport revitalization project is managed by PT Angkasa Pura I (Persero) or AP I. It is continually accelerated to increase the airport capacity to accommodate the growth rate of passenger traffic, equipped with various facilities and services.

Integrasi sarana penunjang antara pembangunan infrastruktur jalan dengan revitalisasi bandara menjadi satu kesatuan yang saling menunjang antara satu dan yang lainnya, guna mendorong peningkatan ekonomi suatu daerah dan juga meningkatkan industri pariwisata setempat. Progres revitalisasi Bandar Udara Syamsudin Noor per Desember 2018 telah mencapai 57,15%.

The integration of supporting facilities between the construction of road infrastructure and the revitalization of airport has become a mutually supportive entity in order to encourage the improvement of the economy in regions and also to improve the local tourism industry. The revitalization progress of Syamsudin Noor Airport as of December 2018 has reached 57.15%.

Pembangunan Bandar Udara Baru Kulon Progo Yogyakarta

Bandara Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA) diproyeksikan sebagai pendukung Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Operator 13 bandara di Indonesia Tengah dan Timur, yakni PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I menargetkan pembangunan Bandara Kulon Progo Yogyakarta yang akan menelan biaya investasi sekitar Rp9,3 triliun ini dapat selesai 100,00% pada Desember 2019, dimana progres pembangunan telah mencapai 74,27%.

Construction of Kulon Progo New Airport in Yogyakarta

Kulon Progo Airport or New Yogyakarta International Airport (NYIA) is projected as a supporting airport of Adi Sucipto Airport in Yogyakarta. The operator of 13 airports in Central and Eastern Indonesia, namely PT Angkasa Pura I (Persero) or AP I, target the construction of Adisutjipto Yogyakarta Airport, which will cost around IDR 9.3 trillion, to be completed by 100.00% in December 2019 as development progress has reached 74.27%.

Bandara tersebut nantinya akan memiliki daya tampung sebanyak 14 juta penumpang/tahun dengan pergerakan pesawat yang diperkirakan dapat mencapai 300 penerbangan/hari. Selain itu, Kulon Progo juga bakal menampung sebanyak 22 pesawat berbadan lebar atau *widebody* jenis B777. Adapun, Kulon Progo bakal menjadi bagian dari rencana Angkasa Pura I dalam mengembangkan *Airport City*.

The airport will have a capacity of 22 million passengers/year with aircraft movements which are estimated to reach 300 flights/day. In addition, Kulon Progo will also accommodate 28 widebody aircrafts type B777. Meanwhile, Kulon Progo will be part of Angkasa Pura I's plan to develop Airport City.

Pembangunan bandara baru ini selain bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi juga untuk mendongkrak tingkat pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus memacu pembangunan bandara-bandara baru yang termasuk dalam Proyek Srategis Nasional. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah juga konsentrasi terhadap peningkatan sarana dan prasarana seperti revitalisasi bandar udara yang merupakan salah satu penunjang bisnis suatu daerah tertentu.

The construction of this new airport aims to increase economic potential and to boost tourism in the region. Therefore, the government continues to push the development of new airports included in the National Strategic Project. In order to increase economic growth through infrastructure development in Indonesia, the Government also focuses on improving facilities and infrastructure such as revitalizing airports as one the the supporting businesses in certain region.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah membidik 5 negara ASEAN untuk membuka pasar wisatawan baru lewat bandara internasional di Kabupaten Kulon Progo yang sudah mulai dibangun ini. Negara-negara yang jadi sasaran wisatawan baru itu adalah Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, dan Laos.

The Yogyakarta Special Region Government has targeted five ASEAN countries to open a new tourist market through the international airport in Kulon Progo Regency which has commencing its construction. The targeted countries are Vietnam, the Philippines, Brunei Darussalam, Thailand and Laos.

Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta

Sebagai salah satu Proyek Stratetegis Nasional (PSN), PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II terus mengebut pembangunan landasan pacu atau *Runway* 3 Bandara Soekarno Hatta yang ditargetkan dapat dioperasikan pada Juni 2019. Pembangunan *runway* ketiga di Bandara Internasional Soekarno Hatta ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp6 triliun dengan pembangunan fisik mencapai Rp2 triliun, sementara itu dana pembebasan lahan mencapai Rp4 triliun.

Total lahan yang dibutuhkan adalah 216 hektar guna membangun runway berukuran 3.000 x 60 meter persegi itu. Dari lahan seluas itu, AP II sebelumnya sudah memiliki 48,5 hektar ditambah 167,5 hektar yang telah dibebaskan yang terbagi dalam 3.021 bidang tanah. Lahan *Runway* 3 yang dibebaskan terletak di Kota Tangerang yakni Kelurahan Selapajang Jaya dan Kelurahan Benda, serta wilayah Kabupaten Tangerang yaitu Desa Bojong Renged, Desa Rawa Burung dan Desa Rawa Rengas.

Dengan memiliki 3 Runway, penerbangan di Bandara Internasional Soekarno Hatta bakal meningkat menjadi 120 penerbangan setiap jam-nya. Adapun progres pembangunan landasan pacu atau *Runway* 3 Bandara Soekarno Hatta telah mencapai 85,00% dengan progres pembangunan *Paralel Taxiway* yang telah mencapai 100% dan *East Connection Taxiway* dengan progres pembangunan yang telah mencapai 94,50%.

Construction of Runway 3 Soekarno Hatta International Airport

As one of the National Strategic Projects (PSN), PT Angkasa Pura II (Persero) or AP II continues to speed up the construction of runways or the Soekarno Hatta Airport Runway 3 which are targeted to be in opetation by June 2019. The construction of the third runway at Soekarno Hatta International Airport is expected to spent IDR6 trillion in funds with physical development reaching IDR2 trillion. Meanwhile, the land acquisition funds reached IDR4 trillion.

The total land needed is 216 hectares to build the 3,000 x 60 sqm runway. From this area, AP II previously had 48.5 hectares and 167.5 hectares that had been released which was divided into 3,021 plots of land. The released Runway 3 land is located in Tangerang City, namely Selapajang Jaya Village and Benda Village, and in Tangerang Regency, namely Bojong Renged Village, Rawa Burung Village and Rawa Rengas Village.

By having 3 Runways, the flights at Soekarno Hatta International Airport will increase to 120 flights every hour. The progress of runway construction or Soekarno Hatta Airport 3 Runway has reached 85.00%. The construction progress of Parallel Taxiway and East Connection Taxiway has reached 100% and 94.50% respectively.

Electrification
Elektrifikasi

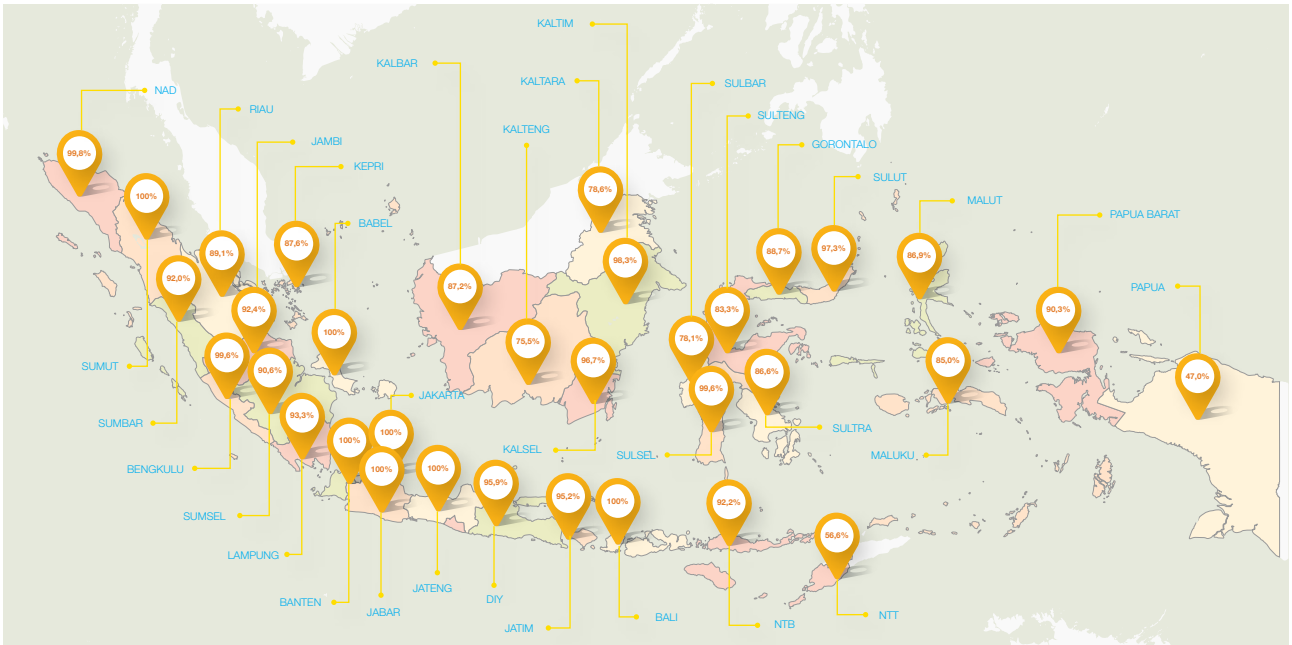
Pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, terus berkomitmen untuk menerangi nusantara, termasuk desa-desa yang berada di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Saat ini, Pemerintah tengah gencar membangun daerah 3T karena pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sana. Hal ini yang menjadi semangat PLN untuk menjangkau pembangunan kelistrikan di daerah 3T tersebut demi mendorong perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik.

The government through PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) or PLN, has strong commitment to illuminate the archipelago, including villages located in the Frontier, Outermost and Disadvantaged (3T) areas. At present, the Government is intensively developing the 3T area as the development has not been fully enjoyed by the people living there. This condition becomes the spirit of PLN to extend the electricity construction in the 3T area in order to encourage the regional economy and the community welfare for greater good.

Tahun 2018 juga menjadi tantangan PLN untuk melistriki desa-desa di seluruh Indonesia di mana desa-desa tersebut memiliki akses yang sulit serta biaya yang tidak murah. Walaupun demikian, PLN selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Kementerian ESDM terus berupaya melistriki seluruh desa-desa di Indonesia, termasuk di dalamnya daerah 3T. Hal tersebut terlihat dari rasio elektri¬kasi yang meningkat dari 93,0% di tahun 2017 menjadi 97,2% di tahun 2018, tren ini pun tercatat terus meningkat sejak tahun 2012 baik dari Rasio Elektrifikasi per unit PLN, per Provinsi, dan per Regional.

2018 also becomes a year of challenge for PLN to light up the villages throughout Indonesia as many villages do not have easy access with costly expense. Nevertheless, PLN as a State-Owned Enterprise (BUMN) along with the Ministry of Energy and Mineral Resources continues the effort to electrify all villages in Indonesia, including the 3T area. This effort contributes to electricity ratio which increased from 93.0% in 2017 to 97.2% in 2018. This trend has also constantly increased since 2012 from the Electrification Ratio by PLN unit, by Province, and by Regional.

Rasio Elektrifikasi per Provinsi (2012-2018)
Electrification Ratio by Province (2012-2018)

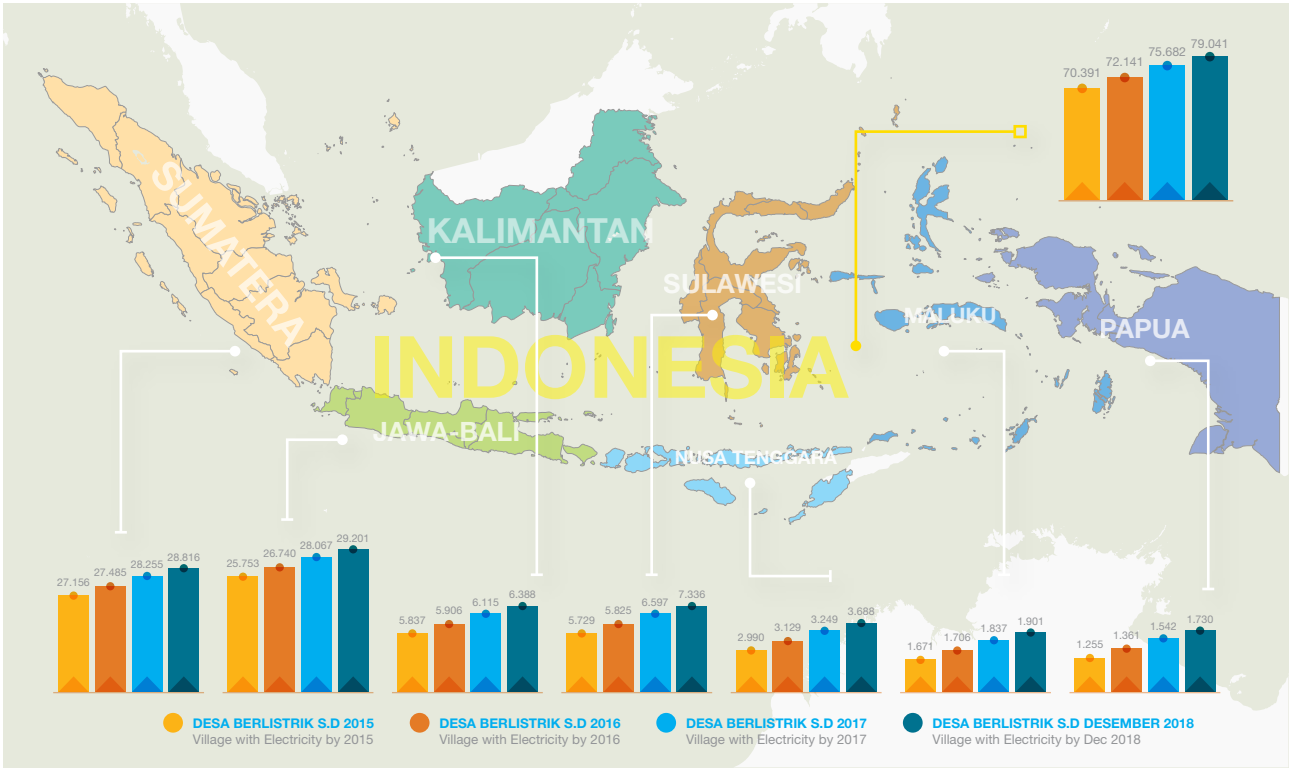


Rasio Elektifikasi (%) *Electrification Ratio (%)*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Desember 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Realisasi PLN *PLN Realization*	73,4	78,1	82,2	86,2	89,1	93,0	97,2								
RUPTL 2018-2027 *2018-2017 RUPTL*							95,15	97,35	99,35	99,99	99,99	99,99	100,0	100,0	100,0

Melalui segala bentuk program yang telah dilakukan PLN dalam rangka melistriki desa, sampai dengan Desember 2018, desa teraliri listrik meningkat menjadi 79.041 desa. Hal ini membuktikan bahwa PLN sebagai salah satu agen pembangunan, telah berupaya untuk memenuhi komitmennya dalam menerangi nusantara untuk kesejahteraan masyarakat.

Through various programs have been carried out by PLN in order to give the village access to electricity, as of December 2018, the electrified village has increased to 79,041 villages. This proves that PLN as one of the agents of development has tried to fulfill its commitment in illuminating the archipelago for the community welfare.

Progres Kegiatan Desa Berlistrik (2015-2018)
Activity Progress of Village with Electricity (2015-2018)



Dengan segala bentuk upaya yang telah dilakukan, PLN berhasil menghilangkan pemadaman listrik secara bergilir yang sempat terjadi di tahun 2015. Penghilangan pemadaman listrik secara bergilir ini dapat teratasi melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkesinambungan. Saat ini, terdapat cadangan daya listrik yang memadai pada sistem besar yakni lebih dari 30%. Tidak hanya sistem besar saja, PLN terus meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau akses listrik, yaitu daerah 3T. Hal ini diperlukan untuk tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Through all efforts, PLN has succeeded in eliminating rotating blackouts that occurred in 2015. It can be overcome through sustainable electricity infrastructure development. At present, there is adequate electricity reserves in large systems of more than 30%. In addition, PLN continues to improve electricity infrastructure to the areas that have not get the access to electricity, namely the 3T area. This aims to maintain the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia and improve people's welfare.

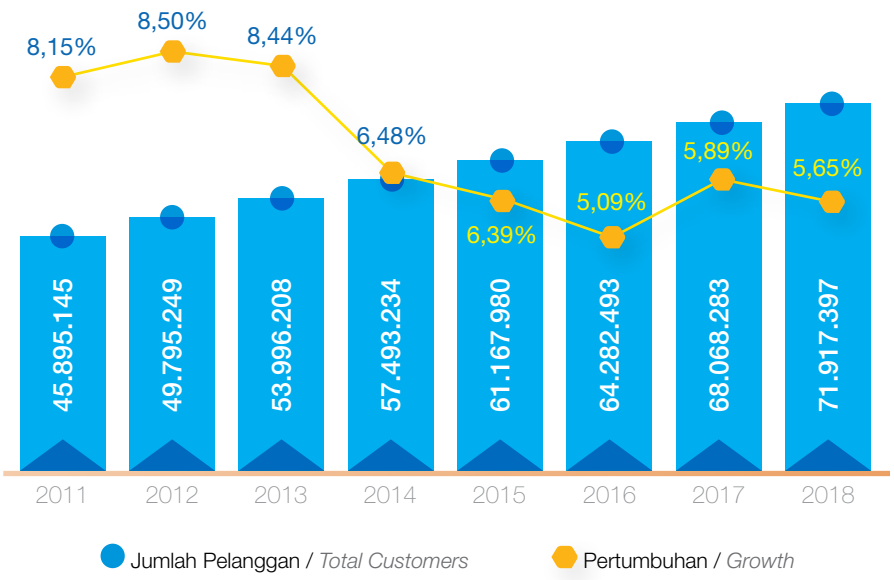
PLN juga terus bekerja dalam meningkatkan kapasitas pembangkit, panjang transmisi dan kapasitas gardu induk untuk memberikan pelayanan yang prima serta kehandalan Hingga Desember 2018, total pembangkit yang beroperasi di seluruh wilayah Indon esia menjadi sebesar 57.822 MW, panjang transmisi menjadi 53.278 kms dan kapasitas gardu induk menjadi sebesar 131.164 MVA.

PLN is also continuing to work in improving the generating capacity, transmission length and substation capacity to providing good customer service as well as dependability until December 2018, total of operating plants in the all regions of Indonesia amounted 57,822 MV, transmission length of become 53,278 kms and capacity of the main station amounted 131,164 MVA.

Selain menjalankan komitmennya dalam menerangi nusantara, PLN juga berhasil mencatatkan peningkatan jumlah pelanggan sebesar 5,65% di sepanjang tahun 2018, dari 68.068.283 pelanggan di tahun 2017 menjadi 71.917.397 pelanggan di tahun 2018.

In addition to maintain its commitment in lighting up the archipelago, PLN also managed to record an increase in total customers by 5.65% throughout 2018, from 68,068,283 customers in 2017 to 71,917,397 customers in 2018.

Pertumbuhan Jumlah Pelanggan (2011-2018)
Growth in Total of Customers (2011-2018)



Telecommunication Networks
Jaringan Telekomunikasi



Pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga pelosok juga termasuk dalam program Pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Masyarakat Indonesia yang tersebar di negara dengan luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi akan semakin mudah terhubung melalui jaringan telekomunikasi. Saat ini Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mengembangkan proyek pembangunan infrastruktur, yang antara lain terkait dengan jaringan telekomunikasi melalui serat optik. Proyek ini merupakan wujud dari komitmen "BUMN Hadir untuk Negeri".

Indonesian people spread across countries with an area of around 1.9 million sqm will increasingly be easily connected via telecommunication networks. At present, the Government through State-Owned Enterprises (BUMN) continues to develop infrastructure development projects, which among others are related to telecommunication networks through optical fiber. This project is a manifestation of the commitment of "SOEs Present for the Country".

Pemerintah, diwakili oleh BUMN hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya, melalui fasilitas komunikasi. Dengan jaringan komunikasi yang tersebar dari Barat hingga Timur, membuat masyarakat Indonesia semakin terhubung. Pemanfaatan waktu, baik untuk kegiatan sosial maupun bisnis, akan makin efisien. Dengan demikian, pemanfaatan biaya juga menjadi lebih rendah yang pada akhirnya diharapkan dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

The government, represented by SOEs, is present in the community to fulfill all of its needs, through communication facilities. With a communication network that spreads from West to East, Indonesian people will be increasingly connected. The use of time, both for social and business activities, will be more efficient. Thus, the utilization of costs is also lower as a result is expected to have an impact on improving people's welfare.

➤ INDONESIA DIGITAL NETWORK

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, terus berupaya untuk terus mendukung pembangunan dan digitalisasi bangsa melalui penyediaan infrastruktur dan konektivitas yang merata di aderah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T). Telkom terus melakukan investasi pada infrastruktur dalam program Indonesia Digital Network (IDN) yang meliputi jaringan akses (id-Access), jaringan *backbone* (id-Ring) hingga *data center* dan *platform digital* (id-Con). Jaringan fiber optik yang kami miliki terbentang dari Aceh hingga Papua menjadi pondasi pertumbuhan bisnis digital di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan ekonomi digital Indonesia, sebagai agen pembangunan, Telkom berkomitmen mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dengan membangun infrastruktur dan *platform* digital secara agresif, serta mengembangkan ekosistem digital. Program ini telah berjalan di MARIMAR (Makassar-Kendari-Maumere) dan ASBL (Aceh-Sabang, Simeuleu-Bakongan, Sibolga-Nias, Batam-TjBalai, Larantuka-Atambua).

Pembangunan infrastruktur dan layanan digital diwujudkan dalam bentuk program Indonesia Digital Network (IDN) yang terdiri dari *id-Access (Indonesia Digital Access) True Broadband Access, id-Ring (Indonesia Digital Ring) Nationwide Super Highspeed Backbone,* dan *id-Con (Indonesia Digital Convergence) Convergence Digital Innovation*. id-Access merupakan akses *broadband* ke pelanggan berbasis *fiber optic* untuk *fixed-broadband* dan teknologi 3G/4G untuk *mobile broadband*. id-Ring merupakan *broadband highway* berbasis *fiber optic*, sebagai jaringan *backbone* yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. *id-Convergence* merupakan fasilitas layanan IT *platform* terintegrasi yang terdiri dari *data center* dan berbagai *platform* layanan digital.

➤ PERLUASAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Telkom telah merealisasikan program *id-Access* berupa pembangunan BTS, dimana sampai dengan akhir Tahun 2018, Telkom telah memiliki total BTS sebanyak 189.086 unit dengan BTS 3G dan 4G LTE sebanyak 138.776 unit atau 73% dan BTS 2G sebanyak 50.310 unit atau 27%. Pembangunan BTS ini tercatat telah mencapai 99% dari populasi Indonesia. Untuk mendukung transmisi data yang

➤ *INDONESIA DIGITAL NETWORK*

As a State-Owned Enterprise (BUMN), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk or Telkom continually strives supporting the nation's development and digitalization through the provision of infrastructure and connectivity that is evenly distributed in the frontier, remote and disadvantaged regions (3T). Telkom continues to invest in infrastructure in the Indonesia Digital Network (IDN) program which includes network access (id-Access), backbone networks (id-Ring) to data centers and digital platforms (id-Con). The optical fiber network extending from Aceh to Papua is the foundation of the growth of digital business in Indonesia.

In order to manifest Indonesia's digital economy, as an agent of development, Telkom is committed to accelerate the growth of Indonesia's digital economy by aggressively building digital infrastructure and platforms, and developing digital ecosystems. This program has been running at MARIMAR (Makassar-Kendari-Maumere) and ASBL (Aceh-Sabang, Simeuleu-Bakongan, Sibolga-Nias, Batam-TjBalai, Larantuka-Atambua).

The construction of digital infrastructure and services is realized through Indonesia Digital Network (IDN) program consisting of id-Access (Indonesia Digital Access) True Broadband Access, ID-Ring (Indonesia Digital Ring) Nationwide Super Highspeed Backbone, and id-Con (Indonesia Digital Convergence) Convergence Digital Innovation. id-Access is broadband access to fiber optic-based customers for fixed-broadband and 3G/4G technology for mobile broadband. id-Ring is a fiber optic based broadband highway, as a backbone network that connects Indonesian islands from Sabang to Merauke. id-Convergence is an integrated IT service platform facility consisting of data centers and various digital service platforms.

➤ *EXPANSION OF TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE*

Telkom has realized the ID-Access program through BTS development. As of the end of 2018, Telkom had a total of 189,086 BTS units with 138,776 units of 3G and 4G LTE or 73% and 50.310 units for 2G BTS or 27%. The construction of BTS has reached 99% of Indonesian population. To support high-quality data transmission, Telkom has 102.6K sqm Data Centers, for Domestic reaches 52.6K sqm and

berkualitas tinggi, Telkom telah memiliki 102.6K sqm *Data Center*, dimana untuk Domestik mencapai 52.6K sqm dan Internasional mencapai 50K sqm.

International reaches 50K sqm.

Untuk program *id-Ring*, Telkom telah membangun kabel *backbone fiber optic* bawah laut dan terestrial serta satelit dalam rangka pemerataaan akses telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Untuk program *id-Convergence*, telkom telah membangun dan mengembangkan berbagai *platform* digital untuk mendukung *digital services & solution*, antara lain *IT & cloud services, managed security services, digital financial technology (fintech), e-commerce, big data analytic, Internet of Things (IoT)*, dan ekosistem pendukungnya.

For the id-Ring program, Telkom has built submarine and terrestrial fiber optic backbone cables and satellites to provide telecommunications access to all regions of Indonesia, including leading, remote, and disadvantaged areas. For the ID-Convergence program, Telkom has built and developed various digital platforms to support digital services & solutions, including IT & cloud services, managed security services, digital financial technology (fintech), e-commerce, big data analytic, Internet of Things (IoT), and the supporting ecosystem.

➤ JARINGAN KABEL BAWAH LAUT DAN SATELIT

Guna meningkatkan akses digital bagi masyarakat Indonesia, pada tahun 2018 Telkom telah berhasil menambah panjang jaringan Fiber Optic Backbone Network menjadi sepanjang 161,65K km yang menjangkau tidak kurang dari 458 Ibukota Kabupaten dan Kota (IKK) di seluruh Indonesia atau lebih banyak dari target 2018 yakni 457 IKK. Untuk jaringan Fiber Optic Backbone Network Domestik sepanjang 96,98K km dan jaringan Fiber Optic Backbone Network Global sepanjang 64,67K km. Jaringan backbone serat optik ini diharapkan akan meningkatkan akses broadband dan menstimulasi layanan ICT hingga ke pelosok Indonesia.

Dari sisi infrastruktur, untuk melengkapi sistem jaringan kabel bawah laut SEA-ME-WE5 dan SEA-US, pada tahun 2018 Telkom juga membangun Indonesia Global Gateway (IGG) 8,50K km yang akan menghubungkan SEA-ME-WE5 dan SEA-US. Pembangunan sistem kabel laut SEA-ME-WE5 dan SEA-US serta IGG ini akan memperkuat jaringan Telkom serta akan menjadikan Telkom sebagai global digital hub.

Sementara itu, dengan diluncurkannya Satelit Merah Putih (Telkom-4) di bulan Agustus 2018, Telkom mengoperasikan 3 satelit dengan total kapasitas 133 transponder equivalent (TPE) guna memenuhi kebutuhan transmisi terutama kawasan-kawasan yang tidak terjangkau oleh serat optik, untuk melayani berbagai kebutuhan di sektor perbankan, media elektronik, transportasi dan pertambangan. Investasi yang berkelanjutan ini dilakukan dalam rangka mempercepat pertumbuhan bisnis digital dan memberikan pengalaman digital terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat.

➤ *UNDERWATER AND SATELLITE CABLE NETWORKS*

In order to increase digital access for the Indonesian people, in 2018, Telkom has succeeded in increasing the length of the Fiber Optic Backbone Network to 161.65K km. It reaches no less than 458 Regencies and Cities (IKK) throughout Indonesia or more than the 2018 target of 457 IKK. Meanwhile, Domestic Fiber Optic Backbone Network reaches 96,98K km and Global Fiber Optic Backbone Network reaches 64,67K km. The fiber optic backbone network is expected to increase broadband access and stimulate ICT services throughout Indonesia.

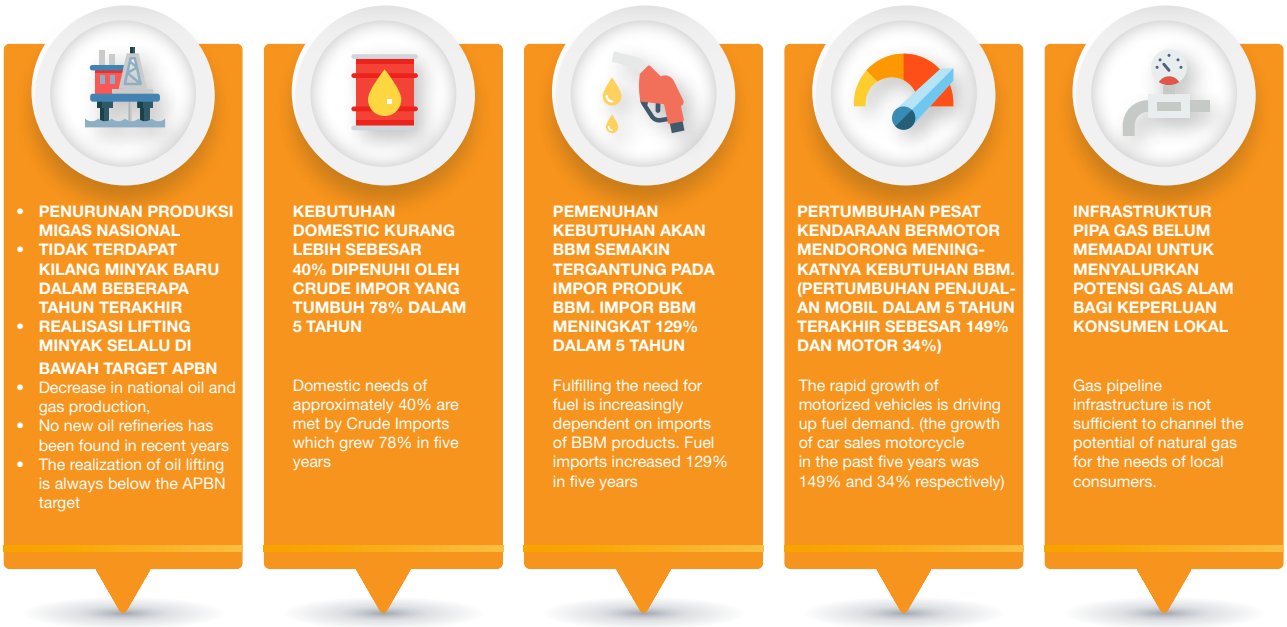
In terms of infrastructure, to complement the SEA-ME-WE5 and SEA-US submarine cable systems, in 2018 Telkom also built an 8.50K km of Indonesia Global Gateway (IGG) which will connect SEA-ME-WE5 and SEA-US. The construction of t SEA-ME-WE5 and SEA-US sea cable systems and IGG will strengthen the Telkom network and will make Telkom to become a global digital hub.

Meanwhile, with the launch of Merah Putih Satellite (Telkom-4) in August 2018, Telkom operates three satellites with a total capacity of 133 transponder equivalent (TPE) to meet the transmission needs, especially in areas that is not covered by optical fiber, to serve various needs in the banking, electronic media, transportation and mining sectors. This sustainable investment is carried out in order to accelerate the growth of the digital business and provide the best digital experience for all levels of society.

Energy Security
Ketahanan Energi

ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dari sekian banyak sektor, sektor energi merupakan salah satu yang menjadi perhatian serius Pemerintah. Upaya pemerataan di sektor energi merupakan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia dihadapkan pada ketergantungan impor energi untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Energy security is a condition for ensuring the availability of energy, access to energy at affordable prices in the long term, while paying attention to the environmental protection. Of the many sectors, the energy sector is one of the Government's serious concerns. The efforts for equity in energy sector are an embodiment of social justice for all Indonesian people. Indonesia faces the dependence on energy imports to meet domestic needs.



Berangkat dari masalah tersebut, serta agar tercipta ketahanan energi, maka perlu dilakukan pembangunan kilang baru yang akan dapat membantu mengurangi gap atau jurang permintaan. Beberapa hal yang jadi fokus pemerintah dalam kebijakan ini adalah yang pertama pembangunan dan pengembangan kilang harus dilakukan dengan menggunakan teknologi yang terbaru, memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, dan tentu saja mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

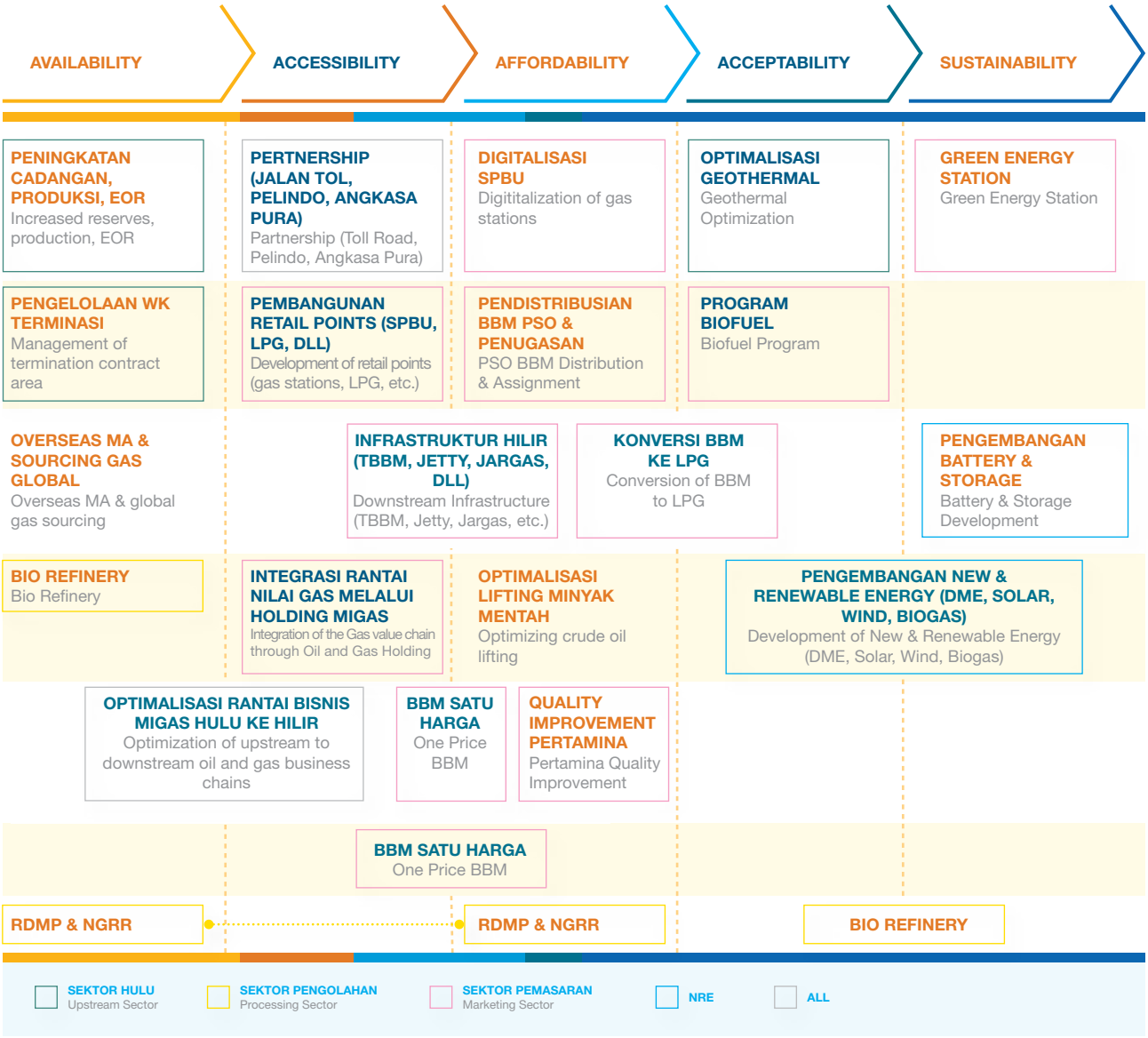
Due to this concern, and in order to establish energy security, developing new refineries become necessary to help reduce the gap or demand gap. Some of the things that have become the government's focus in this policy are the construction and development of refineries must be carried out using the latest technology, meet the provisions of management and environmental protection, and certainly prioritize the use of domestic products.

Sementara, konsumsi gas domestik meningkat dengan rata-rata peningkatan 8% sejak tahun 2003 hingga 2017, dan di tahun 2018 permintaan domestik lebih tinggi dari ekspor dengan 59,9%. Untuk itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan pipa gas yang dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional, guna mengurangi impor dan memaksimalkan potensi besar yang membentang di dalam negeri.

Meanwhile, domestic gas consumption has increased by an average increase of 8% from 2003 to 2017. In 2018, the domestic demand is higher than exports by 59.9%. Therefore, the government continues to boost the development of gas pipelines that are included in national strategic projects, in order to reduce imports and maximize the huge potential thoughout the nation.

Untuk menjaga ketahanan energi nasional, Pemerintah memberian mandat pada BUMN Holding Migas yakni PT Pertamina (Persero) beserta anak-anak perusahaannya seperti PGN, untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Secara umum, peran Pertamina Holding dalam pengelolaan energi nasional adalah sebagaimana terlampir di bawah ini.

To maintain national energy security, the Government gave a mandate to the SOEs Oil and Gas Holdings namely PT Pertamina (Persero) and its subsidiaries such as PGN, to strengthen national energy security through the National Strategic Project (PSN). In general, the role of Pertamina Holding in national energy management is as described as follows.



➤ PROYEK BD BLOK MAHAKAM (TUNU SHALLOW PHASE 4)

Tanggal 1 Januari 2018 menjadi momen bersejarah industri minyak dan gas (migas) nasional, sebab, per tanggal tersebut pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur resmi di serahkan ke PT Pertamina (Persero), dimana sebelumnya dikelola oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation. Alih kelola ini menjadi sejarah industri migas nasional karena Blok Mahakam selama 50 tahun dikuasai asing. Terlebih, blok ini merupakan produsen migas terbesar di Indonesia. Hasil produksinya melampaui produksi kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) Chevron Pasific Indonesia dan ExxonMobil Oil Indonesia.

Blok Mahakam memang bukan wilayah kerja migas biasa. Saat ditemukan, cadangan di cekungan Kalimantan Timur itu diprediksi mencapai sekitar 50 triliun kaki kubik (TCF) gas dan 5 miliar barel (BBLS) minyak. Blok Mahakam sendiri diperkirakan masih menyisakan cadangan 57 juta barel minyak, 45 juta barel kondensat, dan 4,9 TCF gas.

Pertamina mengambil langkah strategis yang salah satunya melalui Proyek BD Blok Mahakam (Tunu Shallow Phase 4) yang berlokasi di Delta Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur. Proyek ini mencakup pemboran sumur dan pekerjaan *well connection* termasuk pemasangan *flowline* baru untuk memproduksikan 100 sumur baru dengan cadangan yang diharapkan sebesar 138 Bcf. Merupakan kelanjutan dari pengembangan intensif dari POD Tunu Shallow-1, Shallow-2 dan Shallow-3, guna meningkatkan *recovery* dari cadangan gas *non-associated Shallow Zone* (menambah cadangan) dan menjaga kesinambungan produksi Lapangan Tunu pasca 2017 khususnya dan Mahakam Blok pada umumnya.

Proyek dengan nilai investasi USD 757 juta ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan *recoverable resources* 138 bcf (dengan estimasi penambahan RF = 4%) melalui 100 sumur pengembangan, dengan rincian:

- Laju produksi awal diperkirakan = 20 MMscfd hingga mencapai laju produksi puncak = 135 MMscfd
- Lama produksi diperkirakan 5 tahun

Per Desember 2018, proyek ini telah menelan biaya sebesar USD 104 juta atau sekitar 14% dari nilai investasi dan telah menghasilkan 18 sumur pemboran atau 20,77% dari target.

➤ *MAHAKAM BLOCK BD PROJECT (TUNU SHALLOW PHASE 4))*

January 1, 2018 became a historical date for the national oil and gas industry, since as of that date, the management of Mahakam Block in East Kalimantan was officially handed over to PT Pertamina (Persero), which was previously managed by Total E & P Indonesie and Inpex Corporation. The management transfer has become the history of national oil and gas industry as Mahakam Block has been controlled by the foreign parties for 50 years. Moreover, this block is the largest oil and gas producer in Indonesia. The production output exceeds the production of the cooperation contract contractor (KKKS) Chevron Pacific Indonesia and ExxonMobil Oil Indonesia.

Mahakam Block is not an ordinary oil and gas working area, indeed. When it was discovered, the reserves in East Kalimantan basin are predicted to reach approximately 50 trillion cubic feet (TCF) of gas and 5 billion barrels (BBLS) of oil. Mahakam block is estimated to still have reserves of 57 million barrels of oil, 45 million barrels of condensate and 4.9 TCF of gas.

Pertamina took strategic steps, one of which was through the BD Mahakam Block Project (Tunu Shallow Phase 4) located in Mahakam Delta, East Kalimantan. The project includes contract area drilling and contract area connection work including the installation of new flowlines to produce 100 new contract areas with expected reserves of 138 Bcf. It is a continuation of the intensive development of the Tunu Shallow-1, Shallow-2 and Shallow-3 POD, to improve recovery from non-associated gas reserves of the Shallow Zone (increase reserves) and maintain the continuity of the 2017 Tunu Field production in particular and Mahakam Blok in general.

The project with an investment of USD 757 million is expected to result in an increase in 138 bcf recoverable resources (with an estimated addition of RF = 4%) through 100 development wells, with the description:

- *The initial production rate is estimated to be = 20 MMscfd until it reaches the peak production rate = 135 MMscfd*
- *The estimated production time is five years*

As of December 2018, this project has cost USD 104 million or around 14% of the investment value and has produced 18 drilling wells or 20.77% of the target.

➤ RDP PHASE IV LAPANGAN ALGERIA

PT Pertamina (Persero) terus berkomitmen untuk memperluas jaringan bisnis hulunya demi memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia akan sumber energi yang terus meningkat. Sadar akan jumlah cadangan di Indonesia yang semakin menipis, sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Industri Minyak dan Gas (Migas) serta Energi Baru dan Terbarukan, Pertamina secara agresif terus memburu ladang-ladang baru hingga ke mancanegara. Salah satu kesuksesan Pertamina dalam mengembangkan bisnis hulunya di luar negeri dipetik melalui Pertamina Algeria EP/COPAL.

Pertamina pun melakukan Reservoir Development Plan (RDP) Phase IV Lapangan Algeria dengan memaksimalkan pemulihan dari Lapangan MLN pada blok 405A dengan pengeboran/*workover* dan optimisasi injeksi gas (EUR = 217 MMSTB OOIP 564 MMSTB). Selain itu dilakukan juga pengembangan dan investasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemulihan sekitar 50 juta barel dibandingkan dengan RDP 2005.

Proyek senilai USD 267 juta ini diharapkan dapat meningkatkan Kapasitas Injeksi Gas dari 225 MMscfd menjadi 275 MMscfd. Per Desember 2018, proyek ini telah menelan biaya sebesar USD62 juta dengan progres fisik proyek sebesar 23,4%.

➤ *RDP PHASE IV ALGERIA FIELD*

PT Pertamina (Persero) continues to be committed to expand its upstream business network in order to meet the needs of the Indonesian people for increasing energy sources. Being aware of the reserves depletion in Indonesia, as the only State-Owned Enterprise (BUMN) engaged in the Oil and Gas Industry and New and Renewable Energy, Pertamina is aggressively continue to discover new fields to foreign countries. One of Pertamina's successes in developing its upstream business abroad is learned through Pertamina Algeria EP/COPAL.

Pertamina also conducted a Phase IV Field Reservoir Development Plan (RDP) by maximizing recovery from the MLN Field in block 405A with drilling/workover and gas injection optimization (EUR = 217 MMSTB OOIP 564 MMSTB). In addition, further development and investment is also carried out to increase recovery by approximately 50 million barrels compared to 2005 RDP.

The project worth USD267 million is expected to increase Gas Injection Capacity from 225 MMscfd to 275 MMscfd. As of December 2018, this project has cost USD62million with the project's physical progress of 23.4%.

➤ PROYEK LUMUT BALAI 1-2

Selain di energi migas PT Pertamina (Persero) juga tengah melakukan pengembangan energi geothermal di wilayah prospek Lumut Balai untuk penyediaan energi listrik terbarukan sebesar 2 x 55 MW dalam upaya mendukung pembangunan khususnya di wilayah Sumatera Selatan atau di wilayah jalur interkoneksi Sumatera Bagian Selatan. Pertamina melalui anak usahanya yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) direncanakan akan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai, Sumatera Selatan. Upaya ini juga untuk menopang produksi migas guna memperkuat ketahanan energi nasional di daerah operasi Pertamina di daerah Lumut Balai.

➤ *LUMUT BALAI 1-2 PROJECT*

In addition to oil and gas energy, PT Pertamina (Persero) is also developing geothermal energy in Lumut Balai prospect area for the supply of 2 x 55 MW renewable electricity to support development, especially in South Sumatra or in the Southern Sumatra interconnection line. Pertamina through its subsidiary, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) is planned to operate Lumut Balai Geothermal Power Plant (PLTP), South Sumatra. It is also to support oil and gas production in order to strengthen national energy security in the Pertamina operation area of Lumut Balai.

Proyek dengan investasi senilai USD 683 juta ini, diharapkan dapat menunjang sumur dan fasilitas Produksi/Reinjeksi berkapasitas 2 x 55 MW, serta diharapkan PLTP unit 1 sebesar 1x55 MW dan unit 2 sebesar 1 x 55 MW dapat beroperasi dan mendapat SLO (Surat Laik Operasi). Per Desember 2018, proyek ini telah menelan biaya sebesar USD 445 juta atau 65% dari nilai investasi dengan progres proyek sebsar 85,4%.

The project with an investment of USD 683 million is expected to support contract areas and Production/ Reinjection facilities with a capacity of 2 x 55 MW, and it is expected that PLTP unit 1 will be 1x55 MW and unit 2 of 1 x 55 MW can operate and receive SLO (Operation Worthy Letter). As of December 2018, this project has cost USD 445 million or 65% of the investment value with the progress of the project has reached 85.4%.

➤ PROYEK RDMP RU V BALIKPAPAN

Proyek ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Keputusan Menteri ESDM No. 1001 K/12/MEM Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Pertamina dalam Pengembangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan proyek ini bertujuan untuk meningkatkan margin kilang RU V dengan meningkatkan NCI RU V dan Kapasitas pengolahan kilang RU V yang memberikan dampak peningkatan produksi BBM RU V. Selain itu proyek ini juga bertujuan untuk melakukan *upgrading material* pada *existing unit* agar dapat mengolah *sour crude* pada tahap berikutnya.

Melalui proyek dengan nilai investasi USD 6.506 juta ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Olah menjadi 360 KBPD dari 260 KBPD. Proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Produk Utama yakni Gasoline menjadi 120 KBPD dari 40 KBPD, Diesel menjadi 160 KBPD dari 90 KBPD, dan Avtur menjadi 40 KBPD dari 10 KBPD.

Adapun realisasi Proyek RDMP RU V Balikpapan per Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- Biaya yang telah terserap sebesar USD 180 Juta atau 3% dari nilai invetasi
- Pengerjaan fisik telah mencapai 4,4%
- Proses EPC bidding RDMP RU V - Balikpapan stage 1 (satu) telah selesai dilaksanakan dengan dilakukannya *Contract Award* kepada kontraktor terpilih pada tanggal 10 Desember 2018. Selanjutnya pada awal tahun 2019 akan mulai dilakukan pekerjaan EPC selama jangka waktu 153 (lima puluh tiga) bulan dengan *target on stream* pada tahun 2023 dan juga akan menyelesaikan pekerjaan *Early Work* yang telah dimulai sejak tahun 2018.

➤ *RDMP RU V BALIKPAPAN PROJECT*

This project is stated in the Republic of Indonesia Presidential Regulation No. 58 of 2017 concerning the Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects. It is also stated in the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1001 K/12/MEM of 2016 concerning Assignment to Pertamina in the Development and Operation of Oil Refineries in Balikpapan City, East Kalimantan.

The project construction aims to increase RU V refinery margins by increasing NCI RU V and RU V refinery processing capacity which has an impact on increasing RU V BBM production. In addition, it aims to upgrade materials to existing units in order to process sour crude at the next stage.

Through the project with an investment of USD 6,506 million, it is expected to increase the processing capacity to 360 KBPD from 260 KBPD. It is also expected to increase the capacity of the Main Products, namely Gasoline to 120 KBPD from 40 KBPD, Diesel to 160 KBPD from 90 KBPD, and Avtur to 40 KBPD from 10 KBPD.

The realization of the RDMP RU V Balikpapan Project as of December 2018 is as follows:

- *The absorbed costs are USD 180 Million or 3% of investment value*
- *Physical workmanship has reached 4.4%*
- *EPC bidding RDMP RU V process - Balikpapan stage 1 (one) has been completed by conducting a Contract Award to selected contractors on 10 December 2018. Furthermore, at the beginning of 2019, EPC work will commence during the period of 153 (fifty three) months with on stream target in 2023 and will also complete the Early Work work that has begun since 2018.*

- Untuk memperbaiki proyek RDMP RU V - Balikpapan ini, direncanakan melalui skema *Project Financing* dan *Joint Venture* dengan mencari mitra, dimana proses seleksi mitra sudah dimulai dengan *long list and preliminary market sounding* di bulan September-Oktober 2018 serta pembahasan draf *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dengan 9 (sembilan) calon mitra yang menyatakan minat dan penyiapan *Data Room* Proyek RDMP RU V - Balikpapan.

- *To improve RDMP RU V, Balikpapan Project is planned through the Project Financing and Joint Venture scheme by finding partners. The partner selection process has begun with a long list and preliminary market sounding in September-October 2018 and discussion of the draft Non-Disclosure Agreement (NDA) with nine potential partners who are interest and prepared RDMP RU V - Balikpapan Project Room Data.*

➤ PROYEK RDMP RU IV CILACAP

Proyek ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Keputusan Menteri ESDM No.1000 K/12/MEM Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Pertamina dalam Pengembangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan proyek ini adalah:
- Fleksibilitas pengolahan MM sulfur 0.1% menjadi 1.6%
- Meningkatkan NCI RU IV dari 4.4 menjadi 8.6
- Peningkatan produksi BBM meningkat ~135%
- Peningkatan kualitas produk dari EURO II ke V

Melalui proyek dengan nilai investasi USD 5.825 juta ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Olah menjadi 400 KBPD dari 348 KBPD. Proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Produk Utama yakni Gasoline menjadi 140 KBPD dari 90 KBPD, Diesel menjadi 160 KBPD dari 80 KBPD, dan Avtur menjadi 50 KBPD dari 40 KBPD.

Adapun realisasi Proyek RDMP RU IV Cilacap per Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- Biaya yang telah terserap sebesar USD 58 juta atau 1% dari nilai investasi
- Pengerjaan fisik telah mencapai 8,2%
- Pending isu kerjasama Pertamina dengan Aramco dalam pembangunan RDMP Cilacap adalah mengenai valuasi. Hasil valuasi oleh PwC akan disampaikan oleh Pertamina kepada Aramco.
- Terdapat dana pinjaman Saudi Fund for Development (SFD) yang dijanjikan oleh Pemerintah Saudi sebesar USD 1 Miliar. Dari jumlah tersebut, Pertamina berminat untuk menggunakan USD 200-300 juta untuk pembangunan RDMP Cilacap (kegiatan *study engineering design*), skema *direct landing* dengan jaminan penuh dari

➤ *CILACAP RU IV RDMP PROJECT*

This project is stated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No.58 of 2017 concerning the Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects. It is also stated in the Minister of ESDM Decree No.1000 K/12/MEM of 2016 concerning Assignment to Pertamina in the Development and Operation of Oil Refineries in Cilacap Regency, Central Java.

The objectives of this project are:
- *Having flexibility in processing MM sulfur 0.1% to 1.6%*
- *Increasing NCI RU IV from 4.4 to 8.6*
- *Increasing fuel production ~ 135%*
- *Improving product quality from EURO II to V*

Through the project with an investment value of USD 5,825 million, it is expected to increase the processing capacity to 400 KBPD from 348 KBPD. It is also expected to increase the capacity of Main Products, namely Gasoline to 140 KBPD from 90 KBPD, Diesel to 160 KBPD from 80 KBPD, and Avtur to 50 KBPD from 40 KBPD.

The realization of the Cilacap RU IV RDMP Project as of December 2018 is as follows:

- *The absorbed cost is USD 58 million or 1% of the investment value*
- *Physical progress has reached 8.2%*
- *Pending the issue of cooperation between Pertamina and Aramco in the development of Cilacap RDMP is about valuation. The valuation results by PwC will be submitted by Pertamina to Aramco.*
- *There is a Saudi Fund for Development (SFD) loan fund suggested by the Saudi Government in the amount of USD 1 billion. Of this amount, Pertamina is interested in using USD 200-300 million for the construction of the Cilacap RDMP (design study engineering activity), a direct landing scheme with full guarantee from the*

pemerintah. Belum dipastikan apakah bisa SFD untuk pembangunan kilang minyak, karena belum diatur jelas. Presiden akan menyampaikan kepada MBS apakah boleh SFD untuk pembangunan kilang minyak.

government. It is uncertain whether SFD can be used for the construction of oil refineries as it has not been clearly regulated. The President will submit to SBM whether it is permissible for SFD to develop oil refineries.

➤ PEMBANGUNAN RDMP RU VI BALONGAN

Proyek ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Keharusan beradaptasi dengan proyeksi turunnya ketersediaan minyak mentah domestik yang rendah sulfur dan harus digantikan dengan impor minyak mentah yang tinggi sulfur. Pembangunan proyek ini bertujuan untuk memaksimalkan kapasitas RFCC (unit penghasil produk Gasoline) tanpa ketergantungan kepada pasokan Intermedia *Long Residue* Impor. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pengolahan sour crude serta menurunkan ketergantungan pada impor Gasoline dan Diesel, juga peningkatan spesifikasi produk dari < EURO II menuju EURO V.

Tujuan proyek ini adalah:
- Memenuhi kebutuhan *feedstock* untuk optimalisasi produksi unit RCC & KLBB
- Meningkatkan fleksibilitas untuk mengolah *Crude* dengan kualitas lebih Sour
- Peningkatan Spesifikasi Produk dari < EURO II menuju EURO V
- Meningkatkan nilai keekonomian kilang

Melalui proyek dengan nilai investasi USD 2.650 juta ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Olah menjadi 400 KBPD dari 348 KBPD. Proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Produk Utama yakni Gasoline menjadi 140 KBPD dari 90 KBPD, Diesel menjadi 160 KBPD dari 80 KBPD, dan Avtur menjadi 50 KBPD dari 40 KBPD.

Adapun realisasi Proyek RDMP RU VI Balongan per Desember 2018 adalah sebagai berikut:
- Keuangan USD 0 Juta (0%)
- Fisik 0% (Masih dalam proses penyusunan Bankable Feasibility Study)
- Untuk mengantisipasi berkurangnya *feedstock* RU VI - Balongan pasca beroperasinya RDMP RU V - Balikpapan pada tahun 2023, maka akan dilaksanakan terlebih dahulu proyek RDMP RU VI - Balongan phase I (survival) yang akan on stream pada tahun 2022. Studi kelayakan + BED direncanakan dimulai pada bulan Januari 2019, dimana saat ini sedang dalam proses penunjukan konsultan.

➤ *DEVELOPMENT OF RDMP RU VI BALONGAN*

This project is stated in the Republic of Indonesia Presidential Regulation No. 58 of 2017 concerning the Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects. The necessity to adapt to the projected decline in the availability of low-sulfur domestic crude oil and must be replaced by imports of high-sulfur crude oil. The construction of this project aims to maximize the capacity of RFCC(unit producing Gasoline products) without dependence on the supply of Intermedia Long Residue Imports. In addition, it also aims to increase sour crude processing flexibility and reduce dependence on Gasoline and Diesel imports, as well as increase product specifications from <EURO II to EURO V.

The objectives of this project are:
- *Meeting feedstock requirements for optimizing the production of RCC & KLBB units*
- *Increasing flexibility to process Crude with more Sour quality*
- *Increasing Specifications of Products from <EURO II to EURO V*
- *Increasing refinery economic value*

Through the project with an investment value of USD 2,650 million, it is expected to increase the processing capacity to 400 KBPD from 348 KBPD. It is also expected to increase the capacity of Main Products, namely Gasoline to 140 KBPD from 90 KBPD, Diesel to 160 KBPD from 80 KBPD, and Avtur to 50 KBPD from 40 KBPD.

The realization of the RDMP RU VI Balongan Project as of December 2018 is as follows:
- *Finance of USD 0 Million (0%)*
- *Physical of 0% (on-going status, preparing a Bankable Feasibility Study)*
- *To anticipate the reduction of RU VI - Balongan feedstock after the operation of RDMP RU V - Balikpapan in 2023, the RDMP RU VI - Balongan project phase I (survival) will be implemented first, which will be on stream by 2022. Feasibility studies + BED are planned to commence in January 2019, which is currently in the appointment of consultant*

- Pertamina masih menunggu terbitnya surat Keputusan Menteri ESDM tentang penugasan kepada Pertamina dalam hal pengembangan dan pengoperasian Kilang Minyak RU VI - Balongan (RDMP RU VI - Balongan) berdasarkan surat Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia No. 059N00000/2018-S0 tanggal 12 April 2018 terkait permintaan penerbitan Keputusan Menteri ESDM tersebut untuk mendorong progres proyek diantaranya dalam hal pengadaan lahan pada tahun 2019.

➤ PROYEK RDMP RU II DUMAI

Proyek ini sudah masuk ke dalam Daftar Proyek Strategis Nasional Perpres No.58/2017 dan Daftar Proyek Prioritas Permenko Ekon No 12/2015 untuk meningkatkan penyediaan minyak mentah dan bahan bakar di Indonesia dan menurunkan ketergantungan pada impor.

Pembangunan proyek ini bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Kilang dari dari 140 MBSD menjadi 300 MBSD, serta mengubah sumber dan kualitas minyak mentah ke minyak mentah sulfur lebih berat dan tinggi, dan mengubah persyaratan produk dan kualitas untuk memenuhi standar lingkungan diesel dan bahan bakar bensin (EURO V). Proyek pembangunan dengan nilai investasi 4-5 juta dollar AS ini, hingga September 2017 masih dilakukan kajian konfigurasi kilang.

Pembangunan RDMP Dumai yang dilakukan oleh Pertamina ini, ditargetkan dapat meningkatkan fleksibilitas Kilang untuk dapat mengolah Minyak Mentah dengan tingkat kandungan sulfur dari 0.1% menjadi 1.3%. Proyek ini juga ditargetkan dapat meningkatkan produksi BBM Solar dari ~100 MBSD menjadi ~180 MBSD dan Gasoline dari ~20 MBSD menjadi ~90 MBSD dan meningkatan kualitas produk dari EURO II ke V, serta meningkatan margin Kilang RU II Dumai.

Adapun perkembangan Proyek RDMP RU II Dumai per Desember 2018 adalah direncanakan akan dilakukan review BFS pada tahun 2019, kemudian untuk sharing risk dan membantu pendanaan proyek, Pertamina saat ini sedang mencari partner strategis untuk RDMP RU II - Dumai

- *Pertamina is still awaiting the issuance of the Minister of Energy and Mineral Resources Decree regarding the assignment to Pertamina on the development and operation of RU VI - Balongan Oil Refinery (RU RDM - Balongan). It is based on the letter of the Megaprocessing and Petrochemical Project Director. No. 059N00000/2018-S0 dated 12 April 2018 regarding the request for the issuance of the Minister of Energy and Mineral Resources Decree to encourage project progress including land acquisition in 2019.*

➤ *RDMP RU II DUMAI PROJECT*

This project has been included in the List of National Strategic Projects of Presidential Regulation No.58/2017 and Priority Project List of Permenko Ekon No 12/2015 to increase the supply of crude oil and fuel in Indonesia and reduce the dependency on imports.

The construction of this project aims to increase oil refinery capacity from 140 MBSD to 300 MBSD. Its goal is also to change the source and quality of crude oil to heavier and higher sulfur crude oil, and change the product requirements and quality to meet diesel and gasoline environmental standards (EURO V). This construction project has an investment value of USD 4-5 million. Up to September 2017, a refinery configuration study still has been conducted.

The development of Dumai RDMP conducted by Pertamina is targeted to increase the flexibility of Refineries to be able to process Crude Oil with a sulfur content level of 0.1% to 1.3%. It is also targeted to increase the production of Solar BBM from ~ 100 MBSD to ~ 180 MBSD and Gasoline from ~ 20 MBSD to ~ 90 MBSD and increase product quality from EURO II to V, and increase the margin of RU II Dumai Refinery.

For the development of RDMP RU II Dumai Project as of December 2018, BFS review is planned to be conducted in 2019. Further for sharing risk and supporting project funding, Pertamina is currently looking for a strategic partner for RDMP RU II – Dumai.

➤ PROYEK GRASS ROOT REFINERY (GRR) TUBAN

Proyek ini sudah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional Perpres No.58/2017 dan daftar Proyek Prioritas Permenko Ekon No 12/2015, serta Kepmen ESDM No. 807K/12/MEM/2016 Tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pembangunan GRR Tuban ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan bahan bakar minyak di Indonesia, menurunkan ketergantungan pada impor, mengembangkan kemampuan pemasaran & pengembangan Petrokimia.

Tujuan proyek ini adalah:

- Peningkatan pendapatan bagi PT Pertamina (Persero) dan Partner JV
- Mengurangi ketergantungan BBM Indonesia dari pihak asing menuju kemandirian energi.
- Mengurangi keterlambatan pasokan BBM dalam negeri akibat isu geopolitik
- Mengurangi resiko tingginya harga akibat fluktuasi harga BBM
- Memungkinkan kerjasama dalam pembelian minyak dalam jangka panjang
- Mendorong pertumbuhan industri hilir/ petrokimia

Melalui proyek GRR Tuban dengan nilai investasi USD 15.831 juta (termasuk pembebasan lahan) ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kilang minyak sebesar 300 MBSD, serta pembangunan kilang petrokimia dan fasilitas penunjang serta sarana pendukung.

Adapun realisasi Proyek *Grass Root Refinery* (GRR) Tuban per Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- Biaya yang telah terserap sebesar USD 2 Juta atau 0,02% dari nilai investasi
- Pengerjaan fisik telah mencapai 0,4%
- Akuisisi lahan KLHK : menunggu persetujuan Presiden terhadap Proses Tukar Menukar Lahan BMN KLHK mengacu surat dari Menteri Keuangan (Surat No. S-953/MK.06/2018).

➤ *TUBAN GRASS ROOT REFINERY (GRR) PROJECT*

This project has been included in the list of National Strategic Projects of Presidential Regulation No.58/2017 and the list of Priority Projects of Permenko Ekon No 12/2015, as well as Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 807K/12/MEM/2016 Regarding Assignment to PT Pertamina (Persero) in the Construction and Operation of Oil Refineries in Tuban, East Java. The Tuban GRR development aims to increase the supply of fuel oil in Indonesia, reduce the dependency on imports, develop the marketing and development capabilities of Petrochemicals.

The objectives of this project are:

- *Increasing revenue for PT Pertamina (Persero) and JV Partners*
- *Reducing the dependence of Indonesian fuel from foreign parties towards energy independence.*
- *Reducing the delay in supply of domestic fuel due to geopolitical issues*
- *Reducing the risk of high prices due to fuel price fluctuations*
- *Enabling cooperation in long-term oil purchases*
- *Encouraging the growth of downstream/petrochemical industries*

Through the Tuban GRR project with an investment of USD 15,831 million (including land acquisition), it is expected to increase the capacity of oil refineries by 300 MBSD, as well as the construction of petrochemical refineries and supporting facilities.

The realization of the Tuban Grass Root Refinery (GRR) Project as of December 2018 is as follows:

- *The absorbed cost is USD 2 Million or 0.02% of the investment value*
- *Physical workmanship has reached 0.4%*
- *KLHK land acquisition: awaiting the President's approval of the KLNK BMN Land Exchange Exchange Process refers to a letter from the Minister of Finance (Letter No. S-953/MK.06/2018).*

➤ PROYEK GRASS ROOT REFINERY (GRR) BONTANG

Proyek ini sudah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional melalui Perpres No.58/2017 dan Daftar Proyek Prioritas Permenko Ekon No 12/2015, serta Kepmen ESDM No. 7935K/10/MEM/2016 Tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Bontang Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan proyek ini adalah untuk menambah kapasitas Pengolahan sebesar 300 MBPD serta untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri terutama Indonesia Bagian Timur dan menembus pasar BBM Internasional dengan spesifikasi Euro V.

Dengan dilakukannya pembangunan *Grass Root Refinery* Bontang, diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar jenis bensin minimal 60 ribu barel per hari dan jenis solar minimal 124 ribu barel per hari. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan penyediaan bahan bakar di Indonesia dan menurunkan ketergantungan pada impor.

PT Pertamina (Persero) menargetkan memulai pembangunan konstruksi kilang minyak (*Grass Root Refinery*/GRR) di Bontang, Kalimantan Timur pada 2019 untuk bisa diselesaikan pada 2023. Pertamina sendiri sudah memiliki investasi awal untuk GRR Bontang berupa infrastruktur yang sangat vital dan lahan yang sudah ada pada area proyek.

Rencananya kilang minyak di Bontang itu akan menghasilkan 300 ribu barel minyak per hari apabila sudah berjalan produksi. Sedangkan jenis produk yang dihasilkan berupa gasoline 92, 95, 98, LPG, dan juga *aviation turbine fuel*.

Adapun realisasi Proyek *Grass Root Refinery* (GRR) Bontang per Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- Pertamina telah menunjuk konsorsium *Overseas Oil & Gas* LLC (OOG dari Oman) sebagai partner terseleksi proyek GRR Bontang pada tanggal 30 Januari 2018.
- Telah dilakukan penandatanganan *Frame Work Agreement* (FWA) GRR Bontang antara Pertamina dengan OOG pada tanggal 10 Desember 2018.
- Selanjutnya OOG akan menyampaikan *list of consultants* untuk proses *approval* oleh Pertamina tentatif pada bulan Februari 2019 yang dilanjutkan dengan proses Penunjukan konsultan BFS oleh partner tentatif pada bulan April 2019.

➤ *GRASS ROOT REFINERY (GRR) BONTANG PROJECT*

This project has been included in the list of National Strategic Projects through Presidential Regulation No.58/2017 and List of Priority Projects of Permenko Ekon No 12/2015, and Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 7935K/10/MEM/2016 Concerning Assignment to PT Pertamina (Persero) in the Construction and Operation of Oil Refineries in Bontang, East Kalimantan.

The purpose of this project is to increase the processing capacity of 300 MBPD and to meet domestic fuel needs, especially in Eastern Indonesia and penetrate the International BBM market with Euro V specifications.

By carrying out the construction of the Bontang Grass Root Refinery, it is expected to increase the production capacity of gasoline-type fuel at a minimum of 60 thousand barrels per day and at least 124 thousand barrels of diesel fuel per day. In addition, it is also expected to increase fuel supply in Indonesia and reduce dependence on imports.

PT Pertamina (Persero) targets to start the construction of refinery (Grass Root Refinery/GRR) in Bontang, East Kalimantan in 2019 to be completed by 2023. Pertamina already has an initial investment for GRR Bontang in the form of very vital infrastructure and existing land in the project area.

It is planned that the oil refinery in Bontang will produce 300 thousand barrels of oil per day when it is already in production phase. While the types of products produced are gasoline 92, 95, 98, LPG, and also aviation turbine fuel.

The realization of the Bontang Grass Root Refinery (GRR) Project as of December 2018 is as follows:

- *Pertamina has appointed a consortium of Overseas Oil & Gas LLC (OOG from Oman) as the selected partner of the Bontang GRR project on January 30, 2018.*
- *The signing of the Frame Work Agreement (FWA) Bontang GRR between Pertamina and OOG on December 10, 2018.*
- *Furthermore, the OOG will deliver a list of consultants for the approval by Pertamina tentatively in February 2019, followed by the appointment of a BFS consultant by a tentative partner in April 2019.*

- Selain beberapa hal tersebut diatas juga akan dilakukan sindikasi ke instansi terkait dalam rangka pemanfaatan lahan LMAN untuk GRR Bontang untuk dapat mendukung pencapaian *target on stream* GRR Bontang pada tahun 2026.

- *In addition to the aforementioned matters, the syndication will also be carried out to the relevant agencies in the context of using LMAN land for GRR Bontang to be able to support the achievement of the Bontang GRR on stream target by 2026.*

➤ PROYEK PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI DURI-DUMAI

Proyek pembangunan jaringan pipa gas transmisi Duri-Dumai merupakan penugasan bersama antara PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 5975 K/12/MEM/2016 yang berisi bahwa Pipa Duri-Dumai akan dibangun dan dioperasikan bersama antara Pertamina dan PGN dengan *target On Stream* pada Triwulan I 2019.

Proyek senilai USD 44,71 juta ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gas Kilang Pertamina Dumai, kebutuhan industri di Riau, kebutuhan pelabuhan, dan industri petrokimia dalam rangka mendorong nilai tambah ekonomi daerah,nasional serta daya saing industri. Per Desember 2018, proyek ini telah menelan biaya sebesar USD 62,34 juta atau mencapai 139,43% dari nilai investasi dengan progres fisik proyek sebesar 99,3%.

➤ *DURI-DUMAI TRANSMISSION PIPE CONSTRUCTION PROJECT*

The project for the construction of the Duri-Dumai transmission pipeline network is a joint assignment between PT Pertamina (Persero) and PT PGN Tbk as stated in the Ministerial Decree of ESDM No. 5975 K/12/MEM/2016 which states that the Duri-Dumai Pipe will be built and operated jointly between Pertamina and PGN target On Stream in the first Quarter of 2019.

The project, valued at USD 44.71 million, is expected to meet the gas needs of Pertamina Dumai Refinery, the industrial needs in Riau, the port needs, and the petrochemical industry in order to encourage added value of regional, national and industrial competitiveness. As of December 2018, this project has cost USD 62.34 million or reached 139.43% of the investment value with a physical progress of 99.3%.

Food Security
Ketahanan Pangan

Upaya mencapai ketahanan pangan selalu digaungkan pemerintah, terutama pada perayaan Hari Pangan Dunia yang jatuh pada 16 Oktober setiap tahunnya dan mungkin lebih sering pada saat masa panen tiba. Perlahan pemerintah berusaha menorehkan capaiannya di bidang ketahanan pangan melalui berbagai program yang di gagas Pemerintah, khusunya melalui program Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan menggerakkan perusahaan BUMN untuk melakukan program ketahanan pangan nasional.

The effort to achieve food security is always stated by the government, especially at the celebration of World Food Day which falls on October 16 each year and may be more frequent when the harvest comes. Gradually, the government tries to reach its achievements in food security through a variety of programs which the Government, especially through the National Strategic Project (PSN) program by encouraging the state-owned companies to carry out national food security programs.

➤ PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

PT Pupuk Indonesia (Persero mendapatkan penugasan Pemerintah untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk subsidi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung program Nasional Pemerintah untuk mencapai Ketahanan Pangan. Wujud dukungan antara lain dalam penyediaan pupuk bersubsidi bagi Petani sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu). Pupuk bersubsidi meliputi pupuk urea dan non urea (NPK, ZA, SP-36, dan pupuk organik).

Kementerian BUMN juga mendorong agar pelaksanaan penugasan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dapat dilaksanakan dengan optimal, maka telah diambil langkah – langkah strategis dan kebijakan yang tepat sehingga pupuk bersubsidi sebagai salah satu faktor utama dalam peningkatan produksi dapat tersedia dan diterima oleh pihak yang berhak untuk menerimanya

Pada tahun 2018 penyaluran/penjualan pupuk subsidi mencapai 9.340.238 ton yaitu sebagai berikut:

➤ *PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)*

PT Pupuk Indonesia (Persero) gets the mandate from the Government to produce and distribute subsidized fertilizers. This aims to support the Government's National program to achieve Food Security. The supports include the provision of subsidized fertilizers for Farmers in accordance with the six principles (type, total, price, place, time and quality). The subsidized fertilizers include urea and non urea fertilizers (NPK, ZA, SP-36, and organic fertilizers).

The Ministry of SOEs also encourages the implementation of assignments by PT Pupuk Indonesia (Persero) to be carried out optimally, so that strategic steps and appropriate policies have been taken. Thus, the subsidized fertilizer as one of the main factors in increasing production can be available and received by those who need.

In 2018, the distribution/sale of subsidized fertilizers reached 9,340,238 tons, as follows:

Penyaluran/Penjualan Pupuk Subsidi Tahun 2018 (Ton)
Subsidized Fertilizer Distribution/Sales in 2018 (Tons)



Urea
Urea
4.100.528



SP-36
SP-36
853.511



ZA
ZA
997.327



NPK
NPK
2.658.688



Organik
Organik
730.184

TOTAL 9.340.238

Penyaluran tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan petani sesuai target mendukung ketahanan pangan nasional.

The distribution is expected to meet the needs of farmers according to the Government's target to support national food security.

➤ PERUM BULOG

Selama tahun 2018, Perum BULOG telah melaksanakan penugasan Pelayanan Publik (PP) atau *Public Service Obligation* (PSO) dari Pemerintah berupa stabilisasi harga dan pasokan berbagai komoditas pangan utama terintegrasi dari sisi hulu hingga ke hilir di seluruh wilayah Indonesia. Komoditas penugasan PP yang ditangani Perum BULOG selama tahun 2018 antara lain beras, gula pasir, daging sapi dan kerbau. Bentuk kegiatan penugasan tersebut dimulai dari pembelian komoditas di tingkat produsen sampai ke penyalurannya melalui berbagai kegiatan seperti Beras Bantuan Sosial (Bansos) untuk Rakyat Sejahtera (Rastra), Operasi Pasar (OP), hingga Gerakan Stabilisasi Pangan (GSP).

Keseluruhan penugasan tersebut pada prinsipnya mendukung tiga pilar dari Ketahanan Pangan yaitu:

1. Pilar Ketersediaan.
   Perum BULOG melaksanakan kebijakan pembelian komoditas pangan pokok dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) melalui kegiatan pengadaan Dalam Negeri (DN). Tujuannya untuk menumbuhkan semangat petani dalam memproduksi tanaman pangan sehingga dapat menjaga kecukupan stok di masyarakat. Manfaat lain dari pengadaan DN antara lain (1) sebagai jaminan pasar; (2) sebagai jaminan harga, dan (3) menimbulkan multiplier effect dengan mendorong pembangunan pedesaan melalui peningkatan dan perluasan lapangan kerja.

2. Pilar Keterjangkauan
   Perum BULOG menyediakan dan menyalurkan komoditas pangan pokok bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga dapat menjangkau pangan secara fisik dan ekonomi. Sebagai contoh misalnya penyaluran Rastra dan penjualan daging kerbau merupakan dukungan atas pilar keterjangkauan baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi dekat RTS dan daging kerbau tersedia di pasar umum) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) dan merupakan program perlindungan sosial untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam bentuk *targeted food subsidy*, serta untuk melindungi rumah tangga rawan pangan dari ancaman malnutrisi, terutama energi dan protein.

➤ *PERUM BULOG*

Throughout 2018, Perum BULOG has carried out Public Service Obligation (PSO) assignments from the Government in the form of price and supply stabilization of various main integrated food commodities from upstream to downstream in all regions of Indonesia. The PP assignment commodities handled by BULOG throughout 2018 including rice, granulated sugar, beef and buffalo, animal feed corn, and soybeans. The assignment activities starts from the purchase of commodities at the producer level to the distribution through various activities such as Rice for Social Assistance (Bansos) for Prosperous People (Rasta), Market Operation (OP), and the Food Stabilization Movement (GSP).

In principle, the whole assignment supports three pillars of Food Security, namely:

1. Pillar of Availability.
   Perum BULOG carries out the policy of purchasing basic food commodities with Government Purchase Price (HPP) provisions through Domestic procurement activities (DN). The aim is to foster the spirit of farmers in producing food crops thus they can maintain sufficient stock in the community. The other benefits of DN procurement include (1) as a market guarantee; (2) as a price guarantee, and (3) create a multiplier effect by encouraging rural development through increasing and expanding employment.

2. Pillars of Affordability
   Perum BULOG provides and distributes the subsidized staple food commodities for low-income groups to give the access for food physically and economically. For instance, the distribution of Rastra and the sale of buffalo meat is a form of support for the physical affordability pillar (rice available at distribution points near RTS and buffalo meat available in the public market) and the economy (affordable selling price). It is also a social protection program for Poor Households (RTM) in the form of targeted food subsidy, as well as to protect food insecure households from the threat of malnutrition, especially energy and protein.

3. Pilar Stabilitas
   Perum BULOG menyediakan dan menyalurkan komoditas pangan pokok untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di tingkat konsumen, serta meningkatkan kesiapan penanggulangan keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan, konsistensi penyediaan pangan oleh Pemerintah melalui pengelolaan stok BULOG dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

3. Pillar of Stability
Perum BULOG provides and distributes the staple food commodities to maintain price and supply stability at the consumer level, as well as improves emergency prevention, disaster, and food insecurity, consistency of food supply by the Government through BULOG stock management and Government Food Reserves (CPP).

Pada tahun 2018 Perum BULOG telah melaksanakan penugasan Pemerintah dengan melakukan kegiatan pengadaan, pengelolaan, pengendalian ketersediaan, stabilisasi dan distribusi komoditas pangan. Dengan realisasi kinerja operasional Perum BULOG tahun 2018 dari realisasi pengadaan beras medium dalam negeri tahun 2018, sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebanyak 1,48 juta ton dan realisasi pengadaan beras impor tahun 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebanyak 1,78 juta ton.

In 2018, Perum BULOG has carried out Government assignments by conducting procurement, management, availability control, stabilization and distribution of food commodities. The realization of Perum BULOG operational performance in 2018 from the realization of domestic medium rice procurement up to December 31, 2018 is 1.48 million tons. Furtherly, the realization of the rice import from 2018 to December 31 2018 is 1.78 million tons.

Selama tahun 2018 Perum BULOG telah menyalurkan beras untuk penugasan Pemerintah (PSO) sebesar 1,85 juta ton dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2018, Perum BULOG has distributed rice for the Government assignment (PSO) of 1.85 million tons with details as follows:

Rincian penyaluran beras PSO tahun 2018 [NH1]
Details of PSO rice distribution in 2018

	KUANTUM
Bansos Rastra	1.207.268.900,00
OP CBP	544.648.592,41
GoI Anggaran	6.952.509,51
TOTAL	100.855.053,34

Pada tahun 2018, Pemerintah secara bertahap mengubah Program Rastra/Raskin menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dimulai di 44 Kota. Artinya di 44 kota tersebut, RTS yang selama ini menerima subsidi dalam bentuk natura beras akan diganti dengan *voucher* yang dapat ditukar bukan hanya dengan beras, namun juga dengan bahan pokok lainnya yang bukan hanya untuk pemenuhan karbohidrat. Ke depannya program penyaluran beras Pemerintah berasal dari penyaluran beras CBP dan Golongan Anggaran dimana kuantum jumlah penyalurannya tidak sebesar program Rastra/Raskin.

In 2018, the Government gradually changed the Rastra/Raskin Program to Non-Cash Food Aid (BPNT) which began in 44 cities. This means that in these 44 cities, RTS that have received subsidies in the form of rice will be replaced with the vouchers that can be exchanged not only for rice, but also with other staples which are not only for carbohydrate fulfillment. In the future, the Government's rice distribution program will come from the distribution of CBP rice and Budget Groups as the quantity of distribution is not as large as the Rastra/Raskin program.

➤ PT PERTANI (PERSERO) DAN PT SANG HYANG SERI

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), selain diikuti Perum Bulog, PT Pertani (Persero) juga ikut serta pada program BPNT tersebut dengan menyuplai beras di agen-agen penyalur BPNT. Selain BPNT, PT Pertani (Persero) juga tetap menyediakan benih yang bermutu dan unggul untuk petani.

Sebelum tahun 2018 PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri mendapatkan penugasan Pemerintah untuk menyalurkan benih bersubsidi. Namun pada tahun 2018 Pemerintah telah meniadakan program penugasan/subsidi benih baik kepada PT Pertani (Persero) maupun pada PT Sang Hyang Seri (Persero) dan mengganti dengan program/sistem e-katalog, sehingga kedua BUMN tersebut pada tahun 2018 harus bersaing dengan kompetitor secara komersial untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

Meskipun tidak ada lagi program subsidi benih, dari sisi penyediaan benih dan penggunaan benih bermutu dan varietas unggul merupakan salah satu pendorong tercapainya ketahanan pangan karena dapat memberikan hasil panen dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Untuk mencapai kondisi tersebut, Kementerian BUMN terus mendorong kedua BUMN tersebut untuk tetap dapat memproduksi benih bermutu dan varietas unggul dengan kualitas yang baik dan mempersiapkan diri bertarung di pasar komersial antara lain dengan melakukan pemasaran di pasar benih umum (non subsidi) untuk tetap menjaga *going concern* perusahaan serta mendukung ketahanan pangan nasional.

➤ *PT PERTANI (PERSERO) AND PT SANG HYANG SERI*

Non-Cash Food Aid Program (BPNT), besides participated by Perum Bulog, PT Pertani (Persero) also participated in the BPNT program by supplying rice to BPNT distributor agents. Besides BPNT, PT Pertani (Persero) also provides high quality and superior seeds to farmers.

Before 2018, PT Pertani (Persero) and PT Sang Hyang Seri were assigned by Government to distribute subsidized seeds. However, in 2018, Government eliminated assignment/subsidized seeds programs from PT Pertani (Persero) and PT Sang Hyang Seri (Persero) and replaced it with E-catalog program/system, so that in 2018, both SOEs must commercially compete with competitors to carry out their business activities.

Despite no other subsidized seeds programs, seeds provision and use of quality seeds and superior varieties are some of the boosters in achieving food resilience because it can provide highly productive and good quality harvests. To achieve such condition, Ministry of SOEs keeps encouraging both SOEs to continuously produce excellent quality seeds and superior varieties and prepare them to compete in commercial market, among others, by conducting marketing in general seeds market (non-subsidized) in order to keep maintaining the companies' 'going concern' and support national food resilience.

National Defense
Pertahanan Nasional

Saat ini Indonesia tengah memperkuat pertahanan nasional melalui produk-produk unggulannya, yang diharapkan mampu memberikan efek manfaat bagi negara dan masyarakat banyak pada umumnya. Salah satunya melalui Pesawat N219 yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI. Pesawat N219 memiliki nilai-nilai strategis untuk memperkuat pertahanan nasional dari produk-produk luar negeri, khusunya dalam industri pesawat terbang. Nilai strategis yang dimaksud adalah:

- Adanya kebutuhan peningkatan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau (RPJMN 2015 – 2019; Buku III Agenda Pembangunan Wilayah)
- Peningkatan aksesibilitas untuk menghubungkan daerah tertinggal dengan kawasan strategis melalui pembangunan sarana serta pelayanan penerbangan perintis (RPJMN 2015 – 2019; Buku III Agenda Pembangunan Wilayah).
- Menjalankan amanat UU no 1 tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional yang mendukung pengembangan Industri Dirgantara Nasional

Pesawat N219 ini dirancang untuk mampu dioperasikan di daerah terpencil dan sulit dijangkau, sehingga mampu memenuhi nilai-nilai strategis diatas secara efektif dan efisien.

At present, Indonesia is strengthening the national defense through its best products, which are expected to provide a beneficial effect for the country and many people in general. One of them was through Airplane N219 produced by PT Dirgantara Indonesia (Persero) or PTDI. The N219 aircraft has strategic values to strengthen national defense from foreign products, especially in the aircraft industry. The strategic values are:

- *The need for increased connectivity between medium cities and small towns, between small towns and villages, and between islands (RPJMN 2015 - 2019; Book III Regional Development Agenda)*
- *Increased accessibility to connect disadvantaged areas with strategic areas through the construction of pioneering aviation facilities and services (RPJMN 2015 - 2019; Book III Agenda for Regional Development).*

- *Carrying out the mandate of Law No. 1 of 2009 and Presidential Regulation No. 28 of 2008 concerning National Industrial Policy which supports the development of the National Aerospace Industry*

The N219 aircraft is designed to be able to be operated in remote and inaccessible areas, to be able to fulfill the aforementioned strategic values effectively and efficiently.



DAERAH DENGAN ELEVASI TINGGI
Areas with High Elevation



WAKTU OPERASI BANDARA YANG SINGKAT
Short operating time in airport



FASILITAS BANDARA TERBATAS
Limited Airport Facilities



TAKE-OFF LANDING PADA LANDASAN PENDEK
Take-off Landing on a short runway



CUACA YANG SULIT DIPREDIKSI
Unpredictable Weather

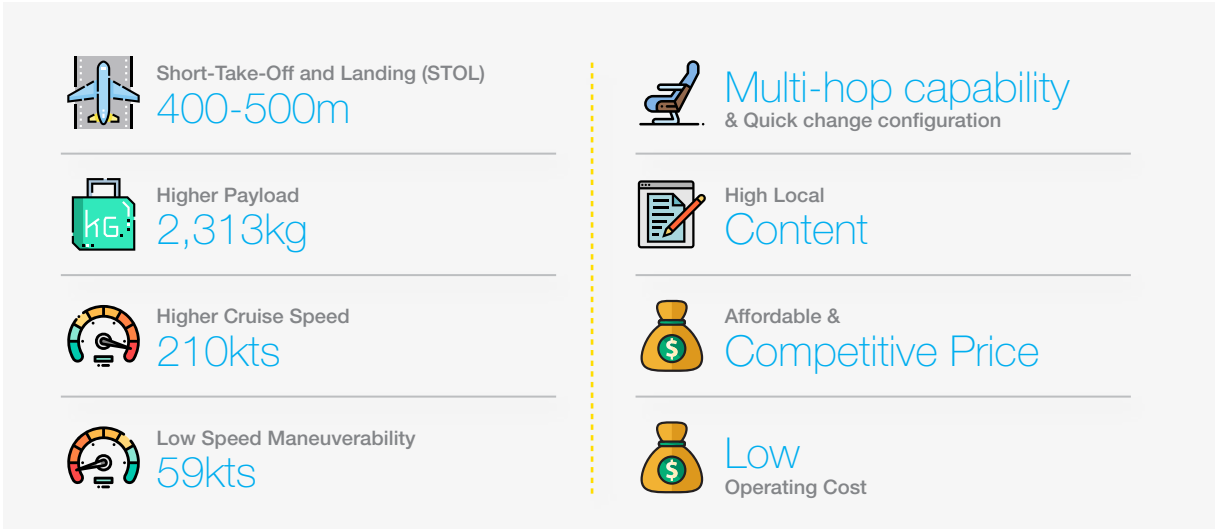


KONDISI GEOGRAFIS YANG EKSTIM (WILAYAH PEGUNUNGAN)
Extreme Geographical Condition (Mountainous Area)

Pesawat N219 merupakan pesawat perintis berdasarkan CASR 23 category, dengan kapasitas 19 penumpang. N219 di kembangkan oleh PTDI yang bekerjasama dengan LAPAN dan telah dimulai sejak 2014. N219 akan disertifikasi oleh DGCA dan EASA (Europe), dengan support Airbus Group.

The N219 aircraft is a pioneer aircraft based on CASR 23 category, with a capacity of 19 passengers. N219 is developed by PTDI in collaboration with LAPAN and has been started since 2014. N219 will be certified by DGCA and EASA (Europe), with the support of Airbus Group.

KEMAMPUAN N219 DALAM MENJAWAB TANTANGAN
N219 Ability to Respond to Challenges

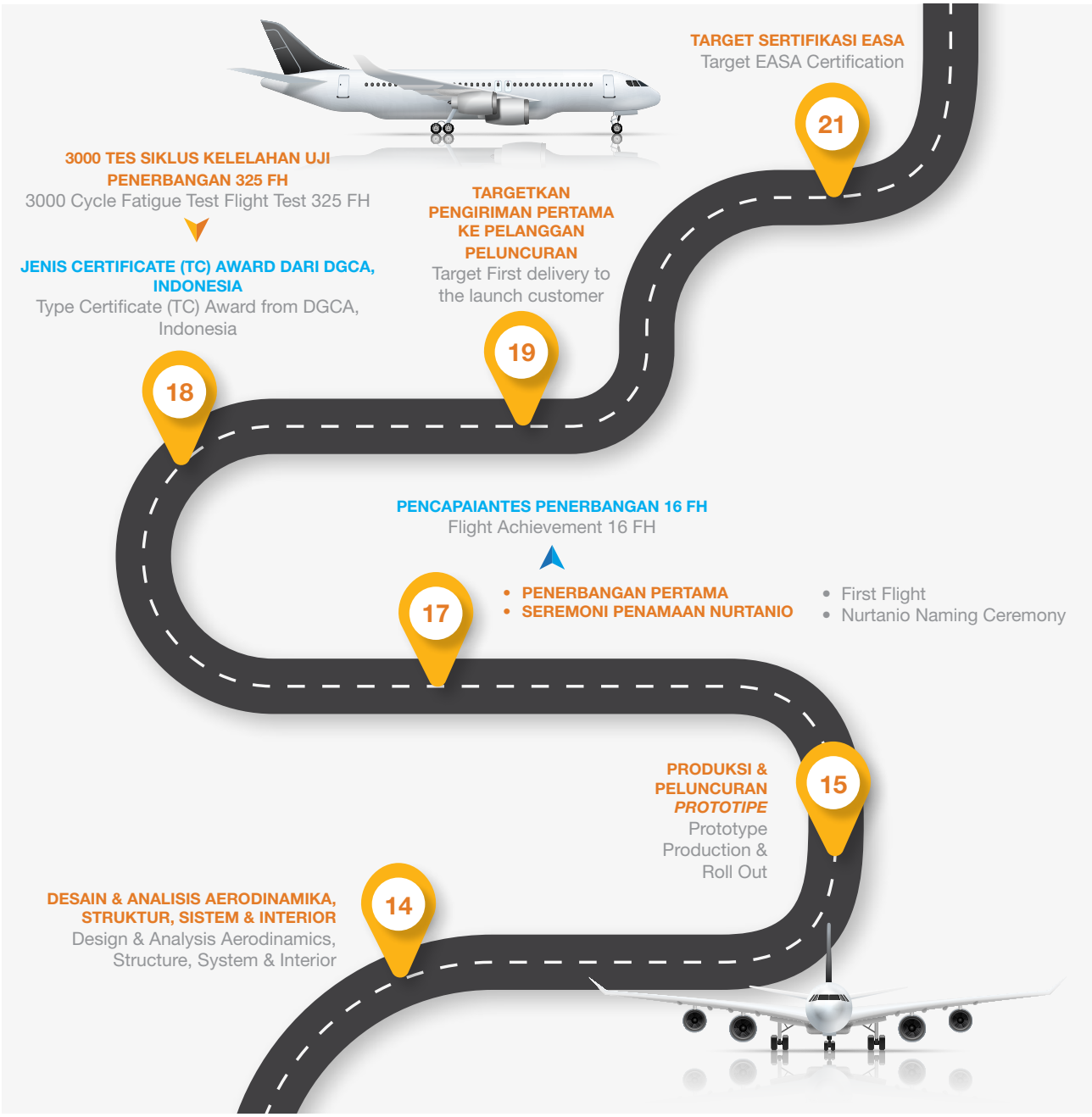


Produksi massal dilakukan setelah N219 mendapatkan sertifikat pasca melakukan uji terbang hingga 300 jam dan uji ketahanan. Pesawat yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Presiden Joko Widodo ini akan melalui proses uji terbang yang ditargetkan selesai pada kuartal III-2019 yang kemudian dilanjutkan dengan proses produksi.

Perlu diketahui, sertifikasi adalah proses verifikasi untuk memastikan pesawat aman untuk digunakan masyarakat. Untuk mendapatkan sertifikasi tidak hanya dengan menerbangkan pesawat selama 300 jam, tapi juga melakukan *development flight test* untuk mengetahui apakah performa pesawat sesuai rancangan. Kemudian dilanjutkan dengan proses *certification flight test* sebagai verifikasi akhir dari otoritas dalam hal ini Kementerian Perhubungan terhadap keamanan pesawat.

Mass production was carried out after N219 conductED flight tests of up to 300 hours and endurance tests and obtained a certificate. The aircraft, which is one of the National Strategic Projects (PSN) of President Joko Widodo's government, will go through a flight test process which is targeted to be completed in the third quarter of 2019. Further, it is followed by the production process.

It is worth to mention that the certification is a verification process to ensure the aircraft is safe for public use. To get a certification, the aircraft is not only required to fly for 300 hours, but also take a development flight test to find out whether the aircraft's performance is in accordance with the design. Afterwards, it is proceeded with the certification flight test as the final verification of the authority by the Ministry of Transportation on aircraft security.



Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, oleh karena itu pemerintah bersama berbagai pihak terkait terus fokus mengembangkan industri pesawat terbang di Indonesia. Sehingga pesawat komersial sangat penting bagi Indonesia karena merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Mengingat kondisi geografis Indonesia sangat memerlukan pesawat untuk konektivitas antar pulau.

Indonesia is the largest archipelagic country in the world consisting of 17,504 islands. Therefore, the government and many related parties continue to focus on developing the aircraft industry in Indonesia. Thus, the commercial aircraft is vital for Indonesia as it is the backbone of economic growth. Given to the Indonesian geographical condition, it is in dire need of a plane for inter-island connectivity.

MANFAAT KEHADIRAN N219 UNTUK INDONESIA
Benefits of N219 Presence for Indonesia

MENINGKATKAN STANDAR INDUSTRI DALAM NEGERI
Meningkatkan standar kapabilitas industri dalam negeri untuk memenuhi regulasi/ persyaratan yang sesuai dengan standar Industri Dirgantara

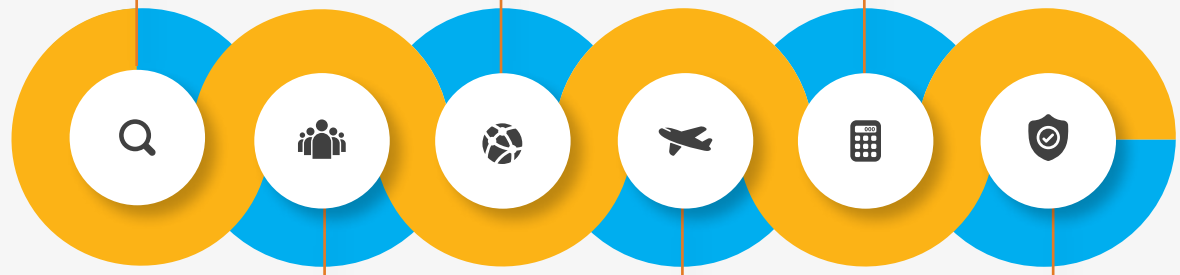
IMPROVE STATE INDUSTRY STANDARDS
Increasing the standard capability of domestic industries to meet regulations/requirements that are in accordance with the Aerospace Industry standard

KONEKTIVITAS NASIONAL
Meningkatkan konektivitas di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) memberi akses ke daerah pedalaman untuk mengurangi biaya logistik, kesehatan dan pariwisata

NATIONAL CONNECTIVITY
Enhancing connectivity in the 3T area (Leading, Outermost, Disadvantaged) gives access to rural areas to reduce logistics, health and tourism costs

POTENSI EKONOMI UNTUK INDUSTRI DALAM NEGERI
Untuk memenuhi kebutuhan pasar, PTDI memerlukan massive outsourcing yang akan membuka peluang bisnis bagi industri manufaktur lokal untuk pembuatan komponen di dalam negeri. Peningkatan kandungan lokal ini akan memberi kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja & inudstri pendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional

ECONOMIC POTENTIAL FOR DOMESTIC INDUSTRY
To meet market needs, PTDI requires massive outsourcing which will open business opportunities for local manufacturing industries to manufacture components domestically. This increase in local content will provide wider opportunities for supporting workers & employees to achieve national economic growth



MENUMBUHKAN INDUSTRI PENERBANGAN NASIONAL
Meliputi: industri utama penerbangan (PT DI), industri pendukung (avionic & elektronika, mekanika, manufacturing & permesinan, karet & ban, interior dll) dan industri pengoperasian pesawat terbang (*airliner, air charter, cargo*, maupun penumpang)

GROWING THE NATIONAL FLIGHT INDUSTRY
Includes: main flight industries (PT DI), supporting industries (avionic & electronics, mechanics, manufacturing & machinery, rubber & tires, interior etc.) and aircraft operation industries (airliners, air charter, cargo and passengers)

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN NASIONAL DALAM PENGUASAAN TEKNOLOGI TRANSPORTASI UDARA
Melalui penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan dan sinergi antara Litbang, Industri, dan Institusi Pendidikan

IMPROVING NATIONAL INDEPENDENCE IN CONTROL OF AIR TRANSPORTATION TECHNOLOGY
Through continuous research and development and synergy between R&D , Industry, and Educational Institutions

KESELAMATAN
MeningkatKan jaminan keselamatan penumpang dengan mengoperasikan pesawat baru

SAFETY
To Increase guarantee of passenger safety by operating new aircraft

Modern Industrial Estate
Kawasan Industri Modern

Pemerintah terus memacu pelaksanaan program pembangunan yang berbasis kepada kewilayahan sehingga terjadi pemerataan ekonomi nasional atau terwujudnya Indonesia sentris. Salah satu program prioritas yang didorong adalah pembangunan kawasan industri terutama di luar Jawa. Pengembangan kawasan industri saat ini dituntut harus melakukan pengelolaan secara profesional baik pada aspek manajemen, infrastruktur dan fasilitas penunjang serta pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu, konsep kawasan industri ke depannya harus mampu melakukan terobosan yang strategis untuk mampu bersaing di pasar global, melalui konsep Kawasan Industri Modern. Kawasan Industri Modern dirancang sedemikian rupa agar memiliki infrastruktur dan fasilitas yang terintegrasi untuk membantu pengembangan dan operasional kebutuhan industri didalamnya.

The government continues to accelerate the implementation of regional-based development programs to boost the national economic equality or the realization of Indonesia centric. One of the priority programs is the development of industrial estates, especially outside Java. The development of industrial estates is currently required to professionally manage the aspects of management, infrastructure and supporting facilities, and environmental management. Therefore, the concept of industrial estates in the future must be able to make a strategic breakthrough to compete in the global market, through Modern Industrial Estates. Modern Industrial Estates are designed in such a way as to have the integrated infrastructure and facilities to assist the development and operational needs of the industry.

Sebagai salah satu dari Proyek Strategis Nasional, Pemerintah tengah mengembangkan Kawasan Industri Medan menjadi Kawasan Industri Modern melalui PT Kawasan Industri Medan (Persero). Sejak didirikannya kawasan ini, seiring dengan tingginya minat investor untuk menanamkan investasinya di Sumatera Utara, PT KIM (Persero) terus melakukan pengembangan lahan. Saat ini luas Kawasan yang dikelola oleh PT KIM adalah seluas 1.060 ha, dengan rincian : seluas 650 Ha merupakan Kawasan yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh PT KIM, sedangkan sisanya yaitu seluas 410 Ha adalah Kawasan milik pihak ketiga yang pengelolaannya dilakukan oleh PT KIM melalui pola kerjasama operasi (KSO).

As one of the National Strategic Projects, the Government is developing the Medan Industrial Area into a Modern Industrial Zone through PT Medan Industrial Estate (Persero). Since the establishment, along with the high interest of investors to invest in North Sumatra, PT KIM (Persero) continues to develop the land. Lately, total area managed by PT KIM is 1.060 hectares, with details: 650 hectares of area is owned and managed independently by PT KIM, while the rest, which is 410 hectares is owned by third party whose management is carried out by PT KIM through cooperative operation pattern (KSO).



PT KIM dengan transformasinya yang sekarang sudah mengaplikasikan *Smart Industrial Estate System* dan sistem pelaporan ERP dan digitalisasi atas servis infrastruktur siap memasuki Era industri 4.0 dan siap menerima investor dari manapun yang akan mempercepat laju investasi dan pertumbuhan ekspor di Indonesia.

Sebagai pintu masuk investasi Indonesia di bagian barat, PT KIM (Persero) bertransformasi menjadi kawasan industri modern dengan layanan yang terintegrasi baik dari segi infrastruktur dasar seperti pengolahan limbah, listrik, gas juga aspek keamanan, dan layanan logistik. PT KIM (Persero) juga mengaplikasikan *Smart Industrial Park Solution* (SIPS) guna menunjang interaksi langsung atas sejumlah laporan seperti munculnya banjir di kawasan, aspek keamaan, dan berbagai hal lainnya yang bisa dilihat langsung melalui sebuah aplikasi khusus.

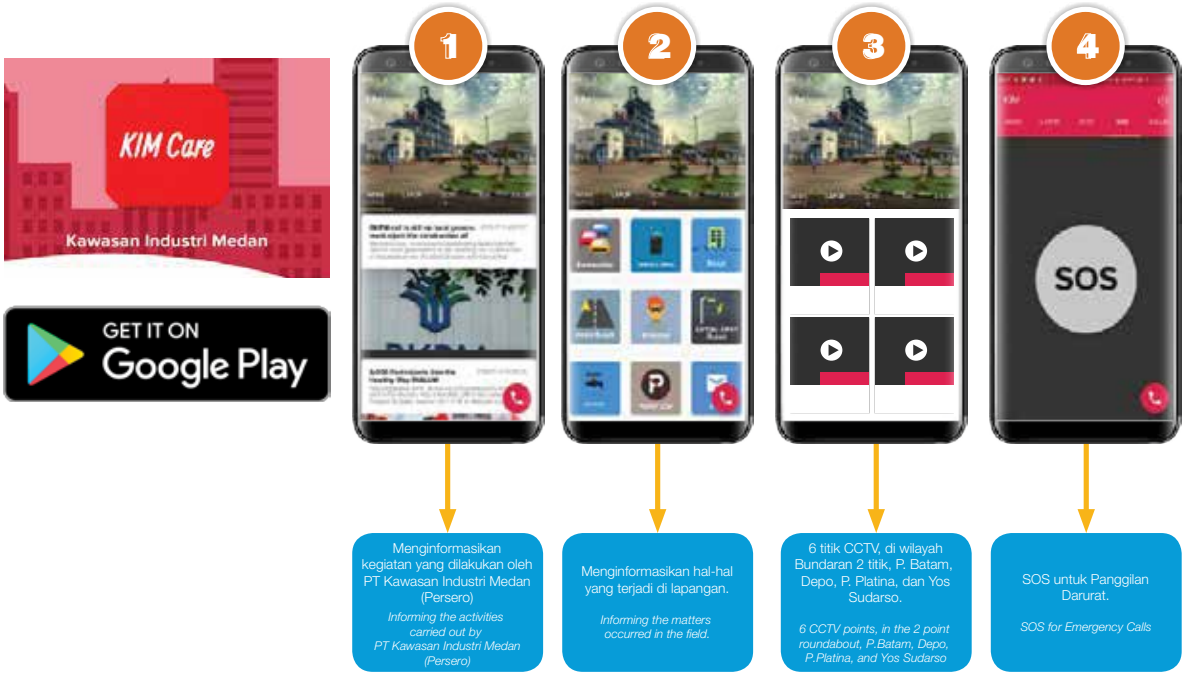
Program pendukung making Indonesia pun sudah diterapkan di KIM, dimana setiap laporan business process sudah bisa dilakukan melalui *gadget* dan *realtime*. PT KIM (Persero) juga telah mempunyai KIM care yaitu sistem *window transaction, window communication* antara mitra industri dengan manajemen kawasan, sebagai bentuk peningkatan palayanan yang diiringi dengan perkembangan teknologi saat ini.

PT KIM with its transformation has now applied the Smart Industrial Estate System, ERP reporting system, and digitalization of infrastructure services. PT KIM is ready to enter the Industrial Age 4.0 and is ready to accept investors across the regions that will accelerate the pace of investment and export growth in Indonesia.

As the gateway to linvestment in the western Indonesia, PT KIM (Persero) transformed into a modern industrial area with integrated services in basic infrastructure such as waste treatment, electricity, gas as well as security aspects, and logistics services. PT KIM (Persero) also applies Smart Industrial Park Solution (SIPS) to support the direct interaction of reports such as the emergence of floods in the region, security aspects, and other things that can be accessed directly through the application.

The Indonesian making support program has also been implemented in KIM as every business process report can be done through gadgets by realtime. PT KIM (Persero) also has KIM care, a window transaction and window communication systems between the industry partners and regional management, as a form of increasing service accompanied by current technological developments.

SMART ESTATE FACILITIES KIM





08

BUMN HADIR UNTUK NEGERI
SOES PRESENT FOR THE COUNTRY

BUMN TERUS BERSINERGI UNTUK MENUMBUHKAN RASA BANGGA BERBANGSA DAN BERTANAH AIR KE SELURUH PELOSOK NEGERI. PROGRAM BUMN HADIR UNTUK NEGERI MENUNJUKKAN BAHWA NEGARA HADIR DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT SECARA LANGSUNG MELALUI KEHADIRAN BUMN DI PROVINSI-PROVINSI.

SOEs continually synergize to foster a sense of pride and love throughout the country. The Presence of SOEs to the Nation program demonstates the direct presence of state in the midst of society through the presence of SOEs in the provinces.



Weaving Sustainable Development
Merajut Pembangunan yang Berkesinambungan

Sejak 2015 Kementerian BUMN bersama BUMN terus melakukan pembangunan berkesinambungan dan mensejahterakan masyarakat melalui "BUMN Hadir untuk Negeri".

Since 2015, Ministry of SOEs, along with SOEs, keeps conducting sustainable development that prospers community through "SOEs Present for the Country".

Melalui program ini, BUMN terus bersinergi untuk menumbuhkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air ke seluruh pelosok negeri. BUMN Hadir Untuk Negeri yang telah berjalan selama empat tahun semakin menunjukkan bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat secara langsung melalui kehadiran BUMN di provinsi-provinsi. Kehadiran BUMN di seluruh provinsi di Indonesia diharapkan dapat menjadi pendorong pengembangan ekonomi di daerah khususnya wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

Through this program, SOEs keeps synergizing to foster pride in the nation and motherland to all over the country. SOEs Present for the Country that has been running for four years shows that the nation is present among the community directly through the presence of SOEs in provinces. The presence of SOEs in provinces in Indonesia is expected to encourage regional economic development especially 3T areas (Frontier, Outermost and Disadvantaged).

Hal ini dilakukan, karena BUMN sadar bahwa Indonesia merupakan sebuah negeri yang kaya. Setiap sudut dihiasi dengan keragaman. Budaya kita pun tak terhitung jumlahnya. Suku, ras, agama, serta bahasa ibu yang ribuan, membuat bangsa ini semakin kuat. Aneka potensi alam pun terbentang dari Sabang ke Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote. Semangat inilah yang terus ada di program "BUMN Hadir untuk Negeri".

The efforts are carried out because SOEs realize that Indonesia is wealthy and prosperous nation. Every corner in this country is decorated with diversity. Cultures are countless with thousands of tribes, races, religions and mother tongues, making this nation stronger. Various natural resources are spread from Sabang to Merauke, from Miangas to Rote Island. This energy remains inside "SOEs Present for the Country" program.

Pembangunan demi pembagunan terus dilakukan secara sinergi dan bergandengan tangan bersama masyarakat. Mulai dari kota, kabupaten, hingga ke pelosok dusun-dusun di Tanah Air, semua diperhatikan secara seksama. Di bidang pembangunan masyarakat, "BUMN Hadir untuk Negeri" juga menggelar Siswa Mengenal Nusantara. BUMN mengirim ratusan siswa dari seluruh provinsi di Indonesia setiap tahunnya untuk saling bertukar informasi dan budaya. Misalnya, siswa dari Provinsi Aceh terbang ke Provinsi Papua, dan siswa dari Provinsi Papua terbang ke Provinsi Aceh. Semangat inilah yang ingin kami bagi sebagai bentuk pembangunan berkesinambungan.

Developments keep progressing with synergy and community solidarity. Everything is carefully maintained, from cities, districts, to remote villages in the country. In the field of community development, "SOEs Present for the Country" also organizes Students Know the Archipelago. SOEs send hundreds of students from all over provinces in Indonesia in every year to share information and culture. For instance, a student from Aceh Province flies to Papua and vice versa. This is the energy that we want to share as a manifestation of sustainable development.

Employees' Home Improvement
Bedah Rumah Karyawan



Implementasi salah satu Misi Kementerian BUMN yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, Kementerian BUMN dan BUMN membuat "Program Rumah Bagi Karyawan BUMN 2018". Program tersebut bertujuan sebagai bentuk komitmen Kementerian BUMN dan BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan yang telah memberikan dedikasi dan loyalitas tinggi kepada BUMN. Disisi lain, untuk menjaga dan terus memupuk rasa kebanggaan di dalam diri karyawan sebagai bagian dari entitas dilingkungan BUMN.

Program ini dikhususkan untuk karyawan dengan *take home pay* yang masuk dalam kategori MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Program ini juga diberikan bagi karyawan Kementerian BUMN dan BUMN dengan masa kerja lebih dari 8 (delapan) tahun, untuk karyawan tetap, kontrak maupun *outsourcing*.

One of the implementation of Ministry of SOEs mission is to actualize high, advanced and prosperous living quality of Indonesian people and SOEs establishes "Houses for SOE Employees 2018". The program is a commitment of Ministry of SOEs and SOEs to improve prosperity of employees who have given great dedication and loyalty to SOEs. On the other side, the program aims to maintain and continue fostering a sense of pride within employees as part of the entity within the SOEs.

The program is devoted for take-home-pay employees included into MBR category (Low Income Community). The program is also given to employees of Ministry of SOE's and SOEs with more than 8 (eight) service years, whether they are permanent, contract or outsourcing employees.

TUJUAN

- Implementasi tanggung jawab sosial Kementerian BUMN dan BUMN terhadap internal organisasi khususnya karyawan.
- Upaya menanamkan rasa bangga dalam diri karyawan sebagai bagian dari Kementerian BUMN dan BUMN.
- Pelaksanaan program diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan difasilitasi oleh seluruh BUMN mengenai peran Kementerian BUMN dan BUMN sebagai Agen Pembangunan (*Agent of Development*) untuk turut serta "Membangun Kapasitas Nasional (*National Capacity Building*)".
- Para penerima manfaat program maupun pemangku kepentingan diharapkan akan memiliki pandangan yang baik tentang Kementerian BUMN dan seluruh BUMN Indonesia, yang telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa, melalui kerja nyata yang berdampak langsung.

Sumber dana program berasal dari dana CSR dan BL, dengan skema:

- Karyawan organik dari dana CSR
- Karyawan anorganik dari dana Bina Lingkungan atau CSR

PURPOSES

- *Implementation of the Ministry of SOEs and SOEs social responsibility towards internal organizations, especially employees.*
- *Efforts to instill pride in employees as part of the Ministry of SOEs and SOEs.*
- *The program implementation was initiated by the Ministry of SOE and facilitated by all SOEs regarding the role of the Ministry of SOEs and SOEs as Agents of Development to participate in "National Capacity Building".*

- *Program beneficiaries and stakeholders are expected to have a good view of the Ministry of SOEs and all Indonesian SOEs, which have played roles in improving the welfare of the nation, through real work that has a direct impact.*

The source of program funding comes from CSR and BL funds, with the scheme:

- *Organic employees from CSR funds*
- *Inorganic employees from Community Development or CSR funds*

BANTUAN PROGRAM KEPEMILIKAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KARYAWAN
Program Assistance Livable House Ownership for Employees

No	Kondisi Karyawan *Employees Condition*	Bentuk Bantuan *Assistance*	Nilai Bantuan *Assistance Value*
1	Belum memiliki tanah dan rumah *Not having land and houses yet*	DP hunian MBR yang disediakan BUMN, sinergi Pemerintah dan BPJS TK *Initial fund of MBR houses provided by SOEs, Government synergy and BPJS TK*	Bantuan maksimal Rp50 juta *Maximum Assistance worth IDR50 millions*
2	Memiliki tanah belum memiliki sertifikat *Having lands, not having certificates*	Dibangunkan rumah dan sertifikat *House and land certificates*	
3	Memiliki tanah dan memiliki rumah namun belum memiliki sertifikat *Having land and houses but not having certificates*	Sertifikasi *Certificates*	
4	Memiliki rumah dan tanah namun tidak layak huni *Having inhabitable houses and land*	Renovasi rumah *House renovation*	
5	Memiliki KPR namun belum lunas *Having Unpaid KPR*	Subsidi cicilan dari BUMN atau restrukturisasi angsuran *Subsidies for installments from SOEs or installment restructuring*	

Students Know The Archipelago
Siswa Mengenal Nusantara

Program BUMN Hadir untuk Negeri yang dilakukan di dunia pendidikan salah satunya adalah program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dengan melibatkan seluruh BUMN. Para peserta kegiatan diharapkan memiliki pemahaman nyata terhadap kekayaan alam dan bangsa serta potensi Indonesia yang luar biasa melalui pertukaran informasi dan pengalaman langsung di lapangan. Para peserta program ini diharapkan memiliki pandangan yang baik terhadap Kementerian BUMN selaku pengelola BUMN dan seluruh BUMN di Indonesia yang dalam kegiatan operasionalnya mengambil peran untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui kiprah nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

One of the SOEs present for nation program in education sector is Students Know The Archipelago (SMN) which conducted by the Ministry of SOEs and also involving all SOEs. The participants are expected to have a real understanding the wealth of nature and nation and the extraordinary potential of Indonesia through the exchange of information and direct experience in the field. The participants of this program are expected to have a good view of the Ministry of SOEs as the manager of SOEs and all SOEs in Indonesia, which in their operational activities play a role to improve the nation's competitiveness through real action that has a direct impact on society.

Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebijakan dan kebajikan kepada para pesertanya tentang arti keberagaman bangsa dan budaya Indonesia dengan segala perbedaannya yang bermuara pada utuhnya wawasan kebangsaan calon-calon pemimpin masa depan sehingga mereka memiliki rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai bangsa yang besar dan mampu bersaing dalam ranah global.

This program aims to instill policy values and virtues to the participants about the meaning of the diversity in Indonesia with all the differences that lead to the full national insight of future leaders so that they have confidence and pride as a great nation and able to compete in the global realm.

Menciptakan generasi muda berwawasan Nusantara yang baik dan memiliki jiwa Bhineka Tunggal Ika adalah salah satu tujuan diadakannya program Siswa Mengenal Nusantara, dengan mengikuti program ini diharapkan rasa bangga dan cinta Tanah Air sejak dini sudah tertanam di dalam jiwa para siswa SMA/SMK/SLB. Keragaman kekayaan Nusantara dan potensi daerah diperkenalkan melalui interaksi langsung siswa dengan komponen Pemerintahan dan masyarakat di provinsi yang dikunjungi para calon pemimpin masa depan ini.

Creating a good young generation with Indonesian insight and having the soul of Unity in Diversity is one of the goals of the program of Students Know the Archipelago, by participating in this program, it is expected that the pride and love of the Motherland will be embedded in the souls of high school/vocational school/special school. The diversity of Indonesia's wealth and regional potential is introduced through the direct interaction of students with the components of Government and society in the provinces visited by future leaders.

Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk memenuhi dahaga pengetahuan para peserta SMN, mulai dari mengunjungi tempat-tempat bersejarah, menyaksikan keindahan alam, melihat potensi alam, merasakan kuliner khas setempat, hingga ikut membuat kerajinan khas provinsi yang mereka kunjungi. Semua kegiatan ini mereka laksanakan untuk mendapatkan pengalaman langsung mengenai keindahan budaya Indonesia yang beragam.

Various activities were carried out to fulfill the knowledge thirst of the SMN participants, starting from visiting historical places, witnessing the beauty of nature, seeing the natural potential, experiencing local specialties, to participating in making the province's unique handicrafts they visited. All of these activities are carried out to get the first-hand experience of the diverse beauty of Indonesian culture.

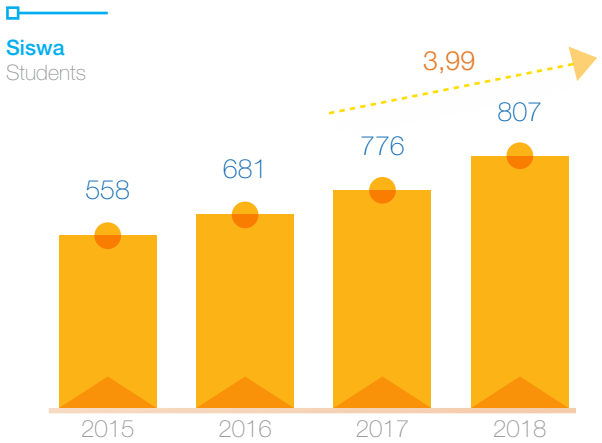
Peserta kegiatan SMN ini terdiri dari Pelajar SMA/SMK/SLB kelas XI dari sejumlah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi tersebut. Untuk Provinsi yang mempunyai kurang dari 18 Kabupaten/Kota, jumlah peserta minimal 20 siswa yang mewakili seluruh Kabupaten/Kota. Dari seluruh peserta yang dikirimkan, ditambah tiga orang yang merupakan siswa penyandang disabilitas dan bersekolah di SLB.

The participants consist of high school/vocational school/ special school students of class XI from a number of regencies and cities in the province, students from each district/city. For provinces that have less than regencies/ cities, the number of participants is at least 20 students representing all districts/cities. Of all the participants sent, three were students with disabilities and attended SLB.

Program ini pertama dilaksanakan pada 2015 dengan mengirimkan sebanyak 558 siswa sebagai peserta, di tahun-tahun berikutnya jumlah peserta selalu meningkat karena melihat antusiasme para peserta dan keberhasilan program awal SMN, untuk itu pada 2016 jumlah peserta menjadi 681 siswa, di tahun 2017 jumlah peserta menjadi 776 siswa dan untuk 2018 jumlah peserta menjadi sebanyak 853 siswa di seluruh provinsi dan telah dikirimkan ke daerah lain selama satu pekan pada pekan ketiga atau keempat bulan Agustus tahun 2018. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, tercatat total peserta yang mengikuti program Siswa Mengenal Nusantara adalah sebanyak 2.822 siswa.

The program was first held in 2015 by sending 558 students as participants, in the following years the number of participants always increased because of the enthusiasm of the participants and the success of the initial SMN program, for 2016 the number of participants became 681 students, in 2017 the number of participants became 776 students and for 2018 the number of participants will be as many as 853 students in all provinces and have been sent to other regions for one week in the third or fourth week of August 2018. In the period of 2015 to 2018, the total number of participants participating in the Students Know the Archipelago program are 2,822 students.

Jumlah Peserta Siswa Mengenal Nusantara 2015-2018
Total Students Know the Archipelago Participants 2015-2018



Free Homecoming Program
Mudik Gratis

Mudik Gratis bersama BUMN merupakan salah satu kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri yang dilakukan Kementerian BUMN dan BUMN dalam memfasilitasi masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing. Program ini digagas Kementerian BUMN dengan menyediakan fasilitas kendaraan sepeti Bus, Kereta Api, Kapal Laut maupun Pesawat Udara yang disediakan secara gratis bagi masyarakat yang dapat mengantarkan hingga ke kampung halaman mereka masing-masing.

Free Homecoming program with SOEs Present for the Country activities organized by Ministry of SOEs and SOEs in facilitating community that are keen to be back to their hometown. The program was initiated by Ministry of SOEs by providing certain vehicles for free, such as Buses, Trains, Ship and Airplanes that can take them to their homes.

Tujuan program Mudik Gratis adalah untuk menekan kepadatan, serta membantu masyarakat untuk kegiatan mudik yang lebih aman. Menteri BUMN melalui surat nomor: SK-30/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 telah menetapkan BUMN-BUMN Pelaksana Mudik Gratis tahun 2018, yang diketuai oleh Direktur Utama PT Jasa Raharja. Untuk meningkatkan keselamatan perjalanan, Jasa Raharja menggandeng Dinas Perhubungan melakukan pengujian kelaikan bus dan cek kesehatan pengemudi.

The purpose of Free Homecoming Program is to suppress population density and help community in their ways to home safely. Ministry of SOEs through letter No: SK-30/MBU/01/2018 dated January 22, 2018 has stipulated SOEs as Free Homecoming Organizers 2018 chaired by President Director of PT Jasa Raharja. To improve travel safety, Jasa Raharja cooperates with the Transportation Agency to conduct bus feasibility tests and driver health checks.

Program Mudik Gratis ini bertujuan untuk mengalihkan pemudik yang biasa menggunakan sepeda motor ke moda transportasi yang lebih nyaman dan aman seperti dengan menggunakan Bus, Kereta Api atau Kapal Laut dan Udara. Kegiatan ini juga menjadi upaya dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas jalan.

The Free Homecoming Program aims to distract traveling communities who change their transportation modes from motorcycles into more comfortable and safer transportation modes such as Buses, Trains, Ships or Airplanes. The activity is an effort to suppress the number of road traffic accidents.

Di tahun 2018, realisasi jumlah penumpang yang mengikuti program Mudik Gratis mencapai 102,1%, yaitu sebanyak 204.146 penumpang dari yang ditargetkan sebanyak 200.000 penumpang, atau naik 72,68% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, sebanyak 118.220 penumpang. Adapun rinciannya adalah sebanyak 3.394 bus dengan 162.751 penumpang, kereta api sebanyak 50 rangkaian dengan 11.574 penumpang, dan kapal laut sebanyak 118 *trip* dengan 27.830 penumpang, serta pesawat udara sebanyak 113 *flight* dengan 1.991 penumpang. Dengan jumlah yang meningkat ini dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pada saat mudik.

In 2018, the realization of total passengers that enrolled the Free Homecoming Program reached 102.1% or about 204,146 passengers of targeted 200,000 passengers or increasing 72.68% compared to realization in 2017, amounted to 118,220 passengers. The details were 3,394 buses with 162,751 passengers, 50 trains with 11,574 passengers, and 118 ships with 27,830 passengers, and 113 aircraft with 1,991 passengers. With this increasing number, it can reduce the use of motorized vehicles during homecoming.

REALISASI MUDIK GRATIS BUMN 2017-2018
Realization of SOEs Free Homecoming 2017-2018

No.	Uraian *Descriptions*	Jumlah *Total*		Aktivitas *Activities*
		2017	2018	
1.	BUMN Pendukung *Supporting SOEs*	28	62	121,43%
2.	Jumlah Pemudik *Total Travelers*	118.220	204.146	72,68%
3.	Modal yang dipergunakan *Transportation Modes*			
	a. Armada Bus *Buses*	1.920	3.394	76,77%
	Penumpang Bus *Buses Passengers*	99.576	162.751	63,44%
	b. Rangkaian Kereta Api *Trains*	11	50	354,55%
	Penumpang Kereta Api *Trains Passengers*	6.264	11.574	84,77%
	c. Kapal Laut (*Trip*) *Ships (Trip)*	18	118	555,56%
	Penumpang Kapal Laut *Ships Passengers*	11.075	27.830	151,29%
	d. Pesawat Udara (*Flight*) *Airplanes*	24	113	370,83%
	Penumpang Pesawat Udara *Airplanes Passengers*	1.305	1.991	52,57%
4.	Total Kota Keberangkatan *Total Departure Cities*	22	79	259,09%
	a. Kota di Pulau Jawa *Cities in Java Island*	8	34	325,00%
	b. Kota di luar Pulau Jawa *Cities outside Java Island*	14	45	221,43%
5.	Total Kota Tujuan *Total Arrival Cities*	84	164	95,24%
	a. Kota di Pulau Jawa *Cities in Java Island*	70	80	14,29%
	b. Kota di luar Pulau Jawa *Cities outside Java Island*	14	84	500,00%

People's Business Loans (KUR) for MSMES
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Untuk UMKM

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran Pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh Pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, perternakan dan perkebunan.

The success of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia is inseparable from the support and role of the Government in encouraging lending to MSMEs. Various MSME credit/financing schemes launched by the Government are associated with economic development tasks and programs in certain business sectors, such as food security, livestock and plantations.

Peran Pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana.

The Government's role in these MSME loans schemes is on the side of providing state budget funds for the intended loans scheme interest subsidy, while the entire loans/financing fund (100%) comes from banks appointed by the government as executing banks.

Selain itu Pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.

In addition, the Government has a role in preparing MSMEs so that they can be financed by the scheme, establishing policies and business priorities that will receive loans, provide guidance and assistance during the loans period, and facilitate relations between MSMEs and other parties.

Di bidang peningkatan ekonomi kerakyatan, BUMN menjalankan program Inklusi Keuangan, melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM. Selama ini, bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, dan Bank BTN, sangat aktif terlibat dalam penyaluran kredit-kredit kecil tersebut, dengan dukungan asuransi BUMN yaitu PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo khususnya dalam penjaminan KUR.

In increasing people's economy, SOEs run a Financial Inclusion program, through the distribution of People's Business Loans (KUR) for MSMEs. So far, SOEs banks that are members of the Association of State-Owned Banks (Himbara), namely Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, and Bank BTN, are very actively involved in the distribution of these small loans, with the support of SOEs insurance, such as PT Askrindo (Persero) and Perum Jamkrindo especially in KUR guarantee.

Kebijakan pendanaan melalui penyaluran KUR tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi untuk para pengusaha ekonomi lemah dan UMKM pada kredit bank/nonbank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan Pemerintah.

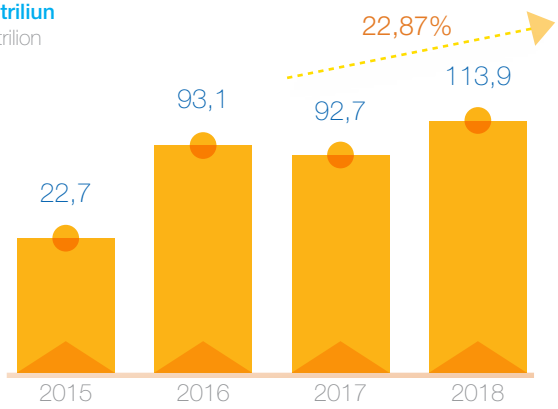
The funding policy through KUR distribution is aimed at expanding funding sources and facilitating weak economic entrepreneurs and MSMEs on bank/non-bank loans, increasing funding institutions and expanding their networks, providing funding facilities and helping MSMEs get financing and other financial services/products with Government guarantees.

Pada tahun 2018 jumlah KUR yang telah tersalur mencapai sebesar Rp113,9 triliun dengan jumlah nasabah atau Debitur KUR sebanyak 4,3 juta nasabah. Adapun penyaluran KUR pada tahun 2018 ini meningkat 22,87% dibandingkan dengan penyaluran tahun 2017 yang sebesar 92,7 triliun. Begitupun dengan jumlah nasabah atau Debitur KUR yang meningkat 10,26% dibandingkan tahun 2017 yang sebanyak 3,9 juta nasabah.

In 2018 the number of channeled KUR reached IDR113.9 trillion with 4.3 million customers or KUR Debtors. The KUR distribution in 2018 increased by 22.87% compared to the distribution in 2017 which amounted to 92.7 trillion. Likewise with the number of customers or KUR Debtors which increased 10.26% compared to 2017 which amounted to 3.9 million customers.

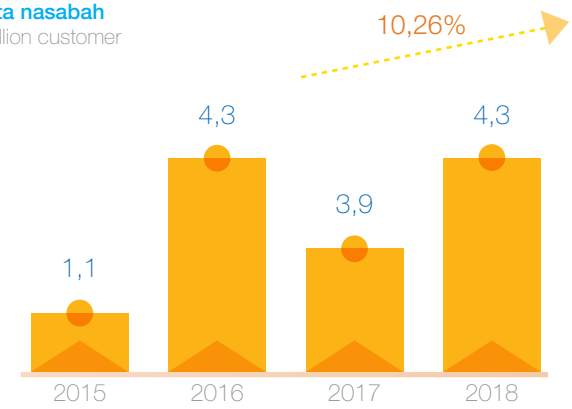
Nilai Penyaluran KUR 2015-2018
Total KUR Distribution 2015-2018

Rp-triliun
Rp-trilion



Debitur KUR 2015-2018
KUR Debtors 2015-2018

juta nasabah
million customer



MEKAAR and ULAMM
MEKAAR dan ULAMM

Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan program pembinaan khusus untuk ibu-ibu prasejahtera produktif *non-bankable*. Program Mekaar adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pelaku usaha mikro. Kementerian BUMN menugasi PT PNM (Persero), untuk membantu Pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan kaum perempuan pra sejahtera.

Mekaar (Fostering the Economy of the Prosperous Family) is a special guidance program for non-bankable productive poor mothers. The Mekaar Program is a group-based empowerment service for women micro-entrepreneurs. The Ministry of SOEs assigns PT PNM (Persero), to help the Government alleviate poverty through empowering pre-prosperous women.

BUMN hadir untuk terus memberikan dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mekaar PNM merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah bagi masyarakat kecil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, program Mekaar PNM sudah berada di hampir pelosok Nusantara dengan melibatkan ibu-ibu dari keluarga prasejahtera.

SOEs are present to continue to provide support for improving the welfare of the community. Mekaar PNM is a real manifestation of the government's partisanship for small communities in order to increase economic growth. Recently, the Mekaar PNM program is already in almost every corner of Indonesia by involving mothers from underprivileged families.

Mekaar memberikan peminjaman modal serta penanaman nilai penting bagi setiap nasabah untuk jujur dalam melakukan usahanya, disiplin dalam kehadiran disetiap pertemuan dengan kelompok dan juga mengangsur pinjaman serta kerja keras untuk terus mengembangkan usahanya.

Mekaar provides capital loans as well as planting important values for each customer to be fair in doing business, discipline in attendance at every meeting with the group and also repay loans and hard work to continue to develop their business.

Nasabah yang tergabung tak hanya nasabah yang sudah memiliki usaha, namun bagi nasabah yang ingin memulai usahanya kembali setelah mengalami kegagalan juga akan dibantu. Mekaar juga akan membantu untuk memberikan pinjaman modal bagi nasabah yang ingin membuka usaha. Tentu saja bantuan yang diberikan tidak hanya pinjaman modal saja tetapi juga pendampingan, sehingga nasabah yang tergabung dalam Mekaar merupakan nasabah yang berkomitmen untuk terus meningkatkan dan menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha.

Customers who are affiliated are not only customers who already have a business, but for those who want to initiate their business again after experiencing failure. They will also be assisted. Mekaar will also help provide capital loans for customers who want to open a business. By all means, the assistance provided is not only capital loans but also accompaniment, so that customers who are members of Mekaar are committed to continuously improving and growing the desire for entrepreneurship.

Sementara Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), menjadi gerai layanan di bawah satu atap atau "*One Stop Shopping*" bagi para pengusaha mikro dan kecil (UMK), yang dilengkapi dengan berbagai dukungan teknis bagi peminjam. Tujuannya adalah membantu usaha mikro dan kecil agar terus berkembang sekaligus mempercepat kemajuan usahanya. Dukungan tersebut meliputi pemberian konsultasi, pelatihan, pendampingan maupun pengelolaan keuangan dan akses pasar.

Meanwhile, the Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), is a one-stop-service outlet or "One Stop Shopping" for micro and small entrepreneurs (MSEs), which are equipped with various technical support for borrowers. The aim is to help micro and small businesses continue to grow while accelerating the progress of their business. The support includes the provision of consultation, training, mentoring and financial management and market access.

ULaMM merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil yang disertai bimbingan untuk mengembangkan usahanya. ULaMM merupakan model atau terobosan baru bagi PNM karena penyaluran pembiayaannya dilakukan secara langsung baik kepada perorangan atau pinjaman untuk Badan Usaha (PT, CV, Firma, dan lain-lain). Adapun kinerja program Mekaar dan UlaMM untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut.

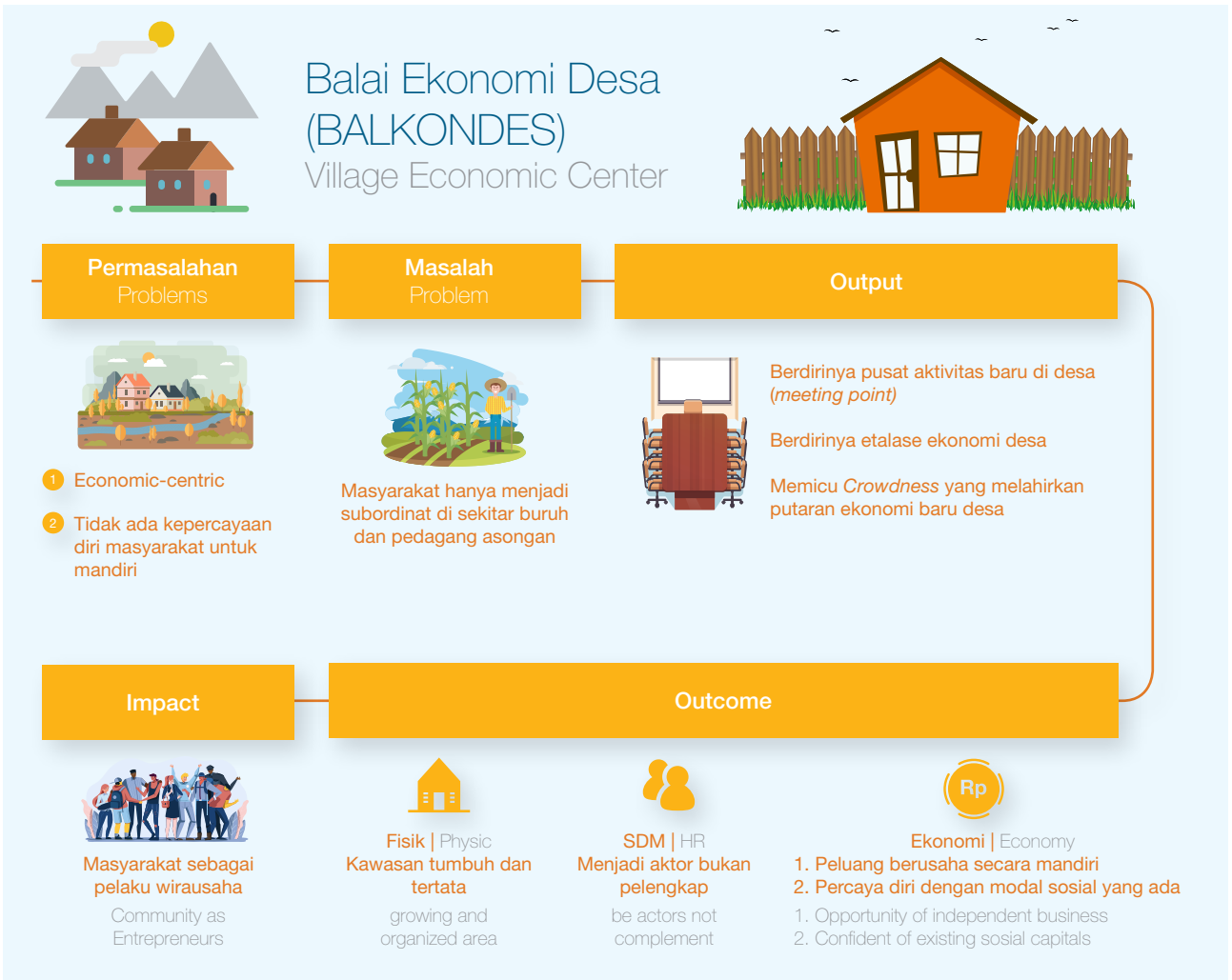
ULaMM is a capital loan service for micro and small businesses accompanied by guidance to develop their business. ULaMM is a new model or breakthrough for PNM because the distribution of funding is done directly either to individuals or loans to Business Entities (PT, CV, Firm, etc.). The performance of the Mekaar and UlaMM programs for 2018 is as follows:

No.	Uraian *Descriptions*	Bulan Desember 2018 *December 2018*		
		Mekaar	ULaMM	Total Mekaar dan ULaMM *Total Mekaar and ULaMM*
1	Jumlah Kantor Layanan *Total Service Office*	1.770	688	2.458
2	Akumulasi Jumlah Nasabah *Total Customers Accumulation*	6.797.713	302.131	7.099.844
3	Akumulasi Penyaluran (Rp Miliar) *Distribution Accumulation (IDR Billion)*	15.201	22.382	37.583
4	Jumlah Outstanding (Rp Miliar) *Total Outstanding (IDR Billion)*	5.752	5.941	11.693
5	Jumlah Nasabah *Total Customers*	4.057.129	68.521	4.125.650
6	Jangkauan Provinsi *Scope of Provinces*	30	29	34

BALKONDES
BALKONDES

Balkondes (Balai Ekonomi Desa) merupakan sebuah program bentukan BUMN yang akan dimanfaatkan sebagai sebuah etalase bagi perekonomian daerah. Balkondes akan memberikan ruang bagi Pemerintah desa maupun masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa.

Balkondes (Village Economic Center) is a SOEs-formed program that will be used as a storefront for the regional economy. Balkondes will provide space for the village government and the community to develop the economic potential in the village.



BUMN mendirikan Balkondes sebagai sebuah bentuk dukungan untuk menggenjot kunjungan wisatawan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia. Melalui Balkondes, masyarakat, khususnya desa, akan dipersiapkan untuk menyambut serta memberikan pelayanan maksimal bagi para wisatawan yang datang ke daerahnya. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada perbaikan ekonomi masyarakat sekitar.

SOEs establish Balkondes as a form of support to boost tourist arrivals in Indonesia. This is in line with the program launched by the Government of Indonesia. Through the Balkondes, the community, especially the villages, will be prepared to welcome and provide maximum service for tourists who come to their area. The increase in the number of tourist visits is expected to have a positive impact on the economic improvement of the surrounding community.



Balkondes merupakan salah satu program buatan BUMN selain kemitraan dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang berguna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Untuk mendukung program ini, BUMN juga membekali masing-masing Balkondes dengan BUMN sponsor.

Balkondes is one of the programs made by SOEs in addition to partnerships and CSR (Corporate Social Responsibility) that are useful to improve Indonesians' living quality. To support this program, SOEs also equip each Balkondes with SOEs sponsors.

Bentuk sinergi lain yang dibangun BUMN antara lain adalah dalam rangka mendukung program Pemerintah mewujudkan 10 Destinasi Wisata Unggulan dengan target untuk menggaet 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019. Selain itu, BUMN juga bersinergi melalui Program "BUMN Hadir untuk Negeri" untuk membangun Balkondes dan sejumlah rumah tinggal wisata (*homestay*) yang telah dijalankan di 20 desa di sekitar Candi Borobudur.

Other forms of synergy built by SOEs include supporting the Government's program to create 10 Leading Tourism Destinations with a target to attract 20 million foreign tourists in 2019. In addition, SOEs also synergize through the "SOEs Present for the Country" Program to build Balkondes (village economy center) and a number of tourist houses (homestays) that have been run in 20 villages around the Borobudur Temple.



Program ini didirikan sebagai bentuk dukungan BUMN untuk menggenjot kunjungan wisatawan ke Indonesia sebagaimana yang diprogramkan oleh Pemerintah. Melalui Balkondes ini, masyarakat disiapkan untuk menyambut wisatawan yang berkunjung ke daerahnya. Melalui program ini diharapkan dapat memberi dampak positif pada perbaikan tingkat ekonomi masyarakat.

Program ini dilaksanakan oleh 20 BUMN, antara lain PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Patra Jasa (Anak Usaha Pertamina), PT Jasa Raharja (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT

This program was established as a form of SOEs support to boost tourist visits to Indonesia as programmed by the Government. Through this Balkondes, the community is prepared to welcome tourists visiting their area. This program is expected to have a positive impact on improving the economic level of the community.

This program is carried out by 20 SOEs, including lain PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko (Persero) or Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Patra Jasa (Pertamina's Subsidiary), PT Jasa Raharja (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi

Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk.

Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk.

Konsep Pemberdayaan Balkondes Borobudur
Balkondes Borobudur Empowerment Concept



Hingga 2018, telah tersedia sebanyak 224 kamar *homestay* yang terdapat di 20 desa dengan 300 serapan tenaga kerja dari adanya Balkondes Borobudur tersebut. BUMN juga bersinergi untuk melakukan pembinaan melalui penyediaan sarana dan pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar, serta pemberian pendidikan *softskill* kepariwisataan dan keterampilan pengelolaan usaha turisme bagi masyarakat di sekitar *homestay*.

Until 2018, 224 homestay rooms were available in 20 villages with 300 labor absorption from the Borobudur Balkondes. SOEs also synergize to provide guidance through the provision of facilities and community empowerment in the surrounding area, as well as the provision of education on tourism soft skills and tourism business management skills for the communities around the homestay.

PROGRES PENGEMBANGAN BALKONDES BOROBUDUR
Balkondes Borobudur Development Progress

No	Desa *Villages*	BUMN Sponsor *SOEs Sponsors*	Status	Jml Kamar *Total Rooms*	Tagline	Potensi Unggulan *Potentials*
1	BIGARAN	PT. ANGKASA PURA I (Persero)	√	6	Coklat Ndeso	Olahan Coklat *Chocolate Processing*
2	KENALAN	PT. BANK MANDIRI (Persero)) Tbk	√	10	Gondopuro Wangi	Wisata Alam *Natural Tourism*
3	SAMBENG	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero)	√	9	Kampung Buah Eksotis Tropis	Tanaman Buah Lokal *Local Fruits Plants*
4	CANDIREJO	PT. SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk	√	10	EcoTourism	Wisata Alam *Natural Toursim*
5	NGARGOGONDO	PT. PEGADAIAN (Persero)	√	17	Desa Bahasa	Desa Bahasa *Languages Village*
6	WANUREJO	PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk	√	20	Kriya & Budaya	Kerajinan dan Seni Budaya *Hand Crafts and art and culture*
7	BOROBUDUR	PT. TAMAN WISATA CANDI (Persero)	√	23		
8	MAJAKSINGI	PT. JASA MARGA (Persero) Tbk	√	6	Desa Kopi	Kopi *Coffee*
9	TUKSONGO	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero) Tbk	√	20	*Digital Heritage Village*	
10	KARANGREJO	PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk	√	20	Kampung Palawija	Tanaman Organik *Organic Plants*
11	BUMIHARJO	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk	√	7	Kampung Dolanan Nusantara	Dolanan Nusantara
12	WRINGINPUTIH	PT. PERTAMINA (Persero)	√	20	Kampung Bambu Carangan	Kampung Bambu Klathakan *Klathakan Bamboo Village*

PROGRES PENGEMBANGAN BALKONDES BOROBUDUR
Balkondes Borobudur Development Progress

No	Desa *Villages*	BUMN Sponsor *SOEs Sponsors*	Status	Jml Kamar *Total Rooms*	Tagline	Potensi Unggulan *Potentials*
13	KEMBANGLIMUS	PT. PATRA JASA (Persero)	√	15	Desa Nanas	Nanas Benggolo, Wisata Alam *Benggolo Pineapple, Natural Toursim*
14	KEBONSARI	PT. HUTAMA KARYA (Persero) Tbk	√	3	Kampung Bambu Carangan	Kerajinan Bambu *Bamboo Handcraft*
15	TEGALARUM	PT. ANGKASA PURA II (Persero)	√	7		Kerajinan Limbah Plastik *Plastic Waste Handcraft*
16	TANJUNGSARI	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk	√	3	Duta Menoreh	Madu & Tahu *Honey & Tofu*
17	KARANGANYAR	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk	√	12	*Pottery Village*	Desa Gerabah *Earthenware Village*
18	GIRITENGAH	PT. JASA RAHARJA (Persero)	√	10	Kampung Madu	Madu dan Wisata Alam *Honey and Natural Tourism*
19	NGADIHARJO	PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)	√	6		
20	GIRIPURNO	PT. PUPUK INDONESIA (Persero) Tbk	*On Progres*	0	Kampung Keju	Keju dan Wisata Alam *Cheese and Natural Tourism*
Jumlah / *Total*			**20**	**224**		



Rencana Strategis
Strategic Plans

- Digitalisasi Balkondes & *Homestay* (*reservation system & Online transaction*)
- Standarisasi Produk dan Kualitas Pelayanan
- *Training Hospitality* dan keterampilan di bidang Balkondes
- *Awareness* dan Promosi Balkondes
- Pemanfaatan kawasan untuk investasi asset Produktif
- Pendampingan Operasional Balkondes oleh Profesional (PT Balkondes)
- Pengembangan Balkondes di Daerah lain

- Balkondes & Homestay Digitalization
- (reservation system & Online transaction)
- Product Standardization and Service Quality
- Hospitality and Skills Training in Balkondes
- Awareness and Balkondes Promotion
- Area utilization for productive asset investment
- Balkondes Operational Accompaniment by Professionals (PT Balkondes)
- Development of Balkondes in other Regions

SOEs Creative Houses
Rumah Kreatif BUMN

Jumlah pelaku UKM di Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 50 juta, di mana sebagian besar merupakan para pelaku usaha mikro, yang menunjukkan bahwa potensi UKM menjadi cukup besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran negeri.

The number of SMEs in Indonesia has now reached more than 50 million, most of which are micro-entrepreneurs, which shows that the potential of SMEs is sufficiently large to become one of the drivers of the Indonesian economy to improve the country's prosperity.

BUMN sebagai agent of development telah mengembangkan beberapa insiatif untuk meningkatkan kualitas UKM, antara lain PT Bank Mandiri (Perser) Tbk dengan program Wirausaha Muda Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Kampoeng BNI Nusantara, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan program Teras BRI dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dengan 2 juta UKM teregister melalui pogram Kampung UKM Digital di seluruh Indonesia.

SOEs as agents of development have developed several initiatives to improve the quality of SMEs, including PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with the Mandiri Young Entrepreneur program, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk with Kampoeng BNI Nusantara, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with the Teras BRI program and PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk with 2 million UKM registered through a program of Digital SME Villages throughout Indonesia.

Sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Kementerian BUMN bersama perusahaan milik negara membangun Rumah Kreatif BUMN (RKB) sebagai rumah bersama untuk berkumpul, belajar dan membina para pelaku UKM menjadi UKM Indonesia yang berkualitas.

As an effort to empower the people's economy, especially for micro, small and medium enterprises (MSMEs), the Ministry of SOEs together with state-owned companies built a SOEs Creative Home (RKB) as a shared home to gather, study and foster SMEs into quality Indonesian SMEs.

Rumah Kreatif BUMN akan mendampingi dan mendorong para pelaku UKM dalam menjawab tantangan utama pengembangan usaha UKM dalam hal Peningkatan kompetensi, Peningkatkan Akses Pemasaran dan Kemudahkan akses Permodalan.

SOEs Creative Houses will assist and encourage SMEs in responding to the main challenges of SME business development in terms of competency improvement, Increasing Access to Marketing and Facilitating Capital access.

Pendampingan di dalam Rumah Kreatif BUMN dilakukan melalui proses kegiatan yang diawali dengan registrasi dan analisa data UKM secara *offline* maupun secara *online* melalui website *smartbisnis.co.id*. Selanjutnya pelaku UKM akan mengisi data *profiling* terkait kompetensi UKM dan data produk UKM. Melalui *platform* data analitik, pelaku UKM dapat melakukan analisa dan seleksi data UKM terkait kompetensi dan kategori UKM tersebut.

Mentoring in the SOEs Creative House is carried out through an activation process that begins with the registration and analysis of SME data offline and online through the smartbisnis.co.id website. Furthermore, SMEs will fill profiling data related to SME competencies and SME product data. Through an analytical data platform, SMEs can analyze and select SME data related to the competencies and categories of SMEs.

Melalui program RKB, UMKM di dorong untuk merubah pola bisnis dari konvensional menjadi modern (*go modern*), dan selanjutnya menuju era digital (*go digital*), dan terus menuju penjualan secara *online* (*go online*) yang pada akhirnya akan menuju global (*go global*).

Through the RKB program, MSMEs are encouraged to change the pattern of business from conventional to modern (go modern), and then towards the digital era (go digital), and continue to go online (go online) sales which will eventually go global (go global).

Rumah Kreatif BUMN sendiri merupakan wadah bagi langkah kolaborasi BUMN dalam membentuk *Digital Economy Ecosystem* melalui pembinaan bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UKM itu sendiri. Dalam program ini, pelaku UKM mendapatkan pelatihan sesuai dengan modul yang dibutuhkan, antara lain Bisnis dan Keuangan, Permodalan, Segmentasi dan Target Pasar, Proses Produksi dan Pemasaran serta *Total Quality Management*.

Hingga tahun 2018, RKB yang sudah didirikan sebanyak 209 RKB yang dimotori oleh 26 BUMN yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, Pertamina, PLN, Telkom, Angkasa Pura II, PT Tambang Batubara Bukit Asam, Jasa Marga, PT Perkebunan Nusantara III, Pupuk Indonesia Holding Company, Jasa Raharja, PT Pembangunan Perumahan, Pelabuhan Indonesia II, Pelabuhan Indonesia III, Waskita Karya, PGN, Bulog, Pegadaian, Wijaya Karya, Semen Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Semen Baturaja, Inalum, dan Perum Peruri. Pada akhir tahun 2018, telah terdaftar 501.483 UMKM dan 12.552 UMKM yang eksisting di BLANJA.Com.

The SOEs Creative House itself is a forum for SOEs collaboration in forming the Digital Economy Ecosystem by fostering SMEs to increase the capacity and capability of the SMEs themselves. In this program, SMEs get training in accordance with the modules needed, including Business and Finance, Capital, Segmentation and Target Markets, Production and Marketing Processes and Total Quality Management.

Until 2018, the established RKB was 209 RKBs driven by 26 SOEs namely Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, Pertamina, PLN, Telkom, Angkasa Pura II, PT Tambang Batubara Bukit Asam, Jasa Marga, PT Perkebunan Nusantara III, Pupuk Indonesia Holding Company, Jasa Raharja, Housing Development PT, Pelabuhan Indonesia II, Pelabuhan Indonesia III, Waskita Karya, PGN, Bulog, Pegadaian, Wijaya Karya, Semen Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Semen Baturaja, Inalum, and Perum Peruri. At the end of 2018, there were 501,483 MSMEs and 12,552 existing MSMEs at BLANJA.com.



Go Modern, Go Digital, Go Online

BLANJA.COM 12.552
UKM eksisting
Existing SMEs

209 RKB
seluruh Indonesia
all over Indonesia

RKB bertujuan untuk menaikkan kelas ekonomi pelaku UMKM melalui pembinaan dan pembelajaran bersama
RKB aims at increasing economy class of MSMEs parties through fostering and joint learning

Our Food House
Rumah Pangan Kita

Dalam program pangan, BUMN harus berperan lebih nyata dan optimal agar ketersediaan dan harga komoditas lebih terjamin di masyarakat. Perum BULOG telah memperluas implementasi "Rumah Pangan Kita" (RPK) dan *outlet* yang tersebar di berbagai daerah.

In a food program, SOEs must play a more real and optimal role so that the availability and price of commodities are more secure in the community. Perum BULOG has expanded the implementation of "Our Food House" (RPK) and outlets spread in various regions.



RPK adalah program kerja sama antara Perum BULOG dan masyarakat, di mana warga yang menjadi agen RPK akan mendapatkan suplai kebutuhan pangan berupa beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung. Program RPK merupakan salah satu wujud dari upaya Perum BULOG untuk menstabilkan harga pangan dan juga merupakan perwujudan fungsi Perum BULOG untuk menyediakan bahan pangan yang terjangkau.

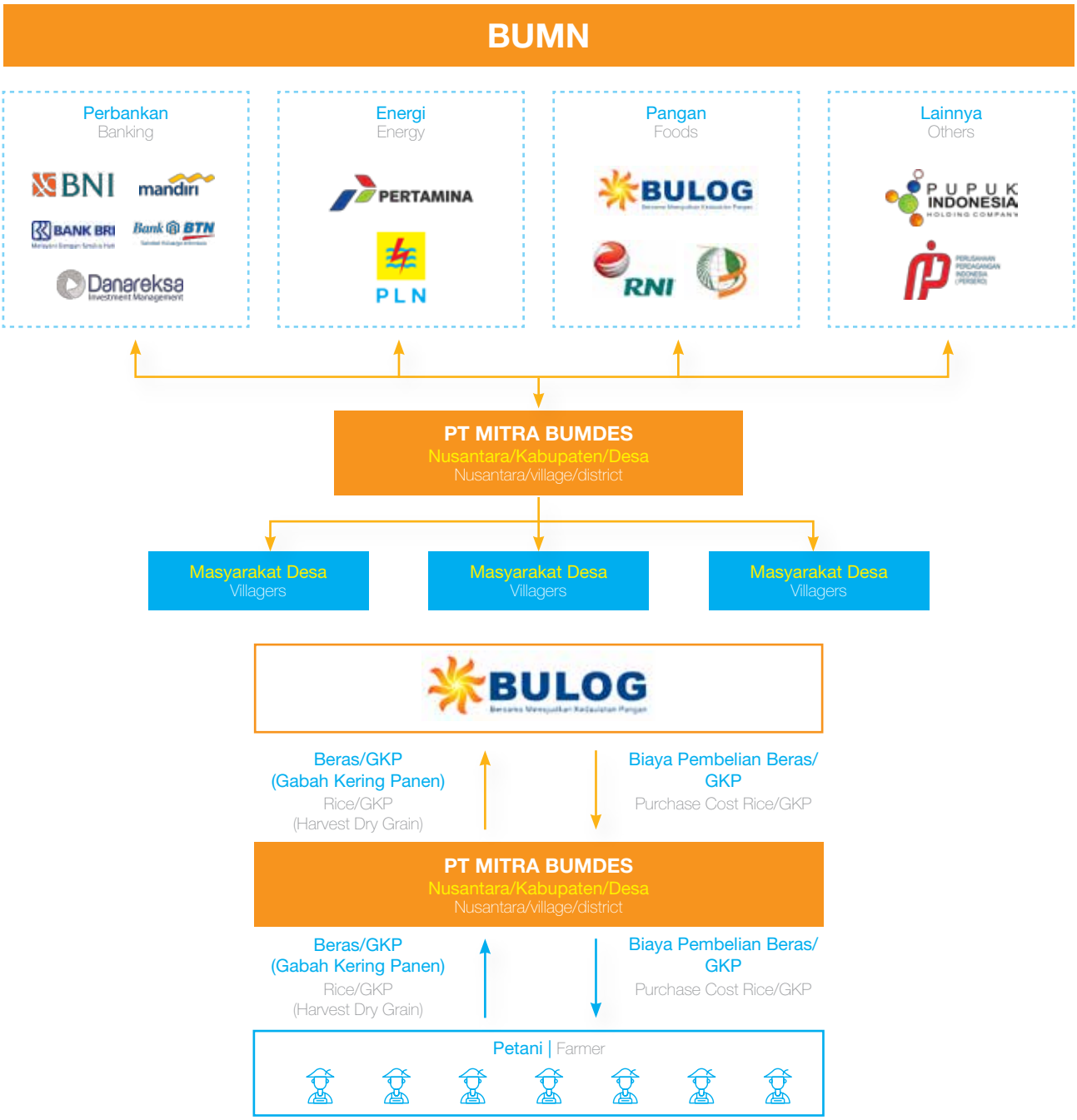
RPK is a program of cooperation between BULOG Public Corporation and the community, where residents who become RPK agents will get food supplies in the form of rice, granulated sugar, cooking oil and flour. The RPK program is one manifestation of the efforts of the National Logistics Agency (Perum BULOG) to stabilize food prices and is also a manifestation of the function of the National Logistics Agency (Perum BULOG) to provide affordable food.

Sampai dengan tahun 2018 telah dibuka 63.180 RPK. Pembukaan RPK ini untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang wajar. Hingga tahun 2018, RPK telah dibangun di 472 kabupaten/kota dan akan terus dibangun di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah-wilayah perbatasan, antara lain di Kaltara dan Papua.

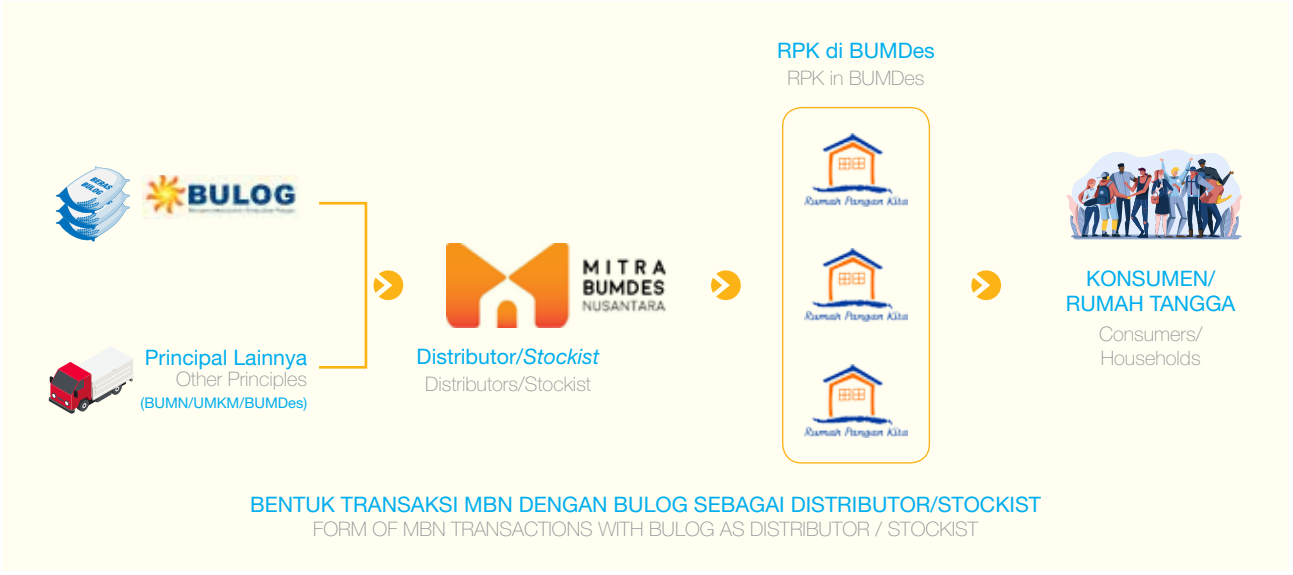
Until 2018 63,180 RPK has been opened. The opening of this RPK is to facilitate the affordability of the community to obtain food needs at reasonable prices. Until 2018, RPK has been built in 472 districts/cities and will continue to be built in all regions of Indonesia, including in border areas, including in Kaltara and Papua.

Program RPK ini juga bersinergi dengan PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN) yang ditujukan untuk ikut berperan aktif dalam menjawab tantangan pembangunan desa di Indonesia. PT Mitra BUMDes Nusantara sebagai *Channel* bagi Produk BUMN dan Produk Desa yang dapat memberikan peluang bagi bisnis produk BUMN melalui PT Mitra BUMDes Nusantara.

The RPK program also synergizes with PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN) which is intended to play an active role in responding to the challenges of rural development in Indonesia. PT BUMDes Nusantara Partners as a Channel for SOEs Products and Village Products that can provide opportunities for the SOEs product business through PT Mitra BUMDes Nusantara.



RPK BUMDes Melalui PT MBN
RPK BUMDes Through PT MBN



BENTUK TRANSAKSI MBN DENGAN BULOG SEBAGAI DISTRIBUTOR/STOCKIST
FORM OF MBN TRANSACTIONS WITH BULOG AS DISTRIBUTOR / STOCKIST



Model Bisnis PT MBN Sinergitasnya dengan RPK
The Business Model PT MBN Synergy with RPK

	1 Distribusi Distributions	2 *Off Taker* Off Taker	3 Agen Agent
TUJUAN OBJECTIVES	**Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat desa yang berasal dari hasil produksi BUMN** Fulfillment of villagers' basic needs that comes from SOEs productions	**Memberikan akses pasar bagi produk asli pedesaan untuk meningkatkan volume bisnis desa** Providing market access for authentic village products to increase village's business volume	**Memberikan akses modal untuk meningkatkan volume bisnis desa** Providing capital access to increase village's business volume
JENIS USAHA TYPES OF BUSINESS **(Komoditas dan Tipe Bisnis)** (Commodities and Types of Business)	**Produk pangan:** Food products: • Beras • Gula • Teh • Kopi • Jagung • Daging • Minyak goreng • Rice • Sugar • Tea • Coffee • Corn • Meat • Cooking Oil	**Hasil Pertanian:** Agricultural Products: • Gabah Kering Panen • Jagung • Kedelai • Cabai • Bawang Merah • Harvest Dry Grain • Corn • Soy • Chili • Shallot	**Agen Pembiayaan:** Financing Agent: • Kredit Usaha Rakyat • People's Business Loans
	Produk pertanian: Agricultural Products: • Pupuk • Pestisida • Fertilizers • Pesticide	**Hasil Perkebunan:** Plantation Products: • Tebu • Tembakau • Sugarcane • Tobacco	**Agen Bank:** Banking Agents: • Pembayaran Listrik • Pembayaran PDAM • Pembayaran Telepon • Pembayaran BPJS • Transfer • Pembelian Pulsa • dll • Electricity Payment • PDAM Payment • Phone Payment • BPJS Payment • Transfer • Credit Purchase • etc
	Bahan Bakar: Fuel: • LPG • LPG	**Produk asli desa** Original Village Product • Kerajinan • Tenun • dll • Handcrafts • Weaving Works • etc	
	Produk lainnya Other Products: • Semen • dll • Cement • etc		

Farmer Card
Kartu Tani

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, salah satu peran BUMN dalam memperkuat ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, keterjangkauan dan kestabilan harga, serta kualitas beberapa komoditas utama, seperti beras, minyak goreng, dan gula. Upaya peningkatan ketahanan pangan tidak terlepas dari bagaimana BUMN meningkatkan kesejahteraan Petani.

In order to support food security, one of the roles of SOEs in strengthening food security is ensuring the availability of basic needs, affordability and price stability, and the quality of several key commodities, such as rice, cooking oil and sugar. Efforts to improve food security are inseparable from how SOEs improve the welfare of farmers.

Untuk maksud tersebut, BUMN juga menggagas diluncurkannya Kartu Tani yang mana dengan kartu tersebut para petani dapat kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan pembiayaan terkait dengan aktivitas pertanian dan untuk biaya hidup selama masa musim tanam. Kehadiran Kartu ini mampu mengintegrasikan sistem untuk kepentingan petani untuk mengetahui data sektor pertanian mulai dari tanam, pemeliharaan, pasca panen, dan pembiayaan.

Hence, SOEs also initiated the launch of Farmer Cards, with which the farmers were able to get the financing needs related to agricultural activities and for living expenses during the planting season. The card is able to integrate the system for the benefit of farmers to find out data on the agricultural sector starting from planting, maintenance, post-harvest, and financing.

Manfaat Kartu Tani
Benefits of Farmer Card

Petani mudah mendapatkan pupuk bersubsidi di seluruh pengecer pupuk bersubsidi karena kejelasan penerima pupuk bersubsidi dan produsen dapat menyiapkan pupuk sesuai kebutuhan.

Farmers easily get subsidized fertilizers from subsidized fertilizer retails because the explication of subsidized fertilizer recipients and producers can prepare appropriate amount of fertilizers

Kartu tani memungkinkan petani untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan untuk usaha tani dan terhubung langsung dengan off taker sehingga diharapkan terbebas dari praktik ijon.

Farmer card enables farmers to obtain loans from banks for their agricultural business with off taker so it is expected that farmers will be free from ijon practice



Petani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pada masing-masing kartu tani dan memperoleh pupuk bersubsidi secara tepat waktu.

Farmers get subsidized fertilizers in accordance with allocated allocation on each farmer card and get subsidized fertilizers punctually

Dapat digunakan sebagai kartu penerimaan pinjaman, subsidi maupun bantuan serta kartu tabungan bagi petani sehingga petani belajar untuk menabung.

It can be used as loan receipt card, subsidy and savings card for farmers so that they can learn how to save money

Melalui Kartu Tani ini, para petani nantinya akan banyak mendapat kemudahan jika sudah menggunakan Kartu Tani ini, seperti mendapatkan akses pembiayaan dengan perbankan di bawah BUMN, mendapat kemudahan kredit murah melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau,. Selain itu, kartu ini juga dapat memfasilitasi kemudahan sertifikasi tanah melalui skema Prona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

By using the card, farmers will then get convenience, such as banking funding access under SOEs, inexpensive loans through People's Business Loans (KUR) with affordable interests. Besides, the card also facilitates convenience in obtaining land certificates through Prona scheme from National Land Agency (BPN).

Kartu Tani tersebut akan berisi data petani baik lahan maupun masa tanam sehingga akan diketahui dengan mudah kapan para petani akan memanen. Kartu Tani tersebut merupakan bagian sinergi antara bank-bank BUMN (Himbara) dengan Perum BULOG, Perhutani, PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) atau PIHC.

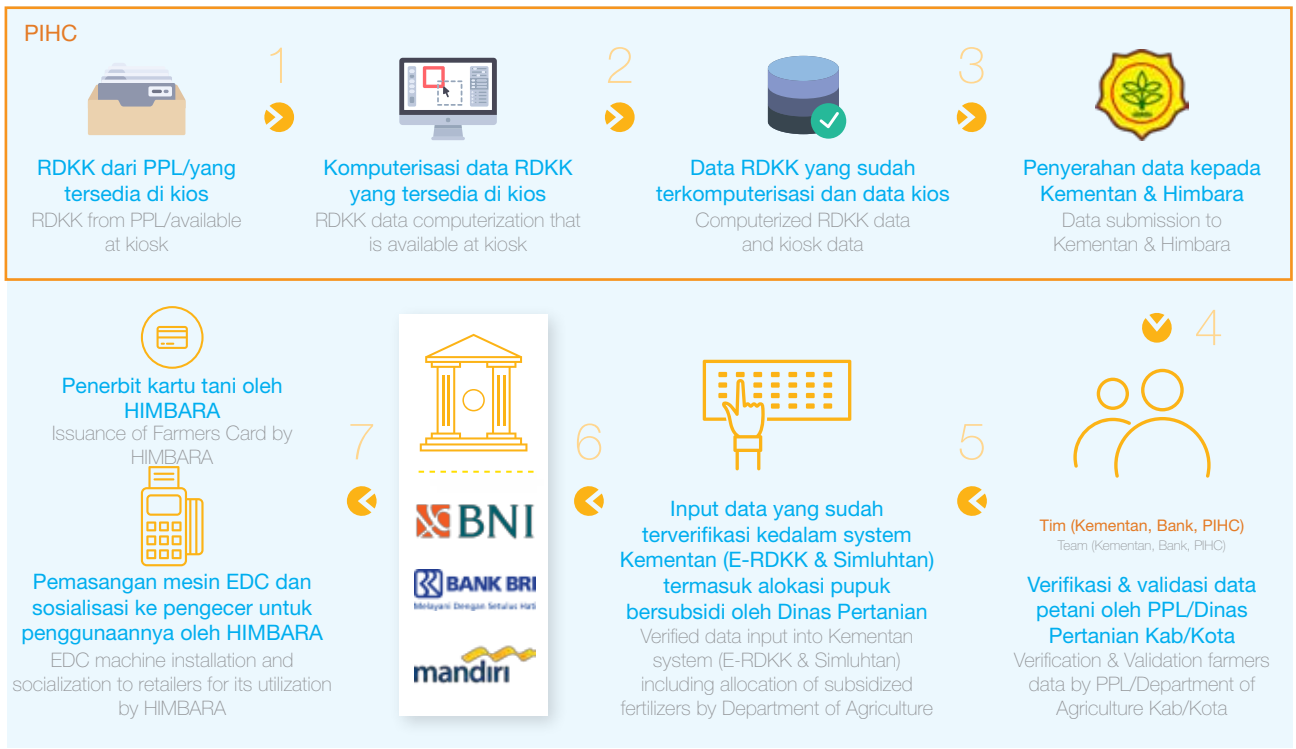
The Farmer Card will contain farmers' data, such as lands and plantation period so that it is easy to identify when the farmers will start planting. The card is also a part of synergy between SOE banks (Himbara) with Perum BULOG, Perhutani, PT Sang Hyang Seri (Persero), and PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) or PIHC.

Manfaat Bagi Pemerintah
Advantages for Government

- Mempunyai data base petani yang lebih akurat dan terintegrasi.
  Obtaining more accurate and integrated farmers data base
- Mengetahui informasi luas lahan per pertanian per komoditas perwilayah.
  Obtaining wide information of land per farm per commodity region
- Menyalurkan subsidi maupun bantuan secara tepat sasaran.
  Distributing subsidy or assistance accurately
- Kemudahan memonitoring penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan individu penerima.
  Convenience of monitoring distribution of subsidized fertilizers to receivers

Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (*e-wallet*). Keunggulan dari Kartu Tani ini antara lain *single entry data*, proses validasi berjenjang secara *online*, transparan, multifungsi. Kartu Tani ini juga bisa digunakan sebagai database para petani sehingga petani dapat mengetahui kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian (saprotan) bersubsidi/non-subsidi, termasuk distribusi pupuk.

The Farmer Card is also acts as integrated banking service access that functions as savings, transaction, loans distribution and subsidy card (e-wallet). The advantages of the Farmer Card are, among others, single entry data, online tiered validation process, transparency, and multifunction. The card can also be used as database of farmers so that the farmers will know certainty of subsidized/non-subsidized agricultural production facilities availability (saprotan), including fertilizer distribution.



Pada tahap awal, tahun 2016, Kartu Tani diimplementasikan kepada para petani tebu, dan pada tahun 2017 telah dilakukan distribusi ke sejumlah 2.835.403 petani yang terdapat di 35 Kabupaten/Kota dan 8.790.607 Petani yang terkomputerisasi.

Implementasi Kartu Tani ini terus akan dilaksanakan sehingga seluruh petani di Indonesia pada akhirnya dapat memanfaatkan Kartu Tani untuk menopang aktivitas pertanian.

In the early stages, in 2016, the Farmer Card was implemented for sugarcane farmers, and in 2017 the cards were distributed to a total of 2,835,403 farmers in 35 districts/cities and 8,790,607 computerized farmers.

The implementation of the Farmer Card will continue to be implemented so that all farmers in Indonesia can finally use the Farmer Card to support agricultural activities.

Pembagian Wilayah Tanggung Jawab
The Area of Responsibility

BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

Banten
- Jumlah petani terkomputerisasi (PIHC) 325.154 petani
- Jumlah petani terverifikasi dan validasi (Dinas Pertanian): 194.453 petani
- Jumlah kartu dicetak (BRI): 194.453 kartu
- Jumlah pengecer (PIHC): 363 kios
- Jumlah EDC terpasang (BRI): 389 EDC

- Total computerized farmers (PIHC): 325.154 farmers
- Total verified and validated farmers (Department of Agriculture): 194.453 farmers
- Total printed cards (BRI): 194.453 cards
- Total retailers (PIHC): 563 retailers
- Total installed EDC (BRI): 389 EDC

BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

Jawa Tengah
- Jumlah petani terkomputerisasi (PIHC): 2.577.301 petani
- Jumlah petani terverifikasi & validasi (Dinas Pertanian): 2.305.431 petani
- Jumlah kartu dicetak (BRI): 2.395.431 kartu
- Jumlah pengecer (PIHC): 5.850 kios
- Jumlah EDC terpasang (BRI): 5.003 EDC

- Total computerized farmers (PIHC): 2.577.391 farmers
- Total verified and validated farmers (Department of Agriculture): 2.395.431 farmers
- Total printed cards (BRI): 2.395.431 cards
- Total retailers (PIHC): 5.850 retailers
- Total installed EDC (BRI): 5.003 EDC

BNI

Jawa Timur
- Jumlah petani terkomputerisasi (PIHC): 3.976.933 petani
- Jumlah petani terverifikasi & validasi (Dinas Pertanian): 2.145.007 petani
- Jumlah kartu dicetak (BNI): 1.708.898 kartu
- Jumlah pengecer (PIHC): 6.885 kios
- Jumlah EDC terpasang (BNI): 6.100 EDC

- Total computerized farmers (PIHC): 3.976.988 farmers
- Total verified and validated farmers (Department of Agriculture): 2.145.007 farmers
- Total printed cards (BNI): 1.708.898 cards
- Total retailers (PIHC): 6.885 retailers
- Total installed EDC: 6.100 EDC



mandiri

Jawa Barat
- Jumlah petani terkomputerisasi (PIHC): 1.754.968 petani
- Jumlah petani terverifikasi & validasi (Dinas Pertanian): 1.0235.340 petani
- Jumlah kartu dicetak (Bank Mandiri, BNI, BRI): 1.029.085 kartu
- Jumlah EDC terpasang (Bank Mandiri, BNI, BRI): 1.433 EDC

- Total computerized farmers (PIHC): 1.754
- Total verified & validated farmers (Department of Agriculture): 1.0235.340 farmers
- Total printed cards (Bank Mandiri, BNI, BRI): 1.029.085 cards
- Total Retailers (PIHC): 3.437 kiosks
- Total installed EDC machines: (Bank Mandiri, BNI, BRI): 1.433 EDC

BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

DI Yogyakarta
- Jumlah petani terkomputerisasi (PIHC): 156.106 petani
- Jumlah petani terverifikasi & validasi (Dinas Pertanian): 284.090 petani
- Jumlah kartu dicetak (BRI): 284.090 kartu
- Jumlah EDC terpasang (BRI): 195 EDC

- Computerized farmers (PIHC): 156.106 farmers
- Verified and validated farmers (Department of Agriculture): 284.090 farmers
- Total printed cards (BRI): 284.090 cards
- Total retailers (PIHC): 277 kiosks
- Total installed EDC machines (BRI): 195 EDC

Keterangan:
Khusus untuk Jawa Barat:
PIC Tasikmalaya: BRI
PIC Garut: BNI

Specifically for West Java:
PIC Tasikmalaya: BRI
PIC Garut: BNI

Social Forestry
Perhutanan Sosial

Kementerian BUMN berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melakukan program Perhutanan Sosial yakni sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Ministry of SOEs collaborates with Ministry of Environment and Forestry by carrying out Social Forestry program which is a sustainable forest management system conducting in national forest area or forest tenure/customary forest. The program is conducted by local community to improve their prosperity, natural balance and social culture dynamism.

Pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial, melalui skema:

1. Hutan Desa (HD) dengan tenurial HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), izin yang diberikan adalah IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan adalah IUPHHK-HTR atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat
4. Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah Penetapan Pencantuman Hutan Adat
5. Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa

The government in the 2015-2019 period allocated 12.7 million hectares for Social Forestry, through the scheme:

1. *Village Forest (HD) with HPHD tenure or Village Forest Management Rights*
2. *Community Forestry (HKm), the permits granted are HKM IUP or Community Forest Utilization Business Permit*
3. *Community Plantation Forest (HTR), permits granted are IUPHHK-HTR or business licenses for Utilization of Timber Forest Products - Community Plantation Forests*
4. *Customary Forest (HA), its tenure is the Establishment of Inclusion of Customary Forests*
5. *Forestry Partnership (KK) in the form of KULIN KK or Recognition of Forestry Partnership Protection and IPHPS or Permit for Utilization of Forest Forestry in Java*

Tujuan program Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan hutan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Masyarakat dapat mengelola perkebunan tanaman dalam area yang diajukan, yang hasil panen dari perkebunan tersebut dapat kemudian dijual oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

The aim of the Social Forestry program is to improve the welfare of the community through patterns of forest empowerment and by orienting to the aspects of sustainability. Community can manage plantations in the proposed area, which can be later sold by them to fulfill their daily economic needs.

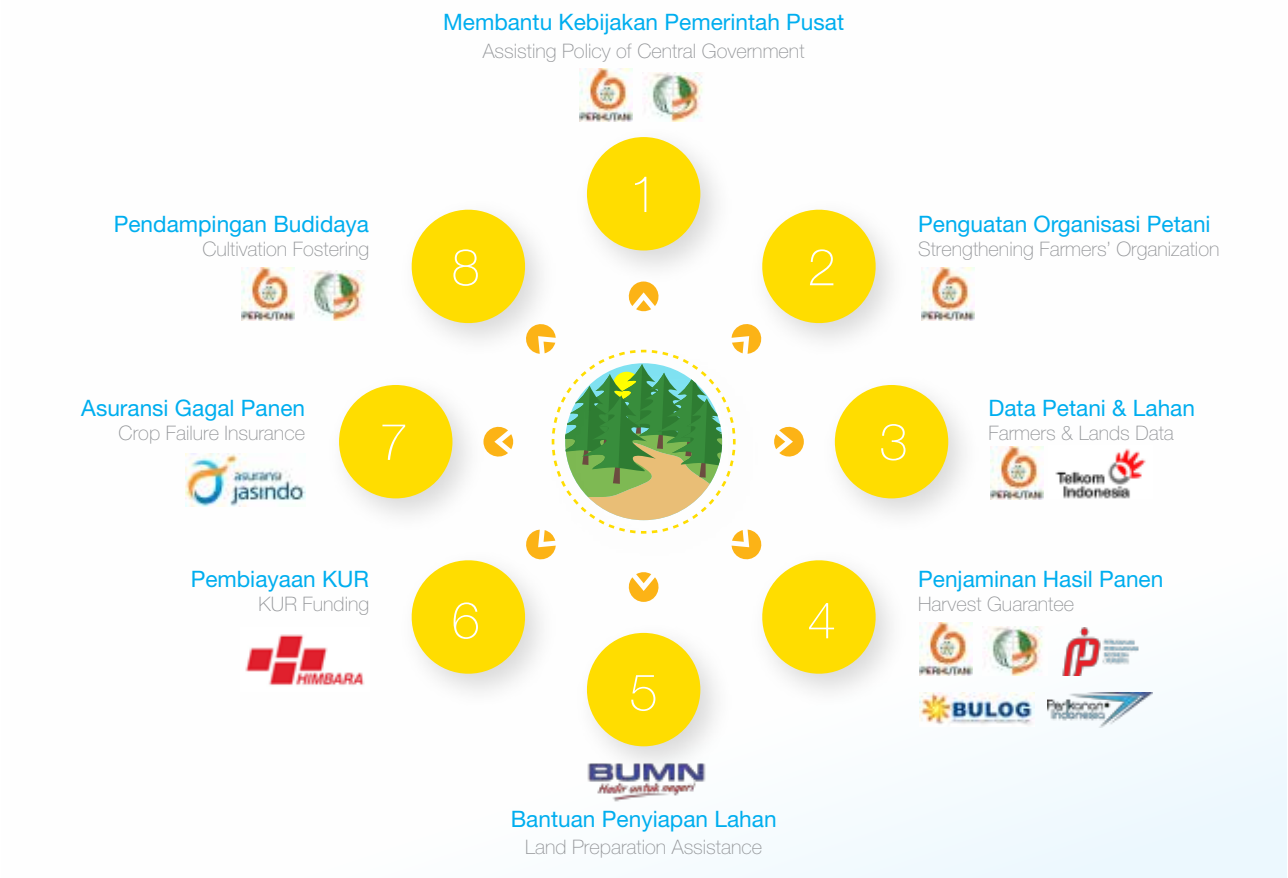
Sebelum Program Perhutanan Sosial, Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Konsep perhutanan sosial akan memberikan aspek legal masyarakat menanam di hutan rakyat.

Before the Social Forestry Program, Community-based Forest Resource Management (CBFM) was a system of forest resource management carried out jointly by Perum Perhutani and forest village communities and stakeholders. The concept of social forestry will provide the legal aspects of community planting in community forests.

Dalam Program Perhutanan Sosial ini, terdapat sinergi antar BUMN sebagai bentuk dari Komitmen BUMN hadir untuk Negeri. Keseluruhan kegiatan dan tata laksana Perhutanan Sosial ini mendapat dukungan penuh dari BUMN sesuai bidangnya yang bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam bisnis proses terintegrasi.

In this Social Forestry Program, there is a synergy between SOEs as a form of present SOEs Commitment to the Country. The entire activities and management of Social Forestry are fully supported SOEs in their fields that work together with relevant Ministries and Institutions in the integrated process business.

Gambar Kegiatan dan Tata Laksana Perhutanan Sosial
Figure of Social Forestry Activities and Procedures



Manfaat Perhutanan Sosial bagi Masyarakat:

1. Mendapat kepastian mengenai lokasi lahan garapan dan jangka waktu hak garap;
2. Memperoleh akses sumber pendanaan KUR perbankan;
3. Mendapatkan kepastian pasar / serapan hasil produksi;
4. Mendapatkan pembinaan intensif dari Departemen terkait serta perbankan;
5. Berpeluang mendapatkan subsidi Saprotan;
6. Mendapatkan area pengelolaan lahan yang lebih ekonomis (2 Ha per orang);
7. Pendapatan tambahan yang lebih baik dan pasti kepada penggarap.

Benefits of Social Forestry for Community:

1. *Getting certainty regarding the location of arable land and the period of working rights;*
2. *Obtaining access to KUR banking funding sources;*
3. *Obtaining market certainty/uptake of production;*
4. *Obtaining intensive coaching from relevant departments and banks;*
5. *Opportunity to get Saprotan subsidies;*
6. *Getting a more economical land management area (2 Ha per person);*
7. *Better and more definite income to cultivators.*

Adapun Penerbitan SK Perhutanan Sosial untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, adalah sebagaimana yang terlampir pada tabel di bawah ini:

The issuance of SK Social Forestry for 2017 up to 2018, is as attached to the table below:

Tahap Penerbitan SK *SK Issuance Stages*	Skema Perhutanan Sosial *Social Forestry Scheme*	Jumlah Lokasi *Total Locations*	Luas (Ha) *Area (Ha)*	Penerima (KK) *Recipients (KK)*
2017	Kulin KK *Kulin KK*	28	9.340	5.593
	IPHPS	12	6.168	3.844
	Jumlah *Total*	40	15.508	9.437
2018	Kulin KK *Kulin KK*	25	9.151	4.920
	IPHPS	40	16.655	16.833
	Jumlah *Total*	65	25.806	21.753

Sementara untuk tahun 2019, diharapkan Program Perhutanan Sosial ini dapat menjangkau lebih banyak petani/penggarap di berbagai lokasi dan dengan wilayah yang lebih luas. Dengan jangkauan yang lebih luas, masyarakat sekitar kawasan hutan diharapkan dapat mendapatkan manfaat ekonomi dan lebih sejahtera dari sebelumnya dengan status yang lebih baik. Keterlibatan sinergi BUMN dalam program ini semakin menunjukan wujud nyata dari BUMN Hadir Untuk Negeri.

While in 2019, it is expected that this Social Forestry Program can reach more farmers/cultivators in various locations and with a wider area. With a wider reach, the community around the forest area is expected to get economic benefits and be more prosperous than before with a better status. The involvement of SOEs synergies in this program increasingly shows the real manifestation of SOEs Present to the Nation.

Agricultural Entrepreneurship Program
Program Kewirausahaan Pertanian

Kewirausahaan Pertanian merupakan salah satu Program Nawacita Presiden Jokowi dalam rangka mengembangkan perekonomian yang ada di Indonesia dengan pengoptimalan sektor pertanian. Sebagai agen pembangunan, Kementerian BUMN memberikan dukungan terhadap program Presiden tersebut melalui kolaborasi kerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta pemerintah daerah terkait, dalam melaksanakan program kewirausahaan pertanian untuk membantu menyejahterakan para petani dengan peningkatan produk pertanian yang berdaya saing. Program yang dapat meningkatkan pendapatan petani ini, dibuat dengan cara mengkorporasikan petani.

Agricultural Entrepreneurship is one of President Jokowi's Nawacita Programs in order to develop the economy in Indonesia with the optimization of the agricultural sector. As a development agency, the Ministry of SOEs provides support for the President's program through synergic collaboration with the Ministry of Agriculture, Ministry of Village Development of Disadvantaged Regions and Transmigration, and related local governments, in implementing agricultural entrepreneurship programs to help improve the welfare of farmers with competitive agricultural products. Programs that can increase farmers' incomes are made by way of exporting farmers.

Kolaborasi kerjasama antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni sebagai berikut:

The synergic collaboration between the central government and regional governments, namely as follows:

- Pemerintah Daerah
  Memberi dukungan dan fasilitas keberadaan Mitra BUMDES Bersama (MBB) untuk meningkatkan skala ekonomis desa dengan sinergi Pemda dan BUMN

- *Local government*
  Providing support and facilities for the existence of a Joint BUMDes Partner (MBB) to increase the economies of scale of the village with the synergy of LGs and SOEs

- Kementerian Pertanian
  Sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui GAPOKTAN dengan sharing database RDKK untuk Kartu Tani, bimbingan teknologi SAPROTAN, ALSINTAN untuk optimalisasi produksi

- *Ministry of Agriculture*
  Synergy to improve the welfare of farmers through GAPOKTAN by sharing RDKK databases for Farmer Cards, SAPROTAN technology guidance, ALSINTAN for production optimization

- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  - Inisiator dan pengarah pendirian Mitra BUMDES Nusantara (MBN)
  - Sinergi pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDES untuk meningkatkan skala ekonomis desa dengan mengoptimalkan PRUKADES

- *Ministry of Rural Development and Disadvantaged Transmigration*
  - *Initiator and director of the establishment of Nusantara BUMDES Partners (MBN)*
  - *Synergy of empowering rural communities through BUMDES to increase the economies of scale of the village by optimizing PRUKADES*

- Kementerian BUMN
  Mengkoordinasikan BUMN dalam memberikan manfaat bagi kesejahteraan petani

- *Ministry of SOEs*
  Coordinating SOEs in providing benefits to the welfare of farmers

Program Kewirausahaan Pertanian 2018
2018 Agricultural Entrepreneurship Program

Kolaborasi dengan Kementrian Pertanian
Collaboration with Ministry of Agriculture

Program Kewirausahaan Pertanian
Agricultural Entrepreneurship Program

"pengembangan perekonomian dengan mengoptimalkan sektor pertanian"
"economic development by optimizing agricultural sector"

9 Lokasi *Piloting*
Piloting Location
Purwakarta, Karawang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Ciamis, Tasikmalaya, & Garut

8 BUMN Pelaksana
Managing SOEs
BRI, BNI, BTN, Mandiri, BULOG, RNI, PIHC, Telkom Indonesia



1. Pertanian mampu menentukan nasib sendiri
Farmers can determine their own fates



2. Menghasilkan kelompok tani yang mandiri dan memiliki daya tawar lebih baik
Producing independent farmers group and having better bargaining power



3. Petani sejahtera
Prosperous farmers

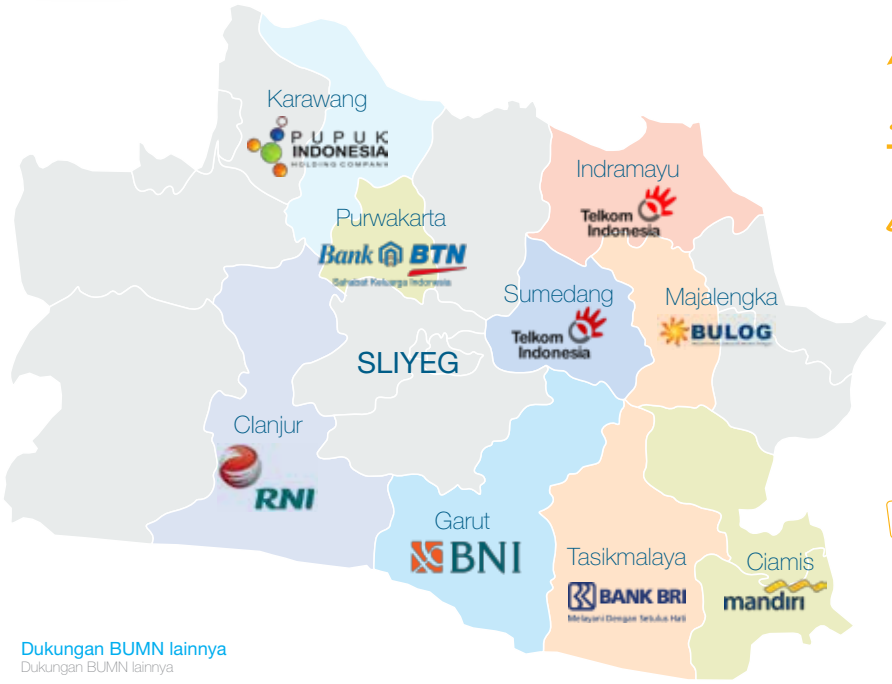
Untuk menciptakan masa depan pertanian yang semakin baik, maka petani harus teroganisir. Tidak hanya terorganisir sebagai Kelompok Petani (PokTan), namun menjadi sebuah organisasi yang lebih besar dengan sistem kerja setingkat korporasi. Di awal tahun 2018, Pemerintah telah meresmikan program Kewirausahaan Tani dan Digitalisasi Sistem Pertanian di lokasi Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu. Wirausaha Tani dan Digitalisasi Sistem Pertanian ini dikembangkan dalam bentuk sebuah perseroan, yaitu PT Mitra Bumdes Bersama (MBB). PT MBB ini di bawah pembinaan perusahaan-perusahaan BUMN. Sembilan kabupaten di Jabar pun dipilih untuk pengembangan program ini sebagai perintis kawasan kewirausahaan pertanian.

To create a better future for agriculture, farmers must be organized. Not only is organized as a Farmer Group (PokTan), but it is also becoming a larger organization with a corporate level work system. In early 2018, the Government inaugurated the Farmers Entrepreneurship Program and Digitizing the Agricultural System at the location of the Integrated Rice Processing Center (SPBT) in Sliyeg District, Indramayu Regency. Farmers' Entrepreneurship and Digitization of the Agricultural System were developed in the form of a company, namely PT Mitra Bumdes Bersama (MBB). PT MBB is under the guidance of SOEs companies. Nine districts in West Java were chosen for the development of this program as a pioneer in the area of agricultural entrepreneurship.

9 Kawasan Perintis Kewirausahaan Pertanian Jawa Barat

Pioneer Areas of West Java Agricultural Entrepreneurship

Sejak 07 September 2017 Since September 7, 2017



LUAS LAHAN SAWAH
RICE FIELDS AREA
4.384 ha

PRODUKSI PADI
RICE PRODUCTION
±45.000
ton/tahun (2x panen)
tons/year (2x harvests)

JUMLAH BUMDES
TOTAL BUMDES
1 Perkumpulan BUMDES bersama kecamatan dan 14 BUMDES
1 BUMDES Association with Districts and 14 BUMDES

JUMLAH POKTAN
JUMLAH POKTAN
1 Perkumpulan GAPOKTAN
dibentuk oleh 14 GAPOKTAN, yang terdiri atas 127 Poktan dan 7.009 Petani (3.737 KTP lokal)
dibentuk oleh 14 GAPOKTAN, yang terdiri atas 127 Poktan dan 7.009 Petani (3.737 KTP lokal)

KARTU & KUR TANI
FAMERS CARDS & KUR
Penyaluran kartu tani di Kec. Sliyeg sebanyak 2.993 Dengan total penerima KUR Tani sebanyak 1.158 Petani
Total Distribution of farmers cards in District Silyeg is 2.993 cards, with total KUR Tani recipients is 1.158 farmers

KELEMBAGAAN
INSTITUTION
Kelembagaan yang terlibat MBB Sliyeg dan SPBT (Sentra Pengolahan Beras Terpadu) Sliyeg
Institution involved in MBB Silyeg and SPBT (Centre of Integrated Rice Processing)

Dukungan BUMN lainnya
Dukungan BUMN lainnya

PT MBB berdiri agar petani tidak hanya bisa menjual padi dalam bentuk gabah saja. Namun, melalui perseroan ini petani bisa menjualnya hingga telah menjadi beras dalam *packaging* yang baik. PT MBB di Sliyeg ini, akan menjadi contoh pengembangan usaha tani dan sistem digitalisasi pertanian di Indonesia.

PT MBB was established to help farmers to not only sell rice in the form of grain. However, through this company, farmers can sell it to become rice in good packaging. This PT MBB in Sliyeg will be an example of farming business development and agricultural digitalization system in Indonesia.

Saham PT MBB Sliyeg 51% akan dikuasai oleh Mitra Bumdes Nusantara (MBN) yang merupakan anak perusahaan dari tujuh BUMN, yaitu Perum Bulog, Danareksa, PPI, PIHC, RNI, PTPN III, dan Pertamina Retail. Sementara 49% sisanya dimiliki oleh Perkumpulan Gapoktan Bersama, terdiri dari 14 Gapoktan dan Perkumpulan Bumdes Bersama terdiri dari Bumdes dari 14 Desa.

51% of PT MBB Sliyeg's shares will be controlled by Mitra Bumdes Nusantara (MBN) which is a subsidiary of seven SOEs, namely Bulog Corporation, Danareksa, PPI, PIHC, RNI, PTPN III, and Pertamina Retail. While the remaining 49% is owned by the Joint Gapoktan Association, consisting of 14 Gapoktan and Bumdes Bersama Associations consisting of Bumdes from 14 Villages.

Sedangkan pembagian hasil usaha tidak mencerminkan porsi saham tersebut. Melainkan 80% untuk perkumpulan Gapoktan dan Bumdes dan 20% untuk PT MBN. Keterlibatan BUMN dalam MBB adalah untuk mendukung manajemen profesional dan teknologi informasi digital. Sehingga diharapkan pengelolaan MBB lebih profesional dan *governance*.

Whereas the distribution of business results does not reflect the portion of the shares. It is 80% for Gapoktan and Bumdes associations and 20% for PT MBN. The involvement of SOEs in MBB is to support professional management and digital information technology. Therefore, it is expected that MBB management will be more professional and governance.

Selain itu, untuk memudahkan para petani,dibentuk juga Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian yang dikelola MBB binaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Hal tersebut sesuai dengan amanat presiden dalam hal korporatisasi pertanian, Kementerian BUMN telah menerjemahkannya dengan mewujudkan Program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan Petani. Program ini merupakan pilot project digitalisasi sistem pertanian di Indonesia. Melalui keberadaan program tersebut diharapkan petani yang sebelumnya hanya sebagai penanam yang menghasilkan padi saja, saat ini bisa menjadi wirausaha yang unggul.

In addition, to facilitate farmers, Agricultural Entrepreneurship and Digitalization of Agricultural Systems are also managed by MBB assisted by PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. This is in accordance with the president's mandate in terms of corporatization of agriculture. The Ministry of SOEs has translated it by realizing the Agricultural Entrepreneurship Program and the Digitalization of the Agricultural System which is expected to improve the welfare of Farmers. This program is a pilot project for digitizing agricultural systems in Indonesia. Through the program, it is expected that farmers who were previously only planters who produce rice can now become superior entrepreneurs.

Digitalisasi sistem pertanian merupakan mesin penggerak guna memaksimalkan produktivitas petani. Digitalisasi pertanian dapat memudahkan monitoring data dan informasi, seperti lokasi kerja petani, luas lahan, serta waktu tanam dan panen. Data ini nantinya dapat digunakan MBB untuk memfasilitasi kebutuhan para petani.

Digitizing the agricultural system is a driving force to maximize farmer productivity. Digitizing agriculture can facilitate monitoring of data and information, such as farmer's work location, land area, and planting and harvesting time. This data can later be used by MBB to facilitate the needs of farmers.

Digitalisasi sistem pertanian diperuntukkan bagi kelompok tani melalui kehadiran BUMN dalam 4 siklus tanam. Pada siklus pratanam, BUMN menyediakan asuransi usaha tani dan kredit usaha rakyat melalui PT Jasindo, PT Askrindo, dan Himbara. Sedangkan pada tahap tanam, BUMN hadir dengan menyediakan benih, distribusi pupuk, dan pendampingan melalui PT Pupuk Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, dan PT PNM.

Digitalization of the agricultural system is intended for farmer groups through the presence of SOEs in 4 planting cycles. In the pre-trial cycle, SOEs provide farm insurance and people's business loans through PT Jasindo, PT Askrindo and Himbara. While at the planting stage, SOEs were present by providing seeds, fertilizer distribution, and assistance through PT Pupuk Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, and PT PNM.

Sementara itu pada tahap panen, BUMN menyediakan penyimpanan hasil panen dan resi gudang yang diselenggarakan PT Pegadaian. Selanjutnya, di tahap pascapanen, BUMN membantu distribusi hasil tani melaui Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia Pangan. Keberadaan Blanja.com sebagai *platform e-commerce* memungkinkan petani menjual secara *online*.

Meanwhile at the harvest stage, the SOEs provide storage for harvest and warehouse receipts held by PT Pegadaian. Furthermore, in the post-harvest stage, SOEs assisted the distribution of agricultural products through State Logistics Agency and PT Pupuk Indonesia Pangan. The existence of Blanja.com as an e-commerce platform allows farmers to sell online.

Program layanan kewirausahaan petani dan digitalisasi sistem pertanian ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi petani, seperti usaha skala kecil, daya tawar petani lemah, serta insentif petani yang tidak tepat dan tidak berkelanjutan. Semua pelayanan dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan kartu tani

The farmer entrepreneurship service program and digitalization of the farming system are expected to overcome various problems faced by farmers, such as small-scale businesses, weak bargaining power of farmers, and inappropriate and unsustainable farmer incentives. All services are carried out through a system that is integrated with farm cards.

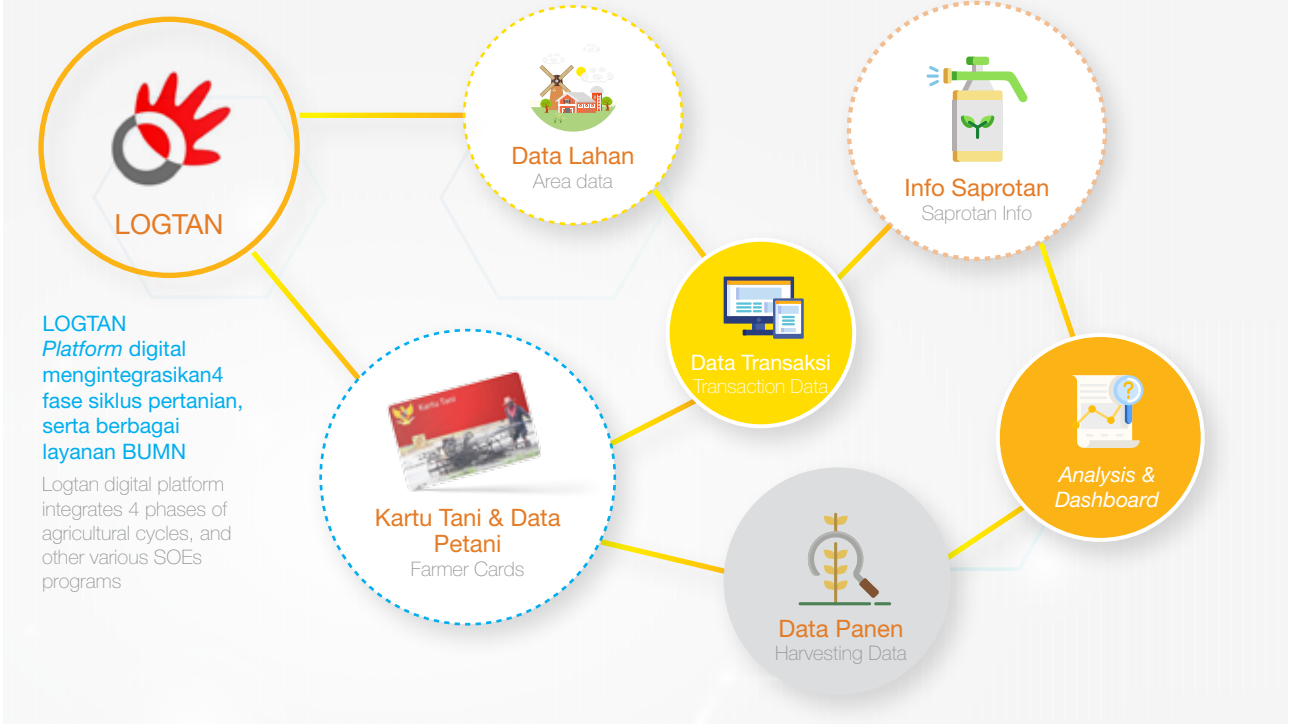
DIGItalisasi

DIGItalisasi

Pertanian dalam Kewirausahaan Pertanian

Agricultural Digitalization in Agricultural Entrepreneurship

Telkom Indonesia



LOGTAN *Platform* digital mengintegrasikan4 fase siklus pertanian, serta berbagai layanan BUMN

Logtan digital platform integrates 4 phases of agricultural cycles, and other various SOEs programs

FASE PRA TANAM
PRE-PLANTATION PHASE

- Data lengkap petani
- Perbankan menyediakan pembiayaan KUR
- Asuransi Pertanian

- Farmers' complete data
- Banking parties provide KUR financing
- Agricultural Insurance

KUR 7%

FASE TANAM
PLANATION PHASE

Mitra BUMDes menyediakan saprotan, alsintan, dan pendamping

BUMDes partners provide saprotan, alsintan and accompaniment

FASE PANEN
HARVESTING PHASE

Penyerapan gabah oleh Off Taker dengan Harga beli gabah yang wajar

Grain absorption by Off Taker with reasonable purchase price

FASE PASCA PANEN
POST-HARVESTING PHASE

Hasil pertanian di proses melalui RMU mitra BUMDes & dipasarkan melalui BUMN Pangan, ritel modern dan *e-commerce*

Harvest products are processed through BUMDes partner RMU & marketed through Food SOEs, modern retailers and e-commerce

MITRA BUMDES NUSANTARA

MBB sebagai operator dari aplikasi LOGTAN berperan sebagai unit ekonomi, simpul layanan BUMN, serta kendali ekonomi pertanian oleh rakyat & petani.

MBB as operator of LOGTAN application plays roles as economy unit, SOEs Service Nod, and agricultural economic control by community and farmers

Konsep *on Farm* Kewirausahaan Petani
Agricultural Entrepreneurship on Farm Concept





Non-Cash Food Social Assistance Program

Program Bansos Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan inisiasi bersama antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Sosial yang merupakan bantuan Pemerintah non kas untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA. Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Non-Cash Food Social Assistance Program (BPNT) is a joint initiative between the Ministry of SOEs and the Ministry of Social Affairs which is non-cash Government assistance to provide more balanced nutrition to KPM. Non-Cash Food Assistance (BPNT) is food assistance from the government that is given to KPM every month through an electronic account mechanism that is used only to buy food at e-Warong KUBE PKH/food traders in collaboration with HIMBARA Bank. Aim to reduce the burden of expenditure and provide more balanced nutrition to KPM on target and on time.

Program BPNT 2018

Program BPNT 2018

Kolaborasi dengan Kementerian Sosial

Collaboration with Ministry of Social

Program Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Non-Cash Food Soscial Assistance Program

"bantuan pemerintah non kas untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM"

"Government's non-cash assistance to provide more balance nutrition to KPM"

9.943.825 KPM

jumlah penerima Bansos BPNT melalui HIMBARA

total BPNT Bansos recipients through HIMBARA

Rp13,2 T/tahun

alokasi anggaran pemerintah

government budget allocation

219

Kota/Kabupaten Lokasi penyaluran BPNT

cities/districts, location of BPNT distribution

94.772

Agen Himbara dan telah memenuhi ratio agen 1:250 KPM

Himbara Agents having fulfilled agent ratio 1:250 KPM

12.772

Agen Himbara dipasok barang oleh BULOG, PPI, dan RNI

Himbara Agents, goods are supplied by BULOG, PPI and RNI

SOEs Shop Program
PROGRAM BUMN SHOP

Program BUMN Shop merupakan inisiasi bersama antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat. Program BUMN Shop ini, dilaksanakan oleh HIMBARA, Pertamina, Pupuk Indonesia Group (PIHC), PPI, Kimia Farma, Bulog, dan Telkom. BUMN Shop adalah layanan *one stop service* di desa dengan layanan antara lain layanan perbankan, sembako dan produk UMKM, obat-obatan, kebutuhan pulsa dan internet, penyediaan produk BBM dan LPG, hingga kebutuhan pupuk.

The SOEs Shop program is a joint initiative between the Ministry of SOEs and the Ministry of Development of Disadvantaged Villages and Transmigration in order to advance the economy of the community. This program is carried out by HIMBARA, Pertamina, Fertilizer Indonesia Group (PIHC), PPI, Kimia Farma, Bulog, and Telkom. the SOEs Shop is a one-stop service provider in the village with services including banking, basic food and MSME products, medicines, pulse and internet needs, the supply of BBM and LPG products, and fertilizer needs.

Program BUMN Shop 2018
SOEs Shop program 2018

Kolaborasi dengan Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Collaboration with Ministry of Rural Development and Disadvantaged Transmigration

Program BUMNShop

"diinisiasi bersama Kementrian BUMN & Kementrian PDTT, dengan menggandeng BUMDes sebagai motor penggeraknya"

"initiated by Ministry of SOEs & Ministry of PDTT, by engaging BUMDes as its drive motor"

Layanan Service one stopservice

- Perbankan produk UMKM obat-obatan
  Banking MSMEs Products Medicines
- Pulsa-internet produk BBM-LPG pupuk
  Internet credit BBM-LPG Products Fertilizers

10 Sinergi BUMN SOEs Synergy
Himbara, Pertamina, PIHC, PPI, Kimia Farma, BULOG, dan Telkom Indonesia
Himbara, Pertamina, PIHC, PPI,Kimia Farma, BULOG, and Telkom Indonesia

76 BUMNShop
65 di Sukabumi (27 Pertashop), 9 di Tasikmalaya (4 Pertashop), 2 di Ciamis (2 Pertashop)
65 in Sukabumi (27 Pertashop), 9 in Tasikmalaya (4 Pertashop), 2, in Ciamis (Pertashop)



Cash for Work
Padat Karya Tunai

Sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian BUMN menyelenggarakan program Padat Karya Tunai (PKT). Program PKT merupakan program yang mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal desa.

As one form of community empowerment, the Government through the Ministry of SOEs organized a Cash for Work (PKT) program. The PKT program is a program that prioritizes local resources, local labor and local village technology.

Tujuan program PKT adalah membangun dan menyediakan sarana serta prasarana infrastruktur lingkungan yang menunjang tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi daerah tersebut dengan melibatkan masyarakat setempat.

The aim of the PKT program is to build and provide infrastructure facilities and infrastructure that support the growth of the economic activities of the area by involving local communities.

Sampai dengan tahun 2018, jumlah dana yang tersalurkan untuk keseluruhan program Padat Karya Tunai sebesar Rp4,83 miliar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.148 tenaga kerja yang tersebar di 38 Lokasi di 13 Provinsi di Indonesia.

As of 2018, the amount of funds disbursed for the entire Cash for Work program amounted to IDR4.83 billion with a workforce of 3,148 workers spread across 38 locations in 13 provinces in Indonesia.

Kegiatan PKT, dilakukan dengan cara/metode berupa:

1. BUMN membuat perencanaan yang mencakup tujuan, struktur organisasi proyek, waktu pelaksanaan, jumlah tenaga kerja yang dilibatkan, design pekerjaan, Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan waktu pembayaran upah kepada masyarakat.
2. BUMN melakukan koordinasi dengan Dinas atau perangkat daerah setempat.
3. BUMN memastikan bahwa lokasi PKT tidak menerima bantuan dana APBN/APBD.
4. BUMN harus memastikan penanganan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan di sekitar tempat kerja
5. Kriteria pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam kelompok PKT apabila pekerjaan tersebut telah memperhitungkan rasio penggunaan tenaga kerja yang melibatkan minimal 300 masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan KTP. Pimpinan proyek memastikan bahwa masyarakat yang terlibat memang berasal dari warga setempat.
6. Sebelum PKT dimulai, BUMN melaksanakan hal sebagai berikut:
   a. BUMN memberikan pendidikan/pelatihan singkat terkait skills untuk melakukan PKT.

The PKT activities are carried out in the following methods:

1. *SOEs make a plan that includes the objectives, project organization structure, implementation time, the number of workforces engaged, job design, Budget and Cost Details (RAB), and payment time for the community.*
2. *SOEs coordinate with local government agencies or apparatus.*
3. *SOEs ensure that the PKT location does not receive APBN/APBD funds assistance.*
4. *SOEs must ensure the handling of construction occupational safety and health (OSH) for everyone at the workplace related to raw materials transportation, use of construction work equipment, production processes and the surrounding environment.*
5. *Criteria of work that can be included in the PKT group is the work that has calculated labor usage ratio by engaging a minimum of 300 surrounding communities as evidenced by ID Cards. Project leaders should ensure that the people engaged are truly from local residents.*
6. *Before the PKT is commenced, SOEs shall carry out the following:*
   a. *SOEs provide short education/training related to skills to do PKT.*

b. BUMN menunjuk pimpinan proyek/ mandor yang berasal dari masyarakat sekitar yang mempunyai pengalaman sebagai pimpinan proyek/mandor.
c. BUMN menunjuk pengawas yang berasal dari masyarakat dengan rasio 1 pengawas memantau 20 pekerja.

7. Upah untuk masyarakat menggunakan standar upah di wilayah tersebut.

8. Pembayaran upah kepada masyarakat dilakukan oleh BUMN yang mempunyai cabang di wilayah PKT. Apabila tidak ada BUMN di wilayah tersebut, maka pembayaran dilakukan oleh masyarakat setempat yang ditunjuk sebagai bendahara atau pengelola keuangan. Pembayaran dilakukan atas dasar laporan pelaksanaan pekerjaan dari pengawas. Pada saat pembayaran dibuat bukti tanda terima penerimaan upah dan dikumpulkan sampai dengan akhir pengerjaan.

9. BUMN menyediakan bahan baku dan material bangunan, sesuai dengan SOP yang berlaku di masing-masing BUMN.

10. Dalam hal pembangunan, BUMN diwajibkan untuk menggunakan tenaga masyarakat sekitar, tidak diperkenankan menyewa pihak ketiga (kontraktor/ tenaga lainnya) dalam melakukan pembangunan.

11. Setelah pekerjaan selesai, pimpinan proyek membuat laporan yang mencakup kualitas, waktu pelaksanaan, dokumentasi (foto dan video) sebelum dan sesudah, penggunaan biaya termasuk bukti transaksi.

b. SOEs appoint experienced project leaders/foremen from the surrounding communities.

c. SOEs appoint supervisors from the community with a ratio of 1 supervisor to monitor 20 workers.

7. Wages for the community are determined in compliance with the regional wage standards.

8. Payment of wages to the community is carried out by SOEs that have branches in the PKT region. If there are no SOEs in the region, then the payment is made by the local community appointed as treasurer or financial manager. Payments are made based on the reports of works carried out by the supervisor. At the payment time, proof of wages receipt is made and collected until the end of the work.

9. SOEs provide raw materials and building materials in accordance with the SOPs applicable in the respective SOE.

10. In terms of construction, SOEs are obliged to hire local workforce and are not allowed to hire third parties (contractors/other personnel) in carrying out the construction.

11. After the work is completed, the project leader makes a report covering the quality, implementation time, documentation (photos and videos) before and after, the costs spent including proof of transactions.

One-Price BBM
BBM 1 Harga

Dalam rangka mewujudkan program Pemerintah untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, BUMN pun hadir dengan melaksanakan program "BBM Satu Harga" melalui PT Pertamina (Persero). Pertamina terus melanjutkan komitmennya untuk melaksanakan penugasan Pemerintah untuk mendistribusikan BBM Satu Harga di wilayah-wilayah 3T (terpencil, terluar dan tertinggal) dalam rangka pemerataan dan asas keadilan. Pelaksanaan tugas BBM Satu Harga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor: 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu harga Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.

In order to realize the Government's program to provide social justice for all the people of Indonesia, SOEs also came up with the "One-Price BBM" program run by PT Pertamina (Persero). Pertamina continues its commitment to carry out the assignment of the Government to distribute One-Price BBM in 3T areas (remote, outermost and disadvantaged) in the context of equity and principle of justice. The implementation of the One-Price BBM assignment is regulated in the Ministry of ESDM Regulation No: 36 of 2016 concerning the Acceleration of the Application of One Type of Specific Fuel and the Type of Special Fuel Oil National Assignment.

Jenis BBM yang diatur terdiri dari Jenis BBM tertentu (JBT) yaitu minyak solar (gas oil) 48 dan minyak tanah (kerosene), dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), yaitu bensin (Gasoline) RON 88. Harga dasar dan harga jual eceran JBT dan JBKP ditetapkan oleh Menteri ESDM. Badan usaha penerima penugasan wajib menerapkan harga jual eceran yang ditetapkan Menteri ESDM. Penyaluran oleh badan usaha penerima penugasan melalui penyalur yang ditunjuk. Apabila belum terdapat penyalur di lokasi tertentu, maka badan usaha wajib menunjuk penyalur baru. Lokasi BBM Satu Harga ditentukan oleh Dirjen Migas. Biaya distribusi dari lokasi suplai ke lokasi penyalur tidak menjadi beban penyalur, melainkan beban Badan Usaha Penerima Penugasan.

The regulated fuel types are diesel oil (gas oil) 48 and kerosene, and Types of Special Fuel Assignments (JBKP), namely gasoline (Gasoline) RON 88. JBT and JBKP base price and retail selling price are determined by the Minister of Energy and Mineral Resources. The business entity receiving the assignment is required to apply the retail selling price set by the Minister of Energy and Mineral Resources. Distribution by the recipient business entity through the appointed distributor. If there is no distributor in a certain location, the business entity must appoint a new distributor. The location of One-Price BBM is determined by the Director General of Oil and Gas. Distribution costs from the supply location to the distributor location are not the supplier's burden, but rather the burden of the Assignment Recipient Business Entity.

Penugasan ini merupakan salah satu peran Pertamina sebagai BUMN untuk memastikan ketersediaan pasokan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia hingga ke pelosok negeri. Program BBM Satu harga di daerah 3T ini sebagai bagian dari kontribusi penting Pertamina yang telah diberi mandat untuk mendistribuskan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Untuk merealisasikannya, Pertamina menggunakan berbagai moda transportasi baik darat, laut maupun udara, at any cost, agar masyarakat di daerah 3T bisa mendapatkan BBM dengan harga sama dengan daerah lainnya. Pertamina meyakini, Program BBM Satu Harga akan memberikan dampak bermakna bagi peningkatan produktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T.

This assignment is one of Pertamina's roles as a SOE to ensure the availability of energy supplies for all Indonesian people to all corners of the country. The One-Price BBM program in the 3T area is part of Pertamina's important contribution which has been given the mandate to distribute BBM throughout the territory of Indonesia. To realize this, Pertamina uses various modes of transportation such as land, sea and air, at any cost, so that people in the 3T area can get the same price as other regions. Pertamina believes that the One-Price BBM Program will have a significant impact on improving business productivity and welfare of the people in the 3T area.

Program BBM Satu Harga dilakukan dengan beberapa

One-Price BBM is carried out with several steps as follows:

langkah sebagai berikut:

Bangun Lembaga Penyalur	***Build Distributor Agencies***
Membangun Lembaga penyalur di wilayah yang belum terdapat penyalur	***Building Distributor agencies in areas that still do not receive distributor agency services***
Peningkatan Storage Capacity	***Increase Storage Capacity***
Meningkatkan kapasitas storage Lembaga penyalur di wilayah terpencil	***Increasing storage capacity of Distributors Agencies in remote areas***
Pembangunan Infrastruktur	***Infrastructure Development***
Percepatan pembangunan infrastruktur darat dan laut/ dermaga oleh Pemerintah	***Accelerating land and sea/dock infrastructure development by Government***

Sesuai Roadmap awal, hingga akhir tahun 2019 Pertamina akan membangun 150 titik BBM Satu Harga. Namun berdasarkan Surat Kepala BPH Migas No 167/Ka BPH/2019 tanggal 21 Januari 2019, target akhir bertambah menjadi 160 titik.

Program BBM Satu Harga dimulai pada tahun 2017 dengan dioperasikannya 54 titik, kemudian pada tahun 2018 telah bertambah 70 titik, sehingga secara total telah beroperasi sebanyak 124 titik sampai dengan akhir 2018. Fokus pelaksanaan BBM satu harga adalah di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut terbatas. Pelaksanaan operasional BBM Satu Harga, tersebar di seluruh daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) mulai dari Pulau Sumatera, Jawa - Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Titik BBM Satu Harga terbanyak berada di Papua sebanyak (28 titik), Kalimantan (27 titik), Sumatera (24 titik), Nusa Tenggara (16 titik), Sulawesi (14 titik), Maluku (11 titik) dan Jawa Bali (4 titik). Program BBM Satu Harga tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2019.

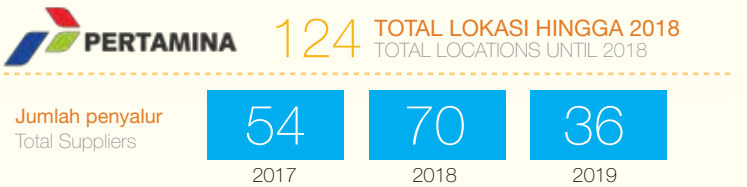
According to the initial Roadmap, until the end of 2019, Pertamina will build 150 One-price BBM points. But based on the Letter of Head of BPH Migas No. 167/Ka BPH/2019 dated January 21, 2019, the final target is increased to 160 points.

The One-Price BBM Program starts in 2017 with 54 points being operated, then by 2018 there have been 70 points, so that in total there have been 124 points operating until the end of 2018. The focus of the One-price BBM implementation is in areas with limited land and sea infrastructure. The operational implementation of One-Price BBM, spread across all disadvantaged, frontier and outermost areas (3T) starting from Sumatra Island, Java - Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku to Papua. Most Price One Fuel Points are in Papua (28 points), Kalimantan (27 points), Sumatra (24 points), Nusa Tenggara (16 points), Sulawesi (14 points), Maluku (11 points) and Java Bali (4 points). The One-Price BBM Program will be continued in 2019.



BBM SATU HARGA

ONE-PRICE BBM

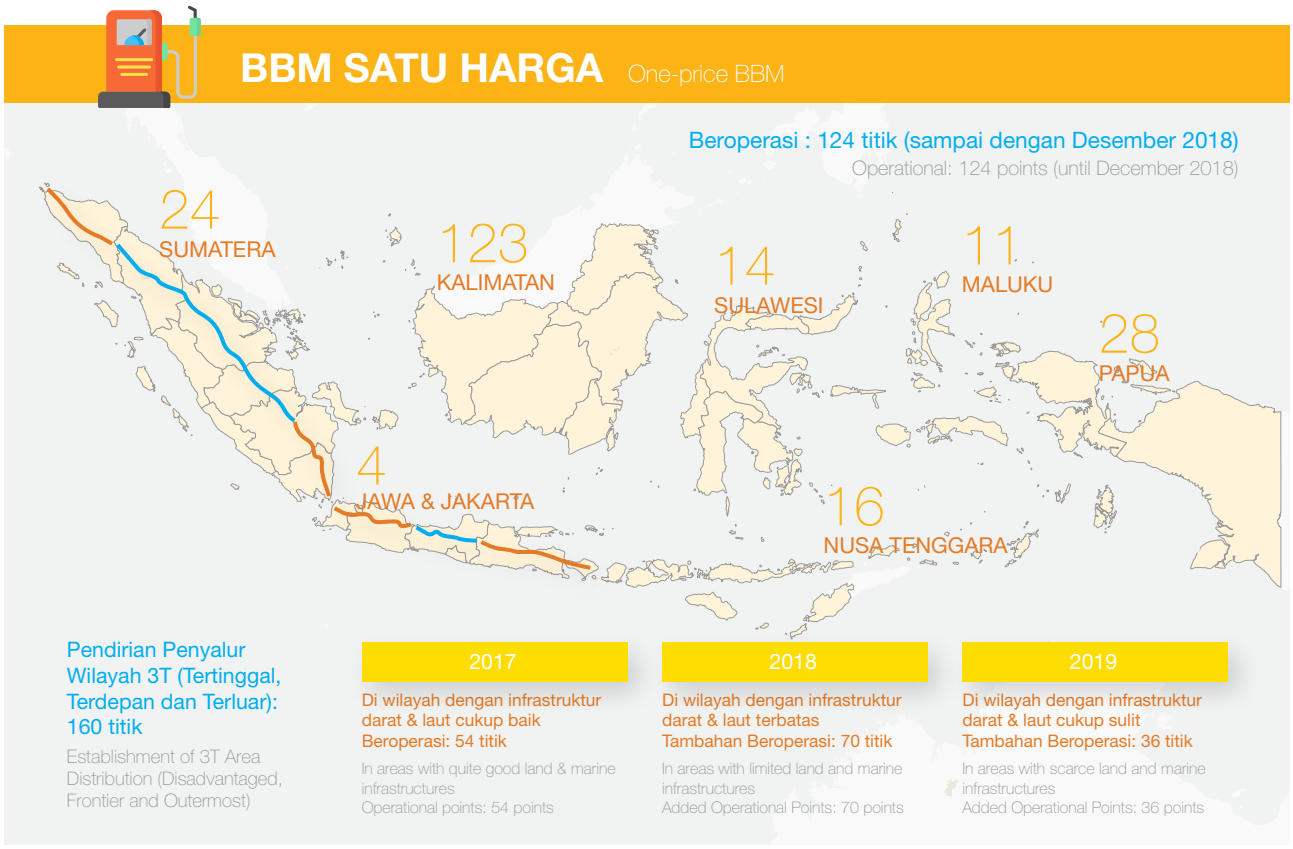


BBM Satu Harga telah mendorong aktivitas perekonomian di daerah 3T, karena masyarakat semakin mudah mendapatkan akses BBM dengan harga yang terjangkau. Harga BBM pada daerah 3T yang sebelumnya tinggi berkisar Rp 7.000 hingga Rp 100.000 per liter, kini jauh menurun menjadi sama dengan harga eceran di daerah lain yaitu Rp6.450 (Premium) dan Rp5.150 (Solar).

Program satu harga ini juga akan dikembangkan untuk produk-produk yang lainnya, seperti semen, beras, gula dan minyak goreng melalui aktivitas sinergi BUMN dengan harapan bisa diwujudkan sebelum akhir tahun 2019.

One-Price BBM has encouraged economic activity in the 3T area, because people are increasingly able to get access to BBM at affordable prices. The price of fuel in the 3T area which was previously high ranged from IDR7,000 to IDR100,000 per liter, is now extremely decreasing to the retail price in other regions, namely IDR6,450 (Premium) and IDR5,150 (Solar).

This one-price program will also be developed for other products, such as cement, rice, sugar and cooking oil through SOEs synergy activities with the hope that it can be realized before the end of 2019.



Implementation of PSO Function
Pelaksanaan Fungsi PSO

Sebagai bagian dari BUMN Hadir untuk Negeri, BUMN juga melaksanakan program PSO (*public service obligation*) dari Pemerintah agar pelayanan produk atau jasa terjamin dan terjangkau oleh publik. Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap mempertahankan maksud dan tujuan kegiatan BUMN itu sendiri. Pemerintah harus berperan dalam kegiatan yang memberikan *multiplier effect* secara ekonomi bagi masyarakat meskipun tidak memberikan keuntungan secara finansial bagi BUMN.

As part of the SOEs Present for the Country, SOEs also implement PSO (public service obligation) programs from the Government so that the services of products or services are guaranteed and affordable by the public. The government assigns assignments to SOEs to carry out the function of public benefit while maintaining the aims and objectives of the activities of the SOEs themselves. The government must play a role in activities that provide a multiplier effect economically for the community even though it does not provide financial benefits for SOEs.



Dasar hukum PSO adalah Undang-Undang RI No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat 1. Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tersebut, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak visibel, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.

The legal basis of PSO is Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises Article 66 paragraph 1. According to Law No. 19 of 2003, the government can give special assignments to SOEs to carry out the function of public benefit while taking into account the aims and objectives of SOE activities. If the assignment, according to the study, does not bring any benefit financially, the Government must compensate for all costs incurred by the SOE including the expected margin.

Berkaitan dengan tujuan mensejahterakan rakyat banyak, BUMN mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengingat BUMN merupakan perwujudan dari peran negara untuk mensejahterakan rakyat berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Penugasan

For the community welfare, BUMN has a very strategic role in the implementation of national economy in order to realize it, considering that BUMN is a manifestation of the state's role to people's welfare based on Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution. The assignment of PSO to SOE is expected to keep on maintaining the health and business

PSO pada BUMN ini diharapkan dapat tetap memelihara kesehatan dan kesinambungan usaha BUMN pelaksana PSO.

continuity of the SOE that implementing PSO.

Mekanisme penugasan dan pelaksanaan PSO pada BUMN telah terlaksana secara efektif efisien, sehat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai aktivitas pelayanan umum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sumber anggaran penugasan PSO merupakan komponen biaya yang dimasukkan dalam APBN, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

The mechanism for assigning and implementing PSO to SOEs has been carried out effectively efficiently, soundly and accountably. As a public service activity that can provide benefits to the community, the budget source for assigning PSO is the cost component included in the State Budget, as stipulated in Law No. 17 of 2003 concerning State Finance.

Untuk tahun 2018, terdapat 7 BUMN yang melaksanakan program atau fungsi PSO untuk memberikan pelayanan produk atau jasa yang terjangkau bagi masyarakat, diantaranya PT Pupuk Indonesia, Perum LKBN Antara, PT Pertamina, PT PLN, PT KAI, PT Pelni, PT POS Indonesia.

In 2018, seven SOEs participated in PSO program or function to provide services of the affordable products or services for the community, including PT Pupuk Indonesia, Perum LKBN Antara, PT Pertamina, PT PLN, PT KAI, PT Pelni, PT POS Indonesia.

REALISASI PSO TAHUN 2018
Realization of PSO in 2018

(nominal dalam miliar rupiah) *(nominal in billion rupiah)*

No	BUMN *Name of SOE*	Bentuk Penugasan *Form of Assignment*	Jenis *Type*	Tahun 2018			
				Plafond/ Target	Realisasi *Realization*	Status LK *FS Status*	SLA (%)
				1	2	3	4 = 2 : 1
1	PT Pupuk Indonesia	Penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani *Distribution of Subsidized Fertilizers to Farmers*	Subsidi *Subsidy*	28.504	28.569	*Audited*	100,23%
2	Perum LKBN Antara	Pembuatan berita PSO dalam bentuk Teks, Artikel, Foto, Infografis dan Video serta mendistribusikan ke masyarakat *Producing PSO news in the form of texts, articles, photos, infographics and videos and distributing them to the public*	PSO	160	156	*Audited*	97,42%
3	PT Pertamina	Penyediaan dan pendistribusian Janis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg *Provision and distribution of certain fuel type and 3 Kg Tube LPG*	Subsidi *Subsidy*	97.670	88.777	*Un-audited*	90,89%
4	PT PLN	Subsidi listrik kepada golongan tertentu *Electricity subsidies to certain groups*	Subsidi *Subsidy*	51.208	55.815	*Un-audited*	109,00%
5	PT KAI	Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi & KRL *Economy Class Railway & KRL*	PSO	2.270	2.145	*Un-audited*	94,49%
6	PT Pelni	Angkutan Laut untuk Kelas Ekonomi *Sea Freight for Economy Class*	PSO	1.868	2.120	*Un-audited*	113,52%
7	PT POS Indonesia	Layanan Pos Universal *Universal Postal Service*	PSO	351	346	*Un-audited*	98,58%
Total				**182.032**	**177.930**		**97,75%**

Love Signs for Victims of Disaster
Tanda Cinta Untuk Korban Bencana

BUMN terus bersinergi dan gerak cepat dalam membantu korban bencana alam di beberapa daerah di Indonesia. Aksi cepat itu membuktikan BUMN hadir di tengah-tengah masyarakat. BUMN selalu hadir saat kesulitan melanda sekalipun karena BUMN milik Indonesia. BUMN hadir dan membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam di wilayah Lombok, Sulawesi Tengah, Lampung dan Banten. Bantuan tersebut berupa bantuan tunai dan non tunai tanggap bencana.

SOEs continually synergize and move quickly to help victims of natural disasters in several regions of Indonesia. This proves SOEs' presence in the midst of society. SOEs are always present even in the midst of difficulties as SOE owned by Indonesia. SOEs are present to help the communities affected by natural disasters in Lombok, Central Sulawesi, Lampung and Banten, through disaster-aware cash and non-cash assistance.

BANTUAN NON TUNAI | Non Cash Assistance



BUMN mengupayakan penanganan terstruktur melalui Yayasan BUMN Hadir Untuk Negeri, BUMN hadir untuk meningkatkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat terdampak bencana alam melalui:

1. Tanggap Darurat Bencana
   - Penyelamatan & Evakuasi
   - Pemenuhan Kebutuhan Dasar
   - Pengurusan Pengungsi
   - Pemulihan Sarana dan Prasarana

2. Rehabilitasi Pasca Bencana
   - Pemulihan Layanan Kelistrikan;
   - Pemulihan Layanan Telekomunikasi;
   - Pemulihan Layanan BBM; dan sebagainya

SOE strives for structured handling thrYayasan BUMN Hadir Untuk Negeri, SOE is present to improve welfare in the midst of communities affected by natural disasters through:

1. *Disaster Emergency Response*
   - *Rescue & Evacuation*
   - *Fulfilling Basic Needs*
   - *Management of Refugees*
   - *Recovery of facilities and infrastructure*

2. *Post-Disaster Rehabilitation*
   - *Recovery of Electrical Services;*
   - *Recovery of Telecommunication Services;*
   - *Recovery of Fuel Services; etc*

1. GEMPA BUMI LOMBOK

BUMN bersinergi untuk membangun ribuan hunian sementara atau huntara di seluruh Nusa Tenggara Barat. Sinergi tersebut melibatkan Bank Mandiri, BNI, BTN dan Telkom. Adapun untuk proses konstruksinya berkolaborasi dengan PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya. Hunian ini juga langsung mendapatkan penerangan dengan teralirkannya listrik oleh PLN.

Kementerian BUMN menunjuk Bank Mandiri sebagai koordinator posko bencana gempa bumi yang terjadi di Lombok, yang difokuskan di 15 wilayah, antara lain:

1. Desa Sesait Kec. Kayangan Lombok Utara;
2. Desa Tetebatu Selatan Kec. Montong Gading Lombok Timur;
3. Desa Manggala Kec. Pemenang Lombok Utara;
4. Desa Sugian Kec. Sambelia Lombok Timur
5. Desa Senteluk Kec. Batu Layar Lombok Barat
6. Desa Lembah Sari Kec. Batu Layar Lombok Barat
7. Desa Batu Layar Barat Kec. Batu Layar Lombok Barat
8. Desa Dopang Kec. Gunung Sari Lombok Barat
9. Desa Bukit Tinggi Kec. Gunung Sari Lombok Barat
10. Desa Jeringo Kec. Gunung Sari Lombok Barat
11. Desa Guntur Macan Kec. Gunung Sari Lombok Barat
12. Desa Batu Kliang Kec. Batu Kliang Lombok Tengah
13. Desa Kekait Kec. Gunung Sari Lombok Barat
14. Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun Lombok Timur
15. Desa Terangan Kec. Pemenang Lombok Utara

1. LOMBOK EARTHQUAKE

After the earthquake that stroke NTB Province, SOEs synergized to build thousands of temporary shelters or shelters throughout West Nusa Tenggara. This synergy involves Bank Mandiri, BNI, BTN and Telkom. The construction process collaborates with PT Wijaya Karya and PT Waskita Karya. This residence also immediately gets information with the electricity flowing by PLN.

The Ministry of SOEs appointed Bank Mandiri as the coordinator of the earthquake disaster post that occurred in Lombok, which was focused on 15 regions, including:

1. *Sesait Village, Kayangan Sub-district, North Lombok;*
2. *Tetebatu Selatan Village, Montong Gading Sub-district, East Lombok;*
3. *Manggala Village, Pemenang Sub-district, North Lombok;*
4. *Sugian Village, Sambelia Sub-district, East Lombok*
5. *Senteluk Village, Batu Layar Sub-district, West Lombok*
6. *Lembah Sari Village, Batu Layar Sub-district, West Lombok*
7. *Batu Layar Barat Village, Batu Layar Sub-district, Lombok Barat*
8. *Dopang Village, Gunung Sari Sub-district, West Lombok*
9. *Bukit Tinggi Village, Gunung Sari Sub-district, West Lombok*
10. *Jeringo Village, Gunung Sari Sub-district, West Lombok*
11. *Guntur Macan Village, Gunung Sari Sub-district, West Lombok*
12. *Batu Kliang Village, Batu Kliang Sub-district, Central Lombok*
13. *Kekait Village, Gunung Sari Sub-district, West Lombok*
14. *Sembalun Bumbung Village, Sembalun Sub-district, East Lombok*
15. *Terangan Village, Pemenang Sub-district, North Lombok*

Adapun pembangunan sarana dan prasarana dilakukan oleh BUMN di empat desa yang terkena dampak paling parah, yakni sebagaimana yang terlampir di bawah ini.

The construction of facilities and infrastructure was carried out by SOEs in the four villages that were most affected, namely as described as follows.



Selain melakukan pembangunan sarana dan prasarana, BUMN juga melakukan penyaluran bantuan sebagaimana yang terlampir di bawah ini.

In addition to building facilities and infrastructure, SOEs also distribute the aid described as follows.



MENERJUNKAN RELAWAN
SENDING VOLUNTEERS

139
Relawan
Volunteers

BRI, BNI, Mandiri, Jasa Marga



LAYANAN TELEKOMUNIKASI
COMMUNICATION SERVICES

Layanan telepon dan SMS gratis, Layanan *charger*, *SIM card* gratis & genset

Free telephone and SMS services, charger services, free SIM cards & generators

Telkom

LAYANAN LISTRIK
ELECTRICAL SERVICES

Recovery system kelistrikan Lombok, Pengamanan SE & KWHm rumah roboh, Siaga Operator, *Start Engine* PLTD Ampenan

Recovery system for Lombok electricity, SE & KWHm Security for collapsed house, Operator Standby, Start Engine PLTD Ampenan

PLN



LAYANAN LOGISTIK BANTUAN
AID LOGISTIC SERVICES

Bebas biaya pengiriman antar Lombok

Free shipping between Lombok

PT POS



LAYANAN ENERGI
ENERGY SERVICES

Pemulihan distribusi BBM, Operasi pasar LPG, Pembagian dan normalisasi LPG, seluruh dukungan BBM untuk evakuasi dan pergerakan logistik BNPB, TNI dan posko BUMN

Recovery of fuel distribution, LPG market operation, division and normalization of LPG, all fuel support for evacuation and BNPB logistical movement, TNI and SOE post

Pertamina



LAYANAN PERBANKAN
BANKING SERVICES

Pemulihan ATM rusak, Teras keliling untuk menggantikan kantor layanan yang rusak, Inventarisir debitur terdampak

Recovery for damaged ATMs, mobile service cars to replace the damaged service office, inventory of the affected debtors

Mandiri, BNI, BRI, BTN



LAYANAN PELAYARAN
DELIVERY SERVICES

Evakuasi 163 wisatawan di beberapa Lokasi, Penyeberangan gratis, Ambulance & Truk Bantuan. Bantuan gratis pengiriman kargo 5x di tanggal 7, 14, 18, 21, 27

Evacuation of 163 tourists in several locations, free crossings, ambulances & relief trucks
Free assistance of 5x cargo shipments on 7, 14, 18, 21, 27

ASDP, Pelni



LAYANAN SEMBAKO
BASIC NECCESITY SERVICES

Stok pangan cukup, Penyaluran beras kepada Korban Bencana Lombok 117,9 Ton. *Drive* terdekat Lombok Timur dengan stok: Beras 9.007 Ton, Gula Pasir 344 Ton, Terigu 5.9 Ton, Minyak Goreng 7.14 Ton

Sufficient food stock, Distribution of rice to Lombok Disaster Victims of 117.9 Ton, Drives closest to East Lombok with Rice Stock of 9.007 Tons, Sugar of 344 Tons, Flour of 5.9 Tons, Cooking Oil of 7.14 Tons

Bulog



LAYANAN PENERBANGAN
FLIGHT SERVICES

Operasional 24 jam 6-9 Agustus 2018. Bandara bantuan kemanusiaan oleh militer, counter khusus evakuasi wisatawan asing, disc. 50% pengiriman kargo
Bantuan kemanusiaan sampai saat ini sudah mengangkut 67.7 Ton, 27 *extra flight*.
Penanganan tiket *force majeur*

24-hour operation on 6-9 August 2018, Airport for humanitarian assistance by the military, special counter for evacuation of foreign tourists, discs. 50% of cargo shipments
Humanitarian assistance up to the present has transported 67.7 tons, 27 extra flights. Handling of force majeure tickets

Angkasa Pura I, Garuda Indonesia

Sementara itu, BUMN juga menyiapkan penyaluran bantuan mendesak, yang sewaktu-waktu dibutuhkan, sebagaimana yang terlampir sebagai berikut.

Meanwhile, SOEs also arrange the urgent aid distribution, which is needed at any time, as described below.



ALAT BERAT
HEAVY EQUIPMENT

ESCAVATOR, Dump Truck, Dozer
Alat berat di lapangan
Di bawah *supervise* KOREM NTB

The heavy equipments in the field under supervision of KOREM NTB

Hutama Karya, Waskita Karya, ITDC, WIKA, Adhi Karya



SEMBAKO
BASIC NECESSITIES

Beras, Air Minum, Minyak Goreng, Gula, Telur, Susu, Makanan Instan

Rice, Drinking Water, Cooking Oil, Sugar, Eggs, Milk, Instant Food

Pertamina, Bulog, Mandiri, ITDC, BRI, Kimia Farma, BNI, PLN, Jasa Raharja, Telkom, Jasindo, Adhi Karya, Pegadaian, Jasa Marga, Garuda, Hutama Karya, Angkasa Pura I



AKOMODASI
ACCOMMODATION

Selimut, Tenda, Tandon Air MCK, MCK *Portable*, Senter

Blankets, Tents, Toilet Water Reservoir, Portable Toilet, Flashlight

ITDC, BRI, BNI, Jasindo, Adhi Karya, Pegadaian, WIKA, Telkom, Angkasa Pura, Mandiri, Hutama Karya



ENERGI
ENERGY

Solarcell, Minyak Tanah, Solar, Gas

Solarcell, Kerosene, Solar, Gas

WIKA, Pertamina



LAYANAN KESEHATAN
HEALTH SERVICES

Pusko Kesehatan, Tenaga Medis (8 Dokter, 14 Perawat, 1 Apoteker), Ambulance, Dokter Orthopedi, Dokter Anastesi, *Trauma Centre*

Health Post, Medical Staff (eight Doctors, 14 Nurses, a Pharmacist), Ambulance, Orthopedic Doctors, Anaesthetist, Trauma Center

BNI, Telkom, Pertamina, Pelindo III, PTPN Holding, Mandiri, BNI, Pertamina

Aedapun rencana ke depan yang akan dilakukan sebagai proses pemulihan pasca bencana adalah sebagai berikut.

The future plans that will be carried out as a post-disaster recovery process are as follows.

MEMBANGUN TEMPAT PENGUNGSIAN BUILDING PLACES OF REFUGE	Tempat pengungsian berupa Rumah Ramah Gempa (RRG) merupakan rumah transisi dan bukan rumah permanen Evacuation sites in the form of Earthquake-Friendly Houses (RRG) are temporary houses and not permanent houses
MEMBANGUN SARANA MCK & AIR BERSIH SERTA DRAINASE BUILDING TOILET FACILITIES & CLEAN WATER AND DRAINAGE	MCK menjadi permasalahan yang serius dan dapat menimbulkan penyakit di kemudian hari Toilet becomes a serious problem, and the lack of toilet may cause serious illness in the future
MEMBANGUN SARANA SEKOLAH BUILDING SCHOOL FACILITIES	Banyak sekolah yang sudah tidak layak sebagai tempat belajar-mengajar, perlu bangunan sementara untuk sarana pendidikan Many schools that are not suitable as the teaching and learning places need temporary school buildings for educational purpose
PENYEDIAAN GENSET, FREEZER, DAN SOLAR PROVISION OF GENSETS, FREEZERS AND DIESEL FUEL	- Penyediaan 2 unit *Freezer*/Lemari Es di setiap posko di 15 posko (untuk menyimpan daging/ayam) - Penyediaan 1 unit Genset di setiap posko (kapasitas 20 KVH) di 15 posko dan 100 liter/hari/posko - Provision of two units of freezers/refrigerators at each post in 15 posts (for storing meat/chicken) - Provision of a unit of generator in each post (capacity of 20 KVH) in 15 posts and 100 liters/day/post

PEMBERSIHAN PUING MENGGUNAKAN ESKAVATOR & BULLDOZER DEBRIS CLEANING USING EXCAVATORS & BULLDOZERS	BUMN bekerja sama dengan Mabes TNI (Asisten Teritorial) untuk membersihkan puing-puing dan melakukan *land clearing* untuk Rumah Ramah Gempa (RRG) SOE cooperates with TNI Headquarters (Territorial Assistant) to clean debris and conduct land clearing for Earthquake-Friendly Houses
POSKO KESEHATAN HEALTH POST	Di 15 Posko yang tersebar di 8 kecamatan, dipastikan terdapat posko kesehatan, dengan praktik dokter harian atau periodik sesuai kondisi masyarakat terkena dampak In 15 posts scattered in eight sub-districts, there were health posts, with daily or periodic doctor according to the conditions of the affected communities.
TELEKOMUNIKASI DAN ELEKTRIFIKASI TELECOMMUNICATION AND ELECTRIFICATION	- Orari - 5 *Handy Talkie* per posko - Penguatan signal di sekitar posko - Pemulihan tower penguat sinyal - Orari - 5 Handy Talkies per post - Strengthening signals around the post - Recovery of signal strengthening tower



2. GEMPA BUMI & TSUNAMI SULAWESI TENGAH

Gempa besar yang mengguncang Sulawesi Tengah pada 28 September 2018, menggugah BUMN untuk membangun kembali kota dan kabupaten yang rusak. Selang beberapa jam setelah gempa menghantam Palu, Sigi, dan Donggala, tim PLN langsung turun ke lapangan untuk 'kembali' menghidupkan listrik. Tentu tidak mudah, dengan kondisi langit gelap dan tak satu pun ada penerangan, mereka tetap bertugas demi menyalakan kembali Palu, Sigi, dan Donggala. Semangat tim PLN patut diacungi jempol, karena di saat mereka menjadi korban gempa, namun di saat itu pula semangat untuk bekerja terus ada.

Tak hanya PLN, tim Pertamina pun bersiap untuk mengamankan pasokan BBM yang ada di lokasi bencana. Begitu pula dengan tim Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, dengan sigap mereka menghidupkan kembali anjungan tunai mandiri (ATM) dan sistem jaringan agar masyarakat di lokasi bencana tetap bisa menerima gaji dan mengambil uang. Pascabencana, BUMN terus membangun hunian sementara atau huntara di Palu dan Donggala, untuk Kabupaten Sigi, juga telah dibangun huntara tepatnya di Desa Lolu dan Desa Sibalaya.

Kementerian BUMN menunjuk 8 Perusahaan BUMN sebagai koordinator posko bencana gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Tengah, yang difokuskan di 31 wilayah, yakni sebagai berikut:

2. THE EARTHQUAKE & TSUNAMI OF CENTRAL SULAWESI

The massive earthquake that stroke Central Sulawesi on September 28, 2018 invoked SOEs to take an initiative to rebuild the damaged cities and regencies. After a few hours of the earthquake hitting Palu, Sigi, and Donggala, the PLN team immediately took action in the field to turn on the electricity back. Surely, it was not an easy task, with the condition of the dark sky and pitch black area. However, the team is still in charge to electrify the areas of Palu, Sigi, and Donggala. Their enthusiasm deserves a full recognition. As the earthquake victims, their enthusiasm to work remained the same.

In addition to PLN, the Pertamina team arranged to secure the supply of fuel at the disaster sites. Likewise the Bank Mandiri, BNI, BRI, and BTN teams, they swiftly repaired the automated teller machines (ATMs) and network systems so that the people in disaster locations could still receive salaries and withdraw money. After the disaster, SOEs continued to build the temporary shelters in Palu and Donggala. For Sigi District, the shelters have been built precisely in Lolu and Sibalaya Villages.

The Ministry of SOEs appointed eight SOE Companies as the coordinator of the earthquake disaster post that occurred in Central Sulawesi, focused on 31 regions, namely as follows:

BUMN Koordinator
Coordinating SOEs

1. PT PLN (Persero)
2. PT Pertamina (Persero)
3. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
4. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
7. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
8. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Lokasi Posko
Location of Command Post

1. Kec. Mantikulore
2. Kec. Palu Barat
3. Kec. Palu Selatan
4. Kec. Palu Timur
5. Kec. Palu Utara
6. Kec. Tatanga
7. Kec. Tawadi
8. Kec. Ulujad
9. Kec. Baluesang
10. Kec. Baluesang
11. Kec. Banawa
12. Kec. Banawa Selatan
13. Kec. Banawa Tengah
14. Kec. Dampelas
15. Kec. Labuan
16. Kec. Sindue
17. Kec. Sindue Tobata
18. Kec. Sindue Tombusabora
19. Kec. Sirenja
20. Kec. Sojol
21. Kec. Tannantovera
22. Kec. Marowala
23. Kec. Kulawi
24. Kec. Kulawi Selatan
25. Kec. Lindu
26. Kec. Dolo Selatan
27. Kec. Dolo Barat
28. Kec. Gambusa
29. Kec. Salua
30. Kec. Parigi Moutong
31. Kec. Parigi

Sebagai bentuk kepedulian BUMN terhadap bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah, BUMN melakukan beberapa langkah pemulihan, diantaranya:

- Pemulihan Layanan Telekomunikasi
- Pemulihan Layanan Kelistrikan
- Pemulihan Layanan Perbankan
- Pemulihan Layanan BBM
- Pemulihan Layanan LPG

Adapun total penyaluran bantuan yang diberikan untuk bencana Sulawesi Tengah ini, tercatat sebesar Rp 61.836.861.239,- yang diberikan oleh 35 BUMN, dimana bantuan ini termasuk dalam program CSR atau Bina Lingkungan (BL) BUMN. Sementara bentuk bantuan lainnya yang juga diberikan oleh BUMN adalah sebagaimana yang terlampir di bawah ini.

As a form of concern for the disaster that occurred in Central Sulawesi, SOEs took several steps to restore, including:

- *Recovery of Telecommunication Services*
- *Recovery of Electrical Services*
- *Recovery of Banking Services*
- *Recovery of Fuel Oil Service*
- *Recovery of LPG Services*

The total distribution of aid provided for the Central Sulawesi disaster was recorded at IDR 61,836,861,239, which was given by 35 SOEs. This assistance was included in the CSR program or Community Development (BL) of SOEs. Meanwhile, other forms of assistance provided by SOEs were described as follows.



3. TSUNAMI BANTEN & LAMPUNG

Pada tanggal 22 Desember 2018, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan Anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung, Indonesia. Sedikitnya 426 orang tewas dan 7.202 terluka dan 23 orang hilang akibat peristiwa ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tsunami disebabkan pasang tinggi dan longsor bawah laut karena letusan gunung tersebut. Kementerian BUMN pun merasa terpanggil untuk turut serta dalam membantu korban bencana di Banten dan Lampung tersebut, dengan mengintruksikan kepada BUMN untuk bergerak cepat dalam menolong sesama.

3. TSUNAMI OF BANTEN & LAMPUNG

On December 22, 2018, a tsunami caused by the eruption of Anak Krakatau in Sunda Strait hit the coastal areas of Banten and Lampung, Indonesia. At least 426 people were killed, 7,202 injured and 23 people missing due to this incident. According to Meteorological, Climatological and Geophysical Agency (BMKG), the tsunami was caused by high tides and underwater landslides due to the volcano eruption. The Ministry of SOEs also felt obligated to participate in helping the disaster victims in Banten and Lampung by instructing SOEs to take action quickly in helping the people.

Untuk wilayah Banten, Kementerian BUMN menunjuk PT PLN dan PT Krakatau Steel sebagai koordinator posko bencana tsunami di Banten, yang difokuskan di 3 wilayah, yakni:

1. Kantor PLN Rayon Pandeglang, Jl. Ahmad Yani No.11 KM Pandeglang, Banten;
2. Jl. Raya Karang Bolong, samping Kantor Koramil Cinangka;
3. Jl. Jenderal Sudirman, No. 156, Labuhan. Posko di Kc. Labuan Bank BRI.

Salah satu bentuk tindakan yang dilakukan BUMN adalah melakukan pemulihan layanan kelistrikan pasca bencana, untuk membantu evakuasi dan lain sebagainya. PLN melalui Unit induk distribusi Jakarta Raya langsung menerjunkan 16 Mobil dan tim pelayanan Teknik antara lain:

- 128 personil;
- Tim detasemen layanan khusus;
- Mobil HIAP
- Material kelistrikan (10 hasbel kabel Jaringan Tegangan Rendah (JTR), 20 hasbel kabel Sambungan Rumah (SR), dan 285 pin isolator)

Adapun total penyaluran bantuan yang diberikan untuk bencana di Banten, tercatat sebesar Rp 2.310.600.957,- yang diberikan oleh 32 BUMN, dimana bantuan ini termasuk dalam program CSR atau Bina Lingkungan (BL) BUMN. Sementara bentuk bantuan lainnya yang juga diberikan oleh BUMN adalah sebagaimana yang terlampir di bawah ini.

For the Banten region, the Ministry of SOEs appointed PT PLN and PT Krakatau Steel as the coordinator of the tsunami disaster post in Banten, focused on three regions, namely:

1. *Rayon Pandeglang PLN Office, Jl. Ahmad Yani No.11 KM Pandeglang, Banten;*
2. *Jl. Raya Karang Bolong, next to the Koramil Cinangka Office;*
3. *Jl. Jenderal Sudirman, No. 156, Labuhan. Command Post in Labuan branch office of Bank BRI.*

The actions taken by SOEs are to restore the post-disaster electricity services, to help evacuate and other actions. PLN through the Greater Jakarta distribution main unit immediately sent 16 cars and the technical service team included:

- *128 personnel;*
- *Special service detachment team;*
- *HIAP cars*
- *Electrical materials (10 low voltage network cable (JTR), 20 home connection cable (SR), and 285 insulator pins)*

The total distribution of aid provided for the disaster in Banten was recorded at IDR 2,310,600,957, which was given by 32 SOEs. The assistance was included in the CSR program or Community Development (BL) of SOEs. Meanwhile, the other forms of assistance provided by SOEs are described as follows.



Sementara untuk wilayah Lampung, Kementerian BUMN menunjuk PT PN VII, PT Bukit Asam, dan Bank BNI sebagai koordinator posko bencana tsunami di Lampung, yang difokuskan di 3 wilayah, yakni:

1. Desa Banding, Kecamatan Rajabasa (Depan Kantor Kecamatan Rajabasa), Lampung Selatan;
2. BNI;
3. Jl. Indra Bangsawan (PT Bukit Asam).

Adapun total penyaluran bantuan yang diberikan untuk bencana di Lampung, tercatat sebesar Rp 1.296.547.400,- yang diberikan oleh 32 BUMN, dimana bantuan ini termasuk dalam program CSR atau Bina Lingkungan (BL) BUMN. Sementara bentuk bantuan lainnya yang juga diberikan oleh BUMN adalah sebagaimana yang terlampir di bawah ini.

Meanwhile for the Lampung region, the Ministry of SOEs appointed PT PN VII, PT Bukit Asam, and Bank BNI as the coordinator of the tsunami disaster post in Lampung, focused in three regions, namely:

1. *Banding Village, Rajabasa Sub-District (In Front of Rajabasa Sub-District Office), South Lampung;*
2. *BNI;*
3. *Jl. Indra Bangsawan (PT Bukit Asam).*

The total distribution of aid provided for the disaster in Lampung was recorded at IDR 1,296,547,400, which was given by 32 BUMNs. This assistance was included in the SOEs CSR program or Community Development Program. Meanwhile, the other forms of assistance provided by SOEs are described as follows.



Commemoration of Independence Day of Republic of Indonesia 2018

Peringatan HUT Kemerdekaan RI 2018

Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2018, BUMN bersama-sama melakukan peringatan rangkaian HUT RI secara serentak di 34 provinsi. Di tahun 2018 ini, 91 BUMN turut memeriahkan HUT RI, menjadi bagian dari bagaimana BUMN mengisi kemerdekaan bersama-sama dengan masyarakat secara langsung. Sinergi BUMN tidak hanya diwujudkan dalam kegiatan bisnis usaha, namun juga dalam program-program yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan lingkungan. Program yang mengenalkan kehadiran BUMN juga membuka wawasan masyarakat mengenai Indonesia yang begitu besar, begitu kaya akan kearifan budaya dan kekayaan bangsa.

On the Independence Day of the Republic of Indonesia on August 17, 2018, SOEs jointly commemorated the series of Indonesian Independence Day simultaneously in 34 provinces. In 2018, 91 SOEs celebrated the Republic of Indonesia's Independence Day, becoming a part of how SOEs celebrate the independence together in direct touch with the community. The synergy of SOEs is not only manifested in business activities, but also in programs whose benefits are directly enjoyed by the community and environment. The programs that introduce the presence of state-owned enterprises also open the public's insight into Indonesia that is so large, so rich in cultural wisdom and the nation's wealth.

Kementerian BUMN bersama-sama BUMN hadir di 34 Provinsi seluruh Indonesia, untuk "membangun pemahaman para pemangku kepentingan (*stakeholders*)" mengenai peran Kementerian BUMN dan BUMN sebagai Agen Pembangunan (*Agent of Development*) untuk turut serta "Membangun Kapasitas Nasional (*National Capacity Building*)". HUT Kemerdekaan RI dilaksanakan bersama pemerintah daerah setempat dan masyarakat di seluruh provinsi agar pembangunan masyarakat dan infrastruktur dapat terasa hingga ke satuan terkecil. Seluruh rangkaian kegiatan yang tergabung di dalam BUMN Hadir Untuk Negeri ini diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan bangsa Indonesia serta sebagai wadah untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

The Ministry of SOEs together with SOEs is present in 34 provinces throughout Indonesia, to "build the understanding of stakeholders (stakeholders)" regarding the role of the Ministry of SOEs and SOEs as Agent of Development to participate in "National Capacity Building". The Independence Day of the Republic of Indonesia was carried out with the local government and communities in all provinces, thus the development of the community and infrastructure could be enjoyed to the smallest units. The whole series of activities incorporated in the SOEs Present for the Country is expected to be a momentum for the rise of the Indonesian nation and as a forum to foster the unity of the Indonesian.

Sinergi BUMN dalam Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2018 diharapkan dapat menjadi kekuatan untuk membantu mensejahterakan masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas, dampak yang lebih besar, dan waktu yang relatif menjadi lebih cepat. Para peserta maupun pemangku kepentingan di seluruh Indonesia diharapkan akan memiliki pandangan yang baik tentang Kementerian BUMN dan seluruh BUMN, yang telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui kerja nyata yang berdampak langsung.

The synergy of SOEs in the Republic of Indonesia Independence Day August 17 2018 is expected to be a force to help the community welfare with a wider range, greater impact, and relatively shorter time. The participants and stakeholders throughout Indonesia are expected to have a good view of the Ministry of SOEs and all state-owned enterprises, which have played a role in improving the nation welfare through real work that shows a direct impact.

Rangkaian HUT RI 17 Agustus 2018 yang digelar BUMN yang dilakukan di beberapa daerah adalah sebagai berikut:

The sequences of Republic of Indonesia Independence Day on August 17 2018 held by BUMNs carried out in several regions are as follows:

➤ ACEH DARUSSALAM

Upacara Bendera dilaksanakan di lapangan kantor BNI46, Banda Aceh. Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat di wilayah Kota Banda Aceh. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Provinsi Papua mendatangi berbagai tempat seperti kantor dan lokasi proyek bumn, museum dan tempat wisata di wilayah Aceh Darussalam.

➤ *ACEH DARUSSALAM*

The flag ceremony was held in the field of BNI46 office, Banda Aceh. 5 Km Healthy Walk was participated by various elements of the community in Banda Aceh City. Students Know the Archipelago was visited by students from Papua Province. They visited various places such as offices and locations of SOEs projects, museums and tourist attractions in Aceh Darussalam.

➤ SUMATERA UTARA

Upacara Bendera dilaksanakan di lapangan Kawasan Industri Medan dihadiri oleh berbagai perwakilan dari sekolah-sekolah di Sumatera Utara, berbagai BUMN, unsur TNI, Polri dan Damkar Kabupaten Deli Serdang, serta Paskibra dari sekolah terbaik Sumatera Utara. Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat, di Kawasan Industri Medan. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi 24 siswa terpilih yang berasal dari 13 kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat.

➤ *NORTH SUMATRA*

The flag ceremony was held in the field of Medan Industrial Zone. It was attended by various representatives from schools in North Sumatra, various SOEs, elements of TNI, Polri and Damkar Deli Serdang Regency, and Flag Hoisting Troop (Paskibra) from the top schools in North Sumatra. 5 Km Healthy Walk was participated by various elements of the community in Medan Industrial Area. Students Know the Archipelago was visited by 24 selected students from 13 districts and cities in West Papua.

➤ SUMATERA BARAT

Upacara Bendera diikuti ratusan peserta di lapangan Istana Baso, Pagaruyung, Batusangkar. Jalan Sehat 5 Km diselenggarkan di Kota Sawahlunto, diikuti ribuan peserta yang terdiri dari berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi 27 siswa dari Provinsi Sulawesi Selatan, mengikuti kegiatan bertemakan Wawasan Nusantara selama 2 hari bersama TNI, mengunjungi BUMN, edukasi wisata, alam dan budaya. Melihat Pusat Kebudayaan Minangkabau, serta bertandang ke Sekolah Diniyyah Putri Padang Panjang, sekolah tertua berbasis agama khusus putri.

➤ *WEST SUMATRA*

The flag ceremony was attended by hundreds of participants in the Istana Baso field, Pagaruyung, Batusangkar. 5 Km Healthy Walk was held in Sawahlunto City, participated by thousands of participants consisting of various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by 27 students from South Sulawesi, taking part in a two-day event with the theme of Archipelago Insight with TNI, visiting SOEs, as well as organizing the tourism of education, nature and culture. They went sightseeing at the Minangkabau Cultural Center, and visiting Diniyyah Putri Padang Panjang School, the oldest girls-only Islamic school.

➤ RIAU

Upacara Bendera dilaksanakan di lapangan lapangan kantor PLN Pekanbaru, Riau. Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat di Kota Pekanbaru. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi 23 siswa dari berbagai sekolah di Provinsi Maluku. Mengunjungi lokasi proyek BUMN, Stasiun *Offtake* PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) di Perawang, pelatihan bersama TNI di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, serta edukasi alam dan budaya, khususnya budaya Melayu.

➤ *RIAU*

The flag ceremony was held at the field of PLN office in Pekanbaru, Riau. 5 Km Healthy Walk was participated by various elements of the community in Pekanbaru City. Students Know the Archipelago was visited by 23 students from various schools in Maluku Province. They visited the location of the SOEs projects, the Offtake Station at PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) in Perawang, joint training with TNI at Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, as well as education on nature and culture, especially Malay culture.

➤ KEPULAUAN RIAU

Upacara Bendera dilaksanakan di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengikuti berbagai edukasi, seperti wisata, alam, budaya serta edukasi mengenal BUMN.

➤ *RIAU ISLANDS*

The Flag Ceremony was held in Bunguran Northeast District, Natuna Island, Riau Islands. 5 Km Healthy Walk was participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by the students from West Nusa Tenggara Province who take part in various education programs, such as tourism, nature, culture and education to learn about SOEs.

➤ JAMBI

Upacara Bendera dilaksanakan Unit Usaha Batang Hari PTPN 6, Jambi. Jalan Sehat 5 Km dimulai dari kantor Gubernur Jambi yang diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi 23 siswa, 3 guru pendamping dari Provinsi Maluku Utara, mendatangi berbagai tempat seperti pembuatan batik Jambi binaan BUMN, situs Muaro Jambi, perkebunan teh tertua di kawasan Gunung Kerinci dan tempat lainnya di wilayah Jambi.

➤ *JAMBI*

The Flag Ceremony was held by Batang Hari PTPN 6 Business Unit, Jambi. 5 Km Healthy Walk started from the Jambi Governor's office which is participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by 23 students, 3 accompanying teachers from North Maluku Province. They came to various places such as Jambi batik making assisted by SOEs, Muaro Jambi site, the oldest tea plantation in Gunung Kerinci area and other places in Jambi.

➤ SUMATERA SELATAN

Upacara Bendera dilaksanakan oleh Angkasa Pura II di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Provinsi Jawa Timur yang melakukan kegiatan edukasi pengenalan BUMN, kegiatan Bela Negara bersama TNI, edukasi wisata alam dan budaya. Edukasi sejarah mengantarkan siswa SMN mengunjungi Pulau Kemaro yang menyimpan mitologi percintaan antara puteri Palembang dengan pangeran dari Tiongkok.

➤ *SOUTH SUMATRA*

The flag ceremony was carried out by Angkasa Pura II at Sultan Mahmud Badaruddin II Airport in Palembang. 5 Km Healthy Walk was participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by the students from East Java who carry out educational activities on the introduction of SOEs, the activities of the National Defense with TNI, education on natural and cultural tourism. The historical education was led SMN students to visit Kemaro Island, which created the mythology of romance between Palembang's daughter and a prince from China.

➤ BANGKA BELITUNG

Upacara Bendera di Kepulauan Bangka Belitung diikuti oleh pegawai BUMN dan unsur masyarakat lainnya. Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Provinsi Sulawesi Tengah yang mengunjungi berbagai tempat seperti edukasi mengenal BUMN, wisata alam dan budaya, serta mengikuti kegiatan bersama TNI dan mengunjungi Rumah Baca Akar Gapabel yang menjadi tempat untuk menumbuhkan minat membaca di kalangan masyarakat.

➤ *BANGKA BELITUNG*

The flag ceremony in Bangka Belitung Islands was attended by SOEs employees and other community elements. 5 Km Healthy Walk was participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by students from Central Sulawesi. They visited various places such as learning about SOEs, natural and cultural tourism, and participating in activities with TNI and visiting Akar Gapabel Reading House as a place to foster interest in reading among the community.

➤ BENGKULU

Upacara Bendera dilaksanakan di halaman cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno. Jalan Sehat 5 Km diikuti dari berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Sulawesi Barat yang mengunjungi berbagai tempat seperti edukasi mengenal BUMN, wisata alam dan budaya, serta mengikuti kegiatan bersama TNI dan mengunjungi perkebunan kopi di Kabupaten Kepahiang.

➤ LAMPUNG

Upacara Bendera, Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Kegiatan peserta Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Provinsi Gorontalo yang mengunjungi berbagai tempat. Edukasi mengenal BUMN, wisata alam dan budaya, serta mengikuti kegiatan bersama TNI, para siswa diajarkan dasar-dasar penyelaman.

➤ DKI JAKARTA

Upacara Bendera dilaksanakan di Kantor Kementerian BUMN. Jalan Sehat 7300m diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari provinsi termuda, Kalimantan Utara, yang melakukan berbagai edukasi seperti pengenalan BUMN, tinggal bersama TNI serta edukasi wisata ke wahana bermain di bagian utara Kota Jakarta.

➤ JAWA BARAT

Upacara Bendera dan Jalan Sehat 5 Km dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang diikuti dari berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari berbagai sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang melakukan berbagai edukasi. Berkunjung ke kantor dan proyek BUMN, mengenal Wawasan Nusantara oleh TNI dan sejumlah siswa SMN melakukan pertunjukkan budaya pada saat Pesta Rakyat berlangsung.

➤ *BENGKULU*

The flag ceremony was held in the courtyard of the cultural heritage house of Bung Karno Exile. 5 Km Healthy Walk was participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by the students from West Sulawesi who visit various places such as education about SOEs, natural and cultural tourism, and participating in activities with TNI and visiting coffee plantations in Kepahiang District.

➤ *LAMPUNG*

Flag Ceremony and 5 Km Healthy Walk were participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by the students from Gorontalo who came to see various places such as education about SOEs, natural and participating in cultural tourism. In the activity with TNI, the students are taught the basics of diving.

➤ *DKI JAKARTA*

The flag ceremony was held at the Ministry of SOEs Office. 7300m Healthy Walk was participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by the students from the newest province, North Kalimantan. They carried out various education programs such as the introduction of SOEs, stay with TNI and tourism education to playgrounds in the northern part of Jakarta City.

➤ *WEST JAVA*

Flag Ceremony and 5 Km Healthy Walk were carried out in the area of West Java Province. These activities were participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by the students from various schools in Southeast Sulawesi who did a variety of educational activities including a visit to the office and the SOEs projects, learning the Archipelago Insights by TNI. Several SMN students did the cultural show when the People's Festival took place.

➤ BANTEN

Upacara Bendera dan Jalan Sehat 5 Km diikuti dari berbagai unsur kalangan masyarakat di Kota Pandeglang, Banten. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Provinsi Kalimantan Selatan yang melakukan berbagai kegiatan seperti edukasi mengenal BUMN, edukasi budaya dan sejarah. Siswa-siswa turut menunjukkan keterampilan seni tari khas Dayak kepada masyarakat Rangkasbitung.

➤ JAWA TENGAH

Upacara Bendera dilaksanakan dilapangan Gedung Lawang Sewu di Kota Semarang. Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Kalimantan Barat yang melakukan edukasi sejarah, wisata dan budaya serta pengenalan BUMN dengan berkunjung ke pengolahan limbah oleh PT KIW Semarang.

➤ DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Upacara Bendera dilaksanakan di lapangan Kantor Desa Palihan, Kulon Progo. Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa terpilih dari berbagai sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah. Beragam kegiatan dilakukan, seperti, edukasi pengenalan BUMN, sejarah dan budaya. Edukasi lingkungan dilakukan peserta SMN dengan melakukan kegiatan membersihkan kawasan Pantai Pelangi di wilayah Yogyakarta.

➤ JAWA TIMUR

Upacara Bendera di lokasi proyek Tol Pandaan - Malang. Jalan Sehat 5 Km di Kota Madiun diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi 23 siswa dari Provinsi Sumatera Selatan mengunjungi lokasi museum, tinggal bersama TNI, melihat pembuatan kereta sebagai edukasi mengenal BUMN.

➤ BALI

Upacara Bendera diselenggarakan di Hotel Grand Inna Bali Beach Sanur. Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Kalimantan Timur mengunjungi lokasi museum, 2 Hari Bersama TNI, mendapatkan jamuan dari Puri Ageng Blahbatuh Gianyar dan mendapatkan edukasi lingkungan dengan melepas liarkan tukik di Pulau Serangan.

➤ *BANTEN*

Flag Ceremony and 5 Km Healthy Walk were participated by various elements of the community in Pandeglang City, Banten. Students Know the Archipelago was visited by the students from South Kalimantan who carry out various activities such as the education about SOEs and the cultural and historical education. The students also showcased the typical Dayak dance skills to Rangkasbitung.

➤ *CENTRAL JAVA*

The flag ceremony was held in the field of Lawang Sewu Building in Semarang City. 5 Km Healthy Walk was participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by the students from West Kalimantan who got the education of history, tourism and culture as well as the introduction of SOEs by visiting waste processing by PT KIW Semarang.

➤ *YOGYAKARTA SPECIAL REGION*

The flag ceremony was held at the Palihan Village Office field, Kulon Progo. 5 Km Healthy Walk was participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by the selected students from various schools in Central Kalimantan. Various activities were carried out, such as the introduction of SOEs, the history and culture. Environmental education was carried out by SMN participants through the activity to clean Pelangi Beach area in Yogyakarta.

➤ *EAST JAVA*

Flag Ceremony took place at Pandaan Tol - Malang project site. 5 Km Healthy Walk in Madiun City was participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by 23 students from South Sumatra, visiting the location of the museum, staying with TNI, seeing the making of train as an education to SOEs.

➤ *BALI*

Flag Ceremony was held at the Grand Inna Bali Beach Hotel Sanur. 5 Km Healthy Walk was participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by the students from East Kalimantan visiting the location of the museum, two days with TNI, getting a banquet from Puri Ageng Blahbatuh Gianyar and getting environmental education by releasing turtles on Serangan Island.

➤ NUSA TENGGARA BARAT

Upacara Bendera dilaksanakan di lapangan Terminal Gilimas, Lembar, Lombok. Kegiatan lain adalah menyalurkan bantuan bagi warga yang terkena dampak bencana gempa melalui posko bencana di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.

➤ NUSA TENGGARA TIMUR

Upacara Bendera dan Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Tak lupa mengunjungi tempat yang bersejarah, yaitu rumah pengasingan Bung Karno di Ende. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa-siswa terpilih dari Provinsi Sulawesi Utara Mereka melakukan berbagai kegiatan, edukasi sejarah dan budaya serta edukasi mengenal BUMN dengan melihat langsung bagaimana produksi garam laut.

➤ KALIMANTAN BARAT

Upacara Bendera, Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi oleh siswa terpilih dari Provinsi Jawa Tengah. Melakukan berbagai edukasi, seperti mengunjungi sekolah unggulan, mengenal BUMN, edukasi sejarah dan budaya, mendatangi Tugu Khatulistiwa serta mengikuti kegiatan Bela Negara bersama Kodam 12 Tanjung Pura.

➤ KALIMANTAN TENGAH

Upacara Bendera, Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan berbagai kegiatan edukasi mengenal BUMN, sejarah, adat istiadat setempat seperti mengenal tradisi penyambutan tamu dengan upacara adat Potong Pantang dan Tampung Tawar.

➤ KALIMANTAN SELATAN

Upacara Bendera, Jalan Sehat 5 Km dilaksanakan di Kota Banjarmasin, diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa terpilih dari Provinsi Banten, mendatangi berbagai tempat dan edukasi seperti mengenal BUMN, sejarah dan budaya serta edukasi lingkungan dengan menanam bibit di hutan Mangrove.

➤ *WEST NUSA TENGGARA*

The flag ceremony was held at the Gilimas, Lembar, Lombok Terminal field. Another activity was channeling aid to the residents affected by the earthquake through a disaster post in Gunungsari District, West Lombok.

➤ *EAST NUSA TENGGARA*

Flag Ceremony and 5 Km Healthy Walk were participated by various elements of the community. A historic place, namely Bung Karno's exile home in Ende, becomes a tourist destination worth to visit. Students Know the Archipelago was visited by selected students from North Sulawesi Province. They carried out various activities, historical and cultural education and education to learn about SOEs by seeing firsthand how sea salt is produced.

➤ *WEST KALIMANTAN*

Flag Ceremony and 5 Km Healthy Walk were participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by selected students from Central Java Province. They conducted various education, such as visiting top schools, introduction to SOE, historical and cultural education, going to the Equator Monument and taking part in the National Defense activities with Kodam 12 Tanjung Pura.

➤ *CENTRAL KALIMANTAN*

Flag Ceremony and 5 Km Healthy Walk were participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by the students from the Special Province of Yogyakarta who carry out various educational activities to learn about SOE, history, local customs such as recognizing the tradition of welcoming guests with traditional ceremonies of Cut Pantang and Tampung Tawar.

➤ *SOUTH KALIMANTAN*

Flag Ceremony and 5 Km Healthy Walk were held in Banjarmasin City, participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by the selected students from Banten Province, visiting various places and educational activities such as introduction to SOEs, historical, cultural and environmental education by planting seeds in the mangrove forest.

➤ KALIMANTAN TIMUR

Upacara Bendera, Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Provinsi Bali, mendatangi berbagai tempat dan kegiatan, seperti susur Sungai Mahakam, edukasi mengenal BUMN, edukasi tentang lingkungan dan konservasi.

➤ KALIMANTAN UTARA

Upacara Bendera, Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Kegiatan pertukaran siswa, Siswa Mengenal Nusantara, dikunjungi oleh siswa dari Provinsi DKI Jakarta yang melakukan kegiatan edukasi lingkungan, mendatangi museum serta berjumpa dengan kepala adat Suku Tidung. Kegiatan 2 Hari Bersama TNI dan mengunjungi Pulau Sebatik naik KAL Bunyu hingga Patok 3 di Desa Aji Kuning, sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia.

➤ SULAWESI UTARA

Upacara Bendera dilaksanakan di Pelabuhan Tua Tahuna, Kepulauan Sangihe. Jalan Sehat 5 Km, sepanjang boulevard dan diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Kali ini, Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melihat Festival Bunga Tomohon, melakukan edukasi mengenal BUMN, edukasi wisata dan alam di wilayah Sulawesi Utara serta 2 Hari Bersama TNI, mengenal Wawasan Nusantara.

➤ SULAWESI TENGAH

Upacara Bendera, Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Provinsi Bangka Belitung mendatangi berbagai tempat dan edukasi seperti pengenalan BUMN, edukasi budaya dan tradisi di Desa Mata Ue yang hidup berdampingan dengan alam serta merawat tradisi leluhur. Edukasi bersama TNI AL yang berpatroli di Teluk Palu. Siswa juga melihat kegiatan yang dilakukan oleh kru Air Traffic Control (ATC) Bandara Mutiara Sis Al Jufri, sebelum bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

➤ SULAWESI BARAT

Upacara Bendera, Jalan Sehat 5 Km serta Pesta Rakyat diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat.

➤ *EAST KALIMANTAN*

Flag Ceremony and 5 Km Healthy Walk were participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by the students from Bali, coming to see various places and activities, such as the flow of Mahakam River, educational activities about SOEs, education about the environment and conservation.

➤ *NORTH KALIMANTAN*

Flag Ceremony and 5 Km Healthy Walk were participated by various elements of the community. The student exchange activity, Students Know the Archipelago, was visited by the students from DKI Jakarta who carry out environmental education activities, such as visiting the museum and meeting the traditional chief of Tidung Tribe. They also carried out the two-day activities with TNI and visited Sebatik Island using KAL Bunyu to Patok 3 in Aji Kuning Village, as the border region between Indonesia-Malaysia.

➤ *NORTH SULAWESI*

The flag ceremony was held at the Tua Tahuna Port, Sangihe Islands. 5 Km Healthy Walk along the boulevard was participated by various elements of the community. This time, Students Know the Archipelago was visited by the students from East Nusa Tenggara. They went sightseeing to the Tomohon Flower Festival, getting the education of SOEs, tourism and nature education in North Sulawesi and two-day activities with TNI, learning bout the Archipelago's Insight.

➤ *CENTRAL SULAWESI*

Flag Ceremony and 5 Km Healthy Walk were participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago was visited by the students from Bangka Belitung Province visiting various places and education such as the introduction of BUMN, education of culture and tradition in Mata Ue Village which lives side by side with nature and takes care of ancestral traditions. The also got the educational activity with the Indonesian Navy who patrol Palu Bay. The students also observed the activities carried out by the crew of the Air Traffic Control (ATC) Mutiara Sis Al Jufri Airport, before the earthquake and tsunami disaster in Central Sulawesi.

➤ *WEST SULAWESI*

Flag Ceremony, 5 Km Healthy Walk and Folk Festival were participated by various elements of the community.

➤ SULAWESI TENGGARA

Upacara Bendera dilaksanakan di Konawe Utara. Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi 30 siswa, 3 guru pendamping dari Jawa Barat mendatangi berbagai tempat dan melakukan edukasi mengenal BUMN, edukasi ke perpustakaan dan sekolahan unggulan di kendari serta mengikuti edukasi bersama TNI dengan belajar memanah.

➤ SULAWESI SELATAN

Upacara Bendera, Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Sumatera Barat mendatangi lokasi proyek BUMN, PLTB Jeneponto yang merupakan proyek pembangkit listrik tenaga angin, edukasi wisata, edukasi mengenal sejarah dengan mengunjungi situs taman purbakala Kompleks Makam Raja-raja Binamu di Jeneponto

➤ GORONTALO

Upacara Bendera, Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Lampung melakukan berbagai kegiatan seperti pengenalan BUMN dan edukasi lainnya.

➤ MALUKU

Upacara Bendera dilaksanakan di Kota Tual. Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi 23 siswa, 3 guru pendamping dari Provinsi Riau, mengikuti 5 materi wawasan dan mengunjungi berbagai tempat di wilayah Provinsi Maluku.

➤ MALUKU UTARA

Upacara Bendera dilaksanakan di Terminal Penumpang Pelabuhan Indonesia 4. Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Provinsi Jambi, menjalani berbagai edukasi, mengenal BUMN, wisata dan alam serta mengunjungi Kesultanan Ternate.

➤ *SOUTHEAST SULAWESI*

The flag ceremony was held in Konawe Utara. 5 Km Healthy Walk was participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago were visited by 30 students, 3 accompanying teachers from West Java. They visited various places and conducted education to learn about SOEs, education to the leading libraries and schools in Kendari and education with TNI by learning archery.

➤ *SOUTH SULAWESI*

Flag Ceremony and 5 Km Healthy Walk were participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago were visited by the students from West Sumatra to visit the SOEs project site, Jeneponto PLTB which is a wind power plant project, tourism education, education about history by visiting the ancient park site Binamu Kings Complex in Jeneponto.

➤ *GORONTALO*

Flag Ceremony and 5 Km Healthy Walk were participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago were visited by the students from Lampung doing various activities such as the introduction of SOEs and other educational activities.

➤ *MALUKU*

The flag ceremony was held in Tual City. 5 Km Healthy Walk was participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago were visited by 23 students, 3 accompanying teachers from Riau Province. They attended five insightful materials and visited various places in Maluku Province.

➤ *NORTH MALUKU*

The Flag Ceremony was held at the Indonesian Port Passenger Terminal 4. The event of Healthy Walk 5 Km was participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago were visited by the students from Jambi Province, undergoing various education including the introduction of SOEs, tourism and nature and visiting the Sultanate of Ternate.

➤ PAPUA BARAT

Upacara Bendera dilaksanakan di Manokwari. Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Kali ini, Siswa Mengenal Nusantara dikunjungi siswa dari Provinsi Sumatera Utara, mendatangi berbagai tempat dan kegiatan edukasi, mengenal BUMN, edukasi mengenal budaya dan tradisi, serta lokasi wisata yang menjadi simbol Papua Barat, Raja Ampat serta Pulau Mansinam, desa awal penyebaran agama Kristen yang memiliki Patung Yesus setinggi 30 meter.

➤ PAPUA

Upacara Bendera dilaksanakan di Terminal BBM Jayapura. Jalan Sehat 5 Km diikuti berbagai unsur kalangan masyarakat. Pelaksanaan program Siswa Mengenal Nusantara diikuti oleh siswa-siswa dari Provinsi Aceh Darussalam. Pelaksanaan kegiatan di Jayapura ini juga dihadiri Menteri BUMN Rini M. Soemarno.

➤ *WEST PAPUA*

The flag ceremony was held in Manokwari. 5 Km Healthy Walk was participated by various elements of the community. This time, Students Know the Archipelago was visited by the students from North Sumatra, came to see various places and educational activities including the introduction to SOEs, education about culture and tradition, and tourism attractions that become the symbols of West Papua, Raja Ampat and Mansinam Island, the villages that spread Christianity with 30 meter tall Jesus Statue.

➤ *PAPUA*

The flag ceremony was held at the Jayapura BBM Terminal. 5 Km Healthy Walk was participated by various elements of the community. Students Know the Archipelago program was followed by the students from Aceh Darussalam. The activity in Jayapura was also attended by Minister of SOEs Rini M. Soemarno.



09

TATA KELOLA PEMERINTAHAN
GOOD GOVERNANCE

KEMENTERIAN BUMN BERKOMITMEN UNTUK MEMBANGUN TATA KELOLA ORGANISASI YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN TERPERCAYA HAL TERSEBUT DIWUKUDKAN DENGAN TERUS MELAKUKAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN, PROSES, DAN PROSEDUR YANG DIJALANKAN

The Ministry of SOEs is committed to build a clean, effective, and reliable organizational governance, manifested by continually improving the policies, processes, and procedures

Good Government Governance in The Ministry of SOEs

Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Kementerian BUMN



Kementerian BUMN berkomitmen untuk membangun tata kelola organisasi yang bersih, efektif, dan terpercaya. Guna mewujudkan hal tersebut, Kementerian BUMN selalu berupaya untuk terus melakukan penyempurnaan kebijakan, proses, dan prosedur yang dijalankan, baik dalam kegiatan pembinaan BUMN maupun dalam kegiatan pengelolaan internal di Kementerian BUMN.

Salah satu landasan dasar dari berhasil atau tidaknya tatakelola pemerintahan yang di jalankan oleh Kementerian, dapat di ukur dari akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Di mana berdasarkan atas Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

The Ministry of SOEs is committed to establish clean, effective and reliable organizational governance. In order to realize this expectation, the Ministry of SOEs always strives to continuously improve the policies, processes and procedures, both in the SOES development activities and in internal management activities at the Ministry of SOEs.

One of the basic foundations in the success or failure of governance run by the Ministry, can be measured by the accountability of government agencies' performance. Based on Presidential Regulation No. 29 of 2014 concerning Government Agency's Performance Accountability System (SAKIP), the Ministry is required to implement performance accountability of Government agency as a form of accountability of Government agency in achieving the organization's mission and objectives.

Performance Accountability is the realization of Government agency's obligation to account for the successful/fail implementation of programs and activities mandated by stakeholders in order to achieve the organization's mission in a measurable manner with performance targets/set targets through periodic reports of government agency performance.

Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang terdiri laporan kinerja interim (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, telah merumuskan Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari 5 komponen yaitu Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Kinerja.

Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Kementerian BUMN dengan parameter penilaian yang terdiri dari Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System* (WBS), Penanganan Benturan Kepentingan, Pembangunan Zona Integritas, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dari hasil penilaian tahun 2018, diperoleh nilai 11,40 dari bobot penilaian sebesar 12,00 atau mencapai 95,00%.

At the end of each fiscal year, each agency submits an accountability reports on government agency performance consisting of interim performance reports (quarterly) and annual performance reports to the Minister of Finance, Minister of National Development Planning/Head of National Development Planning Agency and Minister of Administrative and Bureaucratic Reform.

The Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform has formulated the Government Agency's Performance Accountability System Components consisting of five components namely Planning, Measurement, Reporting, Evaluation and Performance Achievement.

Meanwhile, the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform has also conducted an assessment of the Governance implementation in the Ministry of SOEs with assessment parameters consisting of Gratification, Implementation of SPIP,Public Complaints, Whistleblowing System (WBS), Handling Conflict of Interest, Development of Zone Integrity, Government Internal Supervision Apparatus (APIP). Based on the assessment results in 2018, a nominal of 11.40 was obtained from an assessment value of 12.00 or 95.00%.

Penilaian Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Kementerian BUMN (2016-2018)
Assessment of Governance Implementation of Ministry of SOEs (2016-2018)

No.	Parameter	Bobot *Value*	2016	2017	2018
1	Gratifikasi *Gratification*	1,5	1,5	1,5	1,5
2	Penerapan SPIP *Implementation of SPIP*	1,5	1,0	1,21	1,5
3	Pengaduan Masyarakat *Public Complaints*	2,0	1,54	1,54	2,0
4	Whistle Blowing System (WBS) *Whistle Blowing System (WBS)*	1,5	1,15	1,25	1,5
5	Penanganan Benturan Kepentingan *Handling Conflict of Interest*	1,5	1,30	1,15	1,4
6	Pembangunan Zona Integritas *Development of Integrity Zone*	2,5	1,50	1,75	2,0
7	APIP *APIP*	1,5	1,13	1,38	1,5
	Total *Total*	12	9,12	9,78	11,40
	Nilai dari Kemenpan RB *Value of Kemenpan RB*	12	8,24	8,28	11,40

Information Disclosure
Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana telah diperbarui terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014, yang didalamnya mencakup ruang lingkup kewenangan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berada di Bagian Humas dan Protokol, serta mekanisme penjawaban permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait.

Pelaksanaan fungsi PPID berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-10/MBU/07/2015 yang telah diubah oleh PER-06/MBU/12/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara berada di Bagian Humas dan Protokol, yang dalam hal ini dilakukan melalui koordinasi Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat. Subbagian ini menjalankan fungsi melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas pengelolaan PPID serta pelaksanaan proses pemenuhan dan pengelolaan informasi publik sebagaimana PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN.

Bagian Humas dan Protokol sebagai pelaksana pelayanan informasi publik, terdiri atas seorang Kepala Bagian, tiga orang Kepala Subbagian, tiga orang Pelaksana PNS, dan lima orang Pelaksana Non-PNS. Pada tahun 2018, pelayanan permohonan informasi publik dilakukan oleh satu orang pelaksana non-PNS.

➤ PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan permohonan informasi publik dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Permohonan informasi secara langsung dapat disampaikan kepada Bagian Humas dan Protokol Lantai 3 Gedung Kementerian BUMN sedangkan permohonan informasi tidak langsung, diantaranya dilakukan melalui surat elektronik di alamat ppid@bumn.go.id serta melalui portal publik dengan pengisian formulir permohonan informasi publik yang ada pada alamat ppid.bumn.go.id.

Public Information Disclosure in the Ministry of SOEs refers to the Regulation Minister of SOEs No: PER-08/MBU/2014 dated June 30, 2014 concerning Guidelines for Information and Documentation Management in the Ministry of SOEs as updated recently with Regulation of Minister of SOEs No: PER-12/MBU/10/2015 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs No: PER-08/MBU/2014 dated 30 June 2014. It includes the scope of authority of the Ministry of SOEs' Public Information Service, appointment of Information and Documentation Management Officer (PPID) in the Public Relations Section and Protocol, and the mechanism for responding public information requests conducted by the Public Relations and Protocol Section in coordination with other related work units.

The implementation of PPID functions based on SOE Ministerial Regulation Number: PER-10/MBU/07/2015 which has been amended by PER-06/MBU/12/2017 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of State Owned Enterprises are in the Public Relations and Protocol Section, In this case, it is carried out through coordination of Inter-Institutional and Community Relations. This sub-section carries out the function of preparing material for coordination and implementation of the tasks of managing PPID as well as implementing the process of fulfilling and managing public information as PER-08/MBU/2014 concerning Guidelines for Information and Documentation Management within the Ministry of SOEs.

The Public Relations and Protocol Division as the executor of public information services, consists of a Head of Section, three Subdivision Heads, three PNS Executors, and five Non-PNS Executors. In 2018, the service for disclosing public information is carried out by a non-PNS executor.

➤ *PUBLIC INFORMATION SERVICES*

Public information request services are carried out both directly and indirectly. Requests for information can be submitted directly to the Public Relations and Protocol Section on the 3rd Floor of the Ministry of SOEs Building. Meanwhile, indirect information requests can be submitted including by e-mail at ppid@bumn.go.id and through the public portal by filling out the public information request form on the website ppid.bumn.go.id.

Selama tahun 2018, PPID Kementerian BUMN tercatat menerima 24 permohonan informasi publik, 3 (tiga) diantaranya tidak dapat diproses/ditolak dengan alasan tidak melengkapi persyaratan permohonan sesuai dengan ketetapan. Secara umum, proses pelayanan informasi membutuhkan waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing pelayanan, terhitung sejak diterima/ mendapat disposisi hingga pengesahan jawaban oleh PPID setelah berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Throughout 2018, PPID of the Ministry of SOEs on record received 24 public information requests. Three requests could not be processed/rejected as they did not complete the application requirements in accordance with the provisions. In general, the information service process takes ten working days and an extension of seven working days for each service, from the time of receipt/getting the disposition to the confirmation of answers by PPID after coordinating with the relevant work units.

Di penghujung tahun 2018, PPID Kementerian BUMN menghadapi sengketa informasi publik dengan pemohon sidang sengketa atas nama Sutarno Bin Martowiharso dengan registrasi permohonan Nomor 010/II/KIP-PS/2017 perihal Pengajuan Keberatan Informasi atas Surat Jawaban Permohonan Informasi PPID Kementerian BUMN Nomor S-11/S.MBU.33/12/2016 tanggal 19 Desember 2016.

At the end of 2018, the PPID of Ministry of SOEs encountered a public information dispute with the applicant the dispute trial on behalf of Sutarno Bin Martowiharso by registering an application No. 010/II/KIP-PS/2017 regarding the Submission of Objection Information on the Response Letter Request for PPID Information from the Ministry of SOEs No. S-11/S. MBU.33/12/2016 on December 19, 2016.

Sidang Sengketa semula dijadwalkan untuk disidangkan pada tanggal 4 Desember 2018 namun batal dilakukan mengingat Majelis berhalangan hadir pada sidang dimaksud sehingga akan dilanjutkan pada bulan Januari 2019 dengan agenda pemeriksaan awal termohon dan pemohon.

The Dispute Trial was originally scheduled to be heard on 4 December 2018. However, it was canceled because the Assembly was unable to attend the session. Thus, it would be continued in January 2019 with the agenda of the initial investigation of the defendant and the applicant.

➤ PERKEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kementerian BUMN terus berupaya untuk meningkatkan value di setiap lini, salah satunya adalah yang terkait dengan pelayanan informasi publik. Di akhir tahun 2018, Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian BUMN telah dilengkapi dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor KEP-01/PPID.KBUMN/12/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Daftar Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian BUMN serta Keputusan PPID Nomor KEP-02/PPID.KBUMN/12/2018 Tanggal 21 Desember 2018 dan Daftar Informasi Dikecualikan di lingkungan Kementerian BUMN.

Butir-butir Keputusan PPID Kementerian BUMN mencakup:

1. Daftar Informasi Publik
   a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
   b. Informasi Serta Merta
   c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
2. Daftar Informasi Dikecualikan

➤ *DEVELOPMENT OF PUBLIC INFORMATION SERVICES*

The Ministry of SOEs continually strives to increase value on every line, one of which is related to public information services. At the end of 2018, Public Information Disclosure within the Ministry of SOEs has been completed with Decree of Information and Documentation Management Official No. KEP-01/PID.KBUMN/12/2018 dated 3 December 2018 concerning List of Public Information in Management of Information and Documentation in the Ministry of SOEs and the Decree of PPID No. KEP-02/ PPID.KBUMN/12/2018 dated December 21, 2018 and List of Information Excluded in the Ministry of SOEs.

The items from PPID Decree of the Ministry of SOEs include:

1. *List of Public Information*
   a. *Information that must be announced periodically*
   b. *Necessarily Information*
   c. *Information that must be available at any time*
2. *List of Information Excluded*

➤ EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Evaluasi keterbukaan informasi publik dilakukan melalui penilaian keterbukaan informasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat selaku lembaga yang berwenang dalam mengatur implementasi keterbukaan informasi di setiap Kementerian/Lembaga. Evaluasi ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 PPID Kementerian BUMN mendapat nilai 67.71 dengan kategori Keterbukaan Badan Publik "Cukup Informatif". Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 46.51.

Peningkatan ini disebabkan adanya terobosan PPID Kementerian BUMN pada tahun 2018 berupa inovasi sistem pelayanan informasi melalui Portal PPID (ppid.bumn.go.id) yang telah diluncurkan pada Oktober 2018 silam. Terobosan ini menjadi wujud nyata komitmen Kementerian BUMN untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas. Portal ini memangkas waktu pelayanan menjadi lebih efisien sehingga proses pemenuhan permohonan informasi lebih optimal.

Pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan informasi tahun 2018 dilakukan dengan 1 (satu) termin penilaian yang disebabkan adanya perubahan kebijakan Komisi Informasi Pusat. Proses penilaian pada tahun ini meliputi pengisian *Self Assesment Quitionare* (SAQ) oleh Badan Publik dan tahapan presentasi oleh PPID tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian BUMN.

➤ *EVALUATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE*

Evaluation of public information disclosure is carried out through an assessment of the information disclosure from Public Agency by the Central Information Commission as the authorized institution in regulating the implementation of information disclosure in each Ministry/Institution. This evaluation is carried out routinely every year. In 2018, the Ministry of SOEs' PPID score was 67.71 in the category of "Informative" Public Agency Disclosure. It increased compared to the previous year which obtained a value of 46.51.

The increase was due to the breakthrough of the Ministry of SOEs' PPID in 2018 through information service innovation of PPID Portal (ppid.bumn.go.id) launched in October 2018. This breakthrough is a real manifestation of the Ministry of SOEs' commitment to improve services to wider community. This portal cuts service time to be more efficient thus the process of fulfilling information request becomes more optimal.

The ranking of information disclosure in 2018 was carried out with one evaluation term due to the change in Central Information Commission's policy. The assessment process this year includes filling out the Self Assessment Quitionare (SAQ) by the Public Agency and the presentation stage by PPID on the Implementation of Public Information Disclosure in the Ministry of SOEs.

➤ KENDALA YANG DIHADAPI

• Internal

a. Pada dasarnya Kementerian BUMN telah menyediakan ruang khusus pelayanan informasi pada Lobi Selatan Gedung Kementerian BUMN. Namun dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bagian Humas dan Protokol, pelayanan informasi publik dilakukan di ruang kerja Bagian Humas dan Protokol. Hal ini dapat menghambat proses pelayanan informasi publik khususnya dalam hal tertib administrasi permohonan informasi publik.

➤ *OBSTACLES ENCOUNTERED*

• *Internal*

a. *Basically, the Ministry of SOEs has provided a special room for information services at the South Lobby of the Ministry of SOEs Building. However, due to limited human resources owned by the Public Relations and Protocol Section, public information services are carried out in the work room of Public Relations and Protocol Section. This condition may restrict the process of public information services, especially in orderly administration of public information requests.*

b. Pembentukan tim PPID ke depan perlu dikaji efektifitasnya mengingat tingkat respon unit maupun kesadaran unit di lingkungan Kementerian BUMN akan keterbukaan informasi publik ini masih terbilang rendah. Ke depan, Bagian Humas dan Protokol perlu menyusun program untuk meningkatkan minat dan kesadaran terhadap keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian BUMN.

c. Proses pemenuhan pelayanan informasi tahun 2018 dilakukan secara konvensional karena PPID Kementerian BUMN menaruh fokus pada pengembangan infrastruktur pelayanan informasi.

b. The formation of PPID team in the future needs to be assessed for its effectiveness, given the level of unit response and awareness within the Ministry of SOEs regarding public information disclosure is still relatively low. In the future, the Public Relations and Protocol Section needs to develop a program to increase interest and awareness of information disclosure in the Ministry of SOEs.

c. The process of fulfilling information services in 2018 was done conventionally since PPID of the Ministry of SOEs focuses on developing information service infrastructure.

• Eksternal

Permohonan informasi yang disampaikan kepada PPID Kementerian BUMN umumnya merupakan permohonan informasi publik atas bisnis yang dijalankan BUMN. Kementerian BUMN terlebih dahulu telah mengantisipasi hal tersebut dengan menetapkan definisi informasi publik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN dimana "Informasi publik yang menjadi kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibatasi pada Informasi terkait Kementerian BUMN sebagai Badan Publik."

Namun demikian, definisi dimaksud masih dapat disanggah dalam proses sengketa informasi mengingat Komisi Informasi Pusat berpedoman pada makna yang berbeda dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi, "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."

Oleh karena itu, dipandang perlu dilakukan pendekatan untuk membangun pemahaman bersama antara PPID Kementerian BUMN dengan Komisi Informasi Pusat.

• External

Requests for information submitted to the Ministry of SOEs' PPID are generally requests for public information on businesses run by SOEs. The Ministry of SOEs has anticipated this condition by establishing the definition of public information stipulated in the Minister of SOE Regulation No: PER-08/MBU/2014 dated June 30, 2014 concerning Guidelines for Management of Information and Documentation in the Ministry of SOEs stated "Public information that becomes the authority of the Information and Documentation Manager Officials is limited to Information regarding the Ministry of SOEs as a Public Agency. "

However, the definition can still be refuted in the information dispute process considering that the Central Information Commission is guided by different interpretation of Article 1 no. 2 of Law No. 14 of 2008 which stated, "Public Information is an information that is generated, stored, managed, sent, and/or received by a public agency relating to the organizer and organization of the state and/or the organizer and organization of other public agencies in accordance with this Law and other information relating to the public interest."

Therefore, it is deemed necessary to take an approach to build a common understanding between PPID of the Ministry of SOEs and the Central Information Commission.

➤ UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kementerian BUMN adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana
   Penyediaan ruangan permohonan informasi yang dekat dengan ruang kerja Bagian Humas dan Protokol serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung akan memaksimalkan proses pelayanan informasi.

2. Sumber Daya Manusia
   Penambahan sumber daya manusia yang khusus menangani pelayanan informasi publik sekurang-kurangnya 1 (satu) orang agar proses pemenuhan permohonan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan informasi di lingkungan Kementerian BUMN dapat berjalan dengan baik.

3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
   PPID Kementerian BUMN perlu meningkatkan kualitas pelayanan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis maupun pelatihan yang dilakukan dengan pihak Komisi Informasi Pusat melibatkan unit kerja Eselon II Kementerian BUMN selaku pemegang informasi sehingga terdapat pemahaman yang sama dalam kewajiban pemenuhan permohonan informasi.

4. Pembentukan Tim PPID
   Dengan adanya portal khusus PPID, ke depan perlu dilakukan penyesuaian Tim PPID tidak hanya dari segi keanggotaan, melainkan juga dari tugas para anggota tim. Tugas tersebut mencakup pengisian dan pembaruan daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan di masing-masing unit kerja anggota tim serta membangun kesadaran hak pemenuhan permohonan informasi publik dari masyarakat.

5. Penyesuaian pemahaman
   Perlu dilakukan pertemuan secara berkala antara Kementerian BUMN, perusahaan BUMN dan Komisi Informasi Pusat agar terjadi persamaan pemahaman tentang proses pemenuhan permohonan informasi publik di lingkungan Kementerian BUMN.

➤ *ATTEMPTS FOR SERVICE QUALITY IMPROVEMENT*

The recommendations and follow-up plans for improving the quality of information services at the Ministry of SOEs are as follows:

1. *Facilities and Infrastructure*
   The provision of information request room adjacent to the workspace of Public Relations and Protocol Section as well as the provision of supporting facilities and infrastructure will maximize information service process.

2. *Human Resources*
   The addition of human resources specifically dealing with public information services minimum one person to run the good process of fulfilling the request for public information and improving the quality of information services in the Ministry of SOEs.

3. *Socialization and Technical Guidance*
   The Ministry of SOEs' PPID needs to improve the quality of services through socialization, technical guidance and training conducted with the Central Information Commission involving the Echelon II Ministry of SOEs' work units as information holders. In the result, a common understanding in the obligation to fulfill information requests can be reached.

4. *Formation of PPID Team*
   Through the presence of a special PPID portal, in the future it is necessary to adjust the PPID Team not only in membership, but also from the duties of team members. The task includes filling out and updating the list of public information and a list of information excluded in each work unit of team members as well as building awareness of the right to fulfill requests for public information from the community.

5. *Adjustment of Understanding*
   It is necessary to hold regular meetings between the Ministry of SOEs, SOEs companies and the Central Information Commission thus a common understanding of the process of fulfilling public information requests in the Ministry of SOEs can be achieved.

Code of Ethics of The Ministry of SOEs Apparatus

Kode Etik Aparatur Kementerian BUMN

Kode Etik Aparatur Kementerian BUMN adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat pada Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Kementerian maupun dalam pergaulan sehari-hari. Kode Etik Aparatur Kementerian BUMN sendiri, di susun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2012 tentang Kode Etik Aparatur Kementerian BUMN.

Code of Ethics of the Ministry of SOEs Apparatus is a guideline of attitudes, behaviors, actions, values and norms that are obligating the employees in the Ministry of SOEs both in carrying out their main duties and functions as Ministry Apparatus and in daily interactions. The Ministry of SOEs' Apparatus Code of Ethics is structured based on Government Regulation No. 42 of 2004 concerning the Development of Civil Servant and the Code of Ethics for Civil Servants; and Minister of SOEs Regulation No: PER-04/MBU/2012 concerning Apparatus Code of Ethics at the Ministry of SOEs.

➤ MAKSUD DAN TUJUAN

Kode Etik dimaksudkan untuk:

1. Mewujudkan aparatur Kementerian BUMN yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
2. Peningkatan disiplin dan mengamalkan etika aparatur di lingkungan Kementerian BUMN

Kode Etik bertujuan untuk :

1. meningkatkan disiplin pegawai;
2. menjamin terpeliharanya tata tertib;
3. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Kementerian;
4. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan menjaga iklim kerja yang kondusif; dan
5. menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional.

➤ *PURPOSE AND OBJECTIVES*

The Code of Ethics is intended to:

1. *Realizing a clean, authoritative and responsible Ministry of SOEs apparatus and having integrity in carrying out their duties.*
2. *Increasing discipline and practicing apparatus ethics in the Ministry of SOEs*

The Code of Ethics aims to:

1. *Improve employee discipline;*
2. *Guarantee the maintenance of order;*
3. *Maintain the dignity, honor, image and credibility of the Ministry;*
4. *Ensure the smooth implementation of duties and maintain a conducive work climate; and*
5. *Create and maintain professional working condition and behavior.*

➤ PENERAPAN KODE ETIK INSAN KEMENTERIAN BUMN

Kementerian BUMN telah menekankan pada setiap pegawai di lingkungan Kementerian BUMN untuk patuh pada kode etik yang berlaku, sesuai dengan nilai-nilai dasar Etika Aparatur Kementerian BUMN, yakni sebagai berikut:

1. Integritas

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen dan kepatuhan pada peraturan yang ada serta mempertimbangkan benturan kepentingan.

a. Bersikap, berperilaku, dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan.
b. Konsisten dalam bersikap dan bertindak.

➤ *IMPLEMENTATION OF CODE OF ETHICS FOR THE MINISTRY OF SOES PERSONNEL*

The Ministry of SOEs has emphasized on every employee in the Ministry of SOEs to comply with the applicable code of ethics, in accordance with the basic values of the Ethics for the Ministry of SOEs Apparatus, namely as follows:

1. Integrity

To behave, act and make decisions based on the system of values, morals, honesty, commitment and compliance with prevailing regulations and to take conflicts of interest into consideration.

a. Behave and act honestly with oneself and the surrounding people.
b. Be consistent in behaving and making actions.

c. Memiliki komitmen terhadap visi dan misi Kementerian.
d. Disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas.
e. Komitmen terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab.
f. Melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
g. Menghindari benturan kepentingan yang menyebabkan suatu tindakan tidak objektif.

2. Profesionalisme

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang mendalam, pengalaman yang sesuai dan keterampilan yang memadai.

a. Setiap aktivitas pelaksanaan tugas harus menggunakan alasan dan pertimbangan yang benar dalam rangka menerapkan kemandirian dan obyektivitasnya.
b. Berorientasi terhadap hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas.
c. Bekerja sesuai dengan standar kinerja.

3. Produktivitas

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berbasis pada prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi baik dari sisi waktu, biaya dan sumberdaya lainnya.

a. Mampu bekerja keras.
b. Mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif.
c. Memberikan kontribusi signifikan bagi target yang telah ditetapkan.

4. Inisiatif

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan dengan berlandaskan pada semangat proaktif, kepeloporan dan perbaikan berkelanjutan.

a. Mampu menyampaikan ide-ide baru dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian.
b. Mempelopori tindakan untuk mencapai tujuan Kementerian dalam batas kewenangannya.

c. *Committing to the Ministry's vision and mission.*
d. *Be disciplined and responsible in carrying out duties.*
e. *Committing to the completion of duties and responsibilities.*
f. *Impelement duties based on the applicable rules and regulations.*
g. *Avoid conflicts of interest that lead to a biased action.*

2. *Professionalism*

To behave, act and make decisions based on in-depth knowledge, appropriate experience and adequate skills.

a. *All duties must be implemented based on the right reasons and considerations in order to implement independence and objectivity.*
b. *Orientation to work results that are systematic, directed and excellent.*
c. *To work according to performance standards.*

3. *Productivity*

To behave, act and make decisions based on the principles of effectiveness and efficiency in terms of time, cost and other resources.

a. *Be able to work hard.*
b. *Be able to use available resources efficiently and effectively.*
c. *Give significant contributions to the set targets.*

4. *initiative*

To behave, act and make decisions based on proactive, pioneering and sustainable improvement spirits.

a. *Be able to convey new ideas to improve the Ministry's performance.*
b. *Pioneer actions to achieve the Ministry's objectives within the authority limit.*

c. Mengambil tindakan positif sesuai dengan batas kewenangannya melebihi apa yang diminta untuk mencapai tujuan.
d. Bersikap proaktif tanpa diminta atau tanpa menunggu pihak lain.
e. Mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
f. Bertekad kuat untuk melakukan tugas dengan perbaikan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kementerian BUMN juga memastikan pada seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN untuk patuh dan mentaati setiap kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan, sebagai bentuk penerapan kode etik aparatur Kementerian BUMN, yakni sebagai berikut:

A. Kewajiban yang harus dilaksanakan terkait penerapan kode etik aparatur Kementerian BUMN adalah:

1. Menghormati kebebasan dan perbedaan agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
2. Bekerja sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh Kementerian.
   a. Menjaga nama baik serta bertindak untuk kepentingan negara, pemerintah, Kementerian, dan tidak untuk kepentingan pribadi dan golongan.
   b. Menggunakan statusnya sebagai aparatur Kementerian untuk hal-hal yang seharusnya dilakukan.
   c. Melaporkan aktivitas yang bertentangan dengan hukum, prosedur serta kode etik kepada pejabat yang berwenang.
   d. Berlaku jujur dan obyektif dalam melakukan tindakan, proses analisis, penyampaian usulan pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan serta kebijakan yang dilakukan.
   e. Mengoptimalkan sumberdaya Kementerian dalam perwujudan BUMN ke arah visi Kementerian.
3. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki oleh Kementerian.
4. Memberikan pelayanan kepada pihak lain dan atau sesama aparatur dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya.
5. Menaati ketentuan jam kerja, peraturan administratif dan perintah kedinasan dengan penuh tanggungjawab.

c. Take positive action in accordance with authority limit beyond what is requested to achieve the goal.
d. Be proactive without being asked or without waiting for other party.
e. Solve problems arising in the implementation of duties.
f. Have a strong determination to do the job with sustainable improvement.

Meanwhile, the Ministry of SOEs also ensures that all employees in the Ministry of SOEs are compliant and obey to all of the set obligations and prohibitions, as a form of implementing the code of ethics of the Ministry of SOEs apparatus, namely as follows:

A. Obligations that must be carried out regarding the implementation of the code of ethics of the Ministry of SOEs apparatus are:

1. Respect the freedom and differences of religion, beliefs, culture and customs of others.
2. Perform works in accordance with the Ministry's basic values.
   a. Maintain good reputation and act for the interests of the state, the government, the Ministry, and not for personal or group interests.
   b. Use his/her position as Ministry apparatus to do things that should be done.
   c. Report activities that are contrary to laws, procedures, and code of conduct, to the competent authorities.
   d. Be honest and objective in carrying out actions, analysis process, submission of proposals for problem solving, decision making and the policies taken.
   e. Optimize the Ministry's resources in the realization of SOEs towards the Ministry's vision.
3. Securing data and or information owned by the Ministry.
4. Serve other parties and/or fellow apparatus to do their best in performing duties.
5. Adhere to work hour rules, administrative regulations, and work orders with full responsibility.

6. Melaporkan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bertanggungjawab dalam penggunaan barang inventaris milik Kementerian.
8. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

B. Larangan terkait penerapan kode etik aparatur Kementerian BUMN adalah:

1. Bersikap diskriminatif dalam bertugas.
2. Menjadi pengurus dan anggota partai politik.
3. Ikut serta atau diikutsertakan sebagai pelaksana atau peserta atau menghadiri kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden dan atau pemilihan kepala daerah dan atau anggota legislatif.
4. Menyalahgunakan kewenangan jabatan:
   a. Menyalahgunakan kedudukan dan statusnya sebagai aparatur Kementerian untuk hal-hal yang tidak patut dilakukan.
   b. Sengaja secara perseorangan dan atau bekerjasama dalam aktivitas yang melanggar ketentuan peraturan serta prosedur dan kebijakan Kementerian yang berlaku.
5. Menyalahgunakan data dan atau informasi Kementerian.
6. Menghilangkan aset negara, dokumen milik negara/ Kementerian, dan barang bukti.
7. Menyalahgunakan aset dan dokumen milik negara/ Kementerian.
8. Menggunakan fasilitas Kementerian untuk selain kepentingan Kementerian.
9. Menerima dan memberi suap.
10. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Kementerian.
11. Membeli saham perdana BUMN dalam program Initial Public Offering (IPO).
12. Melakukan bisnis apapun juga dengan BUMN.

6. Report gratification in accordance with laws and regulation.
7. Be responsible for the use of the Ministry's inventories.
8. Behave, appear and communicate in a polite manner.

B. Prohibition regarding the implementation of the code of ethics of Ministry of SOEs apparatus is:

1. To act discriminatory in performing duties.
2. To involve in management or as a member of a political party.
3. To participate in or be included as executor or participant or to attend the presidential election campaign and/or regional head campaign and/or legislative election campaign.
4. To conduct abuse of authority:
   a. Through misuse of position and status as Ministry apparatus for inappropriate matters.
   b. By intentionally doing activities, individually and/ or in collaboration with other parties, which violate prevailing regulations and the Ministry's procedures/policies.
5. To conduct abuse of the Ministry's data and/or information.
6. To conduct omission of state assets, state/ ministerial documents, and evidence.
7. To conduct abuse of the state/ministry's assets and documents.
8. To use the Ministry's facilities not for the Ministry's interests.
9. To receive and give bribes.
10. To conduct any contrary action to the norms of decency that could damage the Ministry's image and dignity.
11. To purchase the initial shares of SOEs in the Initial Public Offering (IPO) program.
12. To conduct business with SOEs.

Internal Supervision
Pengawasan Internal

Pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN, dilaksanakan Inspektorat Kementerian BUMN, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-10/MBU/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang telah diubah oleh PER-06/MBU/12/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Inspektorat Kementerian BUMN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.

Internal supervision within the Ministry of SOEs is carried out by the Inspectorate of the Ministry of SOEs, As stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: Per-10 / MBU / 07/2015 dated July 23, 2015 which has been amended by PER-06 / MBU / 12/2017 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of State-Owned Enterprises. In the regulation, it is stated that the Inspectorate of the Ministry of SOEs has the task of carrying out internal supervision within the Ministry of SOEs. In carrying out the tasks, the Inspectorate is administratively coordinated by the Secretary of the Ministry of SOEs.

➤ TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan atas capaian kinerja setiap unit kerja yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri BUMN;
e. Penyusunan laporan basil pengawasan;
f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
g. Memastikan kecukupan pengendalian internal Kementerian BUMN;
h. Pelaksanaan monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib LKHPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) surnber daya manusia aparatur Kementerian BUMN;
i. Koordinasi pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi; dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri BUMN.

➤ *MAIN DUTIES AND FUNCTIONS*

The Inspectorate has a duty to carry out internal supervision in the Ministry of SOEs. To carry out the duty, the Inspectorate executes the following functions:

a. Preparing internal supervision policy formulation;
b. Implementing internal supervision on financial management through audits, reviews, evaluations, monitoring, and other supervision activities;
c. Supervising each work unit performance presented in the Performance Accountability Report;

d. Conducting supervision for specific purposes based on the SOEs Minister's assignment;
e. Arranging supervision result report;
f. Implementing Inspectorate administration;
g. Ensuring the Ministry of SOEs's internal control adequacy;
h. Monitoring the reporting of Report on the Wealth of State Official (LHKPN) and Report on the Wealth of the State Civil Apparatus (LHKASN) of the Ministry of SOEs's apparatus.

i. Coordinating the implementation of Independent Assessment of Bureaucratic Reform; and
j. Executing other duties assigned by the SOEs Minister.

➤ VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Auditor Internal yang Profesional dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang Berkualitas di Lingkungan Kementerian BUMN.

MISI

a. Menghasilkan pengawasan intern yang mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan Keuangan Negara di lingkungan Kementerian BUMN.
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas serta pengendalian intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian BUMN.
c. Melaksanakan proses pengawasan intern yang sesuai dengan Standar Profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
d. Melaksanakan pengawasan integritas di lingkungan Kementerian BUMN.

Tujuan

Tujuan Inspektorat adalah:
a. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas Keuangan Negara di lingkungan Kementerian BUMN.
b. Mendukung peningkatan integritas organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.
c. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas kinerja unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.
d. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Kementerian BUMN.

➤ *VISION, MISSION, STRATEGIC GOALS AND OBJECTIVES*

Vision and Mission

Vision

To become a Professional Internal Auditor in Supporting Quality Performance and Financial Accountability in the Ministry of SOEs.

MISSION

a. Generating internal supervision that supports increased performance and State Finance accountability in the Ministry of SOEs.
b. Giving early warning and improving effectiveness as well as internal control and risk management in the implementation of duties and functions of the Ministry of SOEs.
c. Carrying out internal supervision processes in accordance with the Professional Standards of the Government's Internal Supervision Apparatus.
d. Carrying out supervision of integrity in the Ministry of SOEs.

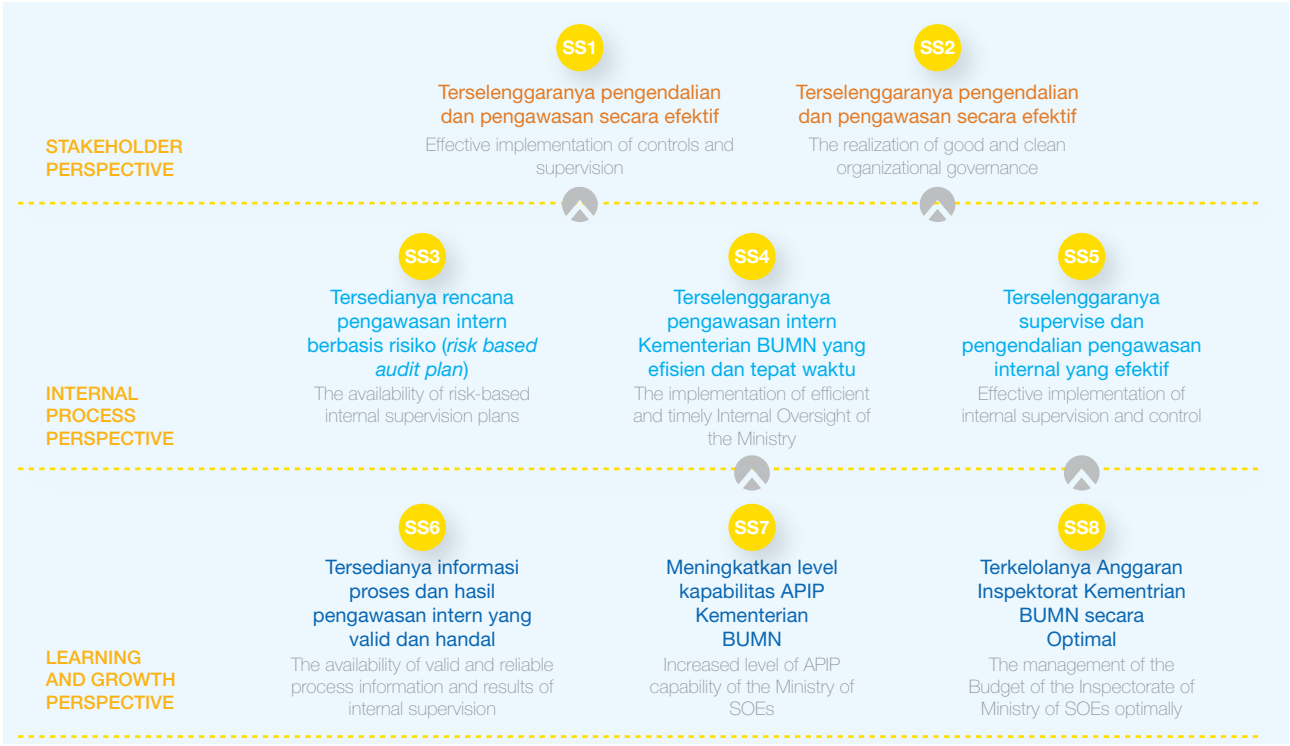
Objectives

The Inspectorate's objectives are as follows:
a. To improve the quality of State Financial accountability supervision and audit in the Ministry of SOEs.
b. To support the improvement of organization integrity in the Ministry of SOEs.
c. To improve the quality of performance accountability supervision and audit of the Ministry of SOEs's organization units.
d. To improve the capability of the Ministry of SOEs's Inspectorate.

Sasaran Strategis

Strategic Target

Peta Strategi Renstra Inspektorat 2015-2019
Inspectorate Renstra Strategy Map 2015-2019



➤ KEGIATAN PENGAWASAN INTERN DI SEPANJANG 2018

Dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Kementerian BUMN untuk mendukung Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Negara yang Berkualitas di Lingkungan Kementerian BUMN, Inspektorat telah berupaya melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN. Peran tersebut diimplementasikan dalam program pengawasan tahunan yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.

Selama tahun 2018, Inspektorat Kementerian BUMN melaksanakan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

➤ INTERNAL SUPERVISORY ACTIVITIES THROUGHOUT 2018

In order to actualize Inspectorate of Ministry of SOEs roles to support qualified Performance Accountability and State Finance in Ministry of SOEs, Inspectorate has strived to carry out internal supervisory in the environment of Ministry of SOEs. The role is implemented in annual supervisory program that includes audit activity, review, evaluation and supervisory, and other supervisory activities.

Throughout 2018, Inspectorate of Ministry of SOEs has carried out several activities, such as:

A. KEGIATAN UTAMA PENGAWASAN

Upaya Inspektorat untuk mendukung akuntabilitas Kinerja Keuangan, perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Audit

a. Audit Kinerja

Audit Kinerja adalah aktivitas untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian BUMN berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Audit Kinerja atas Pembinaan atas Pengelolaan PKBL.
2) Audit Kinerja atas Evaluasi Target Waktu Respon Aksi Korporasi.
3) Audit Kinerja atas Evaluasi Kontrak Manajemen Tahun 2018.

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu

Audit dengan tujuan tertentu adalah aktivitas untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian BUMN telah sesuai dengan kebijakan pimpinan, didukung dengan Sistem Pengendalian Intern yang baik, transparan, dan relevan serta bersih dan bebas dari KKN. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain:

1) *Probity Audit* Jasa Konstruksi Renovasi *Cladding* dan *Landscape*.
2) *Probity Audit* atas Jasa *Houskeeping*, Keamanan dan Pengemudi.

2. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Pada tahun

A. MAIN ACTIVITIES OF SUPERVISION

Inspectorate's efforts to support Financial Performance accountability, improvement of Government Institution Performance Accountability System (AKIP System) and Integrity of State Civil Apparatus (ASN) include activities as follows:

1. Audit Activities

a. Performance Audit

Performance Audit is an activity to provide confidence that the implementation of the main tasks and functions of the Ministry of SOEs runs in accordance with the plans and provisions of legislation, effective, efficient, transparent, accountable, clean and free from KKN. These activities are as follows:

1) Performance Audit for Guidance on PKBL Management.
2) Performance Audit on Evaluating the Target Time of Corporate Action Response.
3) Performance Audit on Evaluation of Management Contracts in 2018.

b. Audit with Specific Purpose

Audit with specific purpose is an activity to provide confidence that the implementation of the main tasks and functions of the Ministry of SOEs is in accordance with the leadership policy, supported by good, transparent, and relevant internal control system that is free from KKN. Activities carried out include:

1) Probity Audit of Cladding and Landscape Renovation Construction Services.
2) Probity Audit of Housekeeping Services, Security and Drivers.

2. Evaluation Activity

Evaluation activity is series of activities that compare the results or achievements of an activity with the standards, plans, or norms that have been set, and determine the factors that influence the success or failure of an activity in achieving certain goals. In 2018 the evaluation activities carried out were:

2018 kegiatan evaluasi yang dilakukan yakni:

a. Evaluasi Sistem AKIP Eselon I Kementerian BUMN Tahun 2017.
b. Evaluasi Penerapan SPIP di Lingkungan Kementerian BUMN Tahun 2017.
c. Evaluasi Penerapan PMPRB 2017.
d. Evaluasi UPG tahun 2017.
e. Evaluasi WBS/Pengaduan Masyarakat tahun 2017.
f. Evaluasi Benturan Kepentingan Tahun 2017.

a. Evaluation of the Echelon I AKIP System for the Ministry of SOEs in 2017.
b. Evaluation of SPIP Implementation in the 2017 Ministry of SOEs Environment.
c. 2017 PMPRB Implementation Evaluation.
d. UPG Evaluation in 2017.
e. Community WBS/Complaints Evaluation in 2017
f. Evaluation of Conflict of Interest in 2017.

3. Kegiatan Monitoring dan Asistensi

Kegiatan monitoring merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Monitoring Tindak Lanjut Temuan LHP BPK pada Kementerian BUMN.
b. Monitoring Tindak Lanjut Temuan LHP Inspektorat.
c. Monitoring Pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2010/ Inpres Nomor 10 Tahun 2016.
d. Monitoring Pelaksanaan UPG.
e. Monitoring Area of Improment RB Tahun 2017.

3. Monitoring and Assistance Activity

Monitoring activity is the process of evaluating the progress of a program or activity in achieving the set objectives. Activities carried out in 2018 are as follows:

a. Monitoring of Follow-up of BPK LHP Findings at the Ministry of SOEs.
b. Monitoring of Follow-up of LHP Inspectorate Findings.
c. Monitoring the Implementation of Presidential Regulation 55 of 2010/Presidential Instruction Number 10 of 2016.
d. Monitoring of UPG Implementation.
e. Monitoring the Area of Improvement RB 2017.

4. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu merupakan proses penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan oleh auditor yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan yang disajikan telah sesuai dengan standard yang ada.

a. Reviu atas Laporan Keuangan Tahun 2017 BA 041 Kementerian BUMN.
b. Reviu atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 BA 041 Kementerian BUMN.
c. Reviu atas Laporan Keuangan Tahun 2017 BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara.
d. Reviu atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara.
e. Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2019 Pagu Indikatif.
f. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2019 Pagu Definitif.
g. Reviu atas RKBMN Tahun 2020.

4. Review Activity

Review activity is a process of reviewing the implementation of accounting and the presentation of Financial Statements by auditors who are competent to provide limited confidence that the Report presented is in accordance with existing standards.

a. Review of Financial Statements for 2017 BA 041 Ministry of SOEs.
b. Review of 2018 BA 041 1st Semester Financial Statements of the Ministry of SOEs.
c. Review of Financial Statements for 2017 BA 999.03 - Participation in State Capital.
d. Review of 2018 Semester I Financial Statements BA 999.03 - State Capital Participation.
e. Review of 2019 Ministry of SOEs Work Plan and Budget Indicative Ceiling.
f. Review of Ministry of SOEs Work Plan and Budget for 2019 Definitive Ceiling.
g. Review of RKBMN in 2020.

5. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Merupakan kegiatan rutin berupa penyiapan bahan dan telaahan mengenai pengawasan, memenuhi disposisi dari pimpinan Kementerian BUMN, pendampingan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK pada BUMN, penanganan pengaduan masyarakat, pemantauan LHKPN dan LHKASN, dan pembangunan Zona Integritas.

B. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas Inspektorat Kementerian BUMN
   Inspektorat memiliki kewajiban untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi, yang di ukur dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM), dengan target tahun 2019 berada pada level 3 (*integrated*).

2. Perencanaan Pengawasan Intern
   Inspektorat memiliki kewajiban penyusunan perencanaan, yang meliputi penyusunan *audit universe* dan *pets* risikonya, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan, Penetapan Kinerja, dan RKA Inspektorat.

3. Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan Intern
   Laporan kegiatan pengawasan intern yang harus disusun oleh Inspektorat selaku Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meliputi:

   a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Tahun 2017.
   b. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2017.
   c. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2018.
   d. Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulanan.

4. Pengembangan Profesi
   Program Pendidikan dan Latihan teknis pengawasan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi, sedangkan Inspektorat mengusulkan pegawai dan program diktat teknis yang akan dilaksanakan balk oleh Auditor maupun JFU

5. Other Oversight Activities

It is a routine activity in the forms of preparation of materials and review of supervision, fulfilling the disposition of the leadership of the Ministry of SOEs, mentoring follow-up recommendations on BPK audits of SOEs, handling public complaints, monitoring LHKPN and LHKASN, and building the Integrity Zone.

B. SUPERVISION SUPPORT ACTIVITIES

It consists of activities as follows:

1. *Increased capability of Inspectorate of Ministry of SOEs*
   The Inspectorate has an obligation to improve capabilities and competencies measured using the Internal Audit Capability Model (IACM), with the target of 2019 being at level 3 (integrated).

2. *Internal Supervision Planning*
   The Inspectorate has the obligation to prepare a plan, which includes the preparation of an audit universe and risk pets, preparation of the Annual Supervision Work Program, Performance Determination, and RKA Inspectorate.

3. *Preparation of the Internal Audit Activity Reports*
   Reports on internal supervision activities that must be prepared by the Inspectorate as the Government's Internal Supervisory Apparatus (APIP) include:

   a. *Government Institution Performance Accountability Report (LAKIP) Inspectorate 2017.*
   b. *Preparation of 2017 Supervision Results Report.*
   c. *Preparation of 2018 Semester I Supervisory Results Report.*
   d. *Quarterly Performance Realization and Budget Report.*

4. *Professional Development*
   The technical supervision and training program was carried out by the Planning, HR and Organization Bureau, while the Inspectorate proposed employees and technical dictate programs to be implemented by both the Auditor and JFU.

Secara umum, capaian kinerja organisasi di tahun 2018 mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan hasil pengawasan yang mencapai target yang telah ditetapkan. Apresiasi diberikan kepada seluruh tim Inspektorat, dukungan para pejabat/ pengelola keuangan/mitra kerja/auditor atas penyediaan dan kelengkapan data pendukung, dan seluruh pihak atas dukungan manajemen datam proses pengawasan internal.

Keberhasilan mencapai target sasaran strategis didukung dengan pemantauan secara ketat yang telah dilakukan secara berkala (mingguan). Pada pemantauan mingguan, fokus pembahasan adalah evaluasi atas pencapaian pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyelesaian terhadap hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKPT. Hal yang baik ini akan diteruskan di tahun 2019 dengan berbagai perkembangan dan perbaikan di segala sisi.

Generally, the achievement of organizational performance in 2018 reached the set target. This success is indicated by the results of supervision that reaches the set target. Appreciation is given to the entire Inspectorate team, support of financial officials/managers/work partners/ auditors for the provision and completeness of supporting data, and all parties for management support in the internal supervision process.

The success of achieving strategic targets is supported by strict monitoring that has been carried out periodically (weekly). On weekly monitoring, the focus of the discussion is an evaluation of the achievement of supervision in accordance with the Annual Oversight Work Program (PKPT) and Key Performance Indicators (IKU) and the resolution of obstacles faced in the implementation of PKPT. This good thing will be continued in 2019 with various developments and improvements on all sides.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK

Selama Tahun 2018 telah terbit Surat BPK terkait monitoring LHP BPK, yaitu hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) KBUMN Tahun 2017 yang terdiri dari 10 temuan dan 33 rekomendasi. Kementerian BUMN telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut dan seluruhnya diusulkan selesai (status S). Capaian progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Tahun 2018 adalah 100%.

Sampai dengan akhir tahun 2018, dari 179 temuan dan 385 rekomendasi, telah ditindaklanjuti seluruhnya. Dari 385 bukti tindak lanjut (TL), BPK menganggap 319 rekomendasi telah selesai dan 66 rekomendasi masih diperlukan tambahan bukti tindak lanjut.

Follow Up of Recommendation of BPK Audit Results

Throughout 2018, BPK Letter has been issued concerning BPK LHP monitoring, that is the result of 2017 Ministry of SOEs Financial Report (LK) that consists of 10 findings and 33 recommendations. Ministry of SOEs has followed up all recommendation and all of them are proposed completed (status S). Progress Achievement of Follow Up on Recommendation of BPK Monitoring Results until the end of 2018 is 100%.

Until the end of 2018, 179 findings and 385 recommendations have been followed up. Of 385 evidences of follow up (TL), BPK assumed that 319 recommendation has been completed and 66 recommendations still require additional evidences of follow up.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Kementerian BUMN menyatakan komitmennya untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungannya dan pembinaan BUMN dalam lingkup pembinaan Menteri BUMN dan entitas di bawah pengendalian BUMN. Kementerian BUMN menilai bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kunci dan struktur untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan

Government Internal Control System (SPIP)

Ministry of SOEs stated their commitment to organize Government Internal Controlling System (SPIP) in its environment and fostering SOEs in the scope of fostering SOEs and entities under the control of SOEs. The Ministry of SOEs considers that Good Corporate Governance (GCG) is the key and structure to increase business success and accountability of SOEs. Therefore, strategy

akuntabilitas perusahaan BUMN. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan kebijakan dalam pembinaan perusahaan-perusahaan yang berada di lingkup pembinaan Kementerian BUMN. Untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*, Kementerian BUMN telah melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penerapan GCG merupakan langkah penting BUMN untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan serta mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, dan efisien. Adapun agenda penting dalam perwujudan kerja sama tersebut antara lain:

1) Pengembangan, penguatan tata kelola perusahaan yang baik melalui pengawasan intern terhadap pengelolaan APBN, percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, peningkatan kualitas implementasi SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP;

2) Pengembangan dan penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi/*assessment*, dan *monitoring*, bimbingan teknis/asistensi pengembangan dan penerapan perangkat manajerial,
3) Penyusunan indikator kunci (*Key Performance Indicator*); dan
4) Penerapan praktik-praktik GCG dalam meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan (*corporate value*).

Penyelenggaraan SPIP ini meliputi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan APBN, percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, peningkatan kualitas implementasi SPIP, dan peningkatan kapabilitas APIP. Dalam hal ini, BPKP memiliki tanggung jawab untuk menyediakan narasumber, fasilitator, dan pengawasan atas penyelenggaraan SPIP.

Membangun *soft control* pada dasarnya adalah membangun budaya pengendalian organisasi. Pengembangan SPIP diarahkan agar *soft control* dapat berjalan secara berkesinambungan. Diperlukan *mind set* dan *culture set* seluruh anggota organisasi, agar pola pikir dan pola tindak seluruh pegawai selaras dengan tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP telah melakukan

and policy are needed in fostering companies that are within the scope of the Ministry of SOEs development. To actualize Good Corporate Governance, the Ministry of SOES has collaborated with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).

Implementation of GCG is crucial leap for SOEs to improve and maximize the companies' values and encourage the companies' professional, transparent, and efficient management. The important agenda in actualizing the cooperation includes:

1) Development, strengthening of good corporate governance through internal supervision of the management of the State Budget, accelerating the completion of follow-up monitoring results, improving the quality of SPIP implementation and increasing APIP capabilities;
2) Development and implementation of risk management and internal control through the implementation of audits, reviews, evaluations/assessments, and monitoring, technical guidance/assistance in developing and implementing managerial devices,
3) Preparation of Key Performance Indicators; and

4) Implementation of GCG practices in increasing and maximizing corporate value.

The implementation of this SPIP includes internal supervision of the accountability of the management of the State Budget, accelerating the completion of follow-up monitoring results, improving the quality of SPIP implementation, and increasing APIP capabilities. In this case, the BPKP is responsible to provide resource persons, facilitators, and supervision over the implementation of SPIP.

Building soft control is basically building a culture of organizational control. SPIP development is directed so that the soft control can run continuously. Mind set and culture set are required for all members of the organization, so that the mindset and pattern of action of all employees is in line with the goals of the organization.

Based on the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 192 of 2014 concerning the Financial and Development Supervisory Agency and Presidential Instruction Number 9 of 2014 concerning Improving the Quality of Internal Control and Reliability of the Implementation of Internal Oversight Functions in the

penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian BUMN Tahun 2017 dengan hasil penilaian pada level "Terdefinisi" atau tingkat 3 dan 5 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran telah dilakukan terhadap 25 fokus penilaian maturitas, yang menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar "3,141".

Framework of Realizing People's Welfare, the BPKP has assessed the maturity of the Government Internal Control System (SPIP) 2017 Ministry of SOEs with the results of the assessment on the "Defined" level or level 3 and 5 SPIP maturity level. Measurements have been made on the 25 focus of maturity assessment, which results in a SPIP maturity value of "3.141".

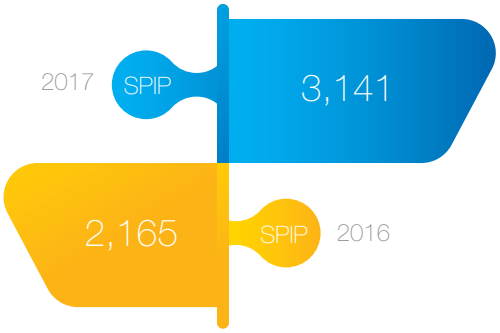
Dengan tingkat maturitas "Terdefinisi", Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian BUMN menunjukkan sebagai berikut:

1) Telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk seluruh kegiatan pokok unit organisasi sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008;
2) Telah mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur atas kegiatan pokok unit organisasi pada Kementerian BUMN;
3) Telah melaksanakan kebijakan dan prosedur atas sebagian kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara konsisten;
4) Telah melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi pada Kementerian BUMN secara berkala dan terdokumentasi;
5) Telah melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan atas dua kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

With the "Defined" maturity level, the implementation of SPIP at the Ministry of SOEs shows the following:

1) Establishing control policies and procedures for all main activities of the organizational unit in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008;
2) Having communicated the policies and procedures for the main activities of the organizational unit at the Ministry of SOEs;
3) Having implemented policies and procedures for a portion of the main activities of the organizational unit and documented them consistently;
4) Having evaluated the effectiveness of the implementation of control policies and procedures for several main activities of the organizational unit at the Ministry of SOEs periodically and documented;
5) Continuously monitoring, integrated with the implementation of two activities supported by automatic monitoring using computer applications.

Tingkat Maturitas
Maturity Level



Atas dasar tingkat maturitas Inspektorat Kementerian BUMN yang telah mencapai tingkat 3, Konsultan World Bank melakukan *Piloting Project* untuk *Best Practice* SPIP. Berikut highlight point hasil *piloting project* yang telah dilakukan Konsultan Word Bank di Inspektorat Kementerian

Based on the maturity level of Inspectorate of Ministry of SOEs that has reached level 3, the World Bank Consultant conducts a Piloting Project for Best Practice SPIP. Following are the highlights points from the piloting project carried out by the Wordbank Consultant at the Inspectorate of

BUMN:
a. Dukungan pimpinan Kementerian BUMN.
b. Kesadaran, inisiatif dan peran aktif dari beberapa pimpinan menengah (Eselon II, III, dan IV) terutama yang membawahi perencanaan, kepegawaian, pengawasan, dan teknis.
c. Menjadikan maturitas SPIP merupakan target kinerja yang harus dicapai (*key performance index*, KPI)
d. Dukungan pendanaan dari APBN yang cukup khususnya dalam pengembangan teknologi informasi.

Ministry of SOEs:
a. Support from the leadership of Ministry of SOEs.
b. Awareness, initiative and active role of several middle leaders (Echelon II, III, and IV) are mainly those who oversee planning, staffing, supervision, and technical.
c. Making SPIP maturity is a performance target that must be achieved (key performance index, KPI)
d. Funding support from the APBN is sufficient especially in the development of information technology.

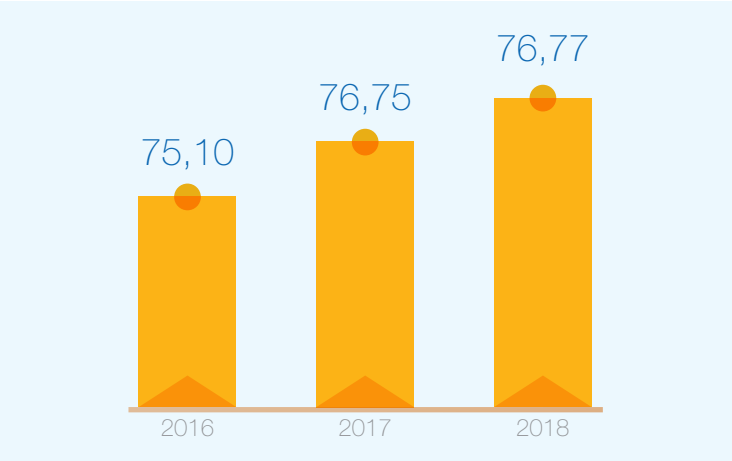
Reformasi Birokrasi

Selama tahun 2018, Inspektorat Kementerian BUMN telah berusaha memperbaiki implementasi Reformasi Birokrasi pada setiap tahapan berdasarkan *guideline* pada *Roadmap* RB, khususnya pada area perubahan bagian Pengawasan, dengan skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai berikut.

Bureaucracy Reformation

Throughout 2018, Inspectorate of Ministry of SOEs has attempted to improve Implementation of Bureaucracy Reformation on each stage based on guidelines of RB Roadmap, particularly in areas of change of Supervisory part, with Independent Assessment of Implementation of Bureaucracy Reformation (PMPRB) score as follow.

Nilai Keseluruhan Kementerian BUMN (2016-2018)
Overall Score of Ministry of SOEs (2016-2018)



Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Government Institution Accountability System (SAKIP)

Based on Government Regulation Number 8 of 2006 concerning Financial Reporting and Government Agency Performance and Presidential Regulation Number 29 of 2014 concerning Government Institution Performance Accountability System (SAKIP), Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform has carried out performance accountability evaluation on Ministry of State-Owned

(BUMN).
Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian BUMN memperoleh nilai 70,14 atau predikat BB.

Kapabilitas APIP dan Asessment IACM

Penilaian mutu kapabilitas APIP atau dapat disebut sebagai *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang berdasarkan dari The Institute of Internal Auditors (IIA) merupakan salah satu alat yang dipakai untuk mengatur efektivitas peran unit audit intern di sektor publik. Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IA-CM dikelompokkan ke dalam 5 Level, yaitu:

1) Level 1 (*Initial*)
2) Level 2 (*Infrastructure*)
3) Level 3 (*Integrated*)
4) Level 4 (*Managed*)
5) Level 5 (*Optimizing*)

Setiap Level terdiri atas 6 elemen, yaitu:
1) Peran dan Layanan Pengawasan Intern
2) Pengelola SDM
3) Praktik Professional
4) Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja
5) Hubungan dan Budaya Organisasi
6) Struktur Tata Kelola.

Untuk berada dalam level-level tersebut, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau *Key Process Area*.

Enterprises (SOEs).
The implementation of evaluation is based on Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 12 of 2015 concerning Guidelines for Evaluating the Implementation of Government Agency Performance Accountability Systems (SAKIP). The evaluation result shows that Ministry of SOEs obtains score of 70.14 or BB predicate.

IIPM APIP Capability and Assessment

APIP capability quality assessment or can be referred to as the Internal Audit Capability Model (IACM) based on The Institute of Internal Auditors (IIA) is one of the tools used to regulate the effectiveness of the role of internal audit units in the public sector. APIP capabilities based on IA-CM assessment criteria are classified into 5 Levels, namely:

1) *Level 1 (Initial)*
2) *Level 2 (Infrastructure)*
3) *Level 3 (Integrated)*
4) *Level 4 (Managed)*
5) *Level 5 (Optimizing)*

Each level consists of 6 elements, namely:
1) *Role and Internal Oversight Service*
2) *HR Manager*
3) *Professional Practice*
4) *Management and Performance Accountability*
5) *Organizational Relations and Culture*
6) *Governance Structure.*

To be at these levels, APIP must meet 41 criteria or Key Process Area.

Nilai IACM Inspektorat Kementerian BUMN
Inspectorate of Ministry of SOEs IACM Score



Profil Risiko dan PKPT Berbasis Risiko

Di tahun 2018, penyusunan Profil Risiko dilaksanakan pada seluruh unit Eselon I di Kementerian BUMN, dengan koordinator Satgas SPIP yang melibatkan Inspektorat Kementerian BUMN dan perwakilan dari masing-masing Unit Eselon I. Tahap penyusunan Profil Risiko terdiri dari identifikasi risiko, penentuan penyebab dan dampak dari risiko tersebut, menentukan level dan prioritas risiko, sampai dengan melakukan mitigasi risiko. Hasilnya dituangkan dalam *Risk Control Self Assessment* (RCSA) tiap Unit Eselon I, dan disatukan menjadi Buku Profil Risiko Kementerian BUMN.

Penyusunan Buku Profil Risiko Kementerian BUMN diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Kementerian BUMN melalui antisipasi risiko, balk untuk mencegah kejadian yang menghambat *clan* mengurangi dampak risiko yang menggagalkan sasaran strategis Kementerian BUMN.

Penerapan ISO 9001:2015

Telah dilakukan penyiapan infrastruktur-Perencanaan, Progres penerapan ISO di Inspektorat dengan detail sebagai berikut:

- Sosialisasi ISO 9001:2015 kepada seluruh tim Inspektorat
- Penyusunan *Manual Book* ISO 9001:2015 pada Juli - Agustus 2018
- Sosialisasi *Manual Book* ISO 9001:2015 pada September 2018
- Implementasi *Manual Book* ISO dalam setiap program kerja pada bulan Oktober 2018
- Diklat Audit Mutu Internal pada bulan Desember 2018

Risk Profile and Risk-based PKPT

In 2018, arrangement of Risk Profile was carried out on all Echelon I unit in Ministry of SOEs, with SPIP Task Force acting as coordinator that involved Inspectorate of Ministry of SOEs and representatives of each Echelon I Unit. The preparation stage of the Risk Profile consists of identifying risks, determining the causes and impacts of these risks, determining risk levels and priorities, and mitigating risks. The results are contained in the Risk Control Self-Assessment (RCSA) of each Echelon I Unit, and are incorporated into the Risk Profile Book of the Ministry of SOEs.

The Risk Profile Book Arrangement of Ministry of SOEs is expected to be able to optimize performance of Ministry of SOEs through risk anticipation aiming to prevent events that hamper clans to reduce risk impacts that fail strategic target of Ministry of SOEs.

Implementation of ISO 9001:2015

Infrastructure-Planning, Progress of ISO implementation in Inspectorate have been carried out with details as follow:

- *ISO 9001: 2015 socialization to all Inspectorate teams*
- *Preparation of the ISO 9001: 2015 Manual Book in July - August 2018*
- *ISO 9001: 2015 Manual Book Socialization in September 2018*
- *Implementation of Manual ISO Book in each work program in October 2018*
- *Training on Internal Quality Audit in December 2018*

Pelaporan LHKPN

Sebagian besar pegawai Kementerian BUMN telah melaporkan e-LHKPN melalui *website* yang berlamat di https://elhkpn.kpk.go.id/. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/01/2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

LHKPN Reports

Most employees of Ministry of SOEs have reported e-LHKPN through https://elhkpn.kpk.go.id/. It is in accordance with Minister of SOEs Regulation Number PER-01/MBU/01/2018 concerning Reporting of Assets of State Administrators in the Ministry of State-Owned Enterprises.

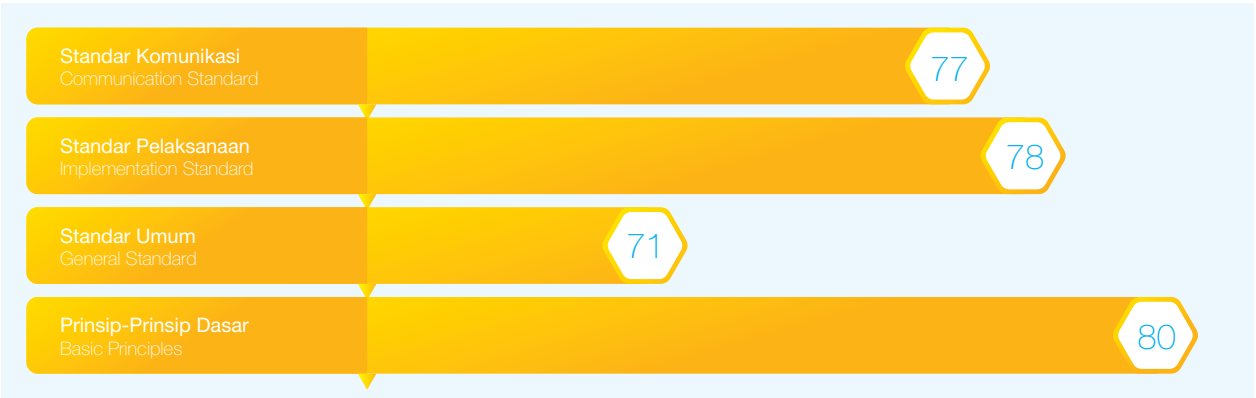
Peer Review oleh Inspektorat DKI (Penugasan AAIPI)

Telaah Sejawat (*Peer Review*) dilakukan dengan tujuan untuk menitai kesesuaian praktik audit intern dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan penerapan kode etik oteh auditor. Kegiatan telaah sejawat diharapkan dapat memberikan saran perbaikan dan/atau peningkatan kualitas dan efektivitas praktek pengawasan intern Inspektorat Kementerian BUMN terhadap pencapaian tujuan dan program Kementerian BUMN. Rata-rata nitai standar kelompok yang diperoleh Inspektorat Kementerian BUMN adalah 76,29% dengan kategori penilaian “Baik”, dengan rincian seperti dalam gambar berikut.

Peer Review by DKI Inspectorate (AAIPI Assignment)

Peer Review is carried out with the aim of assessing the suitability of internal audit practices with the Indonesian Government Internal Audit Standards (SAIPI) and the application of auditors’ ethical codes. Peer review activities are expected to be able to provide recommendations for improvement and/or enhancement in the quality and effectiveness of the Inspectorate of Ministry of SOEs internal supervision practices towards achieving the objectives and programs of the Ministry of SOEs. The group standard average score obtained by the Inspectorate of the BUMN Ministry is 76.29% with “Good” rating category and details as in the following picture.

Nilai Standar Kelompok
Groups Standard Score



Unit Pengendali Gratifikasi

Sasaran Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN adalah seluruh aparatur Kementerian BUMN serta pihak-pihak lain yang diperbantukan atau ditugaskan pada Kementerian BUMN dengan rincian sebagai berikut.

Gratification Controlling Unit

The Targets of Gratification Controlling Unit in Ministry of SOEs are all Ministry of SOEs apparatus and other parties that are seconded and assigned in Ministry of SOEs with details as follows.

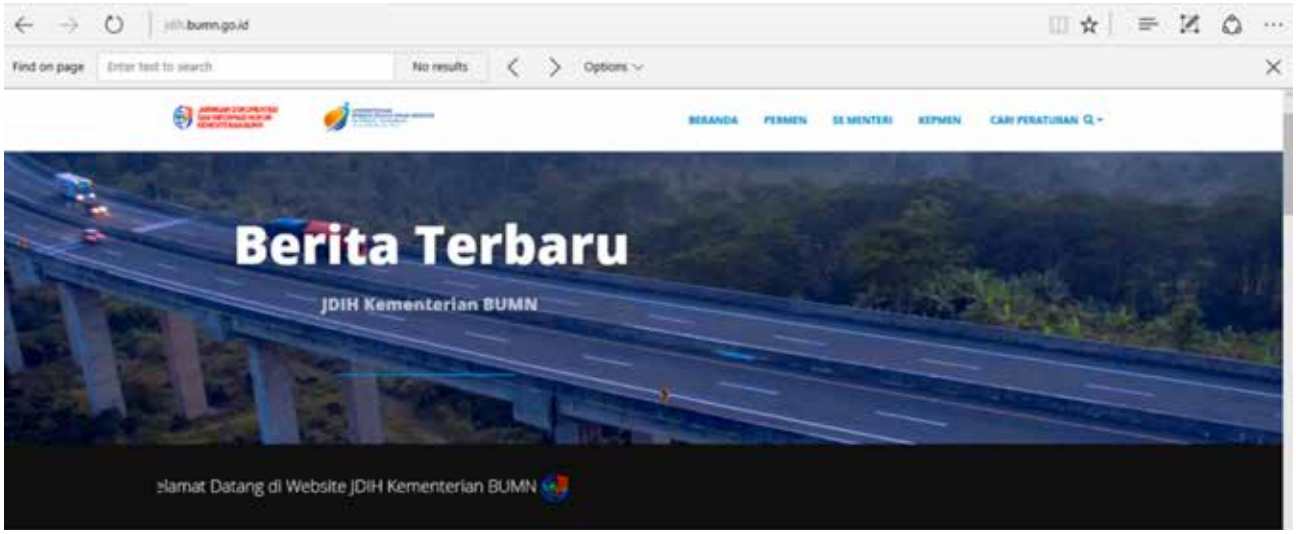
Pejabat Eselon 1A Esselon 1A Officials Berjumlah 8 Orang Total 8 persons	**Pejabat Eselon 1B/Staf Khusus** Esselon 1B/Special Staffs Berjumlah 5 Orang Total 5 persons
Pejabat Eselon IIA Esselon IIA Officials Berjumlah 15 Orang Total 15 persons	**Pejabat Eselon IIIA** Esselon IIIA Officials Berjumlah 42 Orang Total 42 persons
Pejabat Eselon IVA Esselon IVA Officials Berjumlah 88 Orang Total 88 persons	**Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu** General Functional Positions and Specific Functional Positions Berjumlah 124 Orang Total 124 persons
TOTAL :	278 Orang persons

Legal Information and Documentation Network
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu sarana penting dalam melakukan dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, khususnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Documentation Network and Legal Information of Ministry of State-Owned Enterprises are some of the most important means in conducting documentation and dissemination of legal products, particularly those that are issued by Ministry of State-Owned Enterprises in accordance with Presidential Regulation Number 33 of 2012 concerning National Legal Information and Documentation Network.

WEBSITE JDIH KEMENTERIAN BUMN
JDIH Website of Ministry of SOEs



APLIKASI MOBILE JDIH KEMENTERIAN BUMN
JDIH Mobile Application of the Ministry of SOEs



Prepare BUMN

Prepare BUMN adalah Program Evaluasi Peraturan Menteri BUMN yang merupakan suatu inisiatif yang bersifat *crash program* dalam rangka ”akselerasi” pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Kementerian BUMN dalam melakukan pengkajian, evaluasi dan sinkronisasi Peraturan Menteri BUMN, yang dalam pelaksanaannya diintegrasikan dengan JDIH Kementerian BUMN sehingga memenuhi asas transparansi dengan publik, khususnya BUMN sebagai *stakeholder* utama dan sarana informasi kepada publik mengenai program itu sendiri.

Prepare BUMN dilakukan untuk mengukur tingkat kinerja peraturan yang sedang berlaku sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien, membantu proses simplifikasi Peraturan Menteri BUMN agar mudah dipahami dan dilaksanakan serta selalu sejalan dengan kebijakan pengelolaan BUMN. Pelaksanaan *Prepare* BUMN dilakukan oleh suatu Tim Koordinasi Evaluasi yang akan dibentuk dengan melibatkan para pihak terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing guna mendapatkan hasil evaluasi yang tajam, mendalam dan menyeluruh atas peraturan yang dievaluasi.

Untuk tahun 2019 telah direncanakan untuk melakukan evaluasi terhadap 4 Peraturan Menteri BUMN melalui Prepare BUMN, yaitu:

1) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
2) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
3) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara; dan
4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Prepare SOEs

Prepare SOEs is Regulation Evaluation Program of Ministry of SOEs that is also a cash program initiative in order to “accelerate” the implementation of duties and functions of Legal Bureau of Ministry of SOEs in conducting study, evaluation and synchronization of Ministry of SOEs Regulation. The regulation implementation is integrated with Ministry of SOEs JDIH, so that it fulfills public transparency principles, especially SOEs as main stakeholders and information medium to public concerning the program itself.

Prepare SOEs is carried out to measure the level of applicable regulation performance, so it can proceed effectively and efficiently and it can help simplify the process of Ministry of SOEs Regulation, so as to be easily understood and carried out and always be in line with SOEs management policy. The implementation of Prepare SOEs is carried out by an Evaluation Coordination Team that will be established by involving related parties aligned with each task field to obtain sharp, profound and comprehensive evaluation reports on evaluated regulations.

In 2019, evaluation on 4 Ministry of SOEs Regulation through Prepare SOEs will be conducted, namely:

1) *Decree of the Minister of SOEs Number KEP-211/M-PBUMN/1999 concerning Management Report of State-Owned Enterprises;*
2) *Decree of the Minister of SOEs No. KEP-101/MBU/2002 concerning Preparation of State-Owned Enterprise Business Work and Budget Plans;*
3) *Decree of the Minister of SOEs No. KEP-102/MBU/2002 concerning Preparation of State-Owned Enterprises Long-Term Plans; and*
4) *Ministry of SOEs Regulation Number PER-05/MBU/2008 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises.*





10

TANTANGAN KE DEPAN
FUTURE CHALLENGES

DALAM RANGKA UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KE DEPAN, KEMENTERIAN BUMN TELAH MENYUSUN STRATEGI MELALUI ROADMAP YANG TERANGKUM DALAM EMPAT “STRATEGIC PILLARS” DENGAN MELIBATKAN SELURUH BUMN YANG BERKONTRIBUSI DIDALAMNYA.

In order to respond to the challenges ahead, the Ministry of SOEs has formulated a strategy through a roadmap summarized in four “strategic pillars” involving all SOEs in the contribution.

Future Challenges
Tantangan ke Depan

Badan Usaha Milik Negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Kementerian BUMN sebagai institusi yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN, memiliki peran yang sangat menentukan bagi perkembangan BUMN secara umum. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN harus dapat mendukung pengelolaan BUMN sehingga mampu menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi. Hal ini sangat penting agar BUMN siap dan mampu bersaing dengan swasta tidak hanya di tingkat nasional akan tetapi di tingkat regional dan internasional.

Sebagai entitas ekonomi yang dimiliki oleh Negara, BUMN sebagaimana telah diamanatkan Presiden Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab besar agar keberadaannya bisa bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Karena konstitusi menginginkan peran BUMN sebagai agen pembangunan dan kemandiriannya untuk menciptakan nilai, Kementerian BUMN telah membuat semacam rumusan sebagaimana yang terlampir di bawah ini:

State-Owned Enterprises have very strategic roles in national economy. As stipulated in Article 2 of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, the purposes and objectives of SOEs are as follows:

1. *Providing support for national economic development in general and state revenue in particular;*
2. *Pursuing profit;*
3. *Providing public benefits in the forms of goods and/or service provisions that are excellent and adequate to fulfill many people's needs;*
4. *Becoming a pioneer of business activities that cannot be carried out yet by private and cooperation sectors;*
5. *Actively fostering and providing assistance to weak economy entrepreneurs, cooperation and community.*

Ministry of SOEs, as institution whose one of duties is to formulate policies and coordination in fostering SOEs, has decisive roles for development of SOEs in general. Policies set by Ministry of SOEs should be able to support SOEs management so that it can produce sound and highly competitive SOEs. It is very important to produce SOEs that are ready and capable of competing with private enterprises, not only at the national level but also at regional and international levels.

As economic entities owned by the State, SOEs, as mandated by the President of the Republic of Indonesia, are greatly responsible to make its presence beneficial to the community both directly and indirectly. Since the constitution is desirable to make SOEs agents of development and make its independence create value, Ministry of SOEs has developed formulation below:



➤ PENCAPAIAN 2015-2018

Hasil kerja nyata seluruh BUMN yang sudah dicapai dan dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia selama 4 (empat) tahun terakhir ini, tidak lepas dari sinergi semangat membangun negeri. Oleh karenanya, sinergitas yang dibangun melalui pencanangan '*One Nation, One Vision, One Family, to Excellence*' perlu terus dikembangkan oleh seluruh insan BUMN.

Dalam rangka untuk menjawab tantangan ke depan, Kementerian BUMN telah menyusun strategi melalui roadmap yang dilandaskan pada visi BUMN sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai. Strategi BUMN guna menjawab tantangan ke depan terangkum dalam 4 "*strategic pillars*" yang di susun per sektor industri sesuai dengan fokus Pemerintah dengan melibatkan seluruh BUMN yang berkontribusi didalamnya. Di mana dari 4 pilar strategi tersebut, Kementerian BUMN selaku pembina BUMN tengah menyiapkan langkah-langkah strategis guna menjawab tantangan ke depan.

➤ *2015-2018 ACHIEVEMENTS*

The results of the real work of all SOEs that have been achieved and can be felt by all Indonesian people over the past 4 (four) years cannot be separated from the spirit synergy of developing the country. Therefore, the synergy built through the launching of 'One Nation, One Vision, One Family, to Excellence' needs to be continuously developed by all SOEs employees.

In order to answer the challenges ahead, the Ministry of SOEs has devised a strategy through a roadmap based on the vision of SOEs as agents of development and value creation. The strategy of the SOEs to run into the future challenges is summarized in 4 "strategic pillars" which are arranged per industry sector in accordance with the Government's focus by involving all SOEs that contribute to it. Where from the 4 pillars of the strategy, the Ministry of SOEs as the supervisor of SOEs is preparing strategic steps to answer the challenges ahead.

ROADMAP BUMN
SOEs Roadmap

4 *Strategic Pillars* yang Membentuk Jalan Strategi BUMN
4 Strategic pillars that forms path of SOEs strategy



1 Sinergi antar BUMN

Synergy of SOEs

Sejumlah BUMN yang termasuk dalam kelompok rantai nilai serupa bekerja bersama guna mengoptimalisasi hasil dan mengurangi redundasi

A number of SOEs included in similar value chain groups work together to optimize results and reduce redundancy

Kolaborasi atau konsolidasi atas fungsi-fungsi yang serupa (e.g. *corporate university*, rumah sakit/klinik) antar BUMN guna merealisasikan skala ekonomi, mengurangi redudansi dan inkonsistensi dan mendorong tercapainya *best practices*

Collaboration or consolidation of similar functions (e.g. corporate university, hospital/ clinic) between SOEs to realize economies of scale, reduce redundancy and inconsistencies and encourage the achievement of best practices

2 Hilirisasi dan kandungan local

Down Streaming and Local Content

BUMN meningkatkan fokus untuk berperan serta dalam pengembangan produk-produk hilir (yang lebih menambah nilai – *value add*) yang berada di dalam rantai nilai yang sama

SOEs increases the focus to participate in the development of downstream products (which add value-added value) that are in the same value chain

BUMN meningkatkan peran serta dalam pengembangan produk "input/pendukung" (bahan aktif, suku cadang, mesin, dll.) yang diperlukan oleh beragam BUMN secara domestik

SOEs increases participation in developing "input/support" products (active materials, parts, machinery, etc.) needed by various domestic SOEs

3 Pembangunan Ekonomi Daerah Terpadu

Integrated Regional Economic Development

Berbagai BUMN bekerja sama secara efektif untuk menggerakan pengembangan ekonomi di kawasan terpilih melalui pelaksanaan proyek-proyek yang berpotensi menciptakan dampak "*spill over*" atau turut menyumbang PDB lokal (melalui penciptaan lapangan kerja, ketersediaan infrastruktur/konektivitas)

Various SOEs work together effectively to drive economic development in selected regions through the implementation of projects that have the potential to create a "spill over" impact or contribute to local GDP (through job creation, infrastructure availability/connectivity)

4 Kemandirian Keuangan dan Penciptaan Nilai

Financial Independence and Value Creation

BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu menciptakan manfaat finansial, di luar mandatnya sebagai agen pembangunan untuk negeri

SOEs need to be independent and financially sustainable and able to create financial benefits, beyond their mandate as agents of development for the country

Kondisi BUMN selama 4 tahun terakhir terlihat semakin kuat dan kokoh seiring dengan kinerja yang terus bertumbuh sebagaimana laporan kinerja BUMN sepanjang tahun 2018. Sampai dengan 31 Desember 2018, total aset BUMN telah menembus angka Rp8.200 triliun, naik signifikan dari capaian 2015 lalu sebesar Rp5.760 triliun dengan total laba yang terus bertumbuh mencapai Rp212,7 triliun dari sebelumnya Rp149 triliun pada tahun 2015.

The condition of SOEs over the past 4 years looked stronger and tougher in line with the performance that continues to grow as the SOEs performance reports throughout 2018. Up to December 31, 2018, total SOEs assets have exceeded IDR8.200 trillion, up significantly from the 2015 achievement of IDR5.760 trillion with total profits continuing to grow to reach IDR212.7 trillion from IDR149 trillion in 2015.

Kontribusi BUMN terhadap APBN pun melonjak menjadi Rp453 triliun, naik Rp150 triliun jika dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp303 triliun. Besarnya kontribusi BUMN dalam pembangunan infrastruktur terlihat dari capex BUMN yang meningkat sepanjang 2018 yakni Rp456 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp221 triliun pada tahun 2015 dengan tetap didominasi oleh sektor infrastruktur.

The contribution of SOEs to the State Budget also jumped to IDR453 trillion, up IDR150 trillion compared to 2015 which was recorded at IDR303 trillion. The large contribution of SOEs in infrastructure development can be seen from the increase in SOEs Capex throughout 2018, reaching IDR456 trillion, an increase from the previous IDR221 trillion in 2015 while remaining dominated by the infrastructure sector.

Berbagai proyek menghubungkan Nusantara telah dilakukan oleh BUMN dalam 4 tahun terakhir melalui peningkatan konektivitas darat, laut dan udara. Di darat, BUMN telah berperan dalam reaktivasi rel kereta Jawa Barat sepanjang 178,8 km, LRT Palembang, LRT Jabodebek serta merealisasikan pembangunan dan pengoperasian jalan tol baru sepanjang 782 km. Di laut, BUMN mendukung peningkatan konektivitas laut dengan pembangunan 27 pelabuhan baru dan 100 kapal pendukung tol laut serta peningkatan Dwelling Time menjadi 3 hari dari semula 7 hari pada 2014. BUMN juga telah membangun 10 bandara baru guna mendukung konektivitas udara. Tidak hanya itu, BUMN turut berperan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di 458 kota dan kabupaten, layanan yang memungkinkan 79.000 desa terjangkau sinyal serta mendukung pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 97,2 persen.

Various projects connecting Indonesia have been carried out by SOEs in the last 4 years through increasing land, sea and air connectivity. On land, SOEs have played a role in reactivating 178.8 km of West Java railroads, Palembang LRT, Jabodebek LRT and realizing the construction and operation of new toll roads with a length of 782 km. At sea, SOEs support increased sea connectivity with the construction of 27 new ports and 100 marine toll support vessels and an increase in Dwelling Time to 3 days from 7 days in 2014. SOEs have also built 10 new airports to support air connectivity. Not only that, SOEs also play a role in the development of telecommunications infrastructure in 458 cities and districts, a service that allows 79,000 villages to be signaled and supports the government in increasing the electrification ratio to 97.2 percent.

Kemudian, selain mewujudkan BBM Satu Harga di 123 lokasi di seluruh Indonesia, di sisi kemandiran ekonomi, BUMN turut berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penyaluran KUR senilai total Rp113,9 triliun kepada 4,3 juta nasabah dan pembinaan ekonomi keluarga sejahtera 'Mekaar' yang menjangkau 276 kabupaten dengan total nilai penyaluran sebesar Rp16,4 triliun kepada 4,2 juta nasabah ultra mikro.

Later on, besides realizing One-Price BBM in 123 locations throughout Indonesia, on the side of economic stagnation, SOEs play an active role in improving the Indonesian people welfare through KUR distribution totaling IDR113.9 trillion to 4.3 million customers and 'Mekaar' welfare family economy development which reaches 276 districts with a total value of IDR16.4 trillion to 4.2 million ultra-micro customers.

Dalam mendukung pengembangan UKM, BUMN telah mendirikan Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang tersebar di 209 lokasi guna menaikkan kelas ekonomi pelaku UMKM dengan jumlah binaan saat ini 12.522 pelaku, melalui pembinaan dan pembelajaran bersama serta mewadahi penjualan produknya melalui aplikasi *Blanja.com*.

In supporting the development of SMEs, SOEs have established SOEs Creative Houses (RKB) in 209 locations to raise the economy class of MSME players with the current number of 12,522 principals, through coaching and joint learning and accommodating the sale of their products through the Blanja.com application.

➤ TANTANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan upaya yang lebih optimal dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki, yang diantaranya ada pada BUMN. BUMN harus terus meningkatkan akselerasi dan kinerjanya serta menguatkan peran sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai. BUMN harus bisa tumbuh besar dan bertahan hingga 100-200 tahun yang akan datang sehingga bisa diestafetkan kepada generasi mendatang dalam kondisi sehat.

Oleh karenanya, Kementerian BUMN meyakini perlu menyatukan kekuatan seluruh BUMN agar dapat memberikan dampak lebih besar dari yang saat ini telah dihasilkan untuk terus berkontribusi bagi negeri. Untuk itu, diperlukan fondasi yang kuat agar BUMN tumbuh besar, kuat dan lincah guna diestafetkan pengelolaannya ke generasi mendatang untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Terkait hal tersebut, Kementerian BUMN melihat terdapat 5 (lima) tantangan untuk mendorong pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

➤ *CHALLENGES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

Indonesia is predicted to become one of the countries with the world's largest economic power in 2045. To realize this expectation, more optimal efforts are needed by using all the resources that are owned, including those in SOEs. SOEs must continue to increase acceleration and performance and strengthen the role of agents of development and value creation. SOEs must be able to grow big and last up to 100-200 years to come so that they can be converted to future generations in healthy conditions.

Therefore, the Ministry of SOEs believes that it is necessary to unite the strength of all SOEs in order to have a greater impact than what has now been produced to continue to contribute to the country. For this reason, a strong foundation is needed for SOEs to grow large, strong and agile in order to be guaranteed the management of future generations to improve the prosperity and welfare of the people.

The dynamics of the domestic and global economy require that Indonesia is always ready for change. Related to this, the Ministry of SOEs sees that there are 5 (five) challenges to encourage sustainable development of Indonesia.

TANTANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Sustainable Development Challenges

Inequality ***Development***	**Ketahanan Energi dan Pangan** ***Energy and Food Resilience***	**Infrastruktur dan Industri Dasar** ***Infrastructure and Basic Industry***	**Akses Layanan Keuangan** ***Financial Service Access***	**Sumber Daya Manusia** ***Human Resources***
Pembangunan yang belum merata serta masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia *Uneven development andhigh poverty rate in Indonesia*	Tingginya ketergantungan terhadap impor energi dan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik *High dependence on energy and food imports to fulfill domestic needs*	Lemahnya daya saing infrastruktur dan manufaktur; Ketergantungan terhadap impor material cost *Weak infrastructure and manufacturing competitiveness; Dependence on material cost imports*	Akses layanan keuangan masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lainnya *Access to Indonesian public financial services is still at the lower level compared with other countrie*	Jumlah tenaga kerja terdidik dan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah dibandingkan tenaga kerja regional *The number of educated workforce and Indonesian labor productivity is still low compared to regional labor*

➤ PROYEKSI PEREKONOMIAN 2019

Pada tahun 2019 perekonomian global diprediksi akan melambat, yang dipicu antara lain oleh perlambatan ekonomi AS dan Tiongkok, yang mempengaruhi lingkungan global. Mengutip prediksi World Bank, pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi akan turun dari 3% menjadi 2,9% pada tahun ini. Pertumbuhan ekonomi AS, sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia, juga diprediksi akan turun dari 2,9% menjadi hanya 2,5% untuk tahun ini. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, juga akan mengalami perlambatan. Pada 2018, pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya tumbuh 6,6%, sekaligus menjadi yang terendah dalam 28 tahun terakhir atau sejak 1990. Tiongkok memperkirakan produk domestik bruto (PDB) negara tersebut akan tumbuh di kisaran 6%-6,5% tahun 2019 ini, menurut data dalam laporan pembukaan sesi rapat tahunan Kongres Nasional Tiongkok.

Meskipun perekonomian global masih penuh dengan ketidakpastian, para pelaku pasar memprediksi kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2019 akan membaik. Berbagai tekanan yang mewarnai tahun 2018 pun mulai berkurang, sehingga fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga tidak akan terlalu dinamis seperti yang terjadi pada tahun 2018. Salah satu pemicu tertekannya pasar keuangan di tahun 2018 adalah karena munculnya kekhawatiran bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau *The Federal Reserve* (The Fed) akan menaikkan suku bunganya secara agresif, namun pada awal tahun 2019 The Fed memberikan pernyataan bahwa kebijakan The Fed akan mempertimbangkan dan menyesuaikan kondisi ekonomi, yang kemudian diterjemahkan oleh pelaku pasar sebagai sinyal bahwa rencana kebijakan The Fed untuk menaikkan suku bunga sebanyak dua kali pada tahun 2019 kemungkinan tidak akan terjadi.

Sementara itu, berdasarkan hasil Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) Bank Indonesia periode triwulan IV-2018, memprediksikan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2019 akan tumbuh sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PDB tahun 2019 diprediksi tumbuh 5,15% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan prediksi pertumbuhan tahun 2018 sebesar 5,16%. Perlambatan kinerja perekonomian tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, dimana perekonomian global diperkirakan masih menghadapi tingginya risiko ketidakpastian.

➤ *2019 ECONOMIC PROJECTION*

In 2019 the global economy is predicted to slow down, triggered by, among others, the economic slowdown in the US and China, which affects the global environment. Citing World Bank predictions, world economic growth is predicted to decline from 3% to 2.9% this year. US economic growth, as the world's largest economic power, is also predicted to fall from 2.9% to only 2.5% this year. While China's economic growth, as the world's second largest economic power, will also experience a slowdown. In 2018, China's economic growth only grew 6.6%, while being the lowest in the last 28 years or since 1990. China estimates that the country's gross domestic product (GDP) will grow in the range of 6% -6.5% in 2019, according to data in the opening report of the annual session of the Chinese National Congress.

Even though the global economy is still full of uncertainty, market parties predict that Indonesia's economic conditions in 2019 will improve. The various pressures that characterize 2018 have begun to diminish, so that fluctuations in the Rupiah exchange rate and rising interest rates will not be as dynamic as what happened in 2018. One of the triggers for the depressed financial market in 2018 is the concern that the Central Bank of the United States, The Federal Reserve (Fed) will raise interest rates aggressively, but at the beginning of 2019 the Fed gave a statement that the Fed's policy would consider and adjust economic conditions, which were then translated by market parties as a signal that the Fed's policy plan to raise interest rates twice in 2019 will probably not happen.

Meanwhile, based on the results of the Bank Indonesia Macroeconomic Indicator (SPIME) Projection Survey for the quarter IV-2018 period, it predicted that Indonesia's economy in 2019 will slow down slightly compared to the previous year. 2019 GDP is predicted to grow by 5.15% (YoY), slightly lower than the predicted growth in 2018 of 5.16%. The slowdown in economic performance was influenced by external factors, where the global economy is predicted to still face a high risk of uncertainty.

Kendati demikian, responden SPIME memiliki optimisme yang cukup terhadap prospek perekonomian Indonesia tahun 2019. Sebanyak 27,0% responden memprediksi bahwa ekonomi tahun 2019 akan tumbuh di atas 5,25%. Optimisme ini dipengaruhi oleh prediksi terhadap faktor domestik yang positif, antara lain konsumsi swasta dan pengeluaran Pemerintah yang meningkat.

Nevertheless, SPIME respondents have sufficient optimism towards the prospects of the Indonesian economy in 2019. A total of 27.0% of respondents predict that the economy in 2019 will grow above 5.25%. This optimism is influenced by predictions of positive domestic factors, including private consumption and increased government spending.

Menteri Keuangan dalam paparan pidatonya mengenai keterangan Pemerintah atas kerangka makro ekonomi dan pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2019 menyatakan, Pemerintah memandang bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2019 memiliki potensi yang baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4-5,8 persen. Potensi tersebut didasarkan pada beberapa perkembangan yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mulai ditopang secara seimbang oleh keempat mesin pertumbuhan yaitu konsumsi, investasi, ekspor dan belanja Pemerintah.

The Minister of Finance in his speech on the Government's statement on the macroeconomic framework and the main fiscal policy for 2019 fiscal year, stated that the Government viewed that the Indonesian economy in 2019 have good potential to achieve economic growth in the range of 5.4-5.8 percent. This potential is based on several developments that have occurred in recent years. In terms of aggregate demand, Indonesia's economic growth has begun to be sustained balanced by the four growth engines, namely consumption, investment, exports and government spending.

Selama tiga tahun terakhir, inflasi Indonesia berada pada kisaran 3,5 persen, lebih rendah dibanding rata-rata inflasi selama sepuluh tahun terakhir yaitu sebesar 5,6 persen. Perkembangan harga domestik dan laju inflasi telah mengalami penurunan dan semakin stabil merupakan faktor penting dalam menjaga tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat. Investasi secara bertahap mulai pulih kembali, ditopang oleh kesehatan sektor perbankan dan pasar modal, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya daya saing iklim usaha dan investasi Indonesia. Kinerja ekspor telah mulai menunjukkan peningkatan sejak 2017 setelah beberapa tahun sebelumnya terus mencatat kontraksi.

Over the past three years, Indonesia's inflation has been around 3.5 percent, lower than the inflation rate for the past ten years at 5.6 percent. The development of domestic prices and the rate of inflation that have declined and become more stable are important factors in maintaining the level of consumption and purchasing power of the people. Investment gradually began to recover, supported by the soundness of the banking sector and capital market, the implementation of infrastructure development programs, and the increasing competitiveness of Indonesia's business and investment climate. Export performance has begun to show an increase since 2017 after several years ago continued to record contractions.

Capaian-capaian ini telah mampu membawa perbaikan persepsi pelaku usaha terhadap prospek investasi di Indonesia dan membawa dampak positif untuk mendorong minat investor pada pasar dalam negeri. Di sisi produksi (*supply side*), pertumbuhan sektoral cukup merata baik sektor primer seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan yang sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dan perdagangan global, juga bergeraknya sektor sekunder seperti manufaktur dan konstruksi, serta cukup sehatnya sektor tersier seperti telekomunikasi, perdagangan, hotel, restoran dan sektor jasa keuangan. Faktor-faktor tersebut merupakan landasan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

These achievements have been able to bring improved perceptions of business people to the prospects of investment in Indonesia and bring a positive impact to encourage investor interest in the domestic market. On the supply side, sectoral growth is fairly evenly distributed both in the primary sector such as agriculture, plantation and mining which is strongly influenced by commodity prices and global trade, as well as the movement of secondary sectors such as manufacturing and construction, as well as sufficiently tertiary sectors such as telecommunications, trade, hotels, restaurants and the financial services sector. These factors are the basis for sustaining Indonesia's economic growth.

BUMN

Hadir untuk negeri

LAPORAN TAHUNAN **2018** ANNUAL REPORT

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PUSAT :
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta 10110 - Indonesia

021-29935678
021-29935740
Kementerian BUMN
@KemenBUMN
kementerianbumn
KEMENTERIAN BUMN RI

www.bumn.go